

SALINAN
NOMOR 1/2019

WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 260 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
Dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Walikota adalah Walikota Malang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Kinerja adalah capaian keluaran /hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Pasal 2

RPJMD merupakan :

- a. penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RPJMD dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 4

RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, Daerah dan kabupaten/kota sekitar.

BAB III

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 5

Sistematika RPJMD terdiri atas :

- a. pendahuluan;

- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. penutup.

Pasal 6

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RKPD Tahun 2019 sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2019 menjadi bagian dari RPJMD yang ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 - 3 - 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 - 3 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

WASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 56-I/2019

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD).

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Walikota dan Wakil Walikota, merupakan komitmen kinerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2018-2023.

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi "Kota Malang Bermartabat" yang sebagai cita-cita mewujudkan masyarakat Kota Malang sebagai manusia paripurna, terdidik dan berkarakter, serta mewujudkan Kota Malang sebagai kota yang lembut dan tegas, aman dan nyaman, serta penuh kesadaran positif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

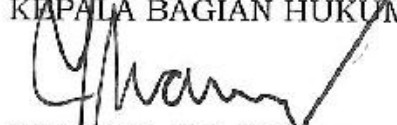
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 38

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019

BAB I PENDAHULUAN

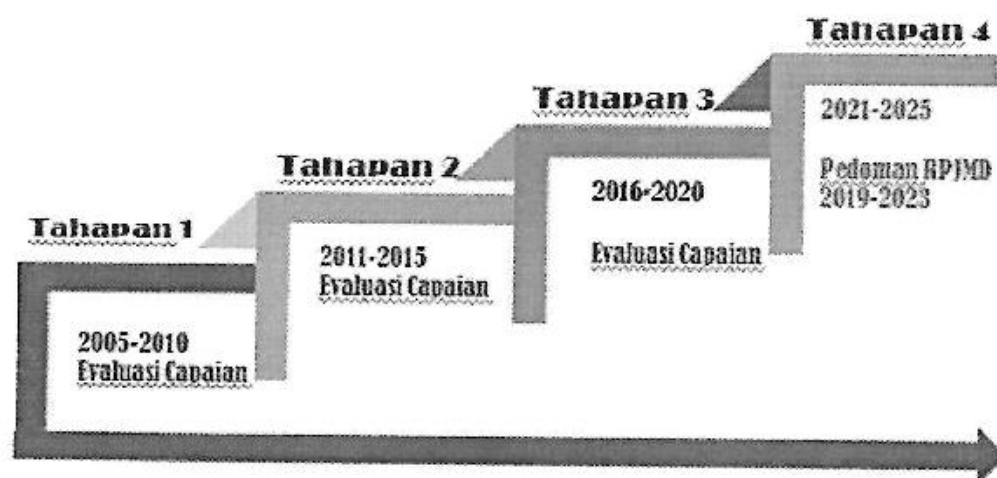
1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-undang SPPN tersebut, mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Sedangkan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dengan terpilihnya pasangan kepala daerah pada tanggal 26 Juli 2018 dan dilantiknya pada tanggal 24 September 2018 maka

Drs. H. Sutiaji dan Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko resmi sebagai Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2018-2023. Sehingga sesuai dengan perundangan yang berlaku perlu disusun dokumen RPJMD untuk periode 2018-2023. Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RPJMD Kota Malang 2018-2023 merupakan irisan sebagai salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Malang. Selain sebagai bagian dari RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 tentu juga merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.

Penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan posisi RPJMD dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025.



Gambar 1.1
Tahapan RPJPD Kota Malang

Merujuk hal tersebut bahwa posisi RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 masuk dalam tahap III (ketiga) dan tahap IV (keempat) atau tahap akhir pencapaian RPJPD Kota Malang melalui visinya “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan lingkungan menuju Masyarakat Sejahtera”. Selain itu, RPJMD disusun harus memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, kondisi lingkungan strategis daerah, potensi daerah, isu-isu strategis baik internasional,

nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rendalev Bangda, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa dalam menyusun RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan, 1) politis; 2) teknokratik; 3)Partisipatif; 4) atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Dimana keempat pendekatan perencanaan pembangunan tersebut telah dilaksanakan secara sistematis dan konsisten, yang mulai dari melakukan pendekatan teknokratis dilaksanakan berdasarkan kajian ilmiah dan bukti fisik, data dan informasi yang akurat kondisi *existing* Kota Malang. Selanjutnya pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik sehingga dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, serta terciptanya konsensus. Sehingga membutuhkan pendekatan *top down* dan *bottom up* dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan melalui forum konsultasi publik. Terakhir pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Malang, yang mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (1,) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Didasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut juga mengatur bahwa dalam RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan Kota Malang 2018-2023. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak saat dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa periodisasi RPJMD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 berpedoman pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan yuridis dan praktis. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia

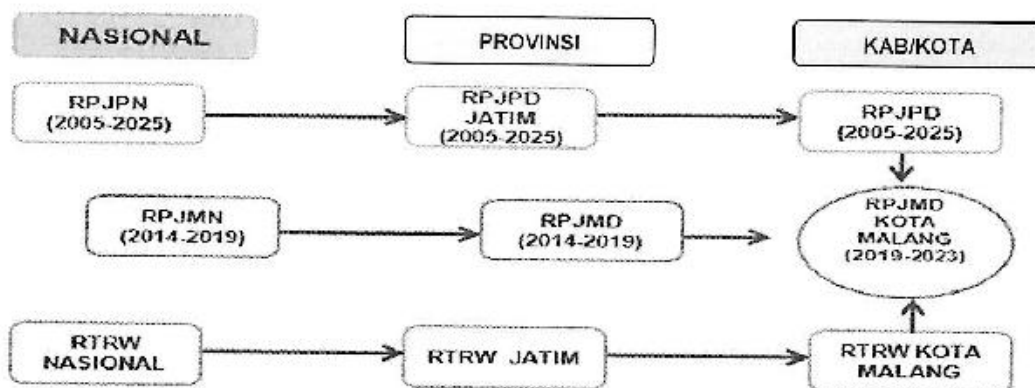
- Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 3);
 25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107)
 26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);
 33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
 34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
 35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 harus sesuai dengan kaidah-kaidah dengan cara terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD dan RPJPD Kabupaten/Kota sekitar, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kota Malang agar rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan, indikasi program pemanfaatan ruang saling selaras. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan daerah untuk menyelaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 1.2

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan mempedomani RPJP nasional Tahun 2005-2025, RPJP Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025, RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025, dan RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 yaitu sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan maksimal. Penyusunan RPJMD Kota Malang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW nasional Tahun 2008-2028, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 serta RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kota Malang dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kota. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kota Malang digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2018-2023.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Sebagaimana ketentuan penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 ini dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Rancangan Akhir RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang sudah tersusun sebelumnya dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 ini telah disusun dan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan, serta telah memuat substansi pendahuluan; gambaran umum kondisi

Daerah; gambaran keuangan Daerah; permasalahan dan isu strategis Daerah; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan penutup.

1.4.2 Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 ini antara lain:

1. Memenuhi ketentuan tahapan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dengan menyempurnakan rancangan akhir RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih;
2. Merumuskan perencanaan daerah melalui tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kota Malang tahun 2018-2023.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

- 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2 Neraca Daerah
 - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2 Analisis Pembiayaan
 - 3.3 Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan
- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- 4.1 Permasalahan Pembangunan
 - 4.2 Isu Strategis
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- 5.1 Visi
 - 5.2 Misi
 - 5.3 Tujuan Dan Sasaran
- BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB IX PENUTUP

BAB IX PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023 pada dasarnya merupakan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Kota Malang akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2018-2023), bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan prioritas kepala daerah terpilih. RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 ini telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD Kota Malang dan Walikota Malang, serta Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. RPJMD ini telah menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025, dan memperhatikan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 ini hendaknya dilakukan secara konsisten, transparan, partisipatif, dan penuh tanggungjawab. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023 ini sebaik-baiknya;
2. RPJMD ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah memberikan informasi yang relevan dan penting terkait kondisi daerah Kota Malang. Informasi yang relevan dan penting tersebut selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi Kota Malang, tujuan, sasaran pokok dan kebutuhan perumusan arah kebijakan. Dengan demikian gambaran umum kondisi daerah merupakan bagian yang sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis. Gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Malang.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografis dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Analisis pada aspek geografi Kota Malang perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kota Malang dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas, Letak dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Malang memiliki wilayah seluas 114,26 km² (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987). Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Berdasarkan ketetapan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara

administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan yang terbagi menjadi 548 Rukun Warga (RW) dan 4.181 Rukun Tetangga (RT). Adapun rincian nama kelurahan, RW dan RT pada masing-masing kecamatan di Kota Malang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Kelurahan dan
Jumlah RW dan RT Se-Kota Malang
Tahun 2017

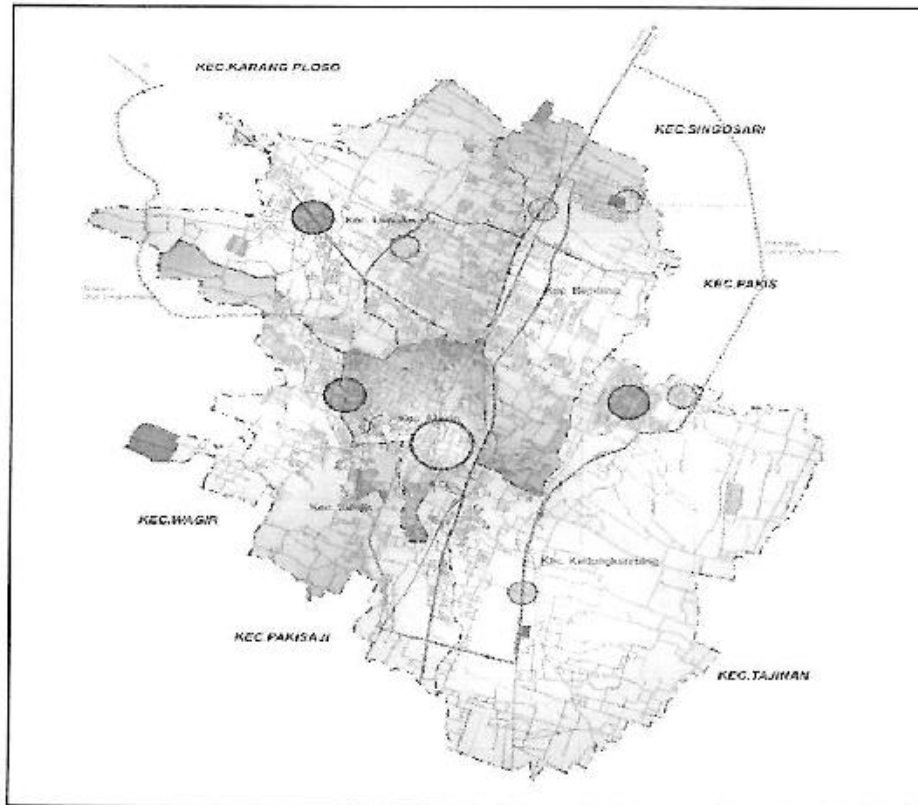
No	Kecamatan	Area	Terhadap Luas Kota	Kelurahan		Jumlah	
						RW	RT
I	BLIMBING	17,77	16,15	1	Balearjosari	127	928
				2	Arjosari		
				3	Polowijen		
				4	Purwodadi		
				5	Blimbing		
				6	Pandanwangi		
				7	Purwantoro		
				8	Bunulrejo		
				9	Kesatrian		
				10	Polchan		
				11	Jodipan		
II	KEDUNG- KANDANG	39,89	36,24	1	Kotalama	117	898
				2	Mergosono		
				3	Bumiayu		
				4	Wonokoyo		
				5	Buring		
				6	Kedungkandang		
				7	Lesanpuro		
				8	Sawojajar		
				9	Madyopuro		
				10	Cemorokandang		
				11	Arjowinangun		
				12	Tlogowaru		
III	LOWOKWARU	22,60	20,53	1	Tasikmadu	120	788
				2	Tunggulwulung		
				3	Merjosari		
				4	Tlogomas		
				5	Dinoyo		
				6	Sumbersari		
				7	Ketawanggede		
				8	Jatimulyo		
				9	Tanjungsekar		
				10	Mejolangu		
				11	Tulusrejo		
				12	Lowokwaru		

No	Kecamatan	Area	Terhadap Luas Kota	Kelurahan		Jumlah	
						RW	RT
IV	KLOJEN	8,83	8,02	1	Klojen	89	675
				2	Samaan		
				3	Rampalceket		
				4	Kiduldalem		
				5	Sukoharjo		
				6	Kasin		
				7	Kauman		
				8	Oro-Oro Dowo		
				9	Bareng		
				10	Gadingkasri		
				11	Penanggungan		
V	SUKUN	20,97	19,06	1	Bakalan Krajan	95	884
				2	Mulyorejo		
				3	Karangbesuki		
				4	Ciptomulyo		
				5	Gadang		
				6	Kebonsari		
				7	Bandungrejosari		
				8	Sukun		
				9	Tanjungrejo		
				10	Pisangcandi		
				11	Bandulan		

Sumber: BPS Kota Malang, 2018

Secara astronomis, Kota Malang terletak pada 07°46'48" LS - 08°46'42" LS dan 112°31'42" BT - 112°48'48" BT. Sedangkan secara administratif, Kota Malang berbatasan dengan kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Malang, yaitu:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso
2. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
3. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji



Gambar 2.1

Peta Kota Malang

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang

B. Topografi

Secara topografis sebagian besar wilayah Kota Malang merupakan dataran dengan dikelilingi deretan bukit dan pegunungan. Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:40-41), Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667m (dpm), dengan keadaan kemiringan tanah (topografi) Kota Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kemiringan 0-8% tersebar diseluruh kecamatan di Kota Malang. Kelas kemiringan ini tergolong datar agak landai.
- b. Kemiringan 8-15% merupakan kelas kemiringan yang tergolong landai agak miring. Kelas kemiringan ini berada di seluruh kecamatan di Kota Malang.
- c. Kemiringan 15-25% merupakan kelas kemiringan yang tergolong miring agak curam. Wilayah terluas pada kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru.
- d. Kemiringan 25-45% merupakan kelas kemiringan yang tergolong curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada disekitar sempadan sungai. Namun wilayah terluas yang berada pada kelas

kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru yang merupakan tempat tertinggi di Kota Malang.

- e. Kemiringan >45% merupakan kelas kemiringan sangat curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada di Kecamatan Kedungkandang.

Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:41-42) bahwa salah satu lokasi yang paling tinggi berdasarkan klasifikasi topografinya adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah Timur Kota Malang.

C. Geologi

Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:44) bahwa keadaan geologis di Kota Malang termasuk kategori dataran tinggi. Sebab Kota Malang merupakan kota yang dikelilingi oleh pegunungan. Di sebelah utara terdapat Gunung Arjuno; di sebelah timur terdapat Gunung Semeru; di sebelah barat terdapat Gunung Panderman; Gunung Kawi; dan Gunung Kelud. Keadaan tanah di bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, sehingga cocok untuk industri. Keadaan tanah di bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, sehingga cocok untuk pertanian. Keadaan tanah bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur. Sedangkan keadaan tanah bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan. Jenis tanah di wilayah Kota Malang terbagi menjadi 4 (empat) macam, antara lain:

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
3. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

D. Hidrologi

Dipandang dari aspek hidrologis, Kota Malang terletak pada Cekungan Air Tanah (CAT) Brantas. Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:42) bahwa di dalam CAT Brantas terkandung potensi dan cadangan air tanah dengan kualitas yang sangat bagus untuk bahan baku air minum. Wilayah CAT Brantas ini mempunyai wilayah cekungan yang terbesar di Propinsi Jawa Timur. Karena letak Kota Malang yang berada pada CAT Brantas ini, maka pemerintah daerah melalui PDAM saat ini menggunakannya sebagai bahan baku utama untuk air minum bagi masyarakat. Di samping itu, Kota Malang juga memiliki 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Metro yang berada di Jalan Raya Langsep, DAS Brantas yang berada di Jalan Gajayana sampai Jalan MT Haryono, DAS Bango yang berada di Jalan Sukarno Hatta, serta DAS Bango yang berada di Jalan Terusan Borobudur sampai Kawasan Pasar Blimbing.

Sementara itu, perairan permukaannya berupa aliran beberapa sungai yang berfungsi sebagai bahan baku pengairan maupun untuk saluran pembuangan akhir dari drainase kota. Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:42) Di wilayah Kota Malang terdapat 4 (empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Mewek-Kalisari-Bango, dan Sungai Amprong. Sungai-sungai yang lain adalah merupakan sungai-sungai relatif kecil yang merupakan sungai pecahan, maupun sungai terusan dari keempat sungai besar tersebut. Kondisi Kota Malang berada pada daerah lereng gunung sehingga Kota Malang menjadi jalur aliran air bagi daerah dataran rendah di bawahnya.

E. Klimatologi

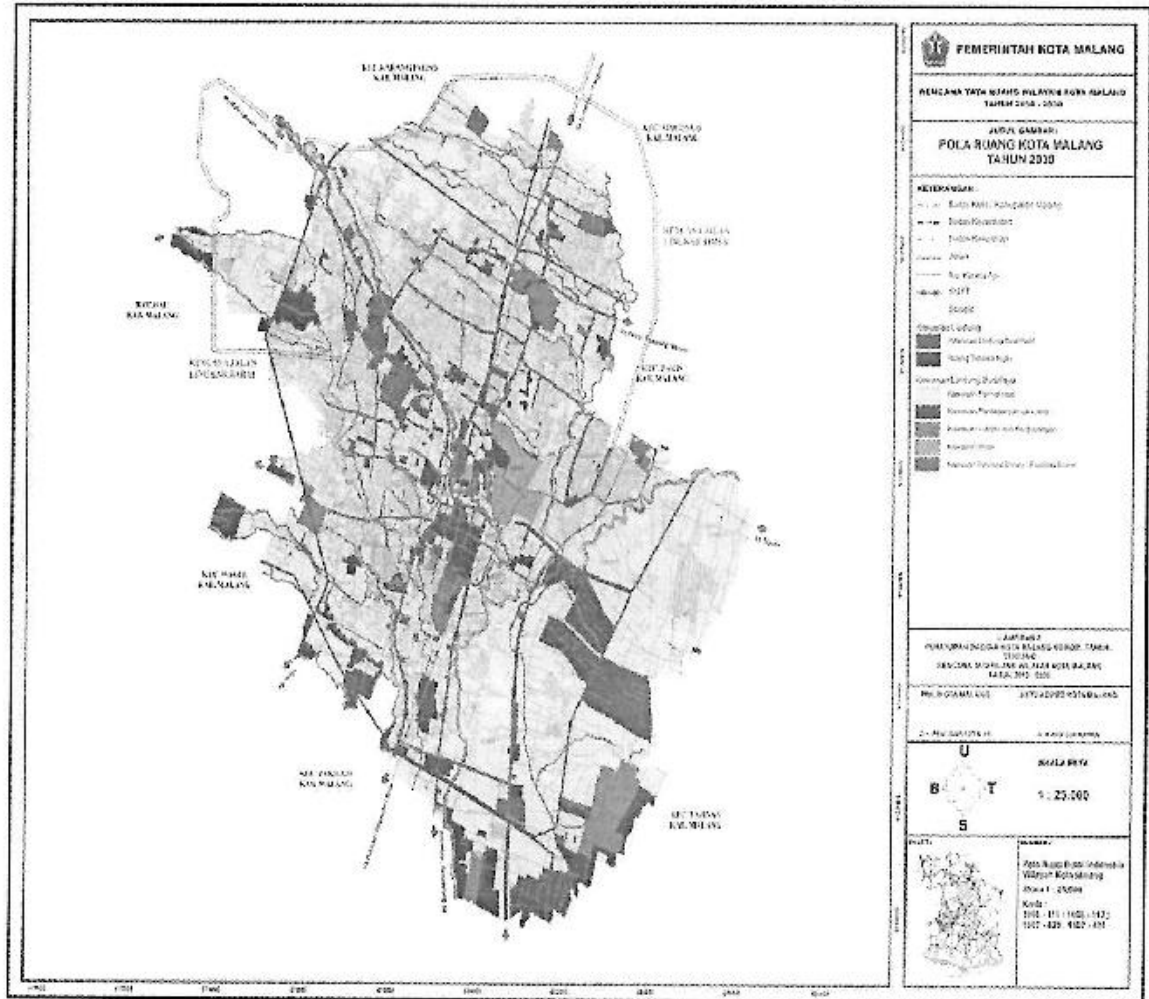
Iklim Kota Malang dipengaruhi oleh letak geologis yang berada di lokasi yang tinggi dan di antara wilayah pegunungan. Kota Malang beriklim muson tropis (pengelompokan iklim Köppen: Am) sehingga memiliki dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan

Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus dan November curah hujan relatif rendah.

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Malang terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada masing-masing kawasan tersebut telah ditetapkan fungsi utama keberadaan dan kemanfaatannya. Adapun penggunaan lahan di Kota Malang diantaranya:

1. Kawasan Lindung di Kota Malang terdiri dari:
 - a. Kawasan Lindung Setempat, yang meliputi daerah sekitar sungai atau sempadan sungai dan sempadan irigasi
 - b. Kawasan Rawan Bencana, merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor
 - c. Kawasan Cagar Budaya,
 - 1) Lingkungan Cagar Budaya,
 - 2) Bangunan Cagar Budaya,
 - d. Kawasan RTH Kota, terdiri dari:
 - 1) RTH Publik
 - 2) RTH Privat
2. Kawasan Budidaya di Kota Malang terdiri dari:
 - a. Kawasan Perumahan
 - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa
 - c. Kawasan Perkantoran
 - d. Kawasan Industri dan Pergudangan
 - e. Kawasan Pariwisata
 - f. Ruang Evakuasi Bencana
 - g. Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal
 - h. Kawasan Peruntukan Lain, yang meliputi:
 - 1) Kawasan Pelayanan Umum Pendidikan
 - 2) Kawasan Pelayanan Umum Kesehatan
 - 3) Kawasan Pelayanan Umum Peribadatan
 - 4) Kawasan Pelayanan Umum Rekreasi dan Olahraga

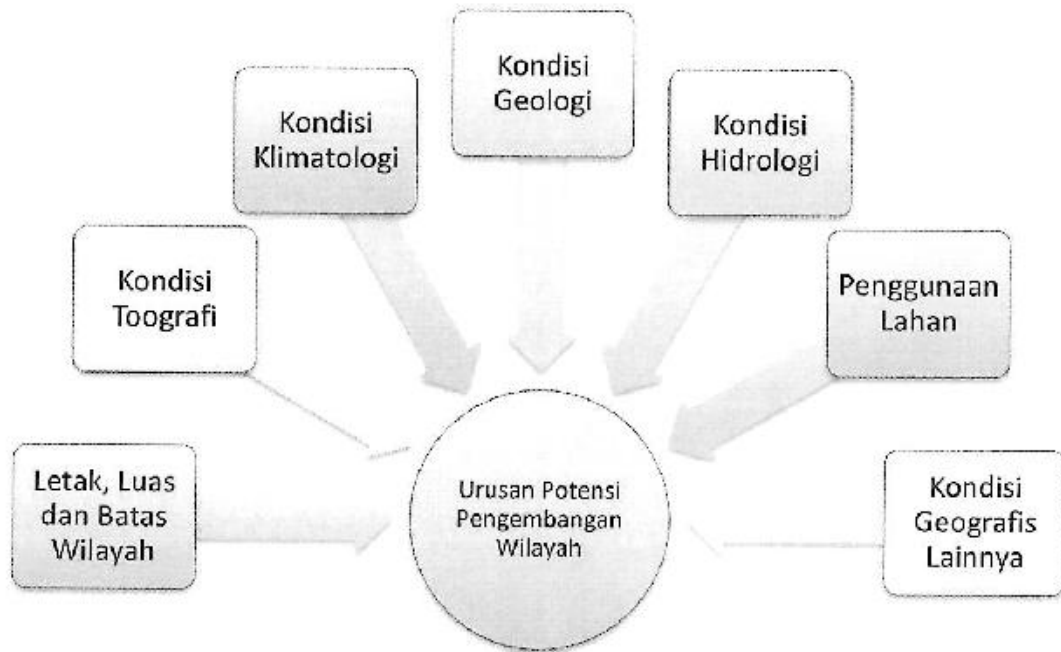


Gambar 2.2
Pola Ruang Tata Guna Lahan Kota Malang

Hingga saat ini kondisi yang ada atas struktur penggunaan lahan di Kota Malang telah mengalami perambahan kawasan terbangun (konversi lahan terbangun) semakin luas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural maupun terencana. Semakin tinggi jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Malang yang disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi salah satu penyebab konversi lahan. Sehingga hal ini berimplikasi pada meningkatnya kerusakan lingkungan. Bahkan tidak jarang sempadan sungai maupun kawasan RTH menjadi alternatif konversi lahan terbangun sebagai ruang untuk tempat tinggal maupun konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berikut kerangka pemikiran potensi pengembangan kawasan budidaya:



Gambar 2.3
(G-C.2)
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan Budaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 telah mengatur pengembangan kawasan budaya Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan Perumahan
- 2) Kawasan Perdagangan dan Jasa
- 3) Kawasan Perkantoran
- 4) Kawasan Komplek Industri dan Pergudangan
- 5) Kawasan Pariwisata
- 6) Ruang Evakuasi Bencana
- 7) Ruang Bagi kegiatan sektor informal
- 8) Kawasan Pelayanan

Potensi pengembangan wilayah yang dikembangkan di Kota Malang diarahkan dapat memberikan dampak ekonomi pada Kota Malang. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian beberapa sektor terhadap PDRB di Kota Malang. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan pada tahun 2013 s/d tahun 2017, yakni di tahun 2013 sebesar 12.363,8 miliar rupiah, tahun 2014 sebesar 13.257,1 miliar rupiah, tahun 2015 sebesar 14.977,1 miliar rupiah, tahun 2016

sebesar 16.890,3 miliar rupiah dan tahun 2017 sebesar 18.465,6 miliar rupiah. Selain itu, juga dapat dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB juga mengalami peningkatan pada tahun 2013 s/d tahun 2017 yakni tahun 2013 sebesar 12.090,5 miliar rupiah, tahun 2014 sebesar 12.637,7 miliar rupiah, tahun 2015 sebesar 13.736,4 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 14.521,8 miliar rupiah dan tahun 2017 sebesar 15,663.8 miliar rupiah. Sekto penyediaan akomodasi dan makan minum juga turut memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Malang dan megalami peningkatan pada tahun 2013 s/d tahun 2017, yakni tahun 2013 sebesar 1.871,4 miliar rupiah, tahun 2014 sebesar 2.271,3 miliar rupiah tahun 2015 sebesar 2.484,7 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 2.802,7 miliar rupiah dan tahun 2017 sebesar 3.114,8 miliar rupiah.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Tingkat kerawanan terhadap bencana merupakan karakteristik dari daerah yang mempunyai kawasan lereng dengan aliran sungai yang dikelilingi tebing-tebing sungai, serta kemiringan lahan yang berpotensi erosi maupun longsor. Semakin tinggi lokasinya, semakin tinggi nilai kemiringan lahannya, sehingga tingkat potensi erosi maupun longsor pada kawasan tersebut juga semakin meningkat. Menilik potensi wilayah dengan karakteristik demikian, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap beban daerah untuk mengelola kawasan-kawasan rawan erosi dan longsor. Di Kota Malang telah ditetapkan lokasi rawan bencana di 5 (lima) kelurahan, yakni Kelurahan Mergosono, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Kedungkandang, dan Kelurahan Kotalama.

Berdasarkan kejadian bencana di Kota Malang menunjukkan bahwa bencana yang sering terjadi di Kota Malang yakni potensi bencana banjir, longsor dan angin topan. Potensi bencana tersebut terlebih harus diwaspadai pada pemukiman di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) atau tebing bibir sungai. Sehingga titik bencana dan lokasi yang berpotensi bencana harus selalu dimonitoring, mengingat

intensitas hujan sedang sampai tinggi belakangan memicu debit Sungai Brantas, meluap di sejumlah titik. Dampaknya, volume air waduk pun meningkat. Selain itu, kondisi muka air waduk di DAS Brantas dan Bengawan Solo, menunjukkan peningkatan volume. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, menjelaskan bahwa pada tahun 2017 peningkatan volume juga terjadi pada Waduk Sutami dan Selorejo, Malang, masing-masing mencapai 17,056 juta meter kubik dan 4,894 meter kubik.

Kejadian bencana di Kota Malang tersebut sebagai dasar pertimbangan strategi dan arah kebijakan program di Pemerintah Daerah Kota Malang adalah UU. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 5) dan PP. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Selain itu, PERDA RTRW Prov dan Kota serta PERGUB.80/2014 tentang Pemanfaatan Kawasan Strategis untuk Pengendalian Ketat Skala Regional.

Tabel 2.2
Data Kejadian Bencana Kota Malang Tahun 2016

NO	BENCANA			DAMPAK	RESPOND TIME	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	SUMBER DAYA TERSEDIA DI LOKASI	BANTUAN		KENDALA
	JENIS	WAKTU	LOKASI					PENYEBAB	DIBUTUHKAN	
1	Kebakaran	Selasa, 5 Januari 2016, Pukul 15.30	Jalan Sumpil Gang 1 Nomor 36C RT 02 RW 04 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing	Obat nyamuk bakar yang menyambar kasur	3 jiwa/ 1 KK mengungsi di Kel. Purwodadi Kec. Blimbing; Kerusakan pada atap sebuah rumah	TRC tiba 15 menit setelah kejadian; Pejabat BPBD (Kastic Logistik/Bu Nur Asmi) tiba pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 09.00	Masyarakat dan SAR	Makanan; Lempat tinggal sementara; pakaian	Sembako	
2	Kebakaran	Kamis, 7 Januari 2016, Pukul 11.45	Jalan Teluk Pelabuhan Batu RT 04 RW 02 Kec. Balcarijari	Lalai saat membakar sampah	Kerusakan pada 1 rumah di bagian dapur	TRC tiba 30 menit setelah kejadian		Sembako	Sembako	
4	Kebakaran	Sabtu, 23 Januari 2016, pukul 12.00	Jalan Lesanpuro Kcc. Kedungkandang	Benzin yang tercecer ketika servis sepeda motor	Kerusakan pada gudang penyimpanan barang					
5	Tanah Longsor	Selasa, 26 Januari 2016	Jalan Mergan Baru Gang 21 RT 02 RW 06 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun	Hujan	Dinding sebuah rumah retak; Satu rumah rawan longsor karena berada di bibir tebing yang longsor					
6	Pohon Tumbang	Rabu, 27 Januari 2016, pukul 14.30	Jalan S. Supriadi Kec. Sukun	Hujan deras disertai angin kencang	1 orang luka ringan an. Gidion Efendi (35) tukang becak, sudah dirujuk ke RS; Kerusakan pada 2 mobil pick up, 1 sepeda motor dan 1 becak	Penyelamatan/ evakuasi korban	Masyarakat dan Tim SAR			
7	Pohon Tumbang	Senin, 1 Februari 2016	Jalan Guntur Malang	Hujan deras disertai angin	Kerusakan pada fasilitas umum berupa seng pagar taman Malabar	Penyelamatan/ evakuasi korban bencana.				

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, 2018

2.1.4 Demografi

Informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pada suatu daerah.



Gambar 2.4

Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2014-2018
 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang 2018

Jumlah penduduk Kota Malang menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Malang berjumlah 865.306 jiwa meningkat di tahun 2015 menjadi 881.796 jiwa. Dan kembali mengalami peningkatan berturut-turut pada tahun 2016 yakni 895.387 jiwa, tahun 2017 yakni 904.165 jiwa dan pada tahun 2018 yakni 916.042 jiwa.

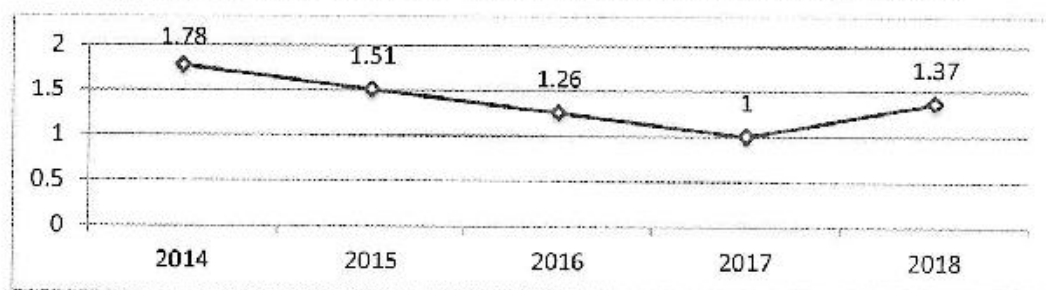
Apabila melihat perkembangan jumlah penduduk di Kota Malang menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tahun 2014 yakni 7.498 jiwa/km², tahun 2015 dengan kepadatan penduduk 8.012 jiwa/km², tahun 2016 dengan kepadatan penduduk 8.136 jiwa/km², tahun 2017 dengan kepadatan penduduk 8.215 jiwa/km², dan per Maret 2018 dengan kepadatan penduduk 8.237 jiwa/km². Kepadatan penduduk terbesar pada tahun 2014-2018 ada di Kecamatan Klojen dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2018 mencapai 12.476 jiwa/km² sedangkan Kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Kedungkandang yakni 5.344 jiwa/km². Untuk perkembangan kepadatan penduduk menurut kecamatan pada tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang
Tahun 2014-2018 (jiwa/km²)

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Blimbing	10.787	10.950	11.077	11.166	11.190
Klojen	10.827	12.436	12.473	12.466	12.476
Kedungkandang	5.097	5.124	5.239	5.326	5.344
Sukun	7.470	9.677	9.853	9.969	10.001
Lowokwaru	7.629	7.524	7.647	7.706	7.726
Total	7.498	8.012	8.136	8.215	8.237

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2018

Penyumbang utama pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kota Malang yakni dari faktor migrasi, dibandingkan dengan penambahan penduduk dari faktor kelahiran. Hal ini dikarenakan Kota Malang merupakan perkotaan, pusat perekonomian dan pusat pendidikan. Namun apabila melihat laju pertumbuhan penduduk Kota Malang pada lima tahun terakhir sejak tahun 2014-2018 menunjukkan angka penambahan penduduk mulai melambat. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan penduduk yakni 1,78%, menurun di tahun 2015 menjadi 1,51%. Penurunan ini berturut-turut terjadi di tahun 2016 hingga tahun 2018 yakni dari 1,26% di tahun 2016, 1% di tahun 2017 dan 1,37 di tahun 2018. Tren laju pertumbuhan penduduk yang mulai berkurang pada tahun 2014 hingga per Maret 2018 dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang cenderung turun.

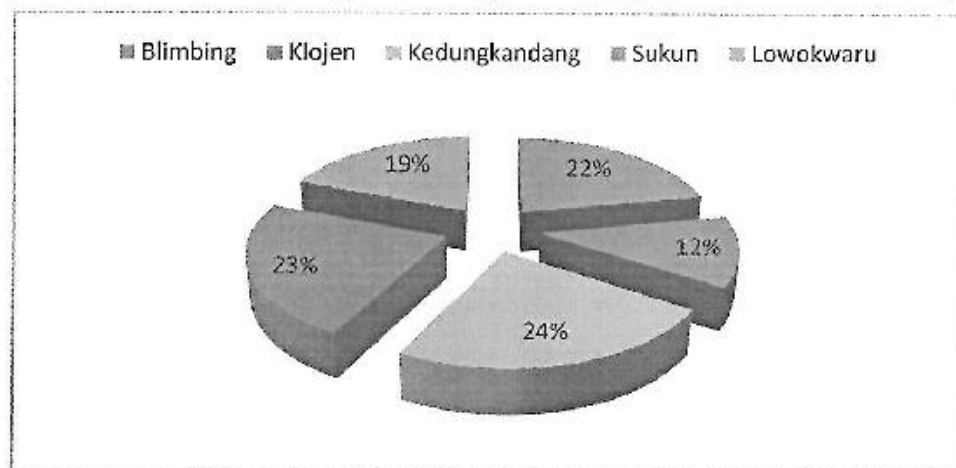


Gambar 2.5
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Malang
Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, 2018

Apabila dilihat dari persebaran penduduk di Kota Malang pada setiap tahunnya yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Kedungkandang. Hal ini dikarenakan Kecamatan

Kedungkandang merupakan kecamatan yang memiliki luas area yang lebih luas dibandingkan dengan keempat kecamatan lainnya.



Gambar 2.6
Distribusi Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Malang Tahun 2018
*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang,
2018*

Berdasarkan persebaran penduduk di Kota Malang berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Kedungkandang memiliki jumlah penduduk paling banyak pada tahun 2018, yakni sebesar 216.222 jiwa atau 24% dari total jumlah penduduk. Sedangkan Kecamatan Klojen memiliki jumlah penduduk paling sedikit pada tahun 2018 yakni sebanyak 110.421 jiwa atau 12% dari total jumlah penduduk. Kecamatan Sukun memiliki jumlah penduduk sebanyak 212.222 jiwa atau 23% dari total jumlah penduduk. Kecamatan Lowokwaru memiliki jumlah penduduk sebanyak 176.514 jiwa atau 19% dari total jumlah penduduk. Kecamatan Blimbing memiliki jumlah penduduk sebanyak 200.663 jiwa atau 22% dari total jumlah penduduk.

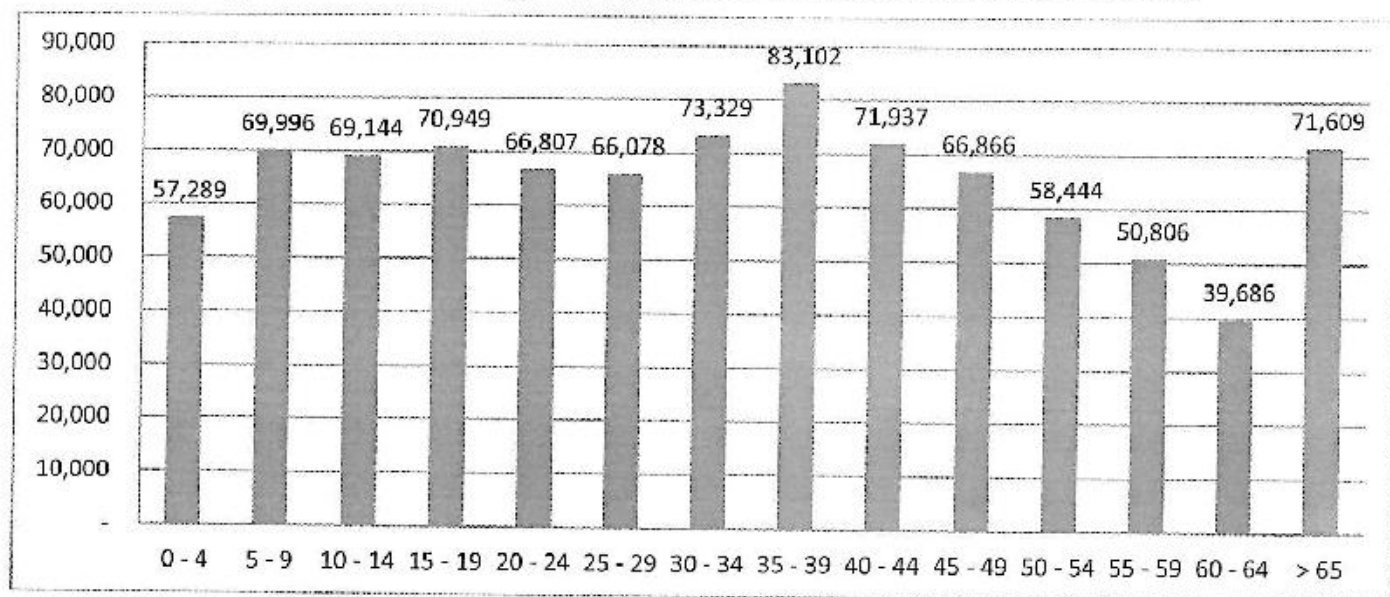
Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Malang
Tahun 2018

Umur	Blimbing	Klojen	Kedung Kandang	Sukun	Lowokwaru	JUMLAH
0 - 4 TH	12.366	5.891	14.574	13.407	11.051	57.289
5 - 9 TH	15.333	7.522	17.124	16.576	13.441	69.996
10 - 14 TH	15.307	7.818	16.781	16.300	12.938	69.144
15 - 19 TH	15.758	8.098	17.591	16.400	13.102	70.949
20 - 24 TH	15.031	7.497	16.674	15.367	12.238	66.807
25 - 29 TH	14.190	7.106	16.932	15.142	12.708	66.078
30 - 34 TH	15.523	8.003	18.261	17.198	14.344	73.329
35 - 39 TH	17.601	9.555	19.455	19.551	16.940	83.102
40 - 44 TH	15.841	8.613	16.810	16.516	14.157	71.937
45 - 49 TH	14.944	8.543	14.984	15.601	12.794	66.866

Umur	Blimbing	Klojen	Kedung Kandang	Sukun	Lowokwaru	JUMLAH
50 - 54 TH	13.222	7.478	13.117	13.594	11.033	58.444
55 - 59 TH	11.252	6.374	11.676	11.664	9.840	50.806
60 - 64 TH	8.674	5.697	8.267	9.160	7.888	39.686
≥ 65 TH	15.621	12.226	13.976	15.746	14.040	71.609

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang 2018

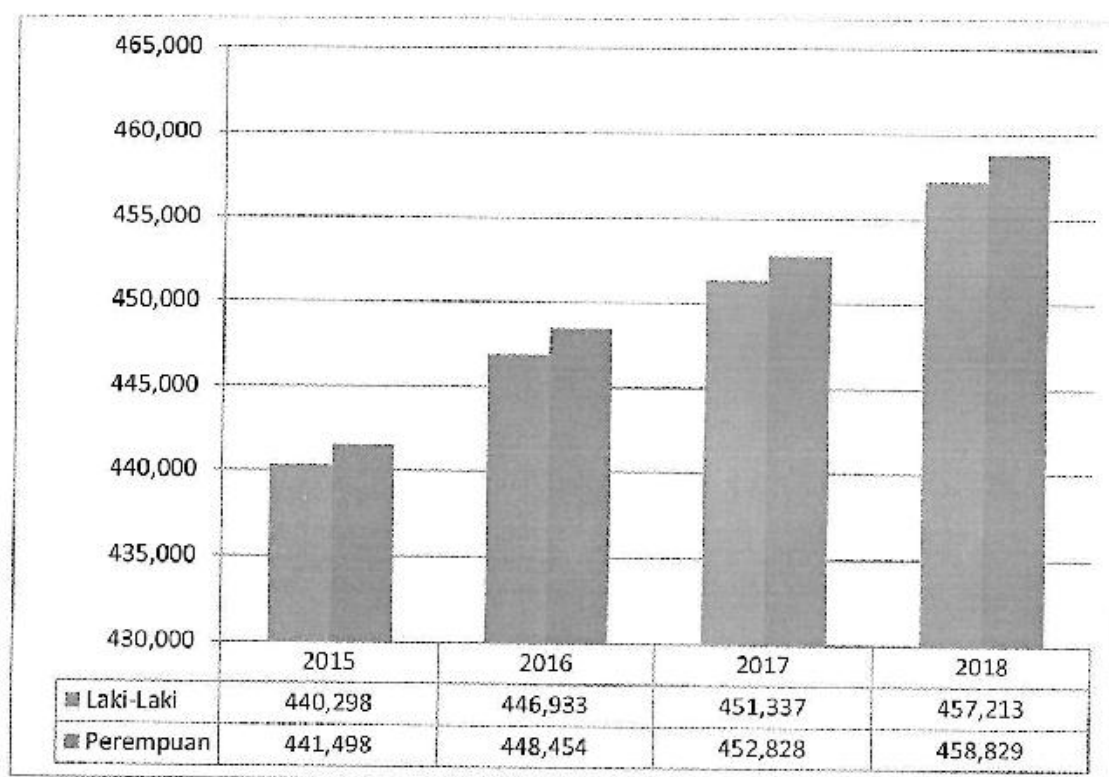
Berdasarkan komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Malang pada tahun 2018 jumlah penduduk produktif yakni usia 15-64 tahun sebanyak 648.004 jiwa atau 70,74%. Sedangkan jumlah penduduk tidak produktif yakni usia 0-14 tahun dan ≥ 65 tahun sebanyak 268.038 jiwa atau 29,26%. Artinya, jumlah penduduk Kota Malang yang didominasi oleh penduduk produktif menjadi peluang dalam menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045. Hal tersebut merupakan Bonus Demografi Kota Malang yang guna menyongsong Revolusi industri 4.0. Untuk itu, Pemerintah Kota Malang secara terus menerus melakukan upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi kreatif.



Gambar 2.7
 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Malang Tahun 2018 (dalam tahun)
 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang 2018

Apabila dilihat dari aspek jenis kelamin, pada tahun 2015 s/d tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Malang didominasi oleh penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kota Malang menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2015 hingga

tahun 2018. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Malang berjumlah 881.796 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 440.298 jiwa dan perempuan sebanyak 441.498 jiwa. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Malang yakni 895.387 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 446.933 jiwa dan perempuan 448.454 jiwa. Pada tahun 2017 Jumlah penduduk Kota Malang yakni 904.165 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 451.337 jiwa dan perempuan sebanyak 452.828 jiwa. Sedangkan tahun 2018 jumlah penduduk Kota Malang yakni 916.042 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 457.213 jiwa dan perempuan 458.829 jiwa. Apabila melihat gambar perkembangan jumlah penduduk menunjukkan pada setiap tahunnya jumlah penduduk Kota Malang selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun uraian jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi jenis kelamin sebagaimana grafik berikut:



Gambar 2.8

Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kota Malang Tahun 2018

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang,
2018

Struktur penduduk Kota Malang dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan di Kota Malang Tahun 2014-2018

Tingkat Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
Tidak/Belum Tamat SD/MI	27,31	26,69	26,76	26,96	27,05
SD/MI	18,41	17,28	16,76	16,26	16,27
SMP/MTs/SMPK	14,26	13,6	13,53	13,48	13,46
SMA/MA/SMK	26,92	25,86	26,16	26,31	26,26
Perguruan Tinggi	13,09	16,57	16,79	16,99	16,96
Total	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2018

Persentase penduduk Kota Malang yang berpendidikan perguruan tinggi cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2014-2017 dari 13,09% di tahun 2014 menjadi 16,99% di Tahun 2017 dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 16,96%. Namun kondisi ini bertolak belakang dengan persentase penduduk yang tidak/belum tamat SD/MI yang telah mengalami kondisi fluktuatif, dari 27,31% (tahun 2014) mengalami penurunan menjadi 26,69% (tahun 2015), namun mengalami kenaikan pada tiga tahun berikutnya yakni 26,76% (tahun 2016), 26,96% (tahun 2017) dan 27,05% (tahun 2018). Meskipun demikian, Pemerintah Kota Malang telah melakukan berbagai upaya pembangunan di bidang pendidikan mulai menunjukkan hasil walaupun pergerakannya masih terjadi secara lambat dan perlahan-lahan. Hal ini dapat dilihat dari capaian penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan SMA/MA/SMK terjadi perbaikan capaian, meskipun cenderung mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 26,92% menjadi 26,26% di tahun 2018. Oleh karena itu, meskipun perbaikan kualitas sumber daya manusia tengah berlangsung, namun masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Sehingga pembangunan di bidang pendidikan harus menjadi prioritas pendidikan Pemerintah Kota Malang, mengingat Kota Malang identik dengan sebutan Kota Pendidikan.

Apabila struktur penduduk Kota Malang dilihat dari aspek kewarganegaraan selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan di Kota Malang
Tahun 2014-2018

Kewarga- negara	2014		2015		2016		2017		2018	
	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA
Blimbing	191.631	46	194.527	64	196.732	115	198.322	106	199.171	128
Klojen	109.000	32	109.747	70	110.012	124	109.950	123	113.035	146
Kedungkandang	199.506	3	204.395	10	208.965	14	212.448	11	215.164	21
Sukun	198.241	153	202.637	291	206.153	459	208.695	358	211.358	393
Lowokwaru	166.633	61	169.817	236	172.417	396	173.790	362	176.228	398
Total	865.011	295	881.123	671	894.279	1.108	903.205	960	914.956	1.086

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2018

Struktur penduduk Kota Malang juga dapat dilihat dari status kewarganegaraannya. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk dengan status Warga Negara Asing (WNA) cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif pada 2014-2018, yakni dari 295 jiwa (tahun 2014), meningkatkan menjadi 671 jiwa (tahun 2015), dan meningkat kembali menjadi 1.108 jiwa (tahun 2016), namun mengalami penurunan menjadi 960 jiwa (tahun 2017) dan mengalami peningkatan kembali menjadi 1.086 jiwa (tahun 2018). Meningkatnya jumlah WNA pemegang izin tinggal di Kota Malang didominasi oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan banyaknya perguruan tinggi di Kota Malang. WNA tersebut berasal dari sejumlah negara yang studi atau menjalani program pertukaran pelajar. Selain itu, WNA di Kota Malang juga berasal dari kelompok sosial budaya, yakni WNA yang masuk ke keluarga. Sedangkan komposisi jumlah penduduk Kota Malang apabila dilihat dari aspek kewarganegaraan WNI pada tahun 2014 s/d tahun 2018 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah WNI di Kota Malang sebanyak 865.011 jiwa meningkat di tahun 2018 menjadi 914.956 jiwa.

Struktur penduduk Kota Malang dapat juga dilihat dari aspek agama yang dianut selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kota Malang
Tahun 2014-2018

Agama	2014	2015	2016	2017	2018
Islam	774.537	789.726	802.581	811.067	822.768
Kristen	50.433	51.212	51.731	52.079	52.328

Agama	2014	2015	2016	2017	2018
Katolik	33.695	34.156	34.438	34.439	34.453
Hindu	1.466	1.487	1.483	1.474	1.460
Budha	4.907	4.943	4.881	4.850	4.787
Konghucu/Keperc.	268	272	273	256	246
Total	865.306	881.796	895.387	904.165	916.042

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2018

Penduduk Kota Malang menganut Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Chu. Mayoritas penduduk Malang pada tahun 2018 menganut agama Islam yakni sebanyak 822.768 jiwa (89,82%) dan minoritas penduduk menganut konghucu/kepercayaan sebanyak 246 jiwa (0,03%). Malang menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren, yang terkenal ialah Pesantren Mahasiswa (Pesma) Al Hikam, dan juga adanya pusat pendidikan Kristen berupa Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara, salah satunya adalah Sekolah Tinggi Teologi SAAT (Seminari Alkitab Asia Tenggara).

Apabila dilihat dari aspek peristiwa penting pencatatan sipil selama tahun 2014-2018 mayoritas dikarenakan oleh peristiwa perpindahan, diikuti dengan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengangkatan anak. Pada tahun 2018 tercatat peristiwa penting karena perpindahan sebanyak 6.087 peristiwa, kelahiran sebanyak 552 peristiwa, kematian sebanyak 809 peristiwa, perkawinan sebanyak 74 peristiwa, perceraian sebanyak 9 peristiwa dan pengangkatan anak sebanyak 2 peristiwa.

Tabel 2.8
Jumlah Peristiwa Penting Pencatatan Sipil
Di Kota Malang Tahun 2014-2018

Peristiwa	2014	2015	2016	2017	2018
Kelahiran	4.344	2.911	2.595	2.282	552
Kematian	1.486	802	1.909	4.096	809
Perpindahan	31.850	46.087	41.471	33.358	6.087
Perkawinan	473	413	392	369	74
Perceraian	76	69	73	59	9
Pengangkatan Anak	7	6	6	239	2
Total	38236	50288	46446	40403	7533

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang 2018

Apabila dilihat dari jumlah peristiwa penting pencatatan sipil di Kota Malang pada tahun 2014 s/d tahun 2018 terkait peristiwa kelahiran menunjukkan tren menurun pada setiap tahunnya. Pada

tahun 2014 cakupan penerbitan akte kelahiran di Kota Malang sebesar 20.166 lembar akte kelahiran. Capaian pada tahun 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013. Pada tahun 2015 cakupan penerbitan akte kelahiran di Kota Malang sebesar 17.198 lembar akte kelahiran. Capaian pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 cakupan penerbitan akte kelahiran di Kota Malang sebesar 19.675 lembar akte kelahiran. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 cakupan penerbitan akte kelahiran di Kota Malang sebesar 19.617 lembar akte kelahiran. Capaian pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2018 cakupan penerbitan akte kelahiran di Kota Malang sebesar 10.154 lembar akte kelahiran. Capaian pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, serta kondisi seni budaya dan olah raga di Kota Malang.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut adalah indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Malang.

A. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan data kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang tahun 2013-2016, diketahui bahwa lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Malang. Dimana lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selama kurun waktu 2013-2016 masih mendominasi didalam

pembentukan PDRB, dengan kontribusi rata-rata presentase pertahun sebesar 29%. Kontribusi kedua terbesar ditunjukkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan mencapai rata-rata pertahun sebesar 28% terhadap PDRB Kota Malang. Kemudian ketiga diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi yang mencapai rata-rata 13% pertahunnya selama periode 2013-2016 terhadap Kota Malang. Sementara lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi di bawah 8%. Secara umum, peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih belum tergeser oleh lapangan usaha lainnya. Sedangkan sektor lapangan usaha yang memiliki peran kontribusi terkecil terhadap struktur ekonomi Kota Malang di tahun 2016 adalah lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 0,03%.

Tabel 2.9
Kontribusi Lapangan Usaha di Kota Malang Tahun 2013-2016 (%)

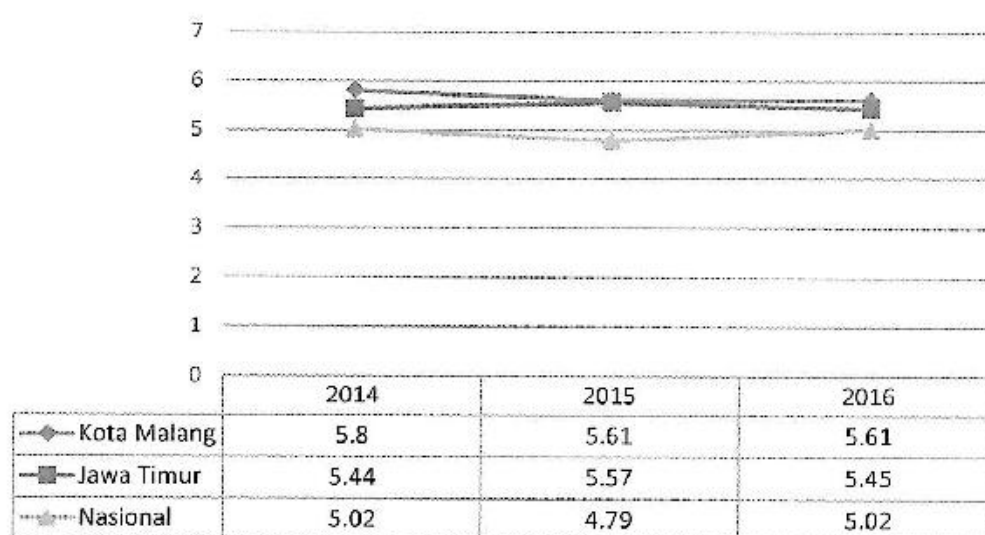
No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,28	0,28	0,27	0,26
2	Pertambangan dan Penggalian	0,10	0,11	0,10	3,77
3	Industri Pengolahan	28,24	27,15	26,51	28,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,20	0,20	0,19	0,19
6	Konstruksi	12,13	12,56	12,53	12,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,88	28,48	28,91	29,55
8	Transportasi dan Pergudangan	2,27	2,40	2,41	2,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,37	4,88	4,80	4,90
10	Informasi dan Komunikasi	4,00	3,94	3,97	3,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,80	2,92	2,97	3,05
12	Real Estate	1,38	1,36	1,41	1,41
13	Jasa Perusahaan	0,74	0,75	0,77	0,78
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,69	1,58	1,52	1,48
15	Jasa Pendidikan	7,69	8,01	8,15	8,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,27	2,44	2,49	2,50
17	Jasa Lainnya	2,93	2,92	2,97	2,87
PDRB		100	100	100	100

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Pada tahun 2017 capain pertumbuhan PDRB ADHB di Kota Malang sebesar Rp 62.359.300.000.000 dan PDRB ADHK sebesar Rp 46.824.750.000.000. Kontribusi sektoral terbesar pertama yakni dari perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 18.456,6 milyar (ADHB) dan Rp 14.620,7 milyar (ADHK).

Kontribusi sektoral terbesar kedua yakni dari industri pengolahan sebesar Rp 15.663,8 milyar (ADHB) dan Rp 10.846,9 (ADHK).

Selain PDRB, tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang mengalami penurunan tiap tahunnya selama periode 2014-2016. Penurunan pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yakni 5,8% jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,61% jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Malang sebesar 5,61% hal ini tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang memiliki kecenderungan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Membaiknya kondisi ekonomi di Kota Malang yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menanjak naik tersebut memunculkan kepercayaan investor. Pemerintah Kota Malang menuai dampaknya, seperti pengusaha memberikan *corporate social responsibility* (CSR) berupa pembangunan taman-taman tematik, bus sekolah, dan lain-lain.

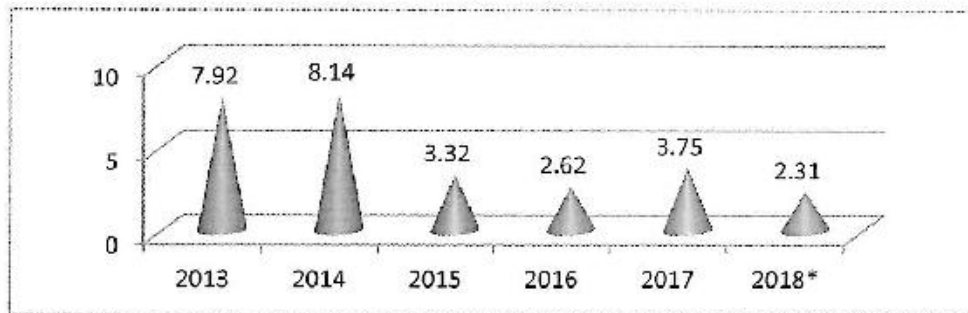


Gambar 2.9
Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2014-2016

Sumber: BPS

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan capaian indikator laju inflasi Kota Malang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



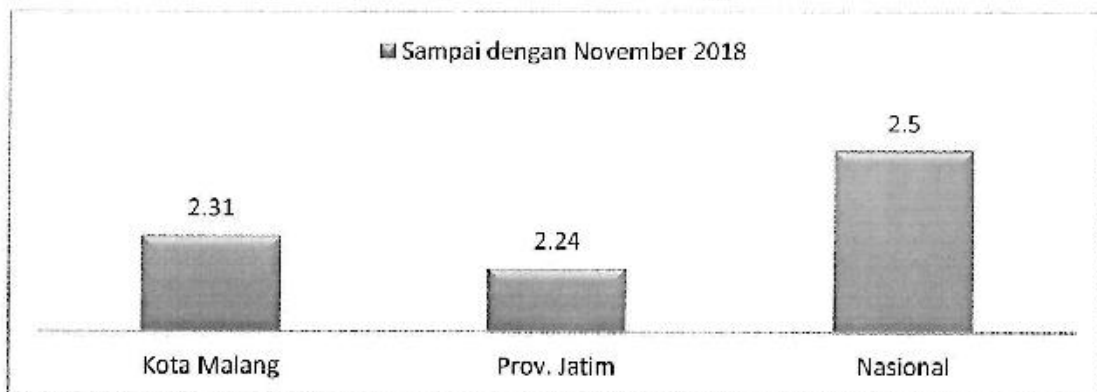
*) Persentase perubahan IHK bulan November 2018 terhadap IHK Desember 2017

Gambar 2.10

Perkembangan Inflasi di Kota Malang Tahun 2013-2018

Sumber: BPS Kota Malang

Tingkat inflasi di Kota Malang juga cukup terkendali. Tingkat inflasi di Kota Malang pada Tahun 2013 sebesar 7,92%, tingkat inflasi di Kota Malang pada Tahun 2014 sebesar 8,14%, di tahun 2015 menurun menjadi 3,32%, tahun 2016 turun menjadi 2,62%, tahun 2017 meningkat menjadi 3,75%, dan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,31% (BPS Kota Malang).



Gambar 2.11

Perbandingan Capaian Tingkat Inflasi Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional per November 2018

Sumber: BPS

Capaian Kota Malang menekan angka inflasi pada kisaran 2,31% di tahun 2018 ini terus berusaha dipertahankan dan dioptimalisasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang. Capaian tingkat inflasi Kota Malang pada tahun 2018 masih

berada diatas tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur yang mencapai 2,24%. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, tingkat inflasi Kota Malang berada dibawahnya, dimana capaian tingkat inflasi nasional sebesar 2,5%.

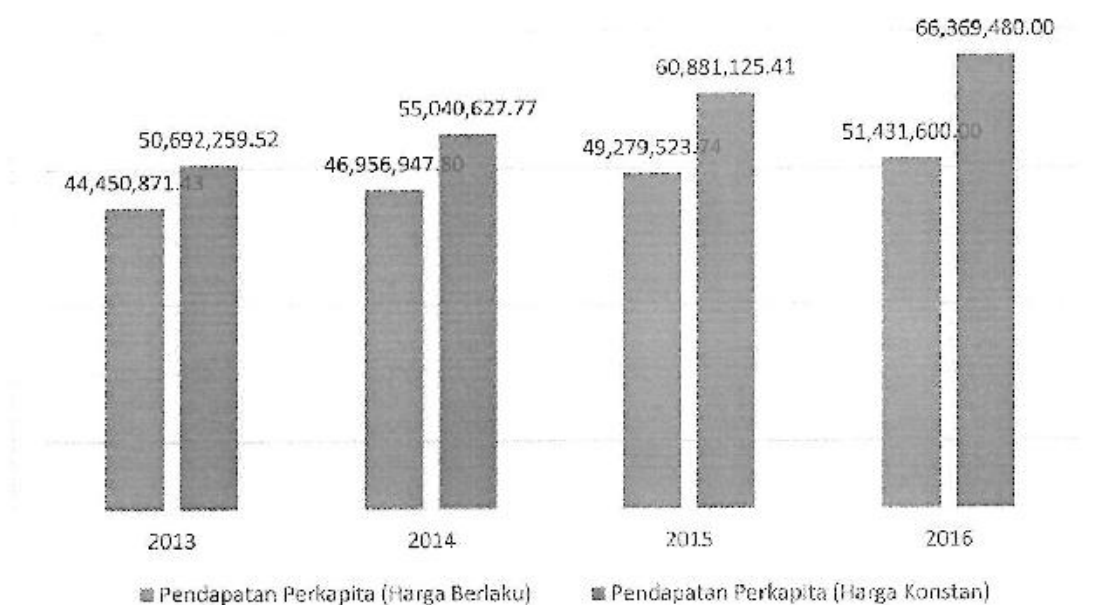
Berdasarkan data Bagian Pengembangan Perekonomian Setda Kota Malang, sedikitnya ada tiga faktor potensi inflasi pada bulan Juli 2018, yakni *volatile food*, *core inflation* dan *administered price*. Pada *volatile food*, berlangsungnya musim tanam komoditas hortikultura menyebabkan keterbatasan stok yang dapat memicu kenaikan harga. Pada *core inflation*, kenaikan bahan bakar nonsubsidi pada awal Juli diprediksi akan mempengaruhi kenaikan harga, di samping masih berlangsungnya musim libur sekolah yang berpotensi meningkatkan harga sektor pariwisata. Sedangkan pada *administered price*, kenaikan bahan bakar kembali menjadi salah satu faktor pendorong inflasi ditambah masih tingginya tarif angkutan udara dengan masih berlangsungnya *peak season* dan musim liburan.

Adapun faktor dominan yang mempengaruhi inflasi pada tahun-tahun tersebut sebagian besar disebabkan karena adanya harga-harga untuk pendidikan, rekreasi dan olahraga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menempati kedudukan paling atas, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pada bidang tersebut bagi masyarakat Kota Malang semakin banyak yang memicu kenaikan harga dari tahun-tahun sebelumnya sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang sangat membutuhkan sarana pendidikan yang memadai. Selain itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya menekan angka inflasi, yakni dengan menjaga arus ekspor dan impor barang sehingga tidak terjadi lonjakan harga di pasar. Disamping itu, beberapa hal lain yang harus dilakukan adalah dengan mempermudah perizinan seperti SIUP bagi usaha yang bergerak di ekspor, mempermudah akses dan menjaga *cash flow* di segala lini sektor yang ada di Kota Malang.

C. PDRB Per Kapita

Pengertian dari PDRB per kapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun

yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Berdasarkan data perkembangan lapangan usaha dan pertambahan jumlah penduduk, diperoleh data PDRB per Kapita Kota Malang yang menunjukkan perkembangan dengan tren dan tendensi meningkat setiap tahunnya. Perkembangan capaian indikator PDRB per Kapita Kota Malang Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.12
Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Malang
Tahun 2013-2016
Sumber: BPS Kota Malang, 2018

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Malang pada tahun 2013 s/d tahun 2016 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pendapatan perkapita atas harga berlaku pada tahun 2013 sebesar Rp. 44.450.871,43, tahun 2014 sebesar Rp 46.956.947,80, tahun 2015 sebesar Rp 49.279.523,74 dan tahun 2016 sebesar Rp 51.431.600,00. Sedangkan pendapatan perkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2013 s/d tahun 2016 juga mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pendapatan per kapita atas harga konstan sebesar Rp 50.692.259,52, pada tahun 2014 sebesar Rp 55.040.627,77, pada tahun 2015 sebesar Rp 60.881.125,41 dan tahun 2016 sebesar Rp 66.369.480,00.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan PDRB per Kapita di Provinsi Jawa Timur dan Nasional, PDRB per Kapita Kota Malang masih berada diatas. Seperti yang tersaji pada grafik dibawah ini PDRB per Kapita Provinsi Jawa Timur dan Nasional berada pada angka dibawah 50 Juta Rupiah ini artinya Kota Malang memiliki kecenderungan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Provinsi dan Nasional. Meskipun demikian PDRB Per Kapita Provinsi dan Nasional mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 2.13
Laju Perkembangan PDRB per Kapita Kota Malang
Tahun 2014-2016 (dalam juta Rp)
Sumber: BPS Kota Malang, 2017

D. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio

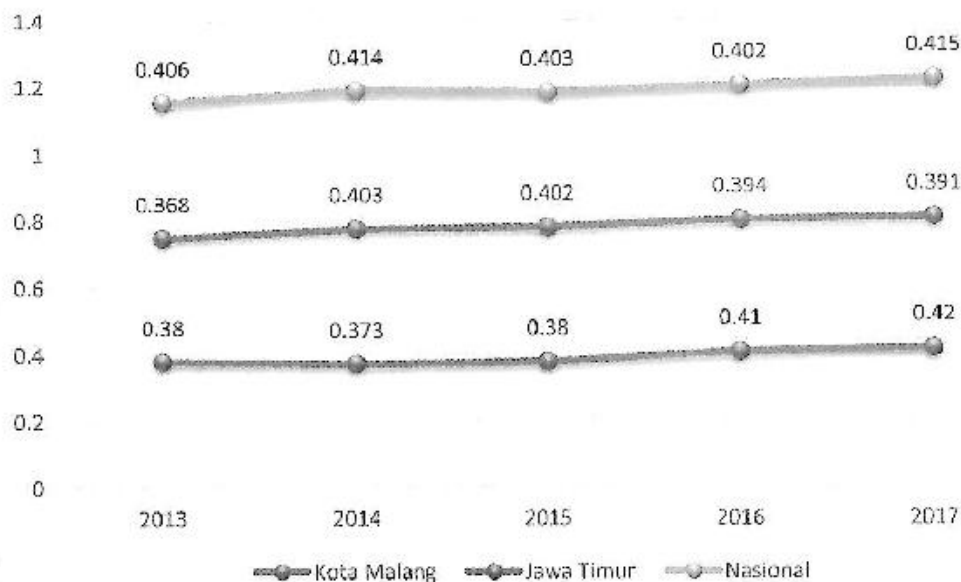
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

- $GR < 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0.4 < GR < 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Perbandingan capaian gini ratio Kota Malang dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.14
Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kota Malang
Tahun 2013-2017
Sumber: BPS

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa gini ratio Kota Malang pada tahun 2013-2017 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 gini ratio Kota Malang sebesar 0,38, tahun 2014 sebesar 0,373, tahun 2015 sebesar 0,38, tahun 2016 sebesar 0,41 dan tahun 2017 sebesar 0,42. Gini ratio Kota Malang pada tahun 2017 terkategori ketimpangan sedang, yang artinya memiliki ketimpangan pendapatan yang sedang. Capaian rasio gini Kota Malang mencapai angka 0,42 persen dan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur pada 2017.

Tingginya capaian rasio gini merupakan sinyal jika kondisi ekonomi Kota Malang sedang tidak baik. Sebab rasio gini merupakan ketimpangan antara yang paling miskin dan kaya dan harus dilihat

apa saja faktor yang mempengaruhi. Faktor penyumbang rasio gini yang paling utama adalah indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi, inflasi rendah, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tinggi.

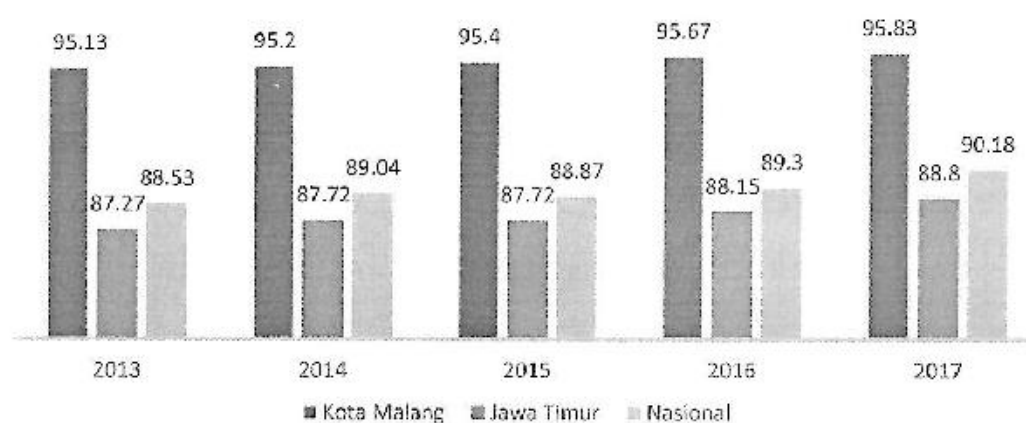
Gini ratio Kota Malang pada tahun 2017 terkategori ketimpangan sedang, yang artinya memiliki ketimpangan pendapatan yang sedang. Meskipun demikian indeks gini atau gini ratio Kota Malang linier dengan kenaikan gini ratio Provinsi Jawa Timur ataupun Nasional. Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Gini Ratio Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 sampai 2017 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 gini ratio provinsi pada angka 0,391 hal tersebut tentunya lebih tinggi dari Gini Ratio Kota Malang. Sedangkan untuk gini ratio nasional berada pada angka 0,415 pada tahun 2017

Apabila mengacu pada standar penilaian ketimpangan Gini Ratio, maka Kota Malang termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang sedang. Meskipun demikian, capaian yang menunjukkan tren meningkat pada Gini Ratio di Kota Malang menjadi tantangan tersendiri yang harus di jawab dalam pelaksanaan program 5 (lima) tahun ke depan. Pembukaan akses pendidikan dan lapangan kerja di daerah-daerah yang selama ini tertinggal, baik pada level kelurahan maupun kecamatan, perlu diidentifikasi secara lebih detail dan dirumuskan program yang tepat sasaran guna memperkecil ketimpangan yang ada.

E. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Pada indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Malang selama tahun 2013-2017 menunjukkan tren yang positif, dimana pada setiap tahunnya telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Malang sebesar 95,13%. Pada tahun 2014 penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Malang sebesar 95,2%. Pada tahun 2015 penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Malang sebesar 95,4% atau mengalami peningkatan sebesar 0,2% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Malang sebesar 95,67% atau mengalami peningkatan sebesar 0,27% dari

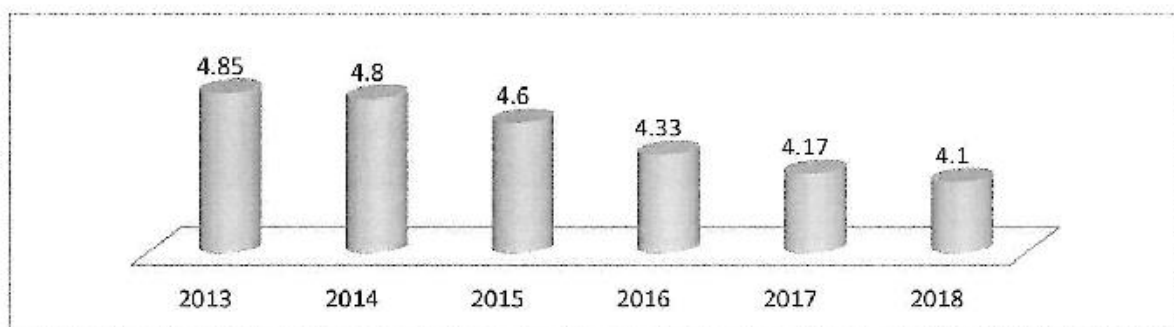
tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2017 penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Malang sebesar 95,83% atau mengalami peningkatan sebesar 0,16% dari tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, persentase penduduk di atas garis kemiskinan masih lebih baik sebab persentase penduduk di atas garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 hanya sebesar 88,8% artinya selisih dengan Kota Malang cukup besar yaitu 7,03%. Sedangkan persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kota Malang apabila dibandingkan dengan statistik Nasional pada tahun 2017 memiliki selisih yang tidak terlalu banyak dibandingkan selisih dengan provinsi yaitu sebesar 5,65%.



Gambar 2.15
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kota Malang
Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Kota Malang, 2018

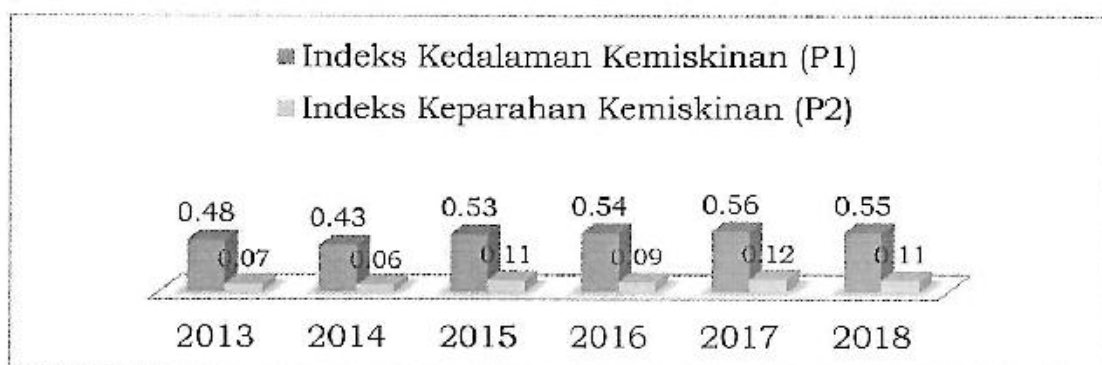
Peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan menunjukkan prestasi Pemerintah Kota Malang dalam mengentas kemiskinan. Meskipun demikian, angka kemiskinan masih menjadi prioritas pembangunan pada lima tahun mendatang. Penanggulangan kemiskinan (nangkis) menjadi tugas lintas sektor. Oleh karena itu, dalam TKPKD terdapat beberapa kelompok kerja (pokja). Di antaranya, pokja pengembangan kemitraan, pokja pengaduan masyarakat, kelompok program bantuan sosial terpadu, kelompok program nangkis berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan kelompok program nangkis berbasis pro rakyat. Selain itu, pemerintah juga masih harus menyediakan wadah bagi keterampilan yang sudah dihasilkan oleh masyarakat.



Gambar 2.16
Persentase Penduduk Miskin Kota Malang
Tahun 2013-2018

Sumber: BPS Kota Malang, 2018

Pada indikator presentase penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2013-2018 mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2013 presentase penduduk miskin di Kota Malang sebesar 4,85%. Pada tahun 2014 presentase penduduk miskin di Kota Malang mengalami penurunan menjadi 4,8%. Pada tahun 2015 presentase penduduk miskin di Kota Malang juga mengalami penurunan menjadi 4,6%. Pada tahun 2016 presentase penduduk miskin di Kota Malang kembali mengalami penurunan menjadi 4,33%. Pada tahun 2017 presentase penduduk miskin di Kota Malang kembali mengalami penurunan menjadi 4,17%. Dan pada tahun 2018 presentase penduduk miskin di Kota Malang kembali mengalami penurunan menjadi 4,1%. Artinya setiap tahun pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi presentase penduduk miskin di Kota Malang, dapat dilihat dari presentase penduduk miskin dari tahun 2013-2018 yang mengalami penurunan.

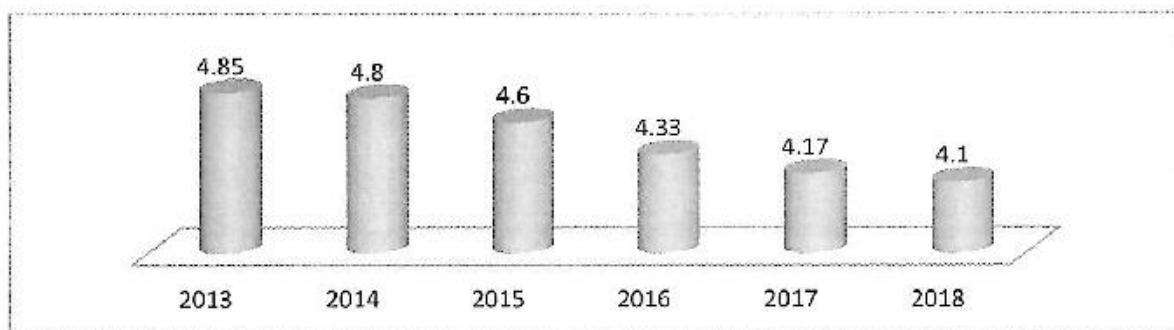


Gambar 2.17
Persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang
Tahun 2013-2018

Sumber: BPS Kota Malang, 2018

Pada indikator persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di atas di Kota Malang selama tahun 2013-2018 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2013 di atas persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Malang sebesar 0,48%. Pada tahun 2014 di atas persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Malang sebesar 0,43%. Pada tahun 2015 persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Malang sebesar 0,53% atau mengalami peningkatan sebesar 0,10% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Malang sebesar 0,54% atau mengalami peningkatan sebesar 0,01% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2017 persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Malang sebesar 0,56% atau mengalami peningkatan sebesar 0,02% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2018 persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Malang sebesar 0,55% atau mengalami penurunan menjadi 0,01% dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Malang selama tahun 2013-2018 sesuai dengan tabel di atas menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2013 di atas persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Malang sebesar 0,07%. Pada tahun 2014 di atas persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Malang sebesar 0,06%. Pada tahun 2015 persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Malang sebesar 0,11%. Pada tahun 2016 persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Malang sebesar 0,09%. Selanjutnya pada tahun 2017 persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Malang sebesar 0,12%. Dan selanjutnya pada tahun 2018 persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Malang sebesar 0,11%.



Gambar 2.18
 Persentase Penduduk Miskin Kota Malang
 Tahun 2013-2018

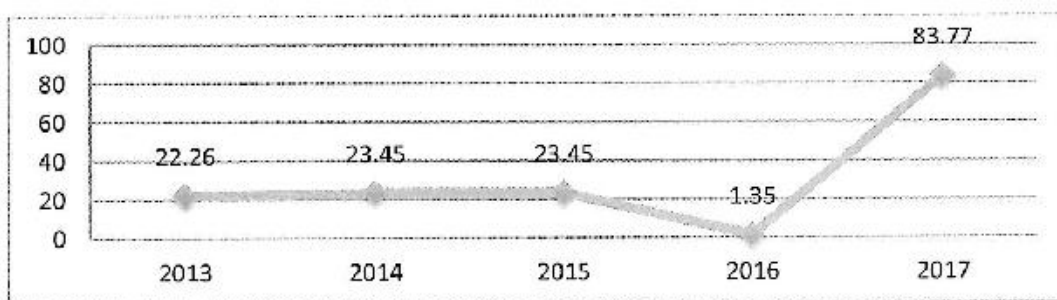
Sumber: BPS Kota Malang, 2018

Pada indikator presentase penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2013-2018 mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2013 presentase penduduk miskin di Kota Malang sebesar 4,85%. Pada tahun 2014 presentase penduduk miskin di Kota Malang mengalami penurunan menjadi 4,8%. Pada tahun 2015 presentase penduduk miskin di Kota Malang juga mengalami penurunan menjadi 4,6%. Pada tahun 2016 presentase penduduk miskin di Kota Malang kembali mengalami penurunan menjadi 4,33%. Pada tahun 2017 presentase penduduk miskin di Kota Malang kembali mengalami penurunan menjadi 4,17%. Dan pada tahun 2018 presentase penduduk miskin di Kota Malang kembali mengalami penurunan menjadi 4,1%. Artinya setiap tahun pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi presentase penduduk miskin di Kota Malang, dapat dilihat dari presentase penduduk miskin dari tahun 2013-2018 yang mengalami penurunan.

F. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Pemulihan/Pengembangan Kemampuan dan Pelatihan Ketrampilan

Adapun pencapaian indikator kinerja persentase PMKS yang memperoleh bantuan pemulihan/ pengembangan kemampuan dan pelatihan ketrampilan di Kota Malang pada tahun 2016 sebesar 122,26%. Pada tahun 2013-2018 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 persentase PMKS yang memperoleh bantuan pemulihan/pengembangan kemampuan dan pelatihan ketrampilan di Kota Malang sebesar 23,45% atau 23.450

orang PMKS. Pada tahun 2016 persentase PMKS yang memperoleh bantuan pemulihan/pengembangan kemampuan dan pelatihan ketrampilan di Kota Malang sebesar 1,35% atau 50 orang. Capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015. Pada tahun 2017 persentase PMKS yang memperoleh bantuan pemulihan/pengembangan kemampuan dan pelatihan ketrampilan di Kota Malang sebesar 83,77% atau 48.182 orang. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016.



Gambar 2.19

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Pemulihan/Pengembangan Kemampuan dan Pelatihan Ketrampilan di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, 2018

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

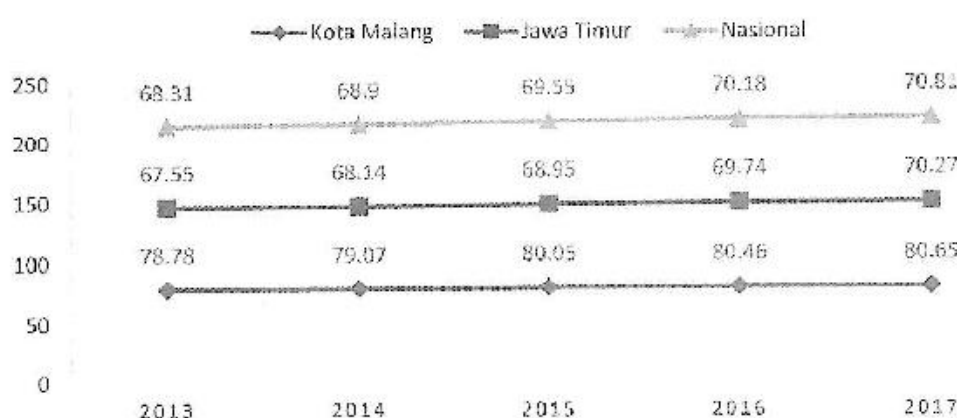
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Berikut ini indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan sosial di Kota Malang.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah proses pembangunan yang ditujukan untuk pembangunan sumberdaya manusia. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat

dengan mengkombinasikan tiga komponen, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Hal ini dikarenakan pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia.

Di Kota Malang, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara umum IPM Kota Malang mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Pada Tahun 2014 IPM Kota Malang sebesar 78,96. Pada tahun 2015 IPM Kota Malang sebesar 80,05. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2016 IPM Kota Malang juga mengalami peningkatan kembali yakni menjadi 80,46. Selanjutnya pada tahun 2017 IPM Kota Malang juga mengalami peningkatan kembali yakni menjadi 80,65. Angka IPM Kota Malang juga diimbangi dengan angka IPM di level Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Statistik IPM Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang hanya sebesar 67,55 meningkat ditahun 2017 menjadi 70,27. Begitupun dengan IPM Nasional yang memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013 IPM Nasional berada pada angka 68,31, lalu pada tahun 2017 meningkat menjadi 70,81. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.20

Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Kota Malang, 2017

Upaya Pemerintah Kota Malang meningkatkan kualitas warganya menunjukkan hasil signifikan. Hal ini dapat terlihat dari

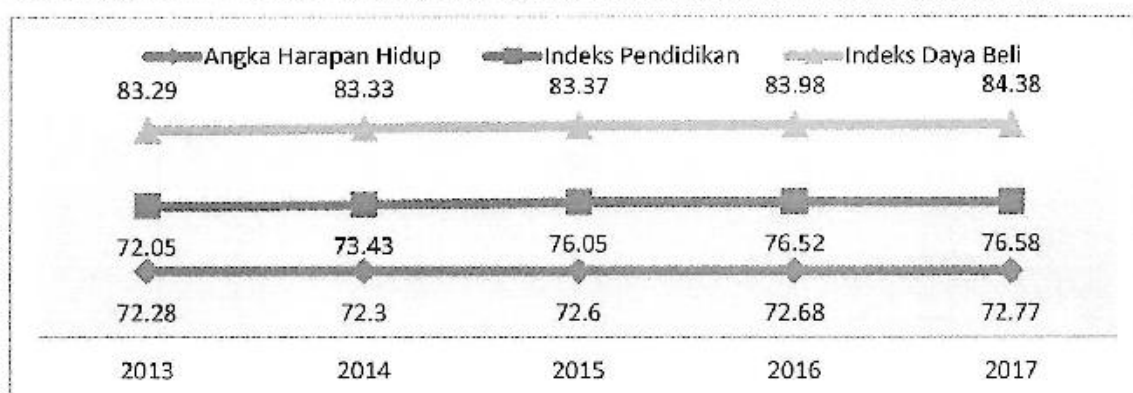
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kota ini meningkat tinggi. Melebihi IPM di Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Adapun besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang Tahun 2014-2017 pada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Nilai IPM Kota Malang dan Komponennya Tahun 2014 – 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1.	IPM	78,96	80,05	80,46	80,65
2.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,30	72,60	72,68	72,77
3.	EYS / Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,47	15,23	15,38	15,39
4.	MYS / Angka Rata-Rata Lamanya Sekolah (Tahun)	9,97	10,13	10,14	10,15
5.	Pengeluaran Per Kapita / Kemampuan Daya Beli (Ribu Rp)	15.399	15.420	15.732	15.939

Sumber : BPS Kota Malang, 2017

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diiringi dengan daya saing perekonomian, meluasnya eksibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh, Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan berbagai upaya, di antaranya melalui peningkatan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Hal ini dapat terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia, baik di sektor pendidikan, kesehatan maupun daya beli. Masing-masing komponen tersebut pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup bagus. Sehingga IPM Kota Malang mengalami kenaikan secara signifikan.



Gambar 2.21

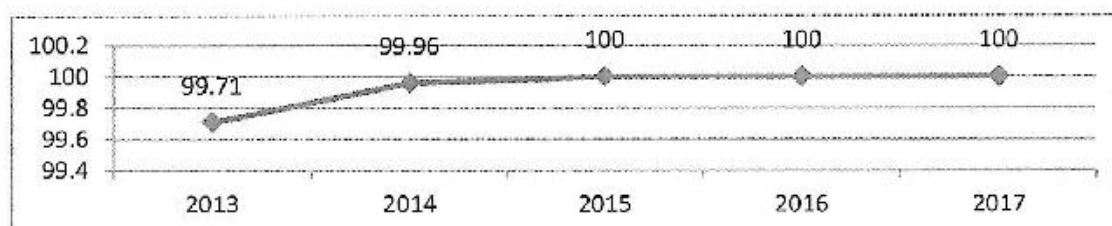
Capaian Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Kota Malang, 2017

B. Aspek Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan capaian indikator angka melek huruf (AMH) di Kota Malang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.22

Perkembangan Capaian Indikator Angka Melek Huruf
Kota Malang Tahun 2013-2017

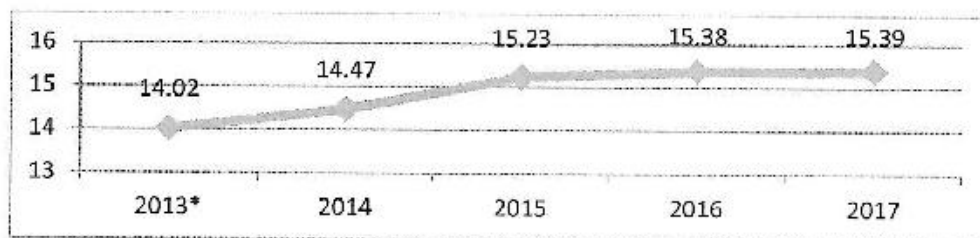
Sumber: BPS Kota Malang, 2018

Capaian indikator angka melek huruf di Kota Malang pada tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2013 capaian angka melek huruf di Kota Malang sebesar 99,71%. Di tahun 2014 capaian angka melek huruf di Kota Malang sebesar 99,96%. Pada tahun 2015-2017 capaian angka melek huruf Kota Malang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni telah mencapai 100%. Artinya seluruh penduduk Kota Malang telah melek huruf atau tidak ada lagi yang buta aksara. Hal ini merupakan sebuah prestasi bagi Pemerintah Kota Malang. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Malang, terutama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang yakni lebih pada pengoptimalan pendidikan informal dengan memperbanyak kelompok belajar pada Taman Baca Masyarakat (TBM) maupun melalui sekolah kesetaraan (Paket A). Namun keberhasilan penduduk Kota Malang yang melek huruf ini juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan keluarga.

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Perkembangan capaian indikator angka harapan lama sekolah di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 angka harapan lama sekolah Kota Malang diproyeksikan sebesar 14,02 tahun. Pada tahun 2014 angka

harapan lama sekolah Kota Malang yakni 14,47 tahun. Capaian angka harapan lama sekolah di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 15,23 tahun di tahun 2015. Sedangkan di tahun 2016 capaian angka harapan lama sekolah di Kota Malang yakni 15,38 tahun. Sedangkan di tahun 2017 capaian angka harapan lama sekolah di Kota Malang yakni 15,39 tahun. Artinya penduduk usia sekolah jenjang SD s/d SMA/SMK/Sederajat di Kota Malang telah memiliki harapan lama sekolah hingga jenjang menengah atas.



Gambar 2.23
Perkembangan Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah
Kota Malang Tahun 2013-2017

**) angka proyeksi*

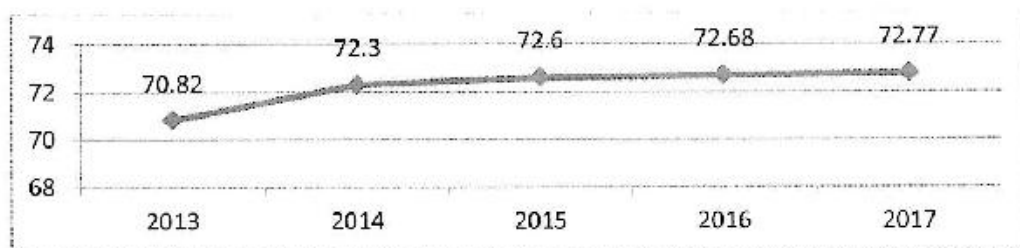
Sumber: BPS Kota Malang, Tahun 2018

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa capaian indikator rata-rata lama sekolah pada tahun 2013-2017 mengalami peningkatan, Pada tahun 2013 angka RLS diproyeksikan sebesar 8,98 tahun. Pada tahun 2014 angka RLS yakni 9,97 tahun. Pada tahun 2015 angka RLS yakni 10,13 tahun. Tahun 2016 angka RLS yakni 10,14 tahun. Pada tahun 2017 angka RLS menjadi 10,15 tahun. Meskipun demikian capaian ini masih belum mampu mencapai RLS 12 tahun. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari ketidaktercapaiannya RLS 12 tahun, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan, yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalannya biaya pendidikan menjadi kendala selanjutnya. Padahal lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

2. Usia Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup (AHH) merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas. Perkembangan capaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Malang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

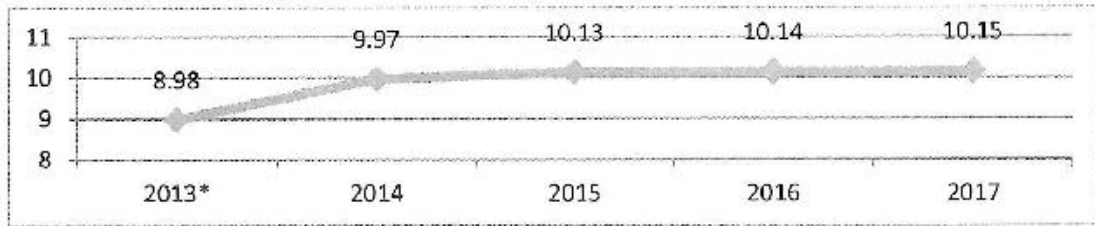


Gambar 2.26
Perkembangan Capaian Indikator Angka Harapan Hidup (AHH)
Di Kota Malang Tahun 2013-2017
Sumber: BPS Kota Malang, 2018

Pada tahun 2013 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Malang yakni 70,28 tahun. Pada tahun 2014 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Malang yakni 72,3 tahun. Pada tahun 2015 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 72,6 tahun. Pada tahun 2016 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 72,68 tahun. Pada tahun 2017 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 72,77 tahun. Hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan dasar yang meliputi penyediaan sarana prasarana, pelayanan dan kesadaran masyarakat di Kota Malang sudah meningkat.

D. Pengeluaran Per Kapita

Capaian indikator pengeluaran per kapita di Kota Malang pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2014 capaian pengeluaran per kapita di Kota Malang sebesar Rp. 15.399 ribu. pada tahun 2015 capaian pengeluaran per kapita di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi Rp 15.420 ribu. Pada tahun 2016 capaian pengeluaran per kapita di Kota Malang juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 15.732 ribu. Pada tahun 2017 capaian pengeluaran per kapita di Kota Malang kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 15.939 ribu.

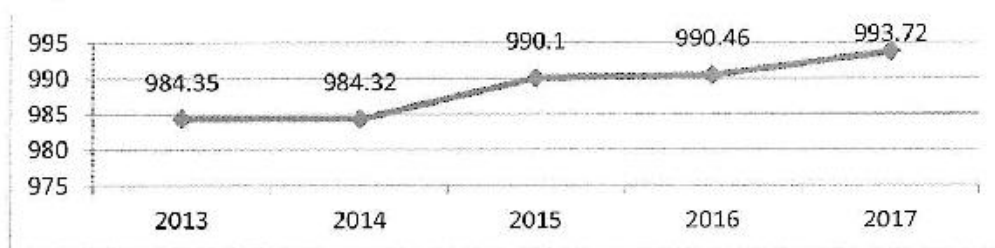


Gambar 2.24
Perkembangan Capaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kota Malang Tahun 2013-2017
*) angka proyeksi
Sumber: BPS Kota Malang

C. Aspek Kesehatan

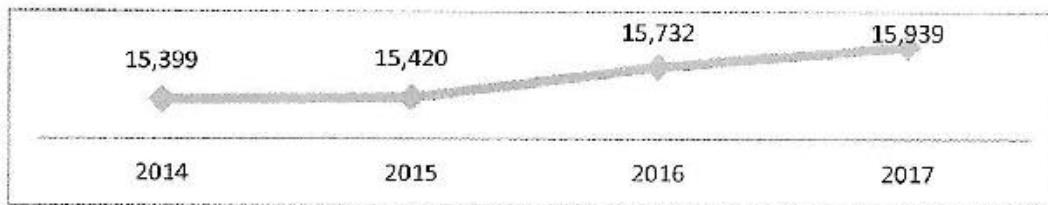
1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi dapat diketahui dari indikator angka kematian bayi (AKB). Perkembangan capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Malang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.25
Perkembangan Capaian Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Di Kota Malang Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2018

Capaian angka kelangsungan hidup bayi di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 capaian angka kelangsungan hidup bayi di Kota Malang sebesar 984,35 per 1.000 KH. Pada tahun 2014 capaian angka kelangsungan hidup bayi di Kota Malang sebesar 984,32 per 1.000 KH. Pada tahun 2015 angka kelangsungan hidup bayi di Kota Malang mengalami penurunan menjadi 990,10 per 1.000 KH. Pada tahun 2016 angka kelangsungan hidup bayi di Kota Malang mengalami kenaikan menjadi 990,46 per 1.000 KH. Pada tahun 2017 angka kelangsungan hidup bayi di Kota Malang mengalami kenaikan menjadi 993,72 per 1.000 KH.

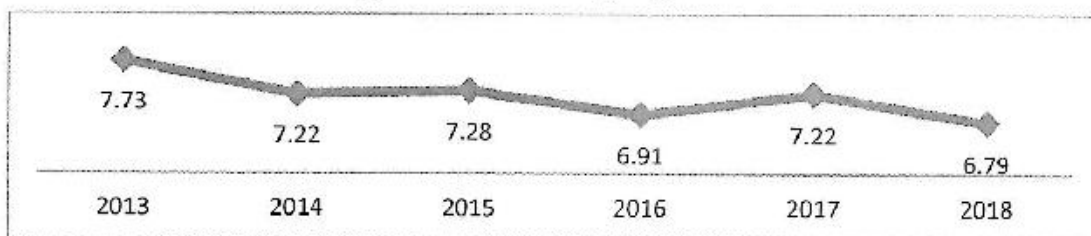


Gambar 2.27
Pengeluaran Per Kapita di Kota Malang Tahun 2014-2017
Sumber: BPS Kota Malang, 2018

E. Aspek Tenaga Kerja

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran secara konseptual didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk usia kerja yang menganggur dengan total penduduk usia kerja yang termasuk kedalam angkatan kerja. Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Malang pada tahun 2013-2018 mengalami kondisi yang fluktuatif.

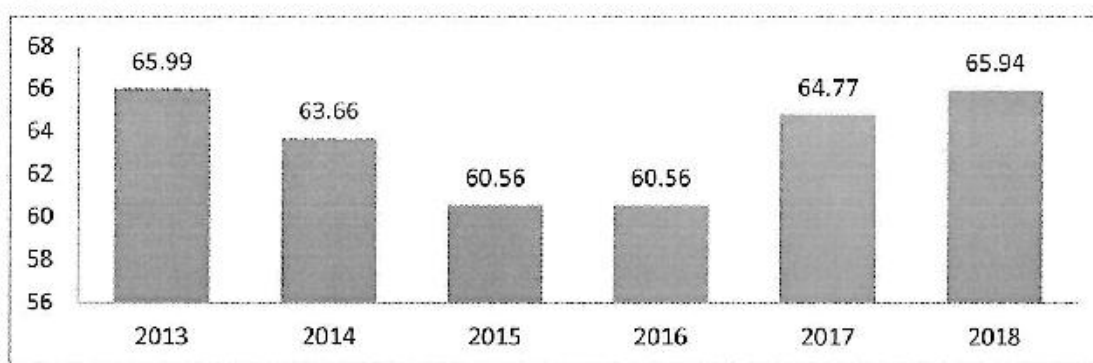


Gambar 2.28
Tingkat pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 2013-2018
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, 2018

Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang sebesar 7,73%. Pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang mengalami penurunan yakni menjadi 7,22%. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang mengalami peningkatan yakni menjadi 7,28%. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang mengalami penurunan yakni menjadi 6,91%. Pada tahun 2017 capaian tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang mengalami peningkatan yakni menjadi 7,22%. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang mengalami penurunan menjadi 6,79%. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2018, namun tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang masih dalam katogori tinggi, sebab masih berada di atas angka Provinsi Jawa Timur yakni 3,99% dan angka nasional yakni 5,34%.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang dikarenakan meningkatnya warga luar yang datang ke Kota Malang tanpa memiliki keterampilan khusus serta banyaknya mahasiswa lulusan Perguruan Tinggi di Kota Malang yang masih mencari pekerjaan di Kota Malang. Selain itu tingkat persaingan yang tinggi dan cukup terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru juga memberikan kontribusi akan tingkat pengangguran yang ada.

Sedangkan dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Malang pada tahun 2013 s/d tahun 2018 mengalami kondisi yang fluktuatif. Adapun perkembangan capaian kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Malang dapat dilihat pada gambar berikut:



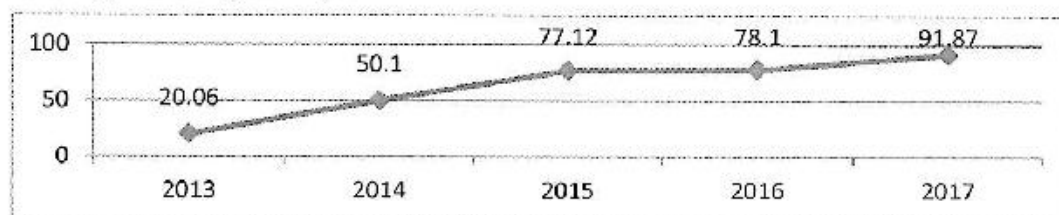
Gambar 2.29
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Malang
Tahun 2013-2018
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, 2018

Apabila mengacu pada tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Malang pada tahun 2013 s/d tahun 2018 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Malang sebesar 65,99%. Pada tahun 2014 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Malang sebesar 63,66%. Pada tahun 2015 s/d 2016 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Malang sebesar 60,56%. Pada tahun 2017 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Malang sebesar 64,77%. Pada tahun 2018 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Malang sebesar 65,94%.

F. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Perkembangan pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Malang pada tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami kondisi

yang baik, yakni mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Malang mencapai 20,06. Pada tahun 2014 pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Malang mencapai 50,1. Pada tahun 2015 pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Malang mencapai 77,12. Pada tahun 2016 pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Malang mencapai 78,1. Selanjutnya pada tahun 2017 pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Malang mencapai 91,87.



Gambar 2.30

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Malang
Tahun 2013-2017

Sumber Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, 2018

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas fokus seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Pembangunan di bidang seni, budaya dan olahraga merupakan suatu hal yang sangat penting. Sebab hal ini berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat serta menunjukkan sebuah jati diri dari suatu daerah. Analisis kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator berikut:

Tabel 2.11

(T-A.12)

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013 s.d 2017
Kota Malang

No	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	162	45	45	45*	46*
2.	jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	145	174	180	185	185

*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2015 serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, 2018

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum ini menjelaskan terkait dengan layanan urusan pemerintahan wajib, baik dasar maupun non dasar; layanan urusan pilihan dan layanan urusan penunjang.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

Pada urusan wajib Pemerintah Daerah Kota Malang dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Adapun urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

A. Pendidikan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pendidikan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Pendidikan							
1.	APK PAUD	%	69,3	64,01	82,39	84,28	86,09
2.	Angka Partisipasi Kasar						
a.	APK SD/MI/Paket A	%	99,63	93,92	95,99	95,86	105,89
b.	APK SMP/MTs/Paket B	%	92,71	93,16	76,83	85,13	100,22
3.	Angka partisipasi murni						
a.	APM SD/MI/Paket A	%	88,92	82,46	85,87	82,79	95,81
b.	APM SMP/MTs/Paket B	%	67,07	68,9	58,52	62,99	81,51
4.	Angka Partisipasi sekolah						
a.	APS SD/MI/Paket A	%	107,34	126,65	104,2	105,36	72,87
b.	APS SMP/MTs/Paket B	%	82,89	121,33	104,37	106,35	104,87
5.	Angka Putus Sekolah						
a.	APS SD/MI	%	0,05	0,06	0,66	0,06	0,04
b.	APS SMP/MTs	%	0,19	0,42	0,22	0,18	0,09
6.	Angka Melanjutkan						
a.	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	%	105,5	93,84	104,61	115,15	112
b.	AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	141,81	99,9	157,29	106,55	103,48
8.	Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	27,8*	27,97	42,45	81,47	86,59

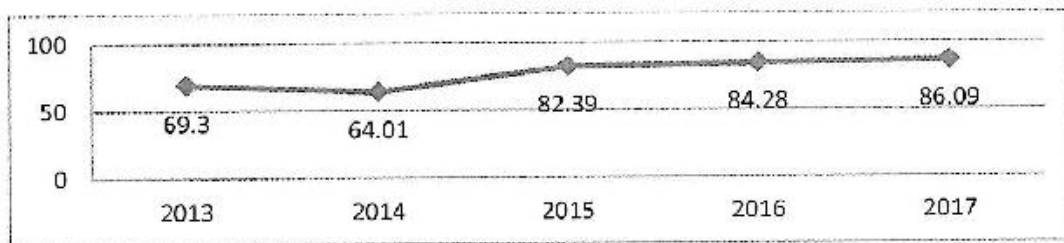
*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018

1. APK PAUD

PAUD terbagi menjadi 2 jenjang yaitu PAUD Non Formal adalah TPA, KB, dan SPS, sedangkan PAUD Formal adalah TK. Keberhasilan program ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi peningkatan IPM (indeks pembangunan manusia) Indonesia. Program yang dijalankan Dinas Pendidikan Kota Malang adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tujuan strategis, pemerataan akses pendidikan formal dan non formal.

Adapun tingkat capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dapat dilihat pada grafik berikut ini:



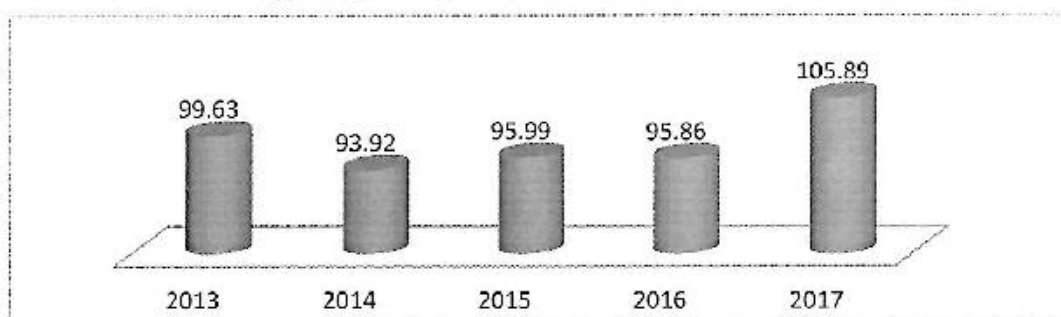
Gambar 2.31
Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD
Di Kota Malang Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pencapaian indikator APK PAUD (anak usia 0 – 6 tahun) di tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 dapat terealisasi sebesar 69,3%. Pada tahun 2014 dapat terealisasi sebesar 64,01%. Jika dibanding dengan tahun 2014, persentase kinerja tahun 2015 memperoleh kenaikan capaian yang sangat signifikan, yakni sebesar 82,39%. Kenaikan capaian indikator APK PAUD meningkat terus hingga tahun 2017. Pada tahun 2016 APK PAUD di Kota Malang sebesar 84,28%. Pada tahun 2017 APK PAUD di Kota Malang sebesar 86,09%. Peningkatan kinerja tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan untuk meningkatkan jumlah layanan PAUD formal maupun nonformal dengan memperluas akses layanan PAUD yang mengacu program pemerintah dengan satu desa satu layanan PAUD melalui penambahan dana bantuan biaya operasional PAUD dan sosialisasi ke masyarakat juga semakin ditingkatkan dengan menggalakkan PAUD di masyarakat luas, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, pengadaan alat praktik dan

peraga siswa, rehabilitasi gedung, penguatan kurikulum serta pembinaan kesiswaan PAUD di Kota Malang. Namun permasalahan yang terjadi masih banyak lembaga PAUD di Kota Malang yang belum terakreditasi.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Capaian indikator kinerja angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kota Malang sebesar 99,63%. Pada tahun 2014 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kota Malang sebesar 93,92%. Pada tahun 2015 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kota Malang sebesar 95,99%. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kota Malang sebesar 95,86%. Capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 angka partisipasi kasar SD/MI di Kota Malang sebesar 105,89%. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016. APK SD/MI yang tidak melebihi 100% ini, karena banyak siswa yang dari luar kota Malang yang menjadi peserta didik di Kota Malang.

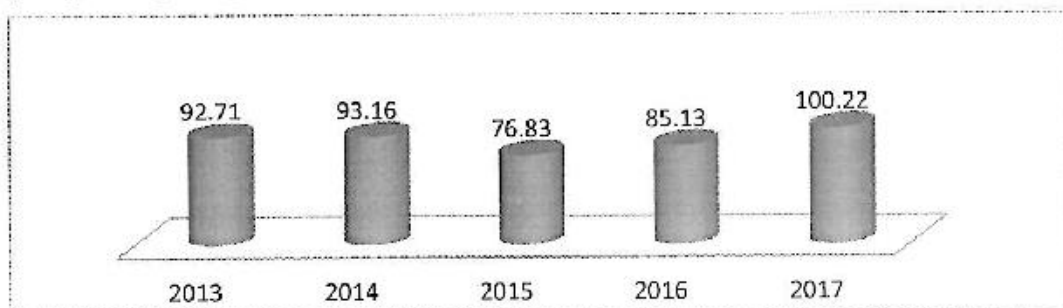


Gambar 2.32
Capaian Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A
Di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018

Capaian indikator kinerja angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kota Malang sebesar 92,71%.

Pada tahun 2014 angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kota Malang sebesar 93,16%. Pada tahun 2015 angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kota Malang sebesar 76,83%. Capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kota Malang sebesar 85,13%. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kota Malang sebesar 100,22%. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Meskipun demikian capaian pada tahun 2013-2017 belum mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kekurangan siswa sekolah pada tingkat SMP. Siswa dimaksud adalah siswa pada umumnya baik warga asli kota Malang maupun warga pendatang yang menempuh pendidikan di SMP, tanpa dibatasi oleh usia sekolah. APK SMP/MTs/Paket B yang tidak melebihi batas maksimal 100% ini, karena banyak siswa yang dari luar kota Malang yang menjadi peserta didik di Kota Malang.

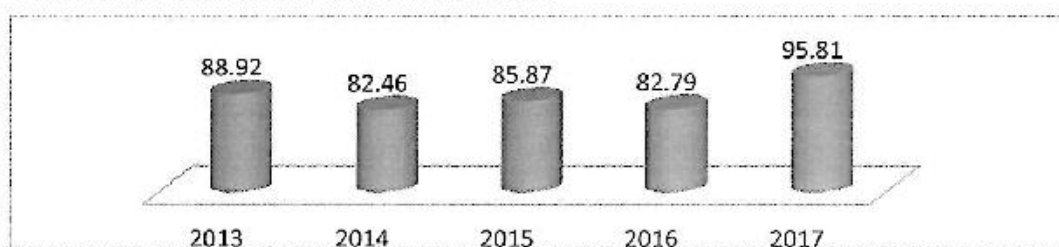


Gambar 2.33
Capaian Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
Di Kota Malang Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada usia yang sama. Capaian indikator kinerja angka partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 angka partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kota Malang sebesar 88,92%. Pada tahun 2014 angka partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kota

Malang sebesar 82,46%. Pada tahun 2015 angka partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kota Malang sebesar 85,87%. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 angka partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kota Malang sebesar 82,79%. Capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 angka partisipasi murni SD/MI di Kota Malang sebesar 95,81%. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Kecenderungan penurunan capaian angka partisipasi murni SD/MI/Paket A di Kota Malang kemungkinan disebabkan karena sebagian orang tua siswa menyekolahkan putra/putrinya di sekolah luar Kota Malang yang berdekatan dengan tempat tinggalnya terutama yang domisilinya di pinggiran Kota Malang atau penduduk usia sekolah, mengikuti orangtua pindah keluar kota namun tidak tercatat pada data kependudukan.



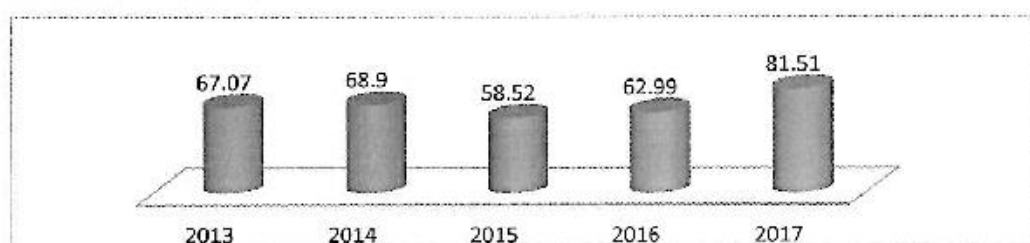
Gambar 2.34

Capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A
Di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018

Capaian indikator kinerja angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kota Malang sebesar 67,07%. Pada tahun 2014 angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kota Malang sebesar 68,9%. Pada tahun 2015 angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kota Malang sebesar 58,52%. Capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kota Malang sebesar 62,99%. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 angka partisipasi murni

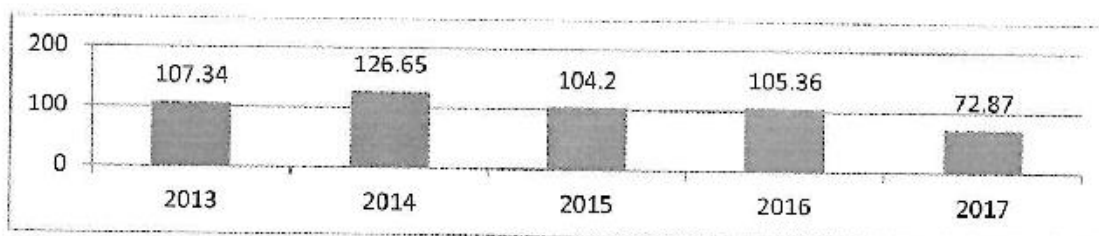
SMP/MTs/Paket B di Kota Malang sebesar 81,51%. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Kecenderungan penurunan capaian angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B di Kota Malang kemungkinan disebabkan karena sebagian orang tua siswa menyekolahkan putra/putrinya di sekolah luar Kota Malang yang berdekatan dengan tempat tinggalnya terutama yang domisilinya di pinggiran kota Malang dan ada pula yang menyekolahkan di lain daerah atau di Pondok Pesantren.



Gambar 2.35
 Capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B
 Di Kota Malang Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018

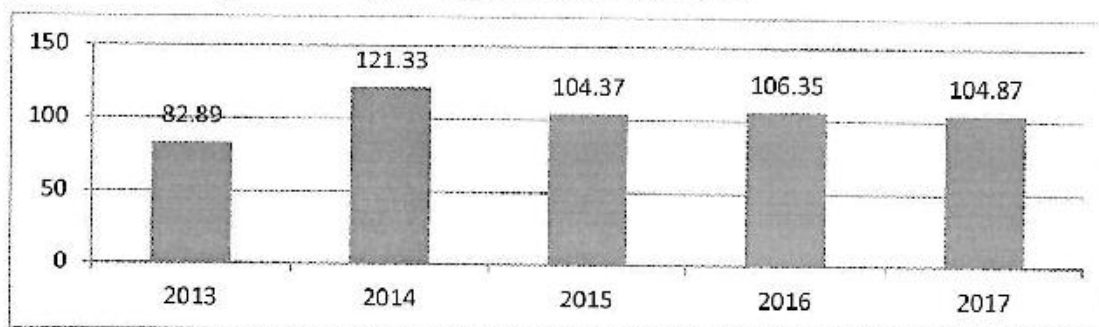
4. Angka Partisipasi Sekolah

Adapun capaian indikator kinerja angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI/Paket A di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI/Paket A di Kota Malang pada tahun 2013 sebesar 107,34%. Angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI/Paket A di Kota Malang pada tahun 2014 sebesar 126,65%. Pada tahun 2015 angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI/Paket A di Kota Malang sebesar 104,2%. Capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI/Paket A di Kota Malang sebesar 105,36%. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI/Paket A di Kota Malang sebesar 72,87%. Capaian pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016.



Gambar 2.36
 Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD/MI/Paket A
 Di Kota Malang Tahun 2013-2017
 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018

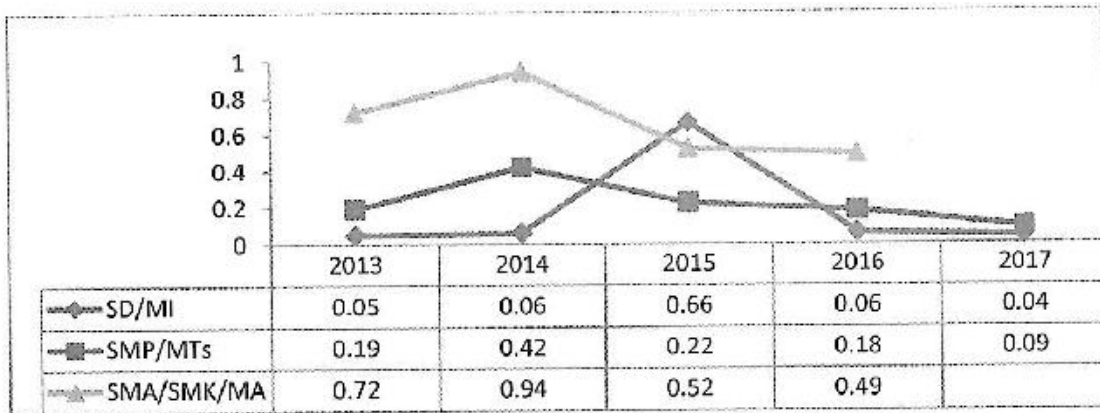
Capaian indikator kinerja angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs/Paket B di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs/Paket B di Kota Malang pada tahun 2013 sebesar 82,89%. Angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs/Paket B di Kota Malang pada tahun 2014 sebesar 121,33%. Pada tahun 2015 angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs/Paket B di Kota Malang sebesar 104,37%. Capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs/Paket B di Kota Malang sebesar 106,35%. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs/Paket B di Kota Malang sebesar 104,87%. Capaian pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016.



Gambar 2.37
 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B
 Di Kota Malang Tahun 2013-2017
 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018

5. Angka Putus Sekolah

Capaian Indikator Angka Putus Sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Malang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2.38

Capaian Angka Putus Sekolah di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa angka putus sekolah tingkat SD/MI mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,05%. Pada tahun 2014 angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,06%. Pada tahun 2015 angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,66%. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014. Pada tahun 2016 angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,06%. Capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015. Pada tahun 2017 angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,04%. Capaian pada tahun 2017 berhasil diturunkan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016.

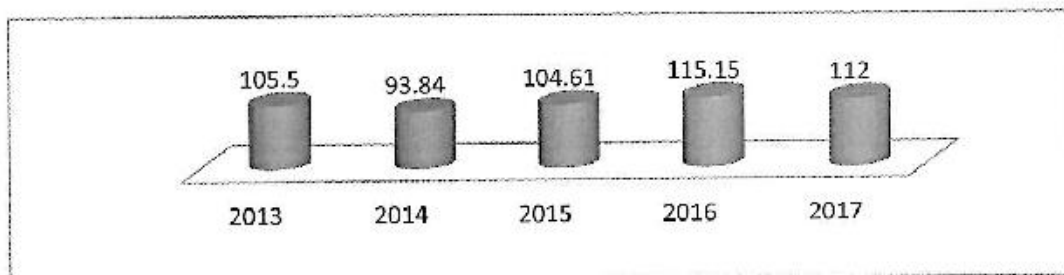
Sedangkan angka putus sekolah tingkat SMP/MTs juga mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,19%. Pada tahun 2014 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,42%. Pada tahun 2015 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,22%. Pada tahun 2016 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,18%. Pada tahun 2017 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,09%. Capaian pada tahun 2017 berhasil diturunkan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016.

Sedangkan angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA juga mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,72%. Pada tahun 2014 angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,94%. Pada tahun 2015 angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA sebesar

0,52%. Capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,49%. Capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015.

6. Angka Melanjutkan

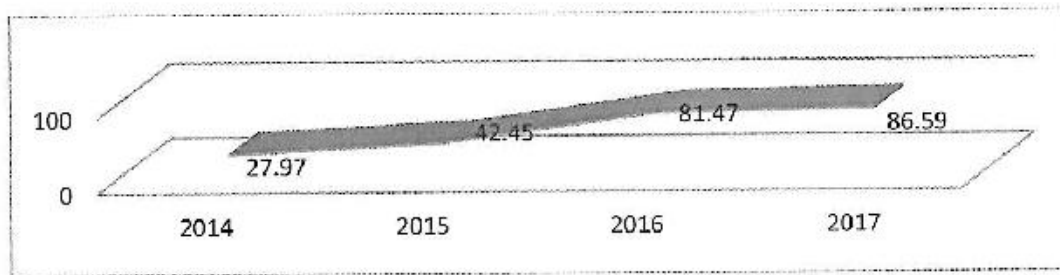
Adapun capaian indikator angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS di Kota Malang sebesar 105,5%. Pada tahun 2014 angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS di Kota Malang sebesar 93,84%. Pada tahun 2015 angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS di Kota Malang sebesar 104,61%. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS di Kota Malang sebesar 115,15%. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS di Kota Malang sebesar 112%. Capaian pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016.



Gambar 2.39
Capaian Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS
Di Kota Malang Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018

7. Persentase Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik

Program sertifikasi ini akan dapat dilihat seberapa besar guru dalam menguasai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dengan adanya indikator ini maka akan dapat diketahui berapa jumlah sekolah yang sudah memiliki guru yang kompeten dan profesional.



Gambar 2.40
 Capaian Persentase Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik
 Di Kota Malang Tahun 2014-2017
 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja “Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik” tahun 2014 sebesar 27,97% yakni sebanyak 4.630 orang guru SD/MI yang sudah mendapatkan sertifikasi dari 14.219 orang guru. Kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dari jumlah total guru sebanyak 14.219 orang, yang bersertifikat mencapai 6.036 orang atau 42,45%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka pada tahun 2015 mengalami peningkatan capaian sangat signifikan. Pada tahun 2016 indikator kinerja “Persentase guru sebesar 81,47%. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali jika dibandingkan dengan capaian 2015. Pada tahun 2017 indikator kinerja “Persentase guru sebesar 86,59%. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali jika dibandingkan dengan capaian 2016. Penurunan capaian ini karena kurang dukungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Malang dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Kota Malang.

B. Kesehatan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kesehatan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.13
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Kesehatan							
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000/KH	15,65	15,68	9,9	9,54	6,28
2.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000/KH	149,75	97,97	68,24	75,29	120,43

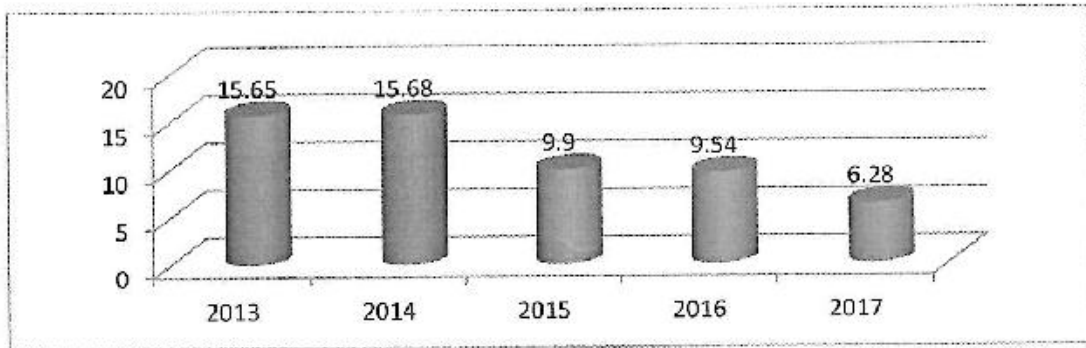
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
3.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk (tiap 1.000 penduduk)	per 1.000 penduduk	1,771	0,12	0,17	0,14	0,14
4.	Rasio Rumah sakit terhadap penduduk (tiap 10.000 penduduk)	per 10.000 penduduk	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29
5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	0,29	0,28	1,57	1,36	1,38
6.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	89,47	82,46	66,67	71,93	82,46
7.	Cakupan penemuan pasien Baru TBC BTA Positif	%	68,11	59,2	54,2	62,1	64,7
8.	Penemuan Jumlah Kasus HIV/AIDS						
a.	Jumlah Kasus HIV	Kasus	130	466	305	310	N/A
b.	Jumlah Kasus AIDS	Kasus	306	225	263	200	N/A
9.	Cakupan Puskesmas	Puskesmas	300	300	300	300	320
10.	Cakupan puskesmas pembantu	%	57,89	57,89	57,89	57,89	57,89

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2018

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Apabila menggunakan satuan per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian bayi (AKB) Kota Malang pada tahun pada tahun 2013 AKB Kota Malang mencapai 15,65 per 1.000 kelahiran hidup, artinya dalam setiap 1.000 kelahiran yang dilaporkan, terdapat kematian bayi antara 15 hingga 16 bayi. Pada tahun 2014 AKB Kota Malang mencapai 15,68 per 1.000 kelahiran hidup, artinya dalam setiap 1.000 kelahiran yang dilaporkan, terdapat kematian bayi antara 15 hingga 16 bayi. Pada tahun 2015 AKB Kota Malang mencapai 9,9 per 1.000 kelahiran hidup, artinya dalam setiap 1.000 kelahiran yang dilaporkan, terdapat kematian bayi antara 9 hingga 10 bayi. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan angka kematian bayi pada tahun 2014. Pada Tahun 2016 AKB Kota Malang mencapai 9,54 per 1.000 kelahiran hidup, artinya dalam setiap 1.000 kelahiran yang dilaporkan, terdapat kematian bayi antara 9 hingga 10 bayi. Angka ini menurun sedikit jika dibandingkan dengan angka tahun 2015. Pada Tahun 2017 AKB Kota Malang mencapai 6,28 per 1.000 kelahiran hidup, artinya dalam setiap 1.000 kelahiran yang dilaporkan, terdapat kematian bayi antara 6 hingga 10 bayi. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan angka tahun 2016.

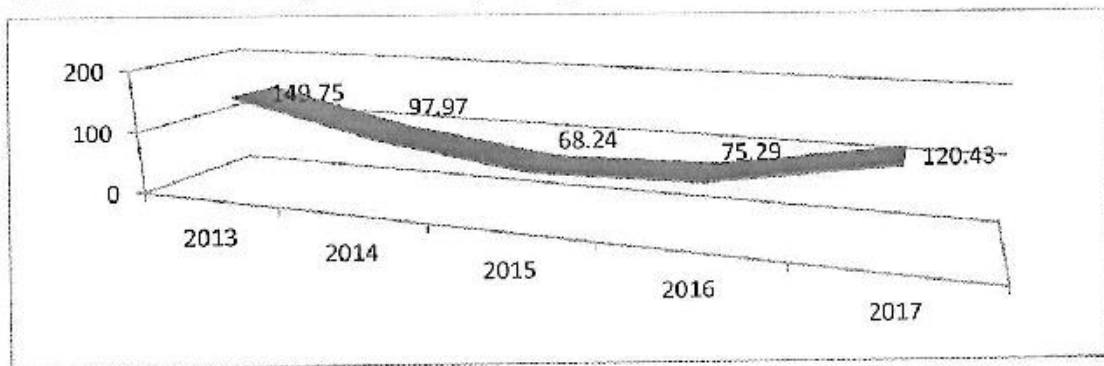
Perkembangan kematian bayi di Kota Malang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.41
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)
Per 1.000 Kelahiran Hidup
Di Kota Malang Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2018

2. Angka Kematian Ibu

Kasus kematian yang menjadi perhatian khusus dalam bidang kesehatan adalah kematian ibu. Perkembangan kasus kematian ibu selama 5 tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



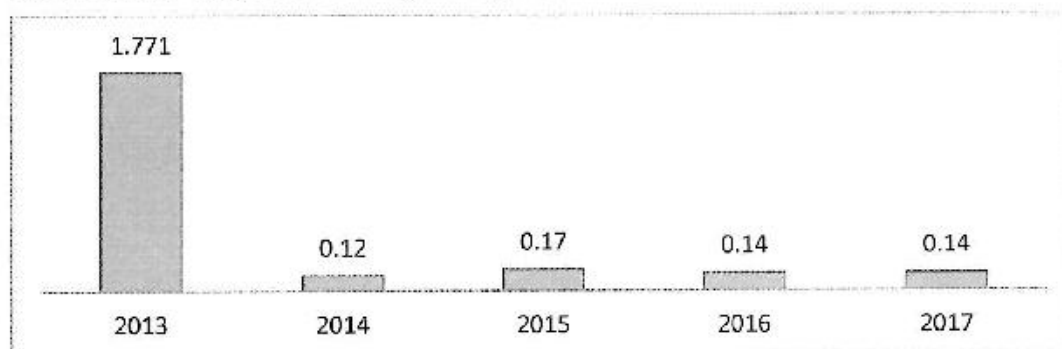
Gambar 2.42
Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000
Kelahiran Hidup Di Kota Malang Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2014-2016

Apabila menggunakan satuan per 100.000 kelahiran hidup angka kematian ibu dilaporkan pada tahun 2013 mencapai 149,75 per 100.000 kelahiran. Artinya dalam setiap 100.000 kelahiran hidup terjadi kematian ibu antara 149 - 150 kasus. Pada tahun 2014 mencapai 97,97 per 100.000 kelahiran. Artinya dalam setiap 100.000 kelahiran hidup terjadi kematian ibu antara 97 - 98 kasus. Pada tahun 2015, angka kematian ibu mencapai 68,24 per 100.000 kelahiran. Artinya dalam setiap 100.000 kelahiran hidup terjadi kematian ibu antara 68 - 69 kasus. Pada tahun 2016 angka kematian ibu mencapai 75,29 per 100.000 kelahiran. Artinya dalam setiap 100.000 kelahiran hidup terjadi kematian ibu antara 75-76 kasus, Pada tahun 2017 angka kematian ibu mencapai 120,43 per

100.000 kelahiran. Artinya dalam setiap 100.000 kelahiran hidup terjadi kematian ibu antara 120-121 kasus.

3. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk (Tiap 1.000 Penduduk)

Puskesmas dalam perkembangannya diupayakan terus meningkat dari sisi kualitas dan kuantitas. Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Malang pada tahun 2013 yakni 1,771 per 100.000 penduduk. Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Malang pada tahun 2014 yakni 0,12 per 100.000 penduduk. Artinya setiap 100.000 penduduk di Kota Malang dilayani oleh 1 puskesmas. Pada tahun 2015 rasio puskesmas, poliklinik dan pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Malang yakni 0,17 per 100.000 penduduk. Artinya setiap 100.000 penduduk di Kota Malang dilayani oleh 1 puskesmas. Dari tahun 2016 hingga tahun 2018 (triwulan ke 2) rasio puskesmas, poliklinik dan pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Malang sama yakni 0,14 per 100.000 penduduk. Artinya setiap 100.000 penduduk di Kota Malang dilayani oleh 1 puskesmas. Perkembangan capaian rasio posyandu per satuan balita di Kota Malang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

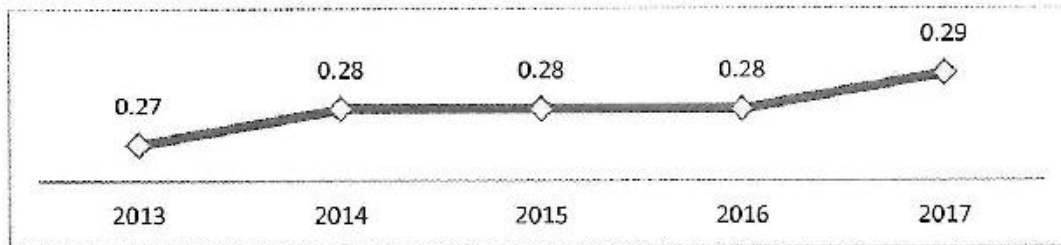


Gambar 2.43
Presentase Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk
Di Kota Malang Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2018

4. Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk (Tiap 10.000 Penduduk)

Perkembangan rasio rumah sakit terhadap penduduk cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 rasio rumah sakit terhadap penduduk yakni 0,27 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014 hingga tahun 2016 rasio rumah sakit terhadap

penduduk yakni 0,28 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2017 rasio rumah sakit terhadap penduduk yakni 0,29 per 100.000 penduduk.



Gambar 2.44

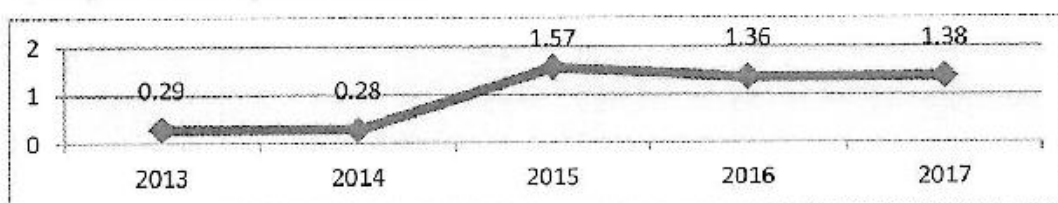
Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk (Tiap 10.000 penduduk)
Di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2018

Pada tahun 2014 dan 2015 jumlah Rumah sakit umum di Kota Malang berjumlah 10 RS yang terdiri dari 1 RS Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 1 RS TNI/POLRI, 1 RS BUMN dan 7 RS swasta. Sedangkan Rumah Sakit Khusus berjumlah 13 RS. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah rumah sakit. Rumah sakit umum di Kota Malang pada tahun 2016 berjumlah 12 RS yang terdiri dari 1 RS Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 1 RS TNI/POLRI, 1 RS BUMN, 1 RS Pemerintah Kab/Kota dan 8 RS swasta. Sedangkan Rumah Sakit Khusus berjumlah 12 RS.

5. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk)

Perkembangan capaian rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Malang mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Malang yakni 0,29 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2014 rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Malang yakni 0,28 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2015 rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Malang mengalami peningkatan yakni 1,57 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2016 rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Malang mengalami penurunan yakni 1,36 per 1.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2017 rasio tenaga medis persatuan penduduk di Kota Malang mengalami peningkatan yakni 1,38 per 1.000 penduduk.

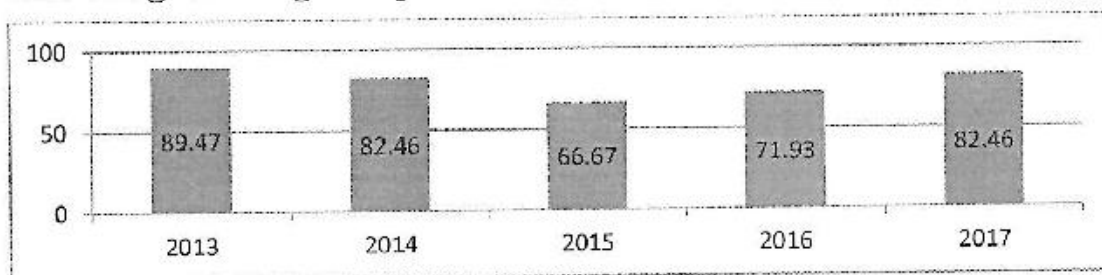


Gambar 2.45
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Malang Tahun
2013-2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2018

6. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan proyeksi terhadap cakupan atas imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi. Selama tahun 2013 Kota Malang mencapai 89,47% kelurahan UCI. Selama tahun 2014 Kota Malang mencapai 82,46% kelurahan UCI. Pada tahun 2014 capaian UCI di beberapa kelurahan dan puskesmas sudah baik, dimana di beberapa puskesmas telah mencapai 100%. Puskesmas dengan capaian UCI 100% antara lain adalah Puskesmas Gribig, Ciptomulyo, Mulyorejo, Arjuno, Bareng, Rampal Celaket, Cisadea, Kendalkerep dan Mojolangu. Sedangkan selama tahun 2015 Kota Malang mencapai 66,67% kelurahan UCI. Cakupan ini menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Penurunan tersebut dikarenakan terdapat 2 puskesmas dengan capaian kelurahan UCI nol, yaitu Puskesmas Bareng dan Puskesmas Arjowinangun. Sedangkan selama tahun 2016 Kota Malang mencapai 71,93% kelurahan UCI. Cakupan ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Sebab hanya terdapat 1 puskesmas dengan capaian kelurahan UCI nol, yaitu Puskesmas Bareng. selama tahun 2017 Kota Malang mencapai 82,46% kelurahan UCI. Cakupan ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016.



Gambar 2.46
Perkembangan Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization*
(UCI) di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Profil Kesehatan Kota Malang Tahun 2014-2016

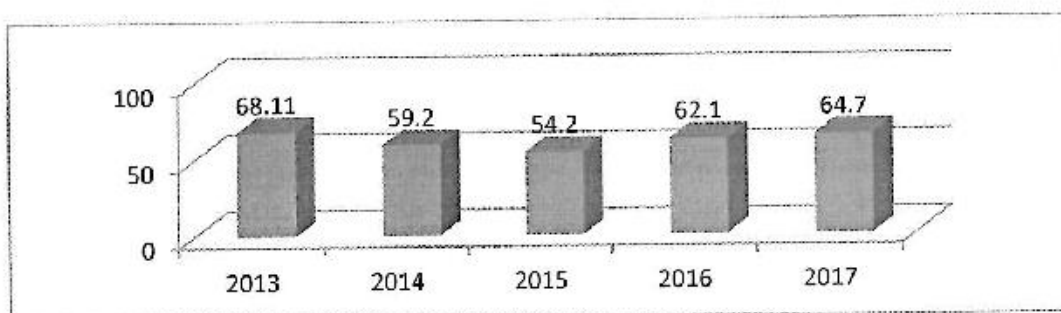
7. Cakupan penemuan pasien Baru TBC BTA Positif

Cakupan penemuan pasien baru TBC BTA Positif tahun 2013 mencapai 68,11 per 100.000 penduduk. Jumlah kasus baru BTA + selama tahun 2014 mencapai 537 kasus (6,79%), dengan penderita

laki-laki berjumlah 275 orang dan wanita berjumlah 262 orang. Sedangkan total kasus TB (suspek) adalah 7.913 kasus, termasuk didalamnya adalah BTA - dan hasil rontgen +. Adapun CNR (*case notification rate*) kasus TB paru adalah 59,2 per 100.000 penduduk. Artinya selama tahun 2014 jumlah pasien baru TB paru yang ditemukan berkisar antara 59 orang di setiap 100.000 penduduk Kota Malang.

Jumlah kasus baru BTA + selama tahun 2015 mencapai 489 kasus (6,50%), dengan penderita laki-laki berjumlah 284 orang dan wanita berjumlah 205 orang. Sedangkan total kasus TB (suspek) adalah 7.524 kasus, termasuk didalamnya adalah BTA - dan hasil rontgen +. Adapun CNR (*case notification rate*) kasus TB paru adalah 54,2 per 100.000 penduduk. Artinya selama tahun 2015 jumlah pasien baru TB paru yang ditemukan berkisar antara 54 orang di setiap 100.000 penduduk Kota Malang.

Jumlah kasus baru BTA + selama tahun 2016 mencapai 573 kasus (6,90%), dengan penderita laki-laki berjumlah 326 orang dan wanita berjumlah 247 orang. Sedangkan total kasus TB (suspek) adalah 8.304 kasus, termasuk didalamnya adalah BTA - dan hasil rontgen +. Adapun CNR (*case notification rate*) kasus TB paru adalah 62,1 per 100.000 penduduk. Artinya selama tahun 2016 jumlah pasien baru TB paru yang ditemukan berkisar 62 orang di setiap 100.000 penduduk Kota Malang. Adapun CNR (*case notification rate*) kasus TB paru adalah 64,7 per 100.000 penduduk. Artinya selama tahun 2017 jumlah pasien baru TB paru yang ditemukan berkisar 64-65 orang di setiap 100.000 penduduk Kota Malang



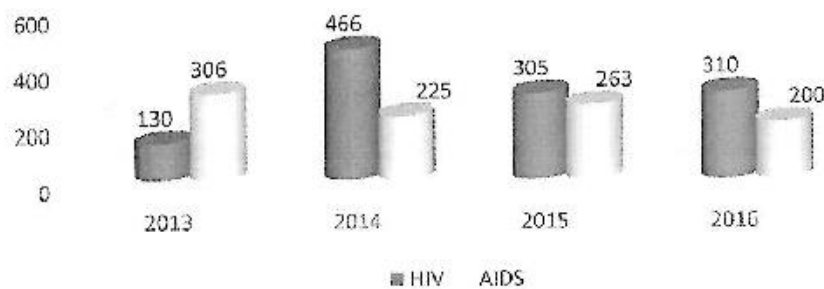
Gambar 2.47

Cakupan penemuan pasien Baru TBC BTA Positif
di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2018

8. Jumlah Kasus HIV/AIDS

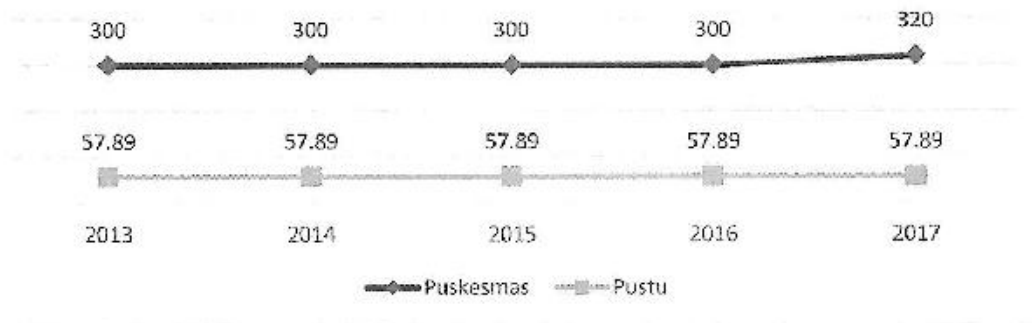
Penderita HIV yang terdata di Kota Malang pada tahun 2013 mencapai 130 orang. Penderita HIV yang terdata di Kota Malang pada tahun 2014 mencapai 466 orang. Penderita HIV yang terdata di Kota Malang pada tahun 2015 mengalami peningkatan yakni mencapai 305 orang. Penderita HIV yang terdata di Kota Malang pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali mencapai 310 orang. Sedangkan penderita AIDS mencapai 306 orang di tahun 2013 dan menurun menjadi 225 orang di tahun 2014. Penderita AIDS yang berada di Kota Malang pada tahun 2015 mengalami peningkatan yakni mencapai 263 orang. Penderita AIDS yang berada di Kota Malang pada tahun 2016 mengalami penurunan yakni mencapai 200 orang. Kebanyakan penderita HIV/AIDS di Kota Malang adalah kaum laki-laki.



Gambar 2.48
Perkembangan Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kota Malang
Tahun 2013-2016
Sumber: Profil Kesehatan Kota Malang Tahun 2014-2016

9. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas di Kota Malang pada lima tahun terakhir, yakni tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013-2016 cakupan puskesmas di Kota Malang mencapai 300 per satuan penduduk. Cakupan tersebut mengalami peningkatan di tahun 2017 yakni menjadi 320 per satuan penduduk. Sedangkan cakupan puskesmas pembantu di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang stabil yakni 57,89 per satuan penduduk.



Gambar 2.49
Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Malang
Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2018

Puskesmas dalam perkembangannya diupayakan terus meningkat dari sisi kualitas dan kuantitas. Jumlah puskesmas di Kota Malang hingga tahun 2013 tetap berjumlah 15 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Setiap kecamatan terdapat 3 buah puskesmas. Dari jumlah tersebut 4 puskesmas berstatus sebagai puskesmas perawatan dan 11 puskesmas sebagai puskesmas non perawatan. Puskesmas perawatan di Kota Malang adalah Puskesmas Kedungkandang, Kendalsari, Dinoyo dan Kendalkerep. Semua puskesmas yang ada di Kota Malang hingga tahun 2014 memiliki laboratorium kesehatan. Namun hanya empat puskesmas yang dapat memberikan pelayanan gawat darurat karena seluruhnya adalah puskesmas perawatan, yaitu Puskesmas Kedungkandang, Puskesmas Kendalsari, Puskesmas Dinoyo dan Puskesmas Kendalkerep. Sedangkan jumlah puskesmas pembantu adalah 33 pustu.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
A. Pekerjaan Umum							
1.	Persentase jalan kota dalam kondisi baik	%	90,59	97,9	98,2	98,59	85,04

2.	Persentase drainase kota dalam kondisi baik	%	97	58,8	68,6	72,77	81,49
3.	Prosentase Keluarga yang memiliki air minum layak	%	84*	85	86	87	92
B. Penataan Ruang							
1.	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	%	90	83	90	100	100
2.	Prosentase Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	%		0	7	12	14,66

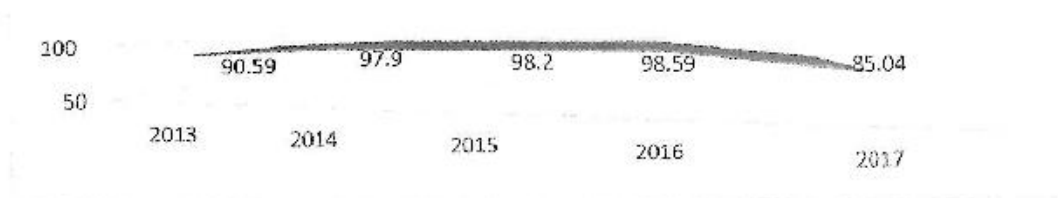
*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, 2018

Pekerjaan Umum

1. Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik

Adapun capaian indikator persentase jalan kota dalam kondisi baik selama kurun waktu 5 tahun terakhir yakni tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 persentase jalan kota dalam kondisi baik sebesar 90,59%. Pada tahun 2014 persentase jalan kota dalam kondisi baik sebesar 97,9% atau sepanjang 136,56 km. Pada tahun 2015 persentase jalan kota dalam kondisi baik sebesar 98,2% atau sepanjang 140,78 km. Capaian pada tahun 2015 menalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 persentase jalan kota dalam kondisi baik sebesar 98,59 atau sepanjang 143,24 km. Sedangkan pada tahun 2017 persentase jalan kota dalam kondisi baik sebesar 85,04% atau sepanjang 477,44 km.



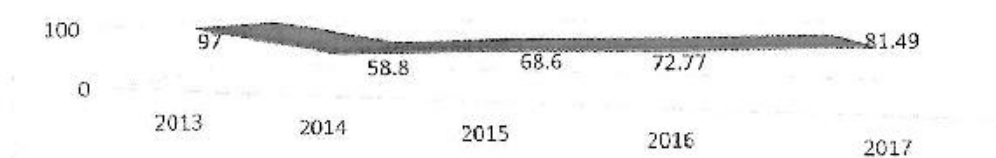
Gambar 2.50
Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik
di Kota Malang Tahun 2013 -2017

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, 2018

2. Persentase Drainase Kota dalam Kondisi Baik

Pada tahun 2013 persentase drainase Kota Malang dalam kondisi baik sebesar 97%. Pada tahun 2014 persentase drainase Kota Malang dalam kondisi baik sebesar 58,8%. Pada tahun 2015 persentase drainase Kota Malang dalam kondisi baik sebesar 68,6%. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 persentase drainase kota Malang dalam Kondisi baik dari 210,57 km Panjang Drainase di

Kota Malang, setelah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi 153,24 km drainase atau 72,77% Drainase Kota Malang sudah dalam kondisi baik. Artinya bahwa capaian pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 persentase drainase Kota Malang dalam kondisi baik sebesar 81,49%. Namun selama tahun 2017 DPUPR Kota Malang hanya melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan drainase / Gorong-gorong dan saluran irigasi sepanjang 13.850,3 meter. Meskipun tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan panjang drainase yang ada DPUPR mengambil peran pada Drainase primer yang akan sangat berpengaruh pada penyelesaian masalah genangan yang terjadi di Kota Malang.



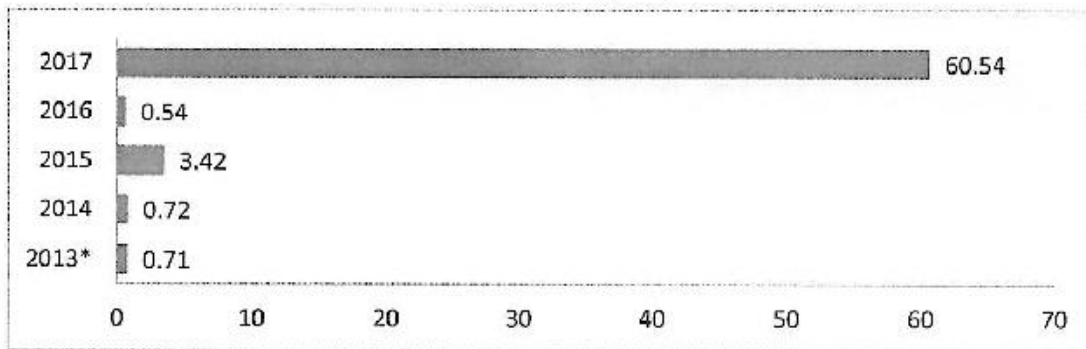
Gambar 2.51
Persentase Drainase Kota dalam Kondisi Baik
di Kota Malang Tahun 2013 -2017

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, 2018

3. Prosentase Keluarga yang Memiliki Air Minum Layak

Pemerintah Kota Malang melalui DPUPR Kota Malang dalam penyediaan dan pemenuhan akses ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat. Pada tahun 2013 persentase keluarga yang memiliki air minum layak di Kota Malang diproyeksikan sebesar 84%. Pada tahun 2014 persentase keluarga yang memiliki air minum layak di Kota Malang meningkat menjadi 85%. Pada tahun 2015 persentase keluarga yang memiliki air minum layak di Kota Malang meningkat menjadi 86%. Pada tahun 2016 persentase keluarga yang memiliki air minum layak di Kota Malang meningkat menjadi 87%. Pada tahun 2017 persentase keluarga yang memiliki air minum layak di Kota Malang meningkat menjadi 92%. Target 100% akses Air Minum layak bagi masyarakat pada tahun 2018 yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam program 100-0-100 pada tahun 2018 masih perlu upaya keras dari pemerintah kota malang yang baru menargetkan sebesar 90% Keluarga terlayani air minum di tahun 2017. Kendala yang terjadi yakni masih ada daerah yang

Adapun pencapaian indikator sasaran persentase PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif.



Gambar 2.59
Persentase PMKS yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial di Kota Malang Tahun 2013-2017

**) angka proyeksi*

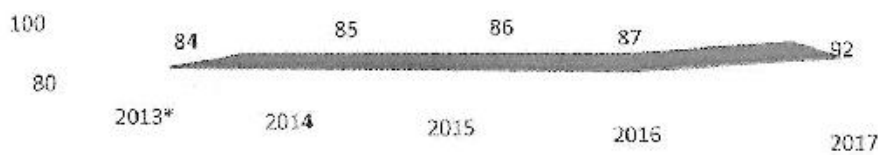
Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, 2018

Pada tahun 2013 persentase PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial di Kota Malang diproyeksikan sebesar mencapai 0,71%. Pada tahun 2014 persentase PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial di Kota Malang mencapai 0,72% atau 200 orang PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial. Pada tahun 2015 persentase PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial di Kota Malang mencapai 3,42% atau 90 orang PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014. Pada tahun 2016 persentase PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial di Kota Malang mencapai 0,54% atau 290 orang PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial. Capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 persentase PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial di Kota Malang sebesar 60,54%. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016.

4. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Adapun pencapaian indikator persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah

berada di kawasan perkampungan sulit mendapatkan akses jaringan PDAM.



Gambar 2.52
Persentase Keluarga yang Memiliki Air Minum Layak
di Kota Malang Tahun 2013 -2017

*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, 2018

Berdasarkan hasil analisis kajian Dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:50) bahwa terhadap daya dukung lingkungan dan ambang batas jasa ekosistem penyedia air didahului dengan menghitung kebutuhan dan ketersediaan jasa ekosistem penyedia air. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki kapasitas penyediaan air bersih dari *Water Tank* PDAM sebanyak 40.271 m³ yang tersedia dari Pemerintah Kota Malang melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang. Kebutuhan air di Kota Malang yang terus meningkat, namun sumber-sumber air permukaan di Kota Malang terbatas. Hal tersebut meningkatkan pemanfaatan air tanah di Kota Malang hingga lebih dari 50% menggunakan air tanah, yang pada dasarnya air tanah tidak dianjurkan terus menerus.

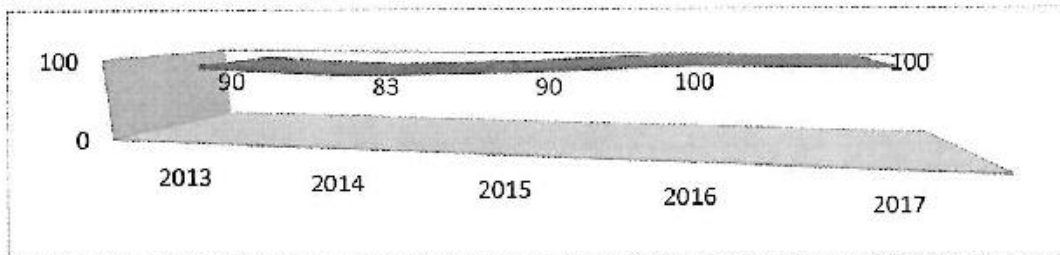
Ketersediaan air di Kota Malang tersebar di beberapa titik lokasi yang memiliki debit air terbanyak ada di Kecamatan Kedungkandang. Peta tersebut menunjukkan warna biru tua mengartikan sangat tinggi ketersediaan air. Sedangkan kecamatan yang memiliki ketersediaan air yang rendah ada di Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing. Dari persebaran ketersediaan air Kota Malang tersebut yang hanya beberapa titik dimanfaatkan untuk masyarakat oleh PDAM Kota Malang

Penataan Ruang

1. Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang Tertangani

Capaian indikator kinerja persentase jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani di Kota Malang pada tahun 2013 sebesar 90%. Pada tahun 2014 persentase jumlah pelanggaran tata ruang yang

tertangani di Kota Malang sebesar 83%. Pada tahun 2015 persentase jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani di Kota Malang sebesar 90%. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 hingga tahun 2017 persentase jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani di Kota Malang sebesar 100%. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015.



Gambar 2.53

Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang Tertangani di Kota Malang Tahun 2013 -2017

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, 2018

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.15

Hasil Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1.	Rasio rumah layak huni		99,85	80,92*	79,92*	78,92*	80
2.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	51*	53*	53*	53*	54
3.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	56,93*	57,83*	59,92*	60*	604,4

*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kota Malang, 2018

1. Rasio Rumah Layak Huni

Capaian indikator rasio rumah layak huni di Kota Malang pada tahun 2013 sebesar 99,85 namun hingga tahun 2017 capai tersebut menurun menjadi 80%.

2. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Capaian indikator Persentase lingkungan pemukiman kumuh di Kota Malang pada tahun 2017 sebesar 54%.

3. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Capaian indikator Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan di Kota Malang pada tahun 2017 sebesar 604,4%.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.16
Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

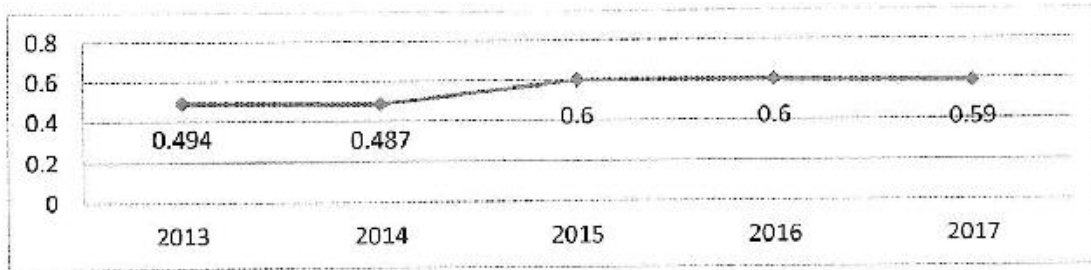
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1.	Rasio Pos Kamling per 100 KK		0,494	0,487	0,6	0,6	0,59
2.	Rasio petugas linmas per RT		0,63	0,48	0,63	0,67	0,67
3.	Cakupan Jumlah Konflik yang ermediasi (Konflik/Perkelahian Antar Kelompok Pemuda, Pelajar/Mahasiswa, Antar kampung)		22*	24	4	4	7

**) angka proyeksi*

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 2018

1. Rasio Pos Kamling per 100 KK

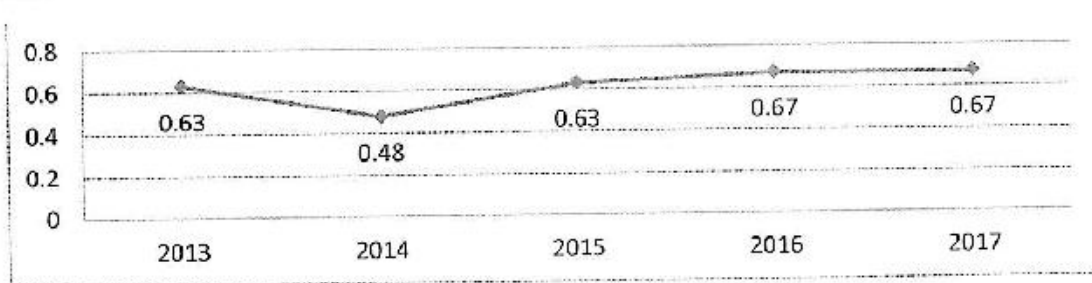
Dapat diketahui rasio pos kamling per 100 KK di Kota Malang Tahun 2013-2017 dalam setiap tahun mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 rasio pos kamling per 100 KK di Kota Malang sebesar 0,494. Pada tahun 2014 rasio pos kamling per 100 KK di Kota Malang sebesar 0,487. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 rasio pos kamling per 100 KK di Kota Malang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yakni menjadi 0,6. Pada tahun 2017 rasio pos kamling per 100 KK di Kota Malang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yakni menjadi 0,59. Namun belum adanya tambahan data pos kamling yang pendataan dilaksanakan oleh petugas linmas yang ada di setiap kelurahan.



Gambar 2.54
Cakupan Rasio Pos Kamling per 100 KK
Di Kota Malang Tahun 2013-2017
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 2018

2. Rasio Petugas Linmas per RT

Dapat diketahui rasio petugas linmas per RT di Kota Malang Tahun 2013-2017 dalam setiap tahun mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 rasio petugas linmas per RT di Kota Malang sebesar 0,63. Pada tahun 2014 rasio petugas linmas per RT di Kota Malang sebesar 0,48. Pada tahun 2015 rasio petugas linmas per RT di Kota Malang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yakni menjadi 0,63. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 rasio petugas linmas per RT di Kota Malang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yakni menjadi 0,67. Saat ini dilakukan pembinaan terhadap satuan linmas yang ada di kelurahan dan juga upaya pendataan petugas linmas setiap RT.

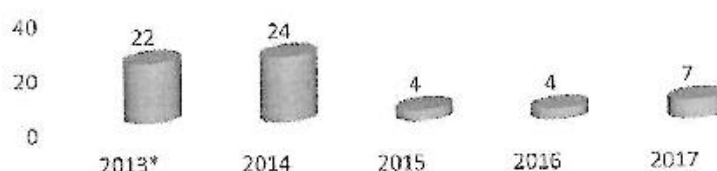


Gambar 2.55
Cakupan Rasio Petugas Linmas per RT
Di Kota Malang Tahun 2013-2017
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 2018

3. Jumlah Konflik yang Termediasi (Konflik/Perkelahian Antar Kelompok Pemuda, Pelajar / Mahasiswa, Antar Kampung)

Kejadian konflik/perkelahian antar kelompok pemuda, pelajar/mahasiswa, antar kampung di Kota Malang pada tahun 2013 hingga tahun 2017 selalu terjadi. Meskipun memang semua kejadian telah berhasil termediasi. Pada tahun 2013 jumlah

konflik/perkelahian antar kelompok pemuda, pelajar/mahasiswa, antar kampung di Kota Malang diproyeksikan sebanyak 22 kejadian dan seluruhnya berhasil dimediasi. Pada tahun 2014 jumlah konflik/perkelahian antar kelompok pemuda, pelajar/mahasiswa, antar kampung di Kota Malang sebanyak 24 kejadian dan seluruhnya berhasil dimediasi. Pada tahun 2015 konflik/perkelahian antar kelompok pemuda, pelajar/mahasiswa, antar kampung di Kota Malang sebanyak 4 kejadian dan berhasil termediasi. Jumlah kejadian pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kejadian pada tahun 2014. Pada tahun 2016 konflik/perkelahian antar kelompok pemuda, pelajar/mahasiswa, antar kampung di Kota Malang sebanyak 4 kejadian. Jumlah kejadian pada tahun 2016 masih sama dengan tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah konflik/perkelahian antar kelompok pemuda, pelajar/mahasiswa, antar kampung di Kota Malang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016, yaitu sebanyak 7 kejadian.



Gambar 2.56

Cakupan Jumlah Konflik yang Termediasi (Konflik/Perkelahian Antar Kelompok Pemuda, Pelajar / Mahasiswa, Antar Kampung) di Kota Malang Tahun 2013-2017

**) angka proyeksi*

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, 2018

F. Sosial

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan sosial Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.17
Hasil Kinerja Bidang Urusan Sosial
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

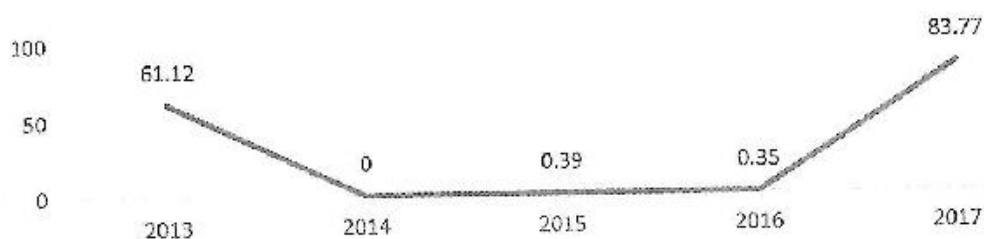
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Sosial							
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	%	61,12	0	0,39	0,35	83,77
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	22,26	23,45	23,45	1,35	83,77

	pemulihan/pengembangan kemampuan dan pelatihan ketrampilan						
3.	Persentase PMKS yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana Sosial	%	0,71*	0,72	3,42	0,54	60,54
4.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	5,76	9,22	1,35	1,35	1,3*
5.	Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina	%	36	35,94	35,94	1,35	0

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, 2018

1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial

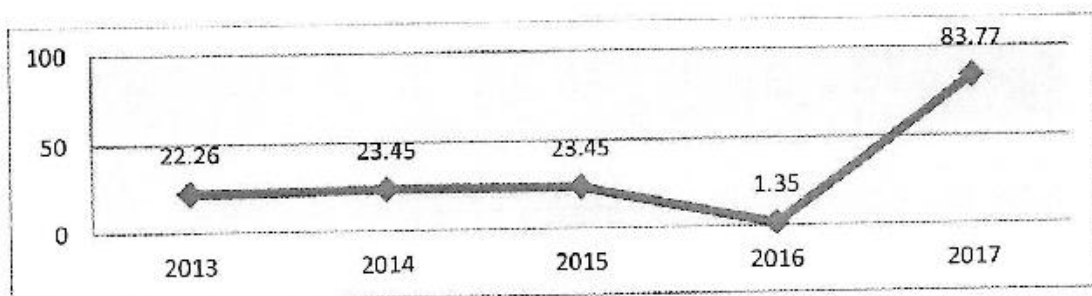
Adapun pencapaian indikator kinerja persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kota Malang tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kota Malang sebesar 61,12%. Pada tahun 2014 persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kota Malang sebesar 0%. Pada tahun 2015 persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kota Malang sebesar 0,39% atau 166 orang PMKS. Pada tahun 2016 persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kota Malang sebesar 0,35% atau 150 orang PMKS. Capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 capaian persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kota Malang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni mencapai 83,77% sebanyak 6438 penerima program keluarga, 31.502 penerima bantuan iuran daerah, dan sebanyak 242 orang terlantar yang dipulangkan.



Gambar 2.57
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial di Kota Malang Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, 2018

2. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Pemulihan/ Pengembangan Kemampuan dan Pelatihan Ketrampilan

Adapun pencapaian indikator kinerja persentase PMKS yang memperoleh bantuan pemulihan/ pengembangan kemampuan dan pelatihan ketrampilan di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 persentase PMKS yang memperoleh bantuan pemulihan/ pengembangan kemampuan dan pelatihan ketrampilan di Kota Malang sebesar 22,26%. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 persentase PMKS yang memperoleh bantuan pemulihan/ pengembangan kemampuan dan pelatihan ketrampilan di Kota Malang sebesar 23,45% atau 23.450 orang PMKS. Pada tahun 2016 persentase PMKS yang memperoleh bantuan pemulihan/ pengembangan kemampuan dan pelatihan ketrampilan di Kota Malang sebesar 1,35% atau 50 orang. Capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015. Pada tahun 2017 persentase PMKS yang memperoleh bantuan pemulihan/ pengembangan kemampuan dan pelatihan ketrampilan di Kota Malang sebesar 83,77% atau 48.182 orang. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016.



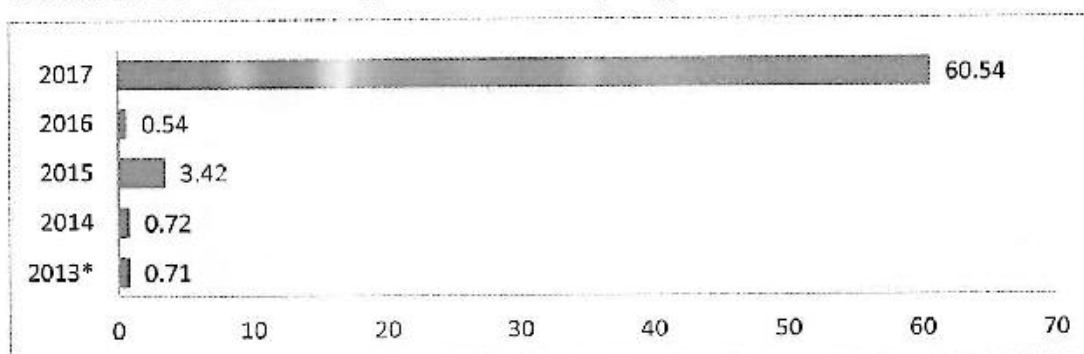
Gambar 2.58

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Pemulihan/ Pengembangan Kemampuan dan Pelatihan Ketrampilan di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, 2018

3. Persentase PMKS yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial

Adapun pencapaian indikator sasaran persentase PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif.



Gambar 2.59

Persentase PMKS yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial di Kota Malang Tahun 2013-2017

**) angka proyeksi*

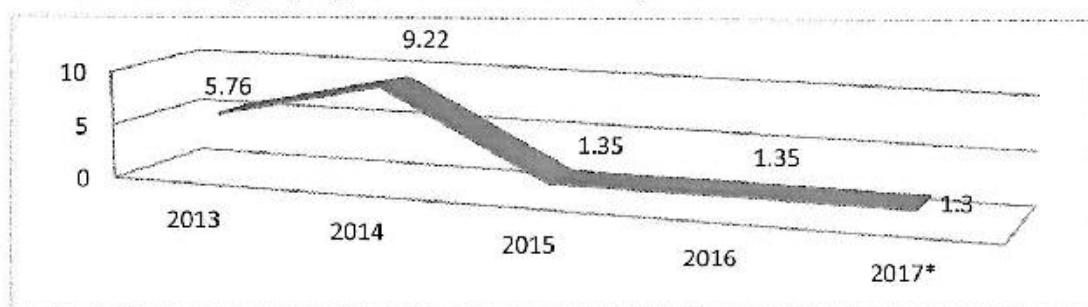
Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, 2018

Pada tahun 2013 persentase PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial di Kota Malang diproyeksikan sebesar mencapai 0,71%. Pada tahun 2014 persentase PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial di Kota Malang mencapai 0,72% atau 200 orang PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial. Pada tahun 2015 persentase PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial di Kota Malang mencapai 3,42% atau 90 orang PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014. Pada tahun 2016 persentase PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial di Kota Malang mencapai 0,54% atau 290 orang PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial. Capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 persentase PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sosial di Kota Malang sebesar 60,54%. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016.

4. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Adapun pencapaian indikator persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah

menerima jaminan sosial di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 capaian persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kota Malang sebesar 5,76%. Pada tahun 2014 capaian persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kota Malang sebesar 9,22%. Pada tahun 2015 hingga tahun 2016 capaian persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kota Malang sebesar 1,35% atau 50 orang. Pada tahun 2017 capaian persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kota Malang diproyeksikan sebesar 1,3%.



Gambar 2.60
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Malang Tahun 2013-2017

**) angka proyeksi*

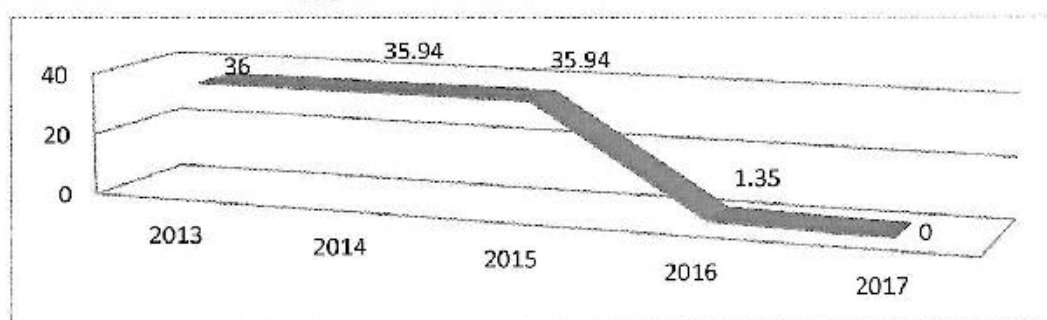
Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, 2018

Ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dengan pencapaian bukan berarti Dinas Sosial tidak berhasil dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial tetapi dikarenakan keterbatasan anggaran untuk bisa melaksanakan kegiatan pemberian jaminan sosial kepada penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.

5. Jumlah Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Penyandang Cacat dan Jompo yang Dibina

Adapun pencapaian indikator jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina di Kota

Malang pada tahun 2013 sebesar 36%. Persentase jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina di Kota Malang pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 35,94% atau 909 orang dari 2.529 orang. Presentase jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina di Kota Malang pada tahun 2016 sebesar 1,35%. Capaian presentase jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding pada tahun 2015.



Gambar 2.61

Persentase Jumlah Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Penyandang Cacat Dan Jompo Yang Dibina di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, 2018

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Adapun urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

A. Tenaga Kerja

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan tenaga kerja Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

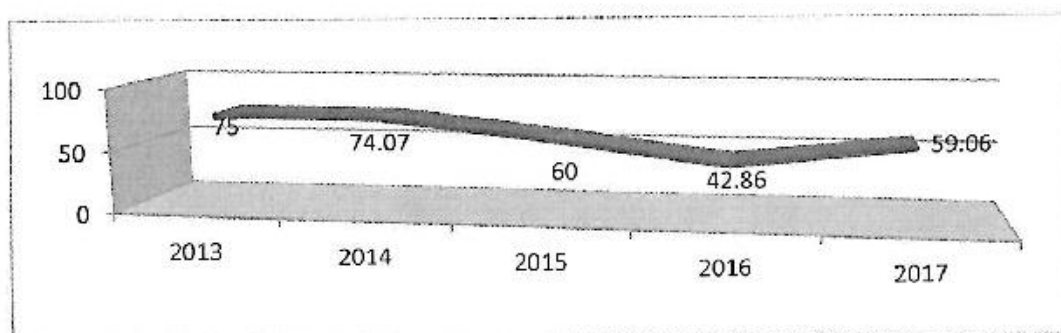
Tabel 2.18
Hasil Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Tenaga Kerja							
1.	Besaran tenaga kerja yang endapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	75	74,07	60,00	42,86	59,06
2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	71,05	80	86,49	72,92	59,06

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, 2018

1. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Capaian indikator kinerja besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 75%. Pada tahun 2014 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 74,07%. Pada tahun 2015 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 60%. Capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kota Malang sebesar 42,86%. Capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 59,06%. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016.



Gambar 2.62

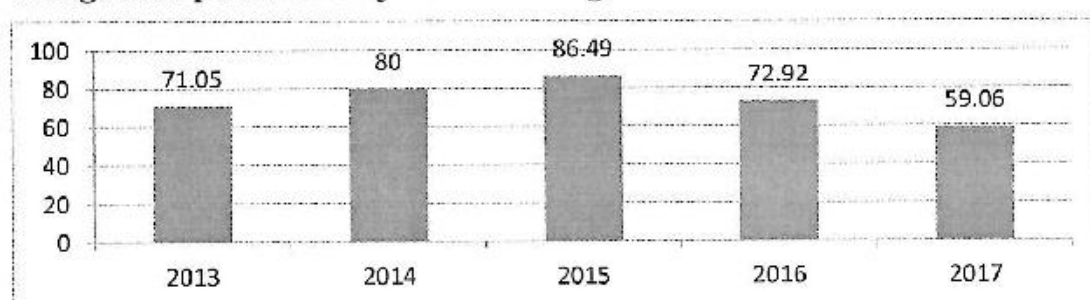
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, 2018

2. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Capaian indikator kinerja besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 71,05%. Pada tahun 2014 besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 80%. Pada tahun 2015 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 86,49%. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 Pada tahun 2016 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 72,92%. Capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan caapaian tahun 2015. Pada tahun 2017 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 59,06%. Capaian pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2016.



Gambar 2.63

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, 2018

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

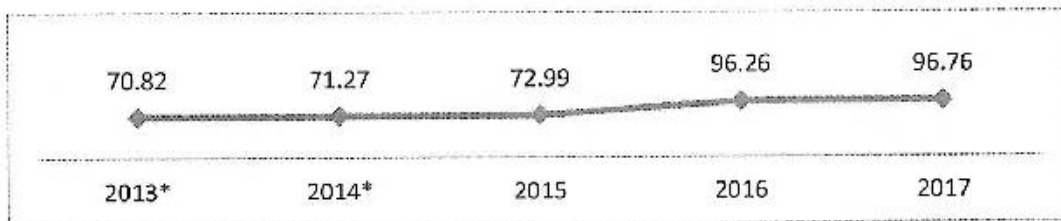
Tabel 2.19
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		70,82*	71,27*	72,99	96,26	96,76
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		70,82*	71,62*	72,99	74,87	74,87
3.	Persentase penanganan kasus tindakan KDRT	%	100	100	100	100	
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase organisasi perempuan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase Forum Anak yang Difasilitasi	%	10	83,33	83,33	83,33	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2018

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah perbandingan antara angka harapan hidup, lama sekolah dan pendapatan non buruh antara laki-laki dan perempuan. Capaian IPG di Kota Malang pada tahun 2013-2017 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2013 capaian IPG di Kota Malang diproyeksikan yakni 70,82. Pada tahun 2014 capaian IPG di Kota Malang diproyeksikan yakni 71,27. Pada tahun 2015 capaian IPG di Kota Malang masih tetap yakni 72,99. Pada tahun 2016 capaian IPG di Kota Malang sebesar 96,26. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 capaian IPG di Kota Malang sebesar 96,76. Capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016.

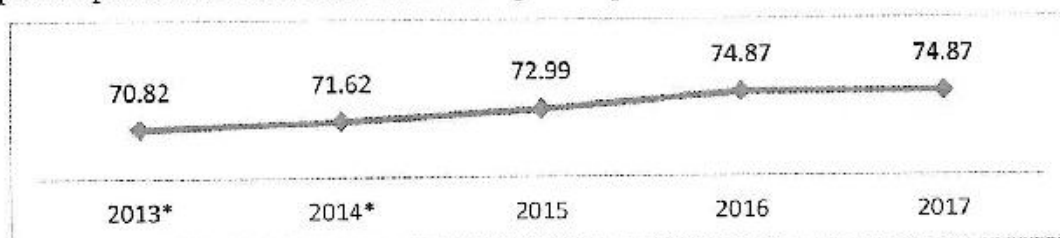


Gambar 2.64
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Malang
Tahun 2013-2017
*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2018

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 2.65
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Malang

Tahun 2013-2017

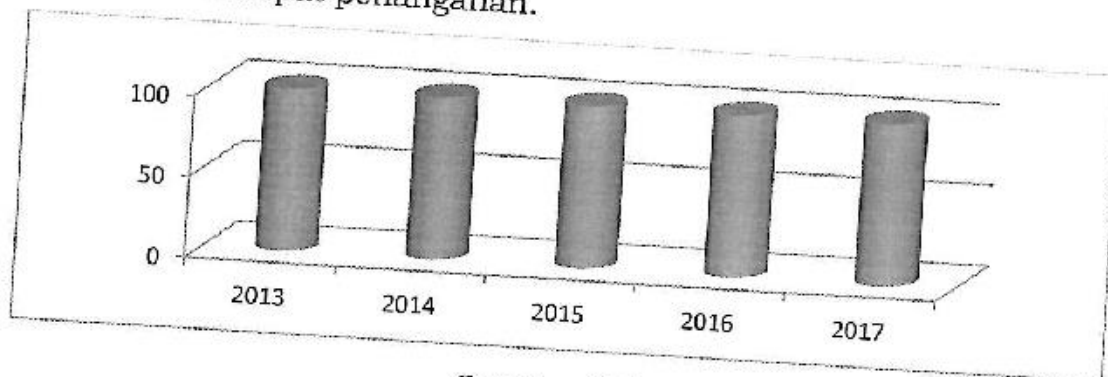
*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2018

Capaian IDG di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 capaian IDG di Kota Malang diproyeksikan sebesar 70,82. Pada tahun 2014 capaian IDG di Kota Malang diproyeksikan sebesar 71,62. Pada tahun 2015 capaian IDG di Kota Malang sebesar 72,99. Capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Pada tahun 2016 capaian IDG di Kota Malang sebesar 74,87. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 capaian IDG di Kota Malang masih tetap yakni 74,87.

3. Persentase Penanganan Kasus Tindakan KDRT

Capaian persentase penanganan kasus tindakan KDRT di Kota Malang pada tahun 2013-2017 menunjukkan tren yang positif, yakni telah berhasil mencapai 100%. Artinya seluruh kasus KDRT yang terjadi di Kota Malang pada tahun 2014 hingga tahun 2016 telah berhasil mendapat penanganan.



Gambar 2.66

Persentase Penanganan Kasus Tindakan KDRT

Di Kota Malang Tahun 2013-2017

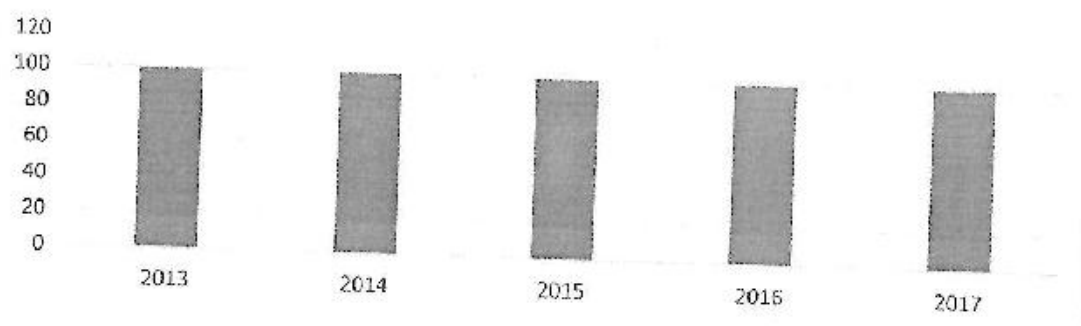
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2018

Pada tahun 2014 pengaduan/laporan KDRT di Kota Malang sebanyak 29 kasus KDRT dan semuanya sudah ditangani. Maka persentase penanganan kasus tindak KDRT di Kota Malang tahun 2014 sebesar 100%. Pada tahun 2015 pengaduan/laporan KDRT di

Kota Malang sebanyak 25 kasus KDRT dan semuanya sudah ditangani. Maka persentase penanganan kasus tindak KDRT di Kota Malang tahun 2015 sebesar 100%. Jumlah kasus KDRT pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah pengaduan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Penurunan jumlah kasus tersebut diindikasikan karena masyarakat semakin sadar bahwa tindakan KDRT akan berdampak hukum pidana bagi si pelaku tindak kekerasan. Pada tahun 2016 pengaduan/laporan KDRT di Kota Malang sebanyak 39 kasus KDRT dan semuanya sudah ditangani. Maka persentase penanganan kasus tindak KDRT di Kota Malang tahun 2016 sebesar 100%. Jumlah kasus KDRT pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah pengaduan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Kenaikan jumlah kasus tersebut diindikasikan karena masyarakat kurang memahami mengenai hukum pidana mengenai KDRT.

4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Capaian cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu di Kota Malang pada tahun 2013-2017 menunjukkan tren yang positif, yakni telah berhasil mencapai 100%. Pada tahun 2015 pengaduan yang masuk di Kota Malang sebanyak 25 kasus dan yang ditindaklanjuti juga 25 kasus. Pada tahun 2016 pengaduan yang masuk di Kota Malang sebanyak 39 kasus dan yang ditindaklanjuti juga 39 kasus. Pada tahun 2017 pengaduan yang masuk di Kota Malang sebanyak 70 kasus dan yang ditindaklanjuti juga 70 kasus.



Gambar 2.67

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Di Kota Malang Tahun 2013-2017

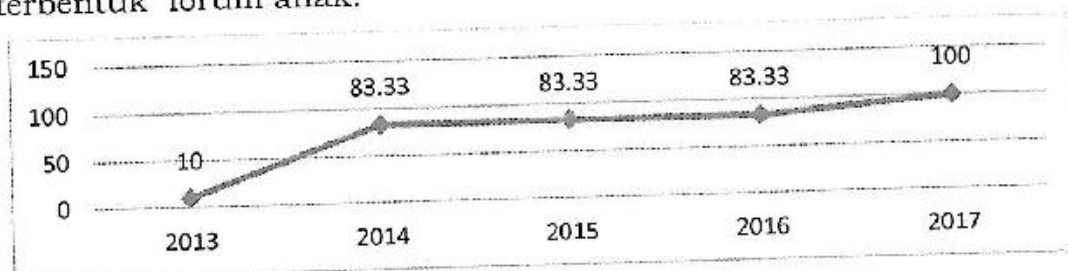
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2018

5. Persentase Organisasi Perempuan yang Difasilitasi

Pada tahun 2014 hingga tahun 2017 jumlah organisasi perempuan di Kota Malang terdapat 29 organisasi dan semuanya telah difasilitasi oleh BKBPM. Fasilitas yang diberikan termasuk dalam kegiatan Fasilitasi Organisasi Wanita di Kota Malang. Sehingga capaian persentase organisasi perempuan yang difasilitasi di Kota Malang pada tahun 2014-2017 sebesar 100%.

6. Persentase Forum Anak yang Difasilitasi

Di Kota Malang terdapat 6 forum anak yaitu 1 forum anak tingkat kota dan 5 forum anak tingkat kecamatan. Pada kegiatan forum anak di tahun 2013, DP3AP2KB memfasilitasi kegiatan forum anak di tingkat kecamatan dan kota, dengan capaian sebesar 10%. Pada kegiatan forum anak di tahun 2014-2016, DP3AP2KB memfasilitasi kegiatan forum anak di tingkat kecamatan dan kota, dengan capaian sebesar 83,33%. Sedangkan pada kegiatan forum anak tahun 2017, DP3AP2KB memfasilitasi kegiatan forum anak di tingkat kecamatan dan kota, sehingga capaian persentase forum anak yang difasilitasi pada tahun 2017 sebesar 100%. Selain itu, pada tahun 2017 juga mulai dibentuk forum anak tingkat kelurahan. Adapun pembentukan forum anak tingkat kelurahan masih dilakukan secara bertahap yaitu di 18 kelurahan di Kota Malang dan diharapkan pada beberapa tahun kedepan semua kelurahan sudah terbentuk forum anak.



Gambar 2.68
Presentase Forum Anak yang Difasilitasi di Kota Malang
Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2018

C. Pangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

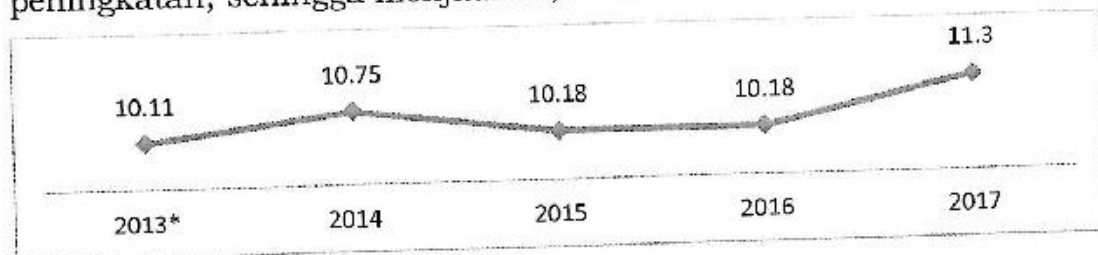
Tabel 2.20
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pangan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Pangan							
1.	Ketersediaan pangan utama (<i>food availability</i>)	%	10,11*	10,75	10,18	10,18	11,3
2.	Konsumsi dan keamanan pangan	Gizi/kapita/hari	1,91	1,97*	2,01*	2,6*	2,7*

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2018

1. Ketersediaan Pangan Utama

Adapun capaian kinerja ketersediaan pangan utama (*food availability*) di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 ketersediaan pangan utama (*food availability*) di Kota Malang diproyeksikan sebesar 10,11%. Pada tahun 2014 ketersediaan pangan utama (*food availability*) di Kota Malang sebesar 10,75%. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 ketersediaan pangan utama (*food availability*) di Kota Malang sebesar 10,18%. Capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2017 ketersediaan pangan utama (*food availability*) di Kota Malang mengalami peningkatan, sehingga menjadi 11,30%.



Gambar 2.69
Ketersediaan Pangan Utama (*Food Availability*)
Di Kota Malang tahun 2013-2017
*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, 2018

Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Tahun 2018 (2018:47-48) menjelaskan bahwa keberhasilan ketersediaan pangan utama (*Food Availability*) di Kota Malang harus adanya pemerataan di setiap kecamatan di Kota Malang. Kota Malang sendiri memiliki 5 Kecamatan yang harus di penuhi

ketersediaan pangan. Berikut merupakan persebaran ketersediaan pangan setiap kecamatan di Kota Malang.

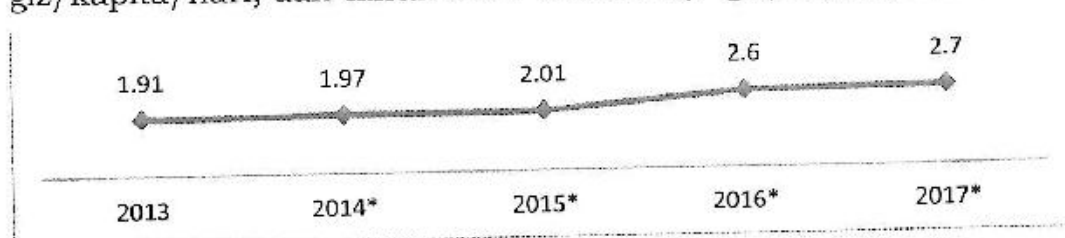
Tabel 2.21
Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kota Malang

Kecamatan	Luas Penyedia Jasa Pangan (Ha)					Jumlah
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Lowokwaru	0.00%	61.26%	7.73%	14.77%	16.25%	1.387008
Blimbing	0.00%	46.74%	16.50%	0.00%	36.77%	0.982934
Klojen	0.00%	68.66%	8.00%	0.00%	23.34%	0.424328
Sukun	0.00%	46.23%	7.63%	18.03%	28.10%	2.027396
Kedungkandang	7.67%	29.69%	16.17%	0.00%	46.47%	3.96294
Kota Malang	180.29	6,627.75	1,712.22	512.80	1,961.62	10,994.69

Sumber: Lapkir Penyusunan daya dukung daya tampung Lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem terkait sektor industri di Jawa Timur tahun anggaran 2016

2. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Capaian riil konsumsi dan keamanan pangan di Kota Malang pada tahun 2013 sebesar 1,91 gizi/kapita/hari. Sedangkan berdasarkan hasil proyeksi capaian konsumsi dan keamanan pangan di Kota Malang tahun 2014 sebesar 1,97 giz/kapita/hari, tahun 2015 sebesar 2,01 giz/kapita/hari, tahun 2016 sebesar 2,6 giz/kapita/hari, dan tahun 2017 sebesar 2,7 giz/kapita/hari.



Gambar 2.70
Konsumsi dan Keamanan Pangan
Di Kota Malang tahun 2013-2017
*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Malang, 2018

D. Pertanahan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanahan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.22
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanahan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

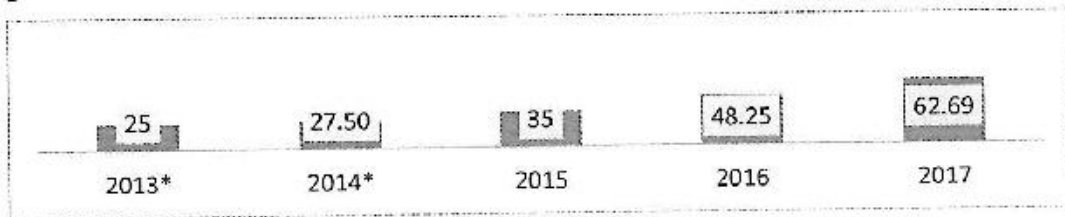
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Pertanahan						

1.	Persentase Data Aset Daerah Yang Akurat sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya	%	25*	27,50*	35	48,25	62,69
----	--	---	-----	--------	----	-------	-------

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2018

1. Persentase Data Aset Daerah Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya

Adapun persentase data aset daerah yang akurat sesuai pemanfaatan dan peruntukannya di Kota Malang pada tahun 2013-2017, dapat diketahui persentase lima tahun terakhir mengalami perubahan.



Gambar 2.71

Persentase Data Aset Daerah Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya Di Kota Malang Tahun 2013-2017

*) angka proyeksi

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2018

Berdasarkan hasil proyeksi capaian persentase data aset daerah yang akurat sesuai pemanfaatan dan peruntukannya di Kota Malang pada tahun 2013 sebesar 25% dan tahun 2014 sebesar 27,5%. Sedangkan capaian riil persentase data aset daerah yang akurat sesuai pemanfaatan dan peruntukannya di Kota Malang pada tahun 2015 sebesar 35%, tahun 2016 sebesar 48,25% dan tahun 2017 sebesar 62,69%.

E. Lingkungan Hidup

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.23

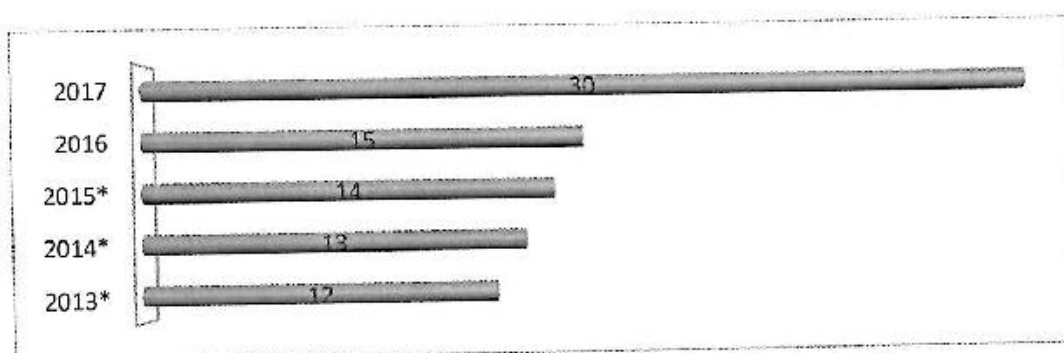
Hasil Kinerja Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Lingkungan Hidup							
1.	Persentase perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	%	12*	13*	14*	15	30

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kota Malang, Tahun 2018

1. Persentase]Perusahaan dan/atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Berdasarkan angka proyeksi pada tahun 2013 s/d tahun 2015 perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Malang yakni sebesar 12% (tahun 2013), 13% (tahun 2014) dan 14% (tahun 2015). Sedangkan capaian riil perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Malang pada tahun 2016 sebesar 15% dan tahun 2017 sebesar 30%.



Gambar 2.72
Perusahaan dan/atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
di Kota Malang Tahun 2013-2017

*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2018

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.24
Hasil Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Jiwa	562.511	588.961	619.318	631.263	623.696
2.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Lembar	21.812	20.166	17.198	19.675	19.617
3.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Lembar	63.100	71.500	78.100	69.172	65.000

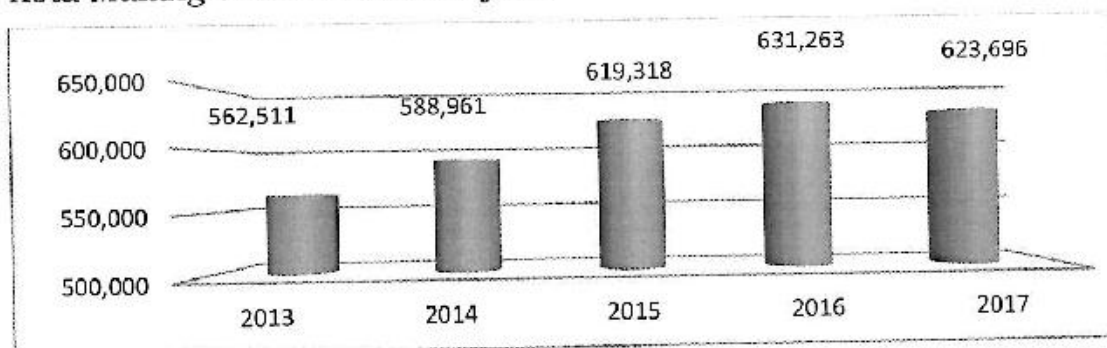
4.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	Lembar	831	2.535	2.388	4.379	5.835
----	--	--------	-----	-------	-------	-------	-------

**) angka proyeksi*

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

1. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Adapun rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Malang pada tahun 2013-2017, dapat diketahui persentase lima tahun terakhir dalam mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Malang sebesar 562.511 jiwa. Pada tahun 2014 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Malang sebesar 588.961 jiwa. Pada tahun 2015 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Malang sebesar 619.318 jiwa. Pada tahun 2016 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Malang sebesar 631.263 jiwa. Pada tahun 2017 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Malang sebesar 623.696 jiwa.



Gambar 2.73

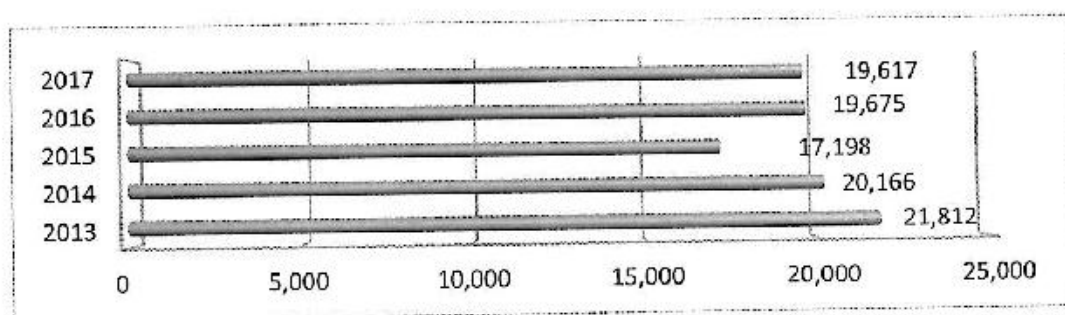
Capaian Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk
Di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2018

2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Adapun cakupan penerbitan akte kelahiran di Kota Malang pada tahun 2013-2017, dapat diketahui persentase lima tahun terakhir dalam mengalami perubahan setiap tahun. Pada tahun 2013 cakupan penerbitan akte kelahiran di Kota Malang sebesar 21.812 lembar akte kelahiran. Pada tahun 2014 cakupan penerbitan akte kelahiran di Kota Malang sebesar 20.166 lembar akte kelahiran. Capaian pada tahun 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013. Pada tahun 2015 cakupan penerbitan akte kelahiran di Kota Malang sebesar 17.198 lembar akte kelahiran. Capaian pada tahun 2015 kembali mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 cakupan penerbitan akte kelahiran di Kota Malang sebesar 19.675 lembar akte kelahiran. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 cakupan penerbitan akte kelahiran di Kota Malang sebesar 19.617 lembar akte kelahiran. Capaian pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016.



Gambar 2.74

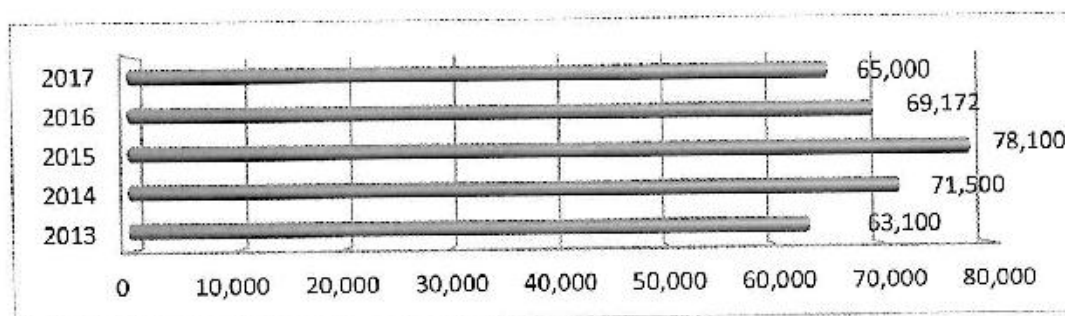
Capaian Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2018

3. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Adapun cakupan penerbitan kartu keluarga di Kota Malang pada tahun 2013-2017, dapat diketahui persentase lima tahun terakhir dalam mengalami perubahan setiap tahun kondisi yang tidak stabil pada setiap tahun terdapat perubahan, guna mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan setiap tahun anggaran. Pada tahun 2013 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kota Malang sebesar 63.100 lembar kartu keluarga. Pada tahun 2014 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kota Malang sebesar 71.500 lembar kartu keluarga. Capaian pada tahun 2014 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013. Pada tahun 2015 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kota Malang sebesar 78.100 lembar kartu keluarga. Capaian pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kota Malang sebesar 69.172 lembar kartu keluarga. Namun capaian pada tahun

2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 cakupan penerbitan kartu keluarga di Kota Malang sebesar 65.000 lembar kartu keluarga. Capaian pada tahun 2017 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016.



Gambar 2.75

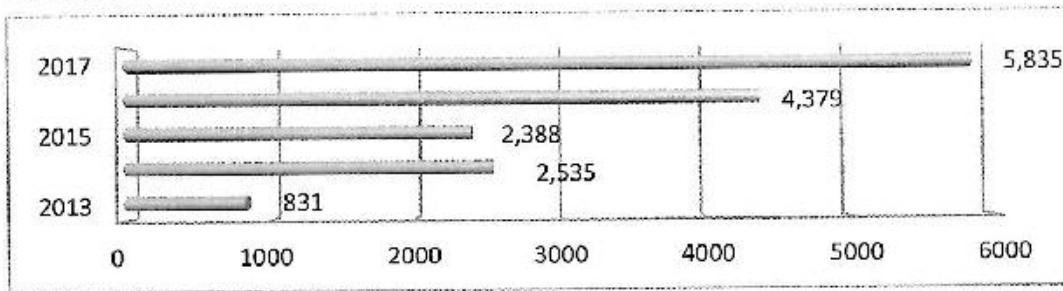
Capaian Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2018

4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Adapun cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kota Malang pada tahun 2013-2017, dapat diketahui persentase lima tahun terakhir dalam mengalami perubahan setiap tahun kondisi yang tidak stabil pada setiap tahun terdapat perubahan, guna mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan setiap tahun anggaran. Pada tahun 2013 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kota Malang sebesar 831 lembar kutipan akta kematian. Pada tahun 2014 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kota Malang sebesar 2.535 lembar kutipan akta kematian. Capaian pada tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013. Pada tahun 2015 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kota Malang sebesar 2.388 lembar kutipan akta kematian. Capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kota Malang sebesar 4.379 lembar kutipan akta kematian. Namun capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 cakupan penerbitan kutipan akta kematian di Kota Malang sebesar 5.835

lembar kutipan akta kematian. Capaian pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan kembali jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016.



Gambar 2.76

Capaian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2018

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25

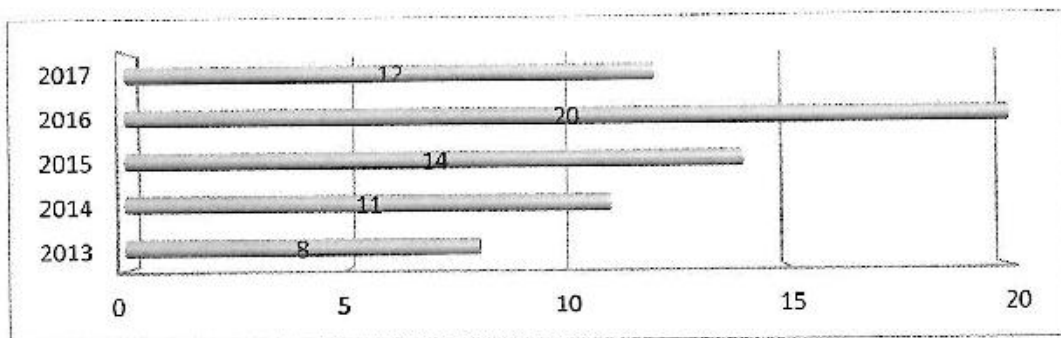
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1.	Jumlah LSM Aktif	LSM	8	11	14	20	12
2.	Jumlah LSM dan Ormas yang mengikuti pembinaan	Organisasi	114	70	170	170	170

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, Tahun 2018

1. Jumlah LSM Aktif

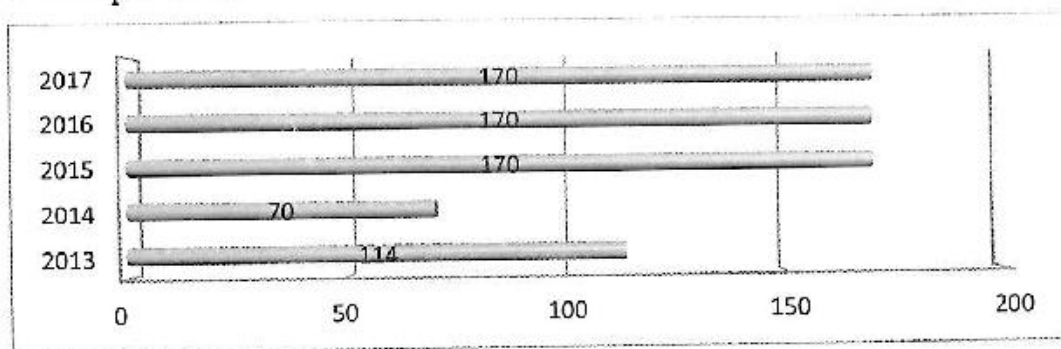
Pada pencapaian indikator jumlah LSM aktif di Kota Malang pada tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 jumlah LSM Aktif di Kota Malang sebanyak 8 LSM. Pada tahun 2014 jumlah LSM Aktif di Kota Malang sebanyak 11 LSM. Pada tahun 2015 jumlah LSM aktif di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 14 LSM. Pada tahun 2016 jumlah LSM aktif di Kota Malang kembali mengalami peningkatan menjadi 20 LSM. Namun pada tahun 2017 jumlah LSM Aktif di Kota Malang mengalami penurunan, menjadi 12 LSM.



Gambar 2.77
 Jumlah LSM Aktif di Kota Malang Tahun 2013-2017
 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, 2018

2. Jumlah LSM dan Ormas yang Mengikuti Pembinaan

Pada pencapaian indikator jumlah LSM dan Ormas yang mengikuti pembinaan pada tahun 2013 hingga tahun 2017 mencapai 100%.



Gambar 2.78
 Persentase LSM dan Omas yang Mengikuti Pembinaan
 Di Kota Malang Tahun 2013-2017
 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, 2018

Pada tahun 2013 jumlah LSM dan Ormas di Kota Malang sebanyak 114 organisasi, dan seluruhnya telah mengikuti pembinaan. Pada tahun 2014 jumlah LSM dan Ormas di Kota Malang sebanyak 70 organisasi, dan seluruhnya telah mengikuti pembinaan. Sedangkan pada tahun 2015 terdapat penambahan jumlah LSM dan Ormas di Kota Malang menjadi 170 organisasi dan seluruhnya telah mengikuti pembinaan pula. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah LSM dan Ormas di Kota Malang masih sama dengan tahun 2015, yakni 170 organisasi dan seluruhnya telah mengikuti pembinaan.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Daerah

Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

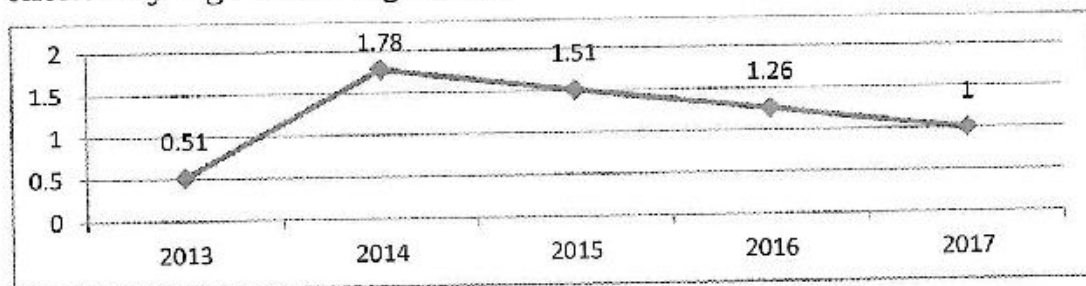
Tabel 2.26
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1.	Persentase Laju pertumbuhan penduduk	%	0,51	1,78	1,51	1,26	1
2.	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif	%	73,25	77,36	76,68	77,36	78,8*
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)	%	13,24	12,18	12,72	12,33	11,7
4.	Ratio petugas Lapangan (PLKB/PKB)		1,06	1,08	0,89	0,89	0,89*
5.	Ratio petugas pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) di setiap kclurahan		1,1	1,12	1,1	1,1	1,1*
6.	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) yang ber-KB	%	81,93	96,68	84,83	100	100*
7.	jumlah kegiatan pembinaan keluarga	Kegiatan	19*	22	17	14	18*

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

1. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Adapun capain indikator kinerja Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan penduduk di Kota Malang yakni 0,51%. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan penduduk di Kota Malang yakni 1,78%, menurun di tahun 2015 menjadi 1,51%. Penurunan ini berturut-turut terjadi di tahun 2016 hingga tahun 2018 yakni dari 1,26% di tahun 2016, 1% di tahun 2017. Tren laju pertumbuhan penduduk di Kota Malang yang mulai berkurang pada tahun 2013 hingga tahun 2017 dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang cenderung turun.

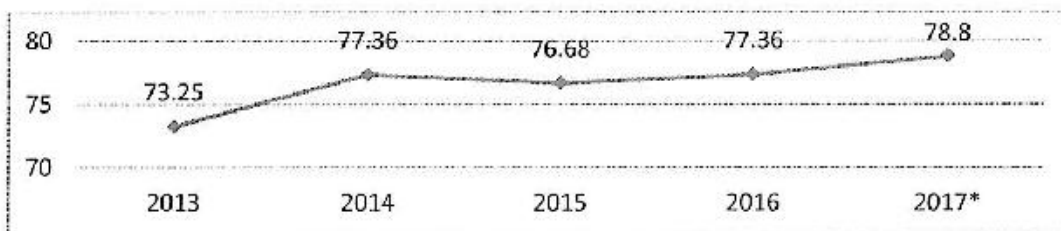


Gambar 2.79
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Malang
Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, 2018

2. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Menjadi Peserta KB Aktif

Adapun capaian indikator kinerja persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif di Kota Malang sebesar 73,25%. Pada tahun 2014 persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif di Kota Malang sebesar 77,36%. Capaian pada tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Pada tahun 2015 persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif di Kota Malang mencapai 76,68%. Capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif di Kota Malang mencapai 77,36%. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif di Kota Malang diproyeksikan mencapai 78,8%.



Gambar 2.80

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Menjadi Peserta KB Aktif di Kota Malang Tahun 2013-2017

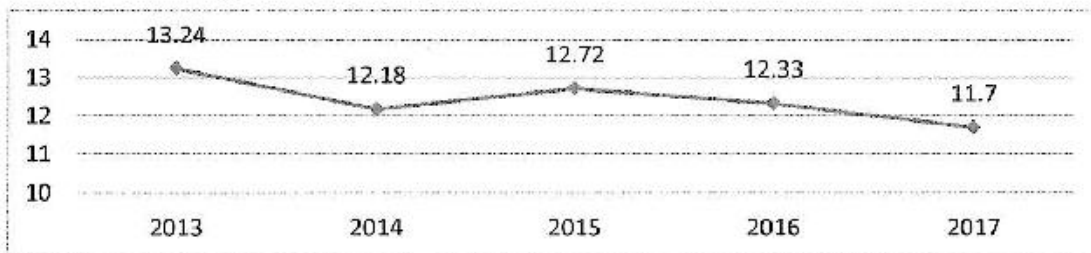
*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

3. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*)

Adapun capaian indikator kinerja cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeet need*) di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif, namun cenderung membaik. Pada tahun 2013 cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeet need*) di Kota Malang sebesar 13,24%. Pada tahun 2014 cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeet need*) di Kota Malang sebesar 12,18%. Pada tahun 2015 cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeet need*) di Kota Malang sebesar

12,72%. Pada tahun 2016 cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeet need*) di Kota Malang sebesar 12,33%. Pada tahun 2017 cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeet need*) di Kota Malang sebesar 11,7%.



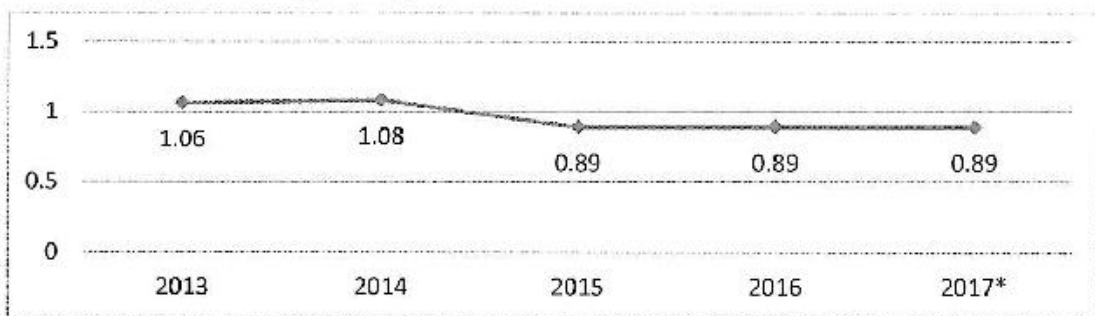
Gambar 2.81

Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*) di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

4. Ratio Petugas Lapangan (PLKB/PKB) Di Setiap Kelurahan

Adapun capaian indikator kinerja ratio petugas lapangan (PLKB/PKB) di setiap kelurahan di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2013 ratio petugas lapangan (PLKB/PKB) di setiap kelurahan di Kota Malang sebesar 1,06. Pada tahun 2014 ratio petugas lapangan (PLKB/PKB) di setiap kelurahan di Kota Malang sebesar 1,08. Pada tahun 2015 dan tahun 2017 ratio petugas lapangan (PLKB/PKB) di setiap kelurahan di Kota Malang sebesar 0,89. Capaian pada tahun 2015 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014.



Gambar 2.82

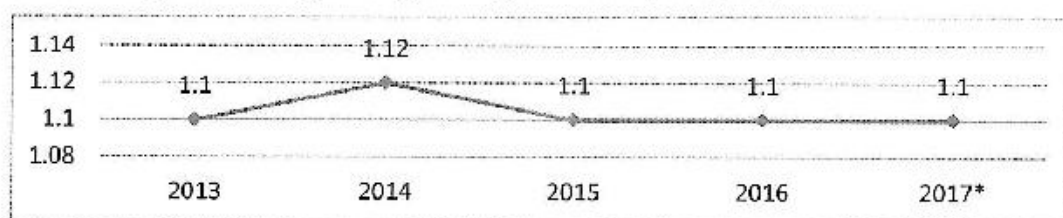
Ratio Petugas Lapangan (PLKB/PKB) Di Setiap Kelurahan di Kota Malang Tahun 2013-2017

*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

5. Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) Di Setiap Kelurahan

Adapun capaian indikator kinerja ratio petugas pembantu pembina KB kelurahan (PPKBD) di setiap kelurahan di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2013 ratio petugas pembantu pembina KB kelurahan (PPKBD) di setiap kelurahan di Kota Malang sebesar 1,1%. Pada tahun 2014 ratio petugas pembantu pembina KB kelurahan (PPKBD) di setiap kelurahan di Kota Malang sebesar 1,12%. Pada tahun 2015 dan tahun 2017 ratio petugas pembantu pembina KB kelurahan (PPKBD) di setiap kelurahan di Kota Malang sebesar 1,1%. Capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014.



Gambar 2.83

Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) Di Setiap Kelurahan di Kota Malang Tahun 2013-2017

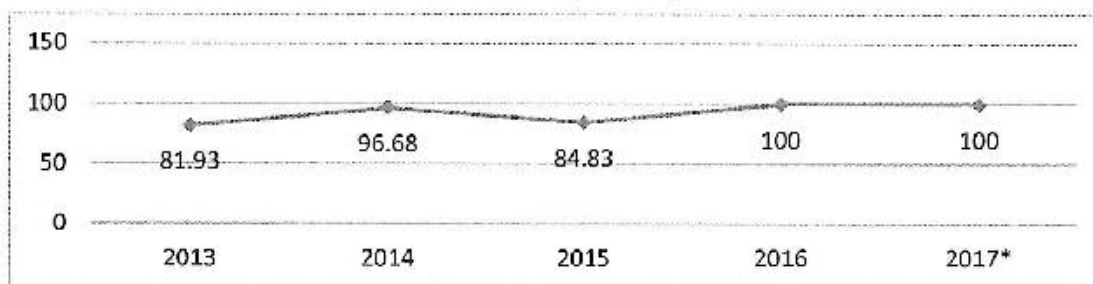
*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

6. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)

Adapun capaian indikator kinerja cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga (UPPKS) di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif, namun cenderung meningkat. Pada tahun 2013 cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkata pendapatan keluarga (UPPKS) di Kota Malang sebesar 81,93%. Pada tahun 2014 cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkata pendapatan keluarga (UPPKS) di Kota Malang sebesar 96,68%. Pada tahun 2015 cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkata pendapatan keluarga (UPPKS) di Kota Malang sebesar 84,83%. Capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Pada tahun 2016 hingga tahun 2017 cakupan PUS peserta KB

anggota usaha peningkata pendapatan keluarga (UPPKS) di Kota Malang sebesar 100%. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015.



Gambar 2.84

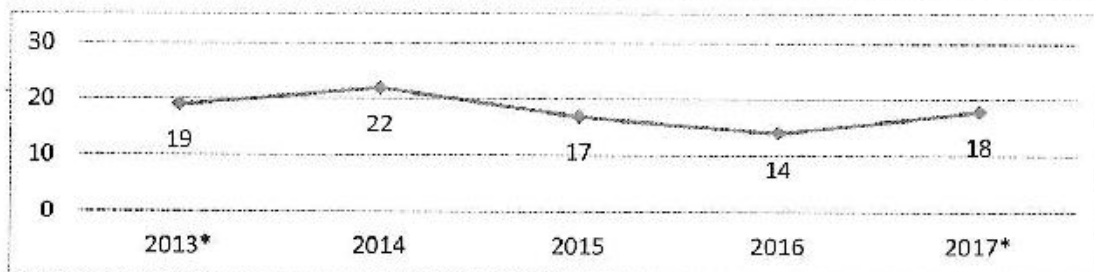
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) Masyarakat di Kota Malang Tahun 2013-2017

*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

7. Jumlah Kegiatan Pembinaan Keluarga

Adapun capaian indikator kinerja jumlah kegiatan pembinaan keluarga di Kota Malang tahun 2014-2017 mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah kegiatan pembinaan keluarga di Kota Malang sebanyak 22 kali. Pada tahun 2015 jumlah kegiatan pembinaan keluarga di Kota Malang sebanyak 17 kali. Pada tahun 2016 jumlah kegiatan pembinaan keluarga di Kota Malang sebanyak 14 kali. Sedangkan Pada tahun 2017 jumlah kegiatan pembinaan keluarga di Kota Malang diproyeksikan sebanyak 18 kali.



Gambar 2.85

Jumlah Kegiatan Pembinaan Keluarga di Kota Malang Tahun 2013-2017

*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

I. Perhubungan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perhubungan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

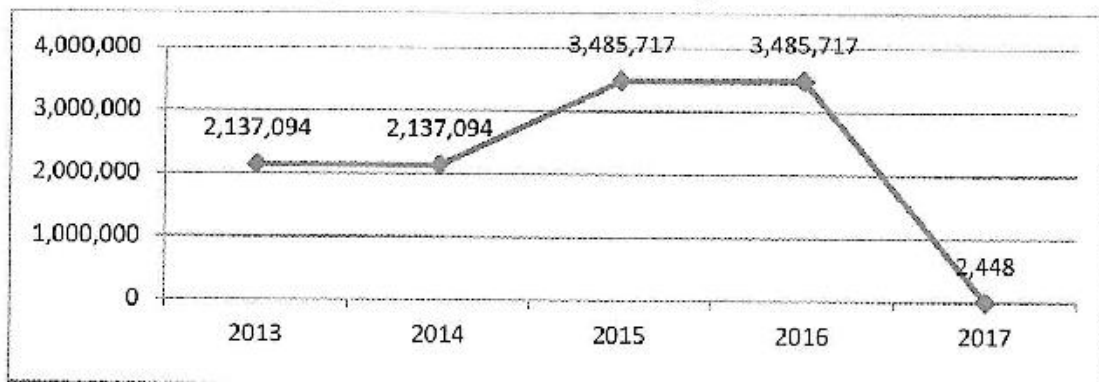
Tabel 2.27
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perhubungan
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Perhubungan							
1.	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/barang	2.137.094	2.137.094	3.485.717	3.485.717	2.448

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang, 2018

1. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Malang diperoleh bahwa jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Malang pada tahun 2013 hingga tahun 2014 yakni 2.137.094 orang/barang. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Malang jika dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Malang sebanyak 3.485.717 orang/barang, jumlah tersebut masih sama hingga tahun 2016. Namun pada tahun 2017 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Malang mengalami penurunan menjadi 2.448 orang/barang. Penurunan tersebut dikarenakan adanya aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan terminal Tipe C di Kota Malang, dimana Kota Malang memiliki 2 Terminal Tipe C.



Gambar 2.86

Perkembangan Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang, 2018

J. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

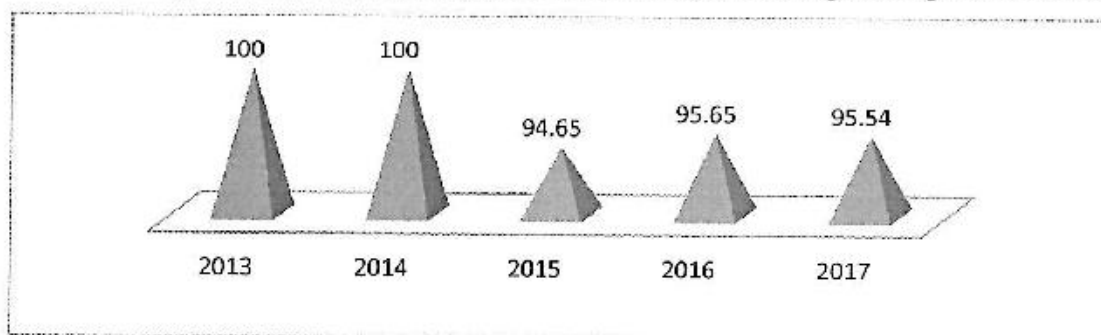
Tabel 2.28
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Komunikasi dan Informatika							
1.	Jumlah pengguna informasi publik yang terlayani	%	100	100	94,65	95,65	95,54

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang, 2018

1. Jumlah Pengguna Informasi Publik yang Terlayani

Adapun jumlah pengguna informasi publik yang terlayani di Kota Malang pada tahun 2013-2017, mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013-2014 jumlah pengguna informasi publik yang terlayani di Kota Malang mencapai 100%. Pada tahun 2015 jumlah pengguna informasi publik yang terlayani di Kota Malang sebesar 94,65%. Pada tahun 2016 jumlah pengguna informasi publik yang terlayani di Kota Malang sebesar 95,65%. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 jumlah pengguna informasi publik yang terlayani di Kota Malang sebesar 95,54%. Capaian pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian 2016



Gambar 2.87

Capaian Jumlah Pengguna Informasi Publik yang Terlayani
 di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2018

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

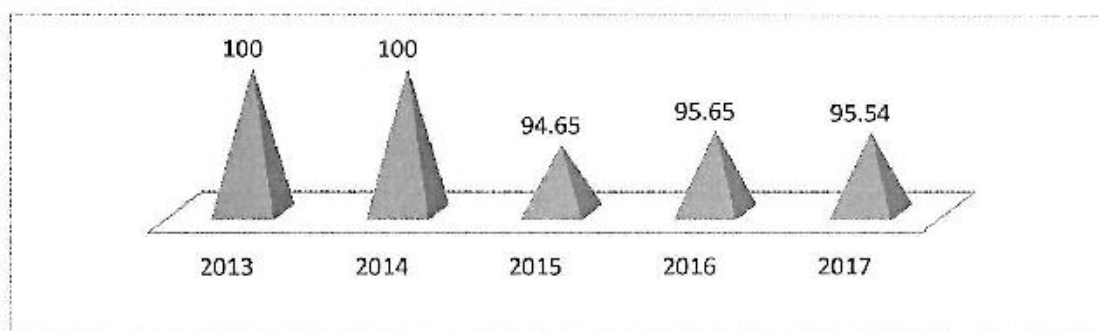
Tabel 2.28
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Komunikasi dan Informatika							
1.	Jumlah pengguna informasi publik yang terlayani	%	100	100	94,65	95,65	95,54

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang, 2018

1. Jumlah Pengguna Informasi Publik yang Terlayani

Adapun jumlah pengguna informasi publik yang terlayani di Kota Malang pada tahun 2013-2017, mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013-2014 jumlah pengguna informasi publik yang terlayani di Kota Malang mencapai 100%. Pada tahun 2015 jumlah pengguna informasi publik yang terlayani di Kota Malang sebesar 94,65%. Pada tahun 2016 jumlah pengguna informasi publik yang terlayani di Kota Malang sebesar 95,65%. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2017 jumlah pengguna informasi publik yang terlayani di Kota Malang sebesar 95,54%. Capaian pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian 2016



Gambar 2.87

Capaian Jumlah Pengguna Informasi Publik yang Terlayani
 di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2018

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.29
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

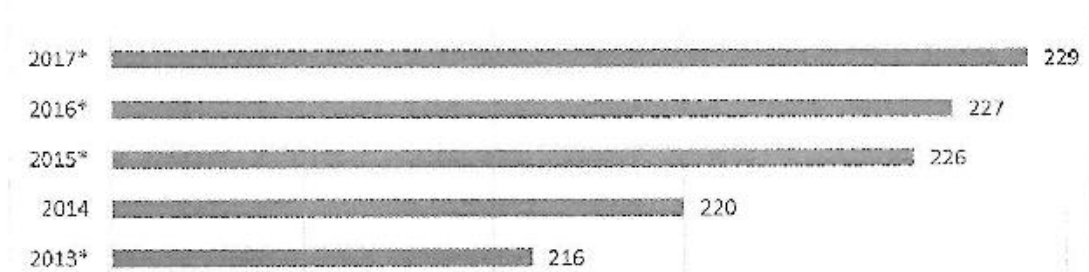
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1.	Jumlah KUMKM yang telah mendapat pembinaan dalam prosedur mengakses permodalan	KUMKM	216*	220	226*	227*	229*
2.	Persentase wirausaha mikro binaan yang berkembang	%	4,12*	4,58*	4,63*	4,65*	4,67

**) angka proyeksi*

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, 2018

1. Jumlah KUMKM yang Telah Mendapat Pembinaan dalam Prosedur Mengakses Permodalan

Adapun proyeksi capaian indikator jumlah KUMKM yang telah mendapat pembinaan dalam prosedur mengakses permodalan di Kota Malang pada tahun 2013 sebesar 216 KUMKM. Sedangkan pada tahun 2014 capaian riil jumlah KUMKM yang telah mendapat pembinaan dalam prosedur mengakses permodalan di Kota Malang sebanyak 220 KUMKM. Pada tahun 2015-2017 diproyeksikan capaian jumlah KUMKM yang telah mendapat pembinaan dalam prosedur mengakses permodalan di Kota Malang sebesar 226 KUMKM di tahun 2015, 227 KUMKM di tahun 2016, dan 229 KUMKM di tahun 2017



Gambar 2.88

Jumlah KUMKM yang Telah Mendapat Pembinaan dalam Prosedur Mengakses Permodalan di Kota Malang Tahun 2013-2017

**) angka proyeksi*

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, 2018

2. Persentase Wirausaha Mikro Binaan yang Berkembang

Adapun persentase wirausaha mikro binaan yang berkembang di Kota Malang pada tahun 2017 mempunyai target sebesar 4,89% atau 250 UM dan terealisasi sebesar 4,67% atau 239 UM sehingga capaian Indikator Kinerja sebesar 95,50%.

L. Penanaman Modal

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan penanaman modal Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.30
Hasil Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

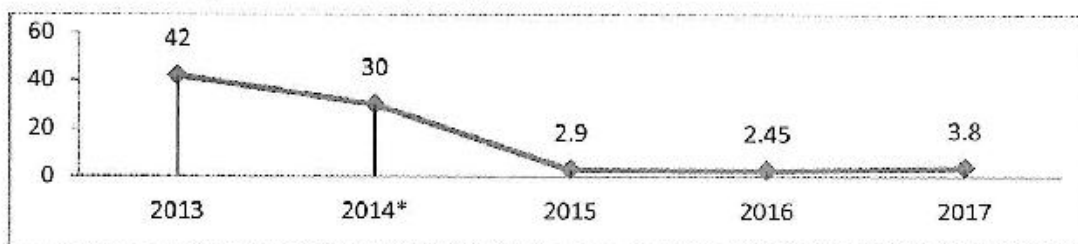
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Penanaman Modal							
1.	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	%	42	30*	2,9	2,45	3,8

*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018

1. Persentase Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah

Apabila dilihat capaian indikator persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah di Kota Malang Tahun 2013-2017 menunjukkan tren yang fluktuatif.



Gambar 2.89
Capaian Persentase Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah di Kota Malang Tahun 2013-2017

*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018

Pada tahun 2013 capaian persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah di Kota Malang sebesar 42%. Pada tahun 2014 capaian indikator persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah di Kota Malang diproyeksikan 30%. Pada tahun 2015 capaian persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah di Kota Malang sebesar 2,9%. Pada tahun 2016 persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah di Kota Malang sebesar 2,45%. Pada tahun 2017 capaian persentase peningkatan nilai

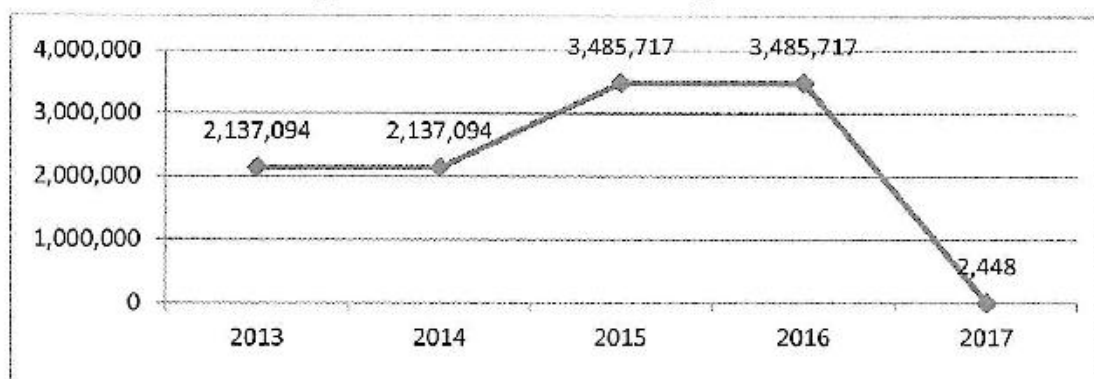
Tabel 2.27
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perhubungan
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Perhubungan							
1.	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/barang	2.137.094	2.137.094	3.485.717	3.485.717	2.448

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang, 2018

1. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Malang diperoleh bahwa jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Malang pada tahun 2013 hingga tahun 2014 yakni 2.137.094 orang/barang. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Malang jika dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Malang sebanyak 3.485.717 orang/barang, jumlah tersebut masih sama hingga tahun 2016. Namun pada tahun 2017 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Malang mengalami penurunan menjadi 2.448 orang/barang. Penurunan tersebut dikarenakan adanya aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan terminal Tipe C di Kota Malang, dimana Kota Malang memiliki 2 Terminal Tipe C.



Gambar 2.86

Perkembangan Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang, 2018

J. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

penanaman modal dan investasi daerah di Kota Malang sebesar 3,8%. Dengan meningkatkan kinerja penanaman modal dan investasi daerah diharapkan pertumbuhan ekonomi di kota Malang cukup baik dan dapat menciptakan daya saing serta dapat menarik investor dari luar.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepemudaan dan olahraga Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.31
Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

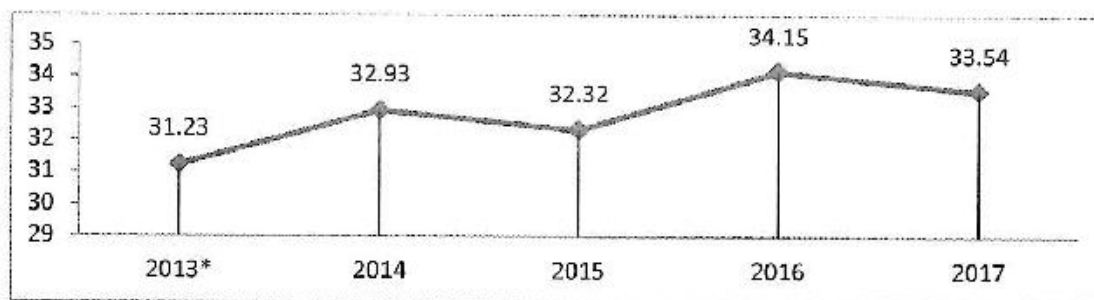
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Kepemudaan dan Olahraga							
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	31,23*	32,93	32,32	34,15	33,54
2.	Persentase wirausaha muda	%	0,4*	0,42	0,31	0,42	0,67
3.	Cakupan pembinaan olahraga	Pembinaan	97	97	97	97	97
4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Pelatihan	72*	73	73	78	80
5.	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	65	15	8	15	11

**) angka proyeksi*

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, 2018

1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami perubahan setiap tahun. Pada tahun 2013 persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Malang diproyeksikan sebesar 31,23%. Pada tahun 2014 persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Malang sebesar 32,93%. Pada tahun 2015 persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Malang sebesar 32,32%. Pada tahun 2016 persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Malang sebesar 34,15%. Pada tahun 2017 persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Malang sebesar 33,54.

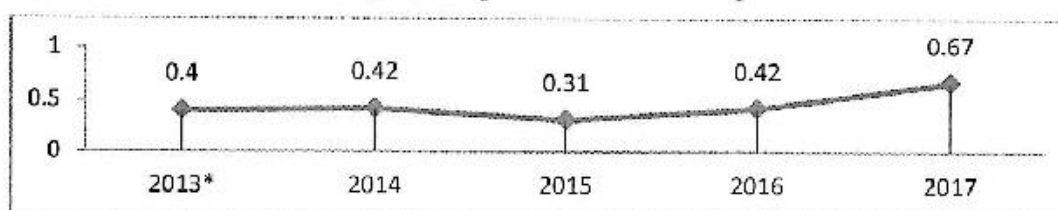


Gambar 2.90
 Capaian Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
 Kota Malang Tahun 2013-2017
 *) angka proyeksi

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, 2018

2. Persentase Wirausaha Muda

Adapun persentase wirausaha muda di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami perubahan setiap tahun.



Gambar 2.91
 Persentase Wirausaha Muda di Kota Malang Tahun 2013-2017
 *) angka proyeksi

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, 2018

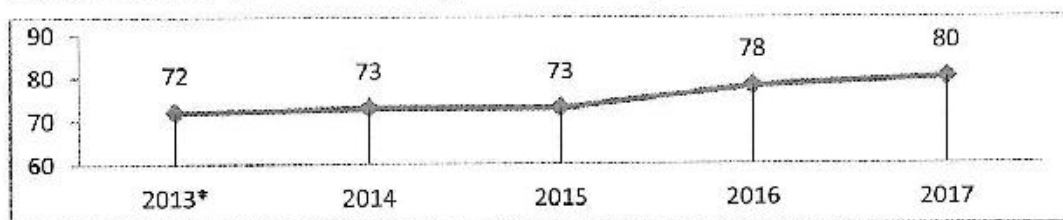
Pada tahun 2013 persentase wirausaha muda di Kota Malang diproyeksikan sebesar 0,4%. Pada tahun 2014 persentase wirausaha muda di Kota Malang sebesar 0,42%. Pada tahun 2015 persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Malang sebesar 0,31%. Pada tahun 2016 persentase wirausaha muda di Kota Malang sebesar 0,42%. Pada tahun 2017 persentase wirausaha muda di Kota Malang sebesar 0,67%.

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Adapun cakupan pembinaan olahraga di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mencapai 97 Pembinaan. Hal ini dikarenakan sistem pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang terhadap atlet muda tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan namun dilakukan apabila ada even perlombaan saja

4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Adapun cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kota Malang pada tahun 2013-2017, dapat diketahui persentase lima tahun terakhir mengalami perubahan setiap tahun, guna mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan setiap tahun anggaran. Pada tahun 2013 cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kota Malang diproyeksikan sebesar 72 pelatihan. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kota Malang sebesar 73 pelatihan. Pada tahun 2016 cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kota Malang sebesar 78 Pelatihan. Pada tahun 2017 cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kota Malang sebesar 80 pelatihan.



Gambar 2.92

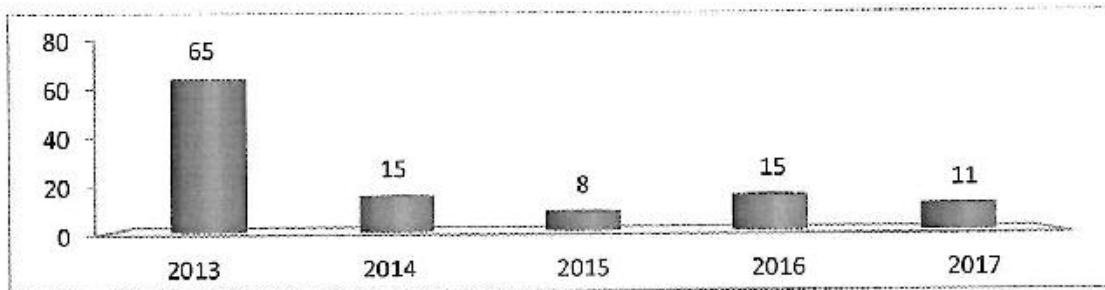
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kota Malang
Tahun 2013-2017

*) angka sementara

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, 2018

5. Jumlah Prestasi Olahraga

Adapun jumlah prestasi olahraga di Kota Malang pada tahun 2013-2017, dapat diketahui capaian lima tahun terakhir bersifat fluktuatif, guna mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan setiap tahun anggaran. Pada tahun 2013 jumlah prestasi olahraga di Kota Malang sebanyak 65 prestasi olahraga. Pada tahun 2014 jumlah prestasi olahraga di Kota Malang sebanyak 15 prestasi olahraga. Pada tahun 2015 jumlah prestasi olahraga di Kota Malang mengalami penurunan menjadi 8 prestasi olahraga. Pada tahun 2016 jumlah prestasi olahraga di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 15 prestasi olahraga. Pada tahun 2017 jumlah prestasi olahraga di Kota Malang mengalami penurunan menjadi 11 prestasi olahraga.



Gambar 2.93

Jumlah Prestasi Olahraga di Kota Malang Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, 2018

N. Statistik

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan statistik Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.32
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Statistik
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Statistik						
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
2.	Buku "kota dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2018

Pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang pertama yakni tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi di Kota Malang baru tersedia sejak tahun 2017. Sedangkan pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang kedua yakni Terdapatnya buku "Kota dalam Angka" di Kota Malang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah memilikinya. Begitu juga pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang ketiga, yakni terdapatnya buku "PDRB" di Kota Malang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 juga telah memilikinya.

O. Persandian

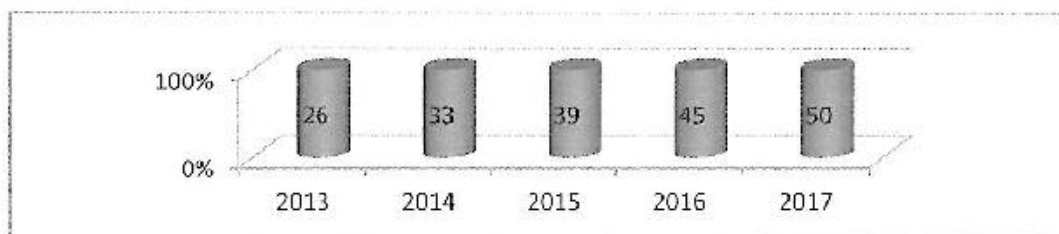
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan persandian Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.33
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Persandian
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Persandian							
1.	Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan	Dokumen	26	33	39	45	50

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang, 2018

Adapun Persentase Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan di Kota Malang pada tahun 2013-2017, telah mencapai 100% pada setiap tahunnya. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang telah melakukan pengelolaan pengendalian dan pengamanan dokumen persandian pada tahun 2013 sebanyak 26 dokumen, pada setiap tahunnya pada tahun 2014 sebanyak 33 dokumen, tahun 2015 sebanyak 39 dokumen, tahun 2016 sebanyak 45 dokumen, tahun 2017 sebanyak 50 dokumen.



Gambar 2.94

Capaian Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan
 di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2018

P. Kebudayaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kebudayaan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.34
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

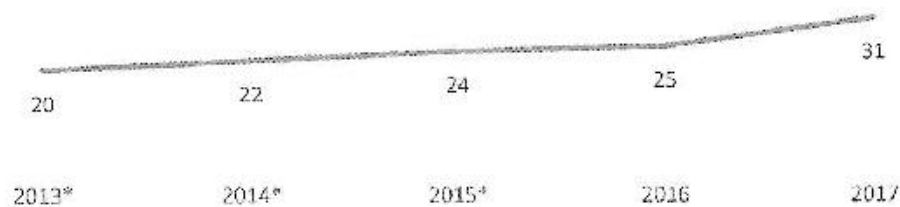
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Kebudayaan							
1.	Persentase budaya tradisional yang ditampilkan sebagai potensi wisata Kota Malang	%	20*	22*	24*	25	31
2.	Persentase Cagar Budaya yang terjaga	%	40	71,62	39,92	81	100

*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2018

1. Persentase Budaya Tradisional yang Ditampilkan Sebagai Potensi Wisata Kota Malang

Adapun capaian indikator kinerja persentase budaya tradisional yang ditampilkan sebagai potensi wisata Kota Malang pada tahun 2013 dan tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 persentase budaya tradisional yang ditampilkan sebagai potensi wisata Kota Malang diproyeksikan sebesar 20%. Pada tahun 2014 persentase budaya tradisional yang ditampilkan sebagai potensi wisata Kota Malang diproyeksikan sebesar 22%. Pada tahun 2015 persentase budaya tradisional yang ditampilkan sebagai potensi wisata Kota Malang diproyeksikan sebesar 24%. Pada tahun 2016 persentase budaya tradisional yang ditampilkan sebagai potensi wisata Kota Malang sebesar 25%. Pada tahun 2017 capaian persentase budaya tradisional yang ditampilkan sebagai potensi wisata Kota Malang meningkat menjadi 31%.



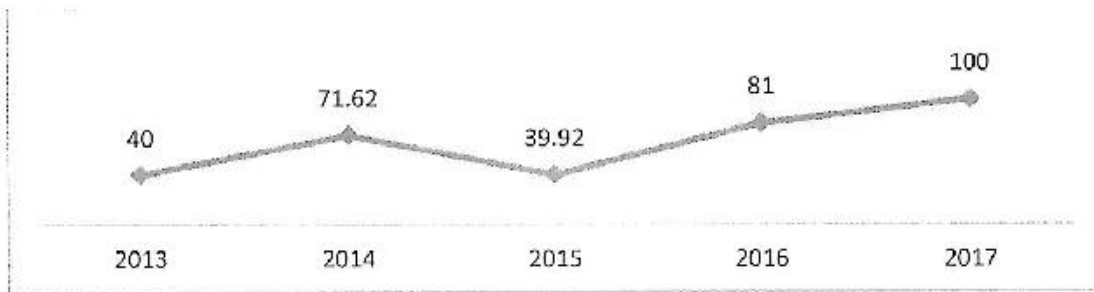
Gambar 2.95
Capaian Persentase Budaya Tradisional yang Ditampilkan
Sebagai Potensi Wisata Kota Malang Tahun 2013-2017

**) angka proyeksi*

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2018

2. Persentase Cagar Budaya yang Terjaga

Adapun capaian indikator persentase cagar budaya yang terjaga di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 persentase cagar budaya yang terjaga Kota Malang sebesar 40%. Pada tahun 2014 persentase cagar budaya yang terjaga Kota Malang sebesar 71,62%. Pada tahun 2015 persentase cagar budaya yang terjaga di Kota Malang sebesar 39,92%. Pada tahun 2016 persentase cagar budaya yang terjaga di Kota Malang sebesar 81%. Pada tahun 2017 persentase cagar budaya yang terjaga di Kota Malang sebesar 100%.



Gambar 2.96
 Capaian Persentase Cagar Budaya yang Terjaga
 di Kota Malang Tahun 2013-2017
 Sumber: Dinas Kedubayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2018

Q. Perpustakaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perpustakaan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.35
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Perpustakaan							
1.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	orang	20.004	21.245	18.928	18.839	20.407

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2018

1. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Adapun capaian indikator jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Malang pada tahun 2013-2017, mengalami perubahan setiap tahunnya.



Gambar 2.97
 Capaian Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun
 di Kota Malang Tahun 2013-2017
 Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2018

Pada tahun 2013 jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Malang sebanyak 20.004 orang. Pada tahun 2014 jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Malang sebanyak 21.245 orang. Pada tahun 2015 jumlah rata-rata

pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Malang sebanyak 18.928 orang. Pada tahun 2016 jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Malang sebanyak 18.839 orang. Namun pada tahun 2017 capaian indikator jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 20.407 orang.

R. Kearsipan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kearsipan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

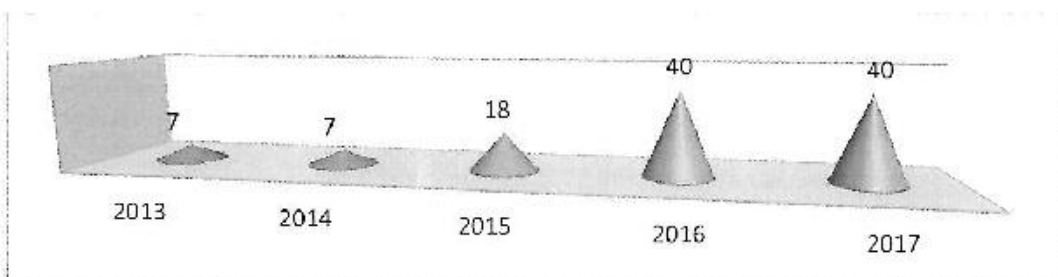
Tabel 2.36
Hasil Kinerja Bidang Urusan Kearsipan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Kearsipan							
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	7	7	18	40	40
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kali	2	2	2	2	1

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2018

1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Adapun capaian indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Malang pada tahun 2013-2017, mengalami peningkatan. Pada tahun 2013-2014 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Malang sebesar 7%. Pada tahun 2015 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Malang sebesar 18%. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Malang sebesar 40%.



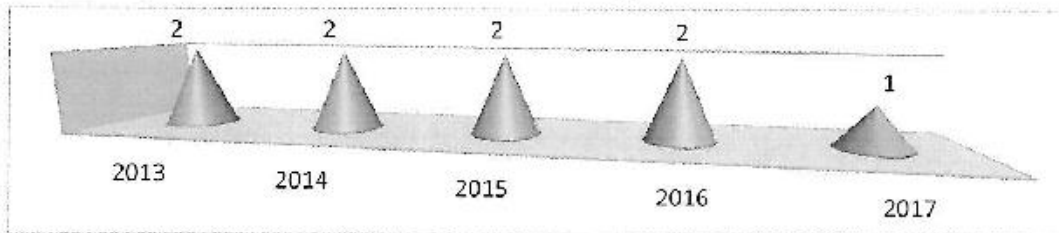
Gambar 2.98

Capaian Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2018

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Adapun capaian indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kota Malang pada tahun 2013-2017, dapat diketahui persentase lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 hingga tahun 2016 peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kota Malang dilakukan sebanyak 2 kali. Namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kota Malang hanya dilakukan sebanyak 1 kali.



Gambar 2.99

Capaian Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2018

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kota Malang, yaitu bidang urusan:

A. Pariwisata

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pariwisata Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.37
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pariwisata
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

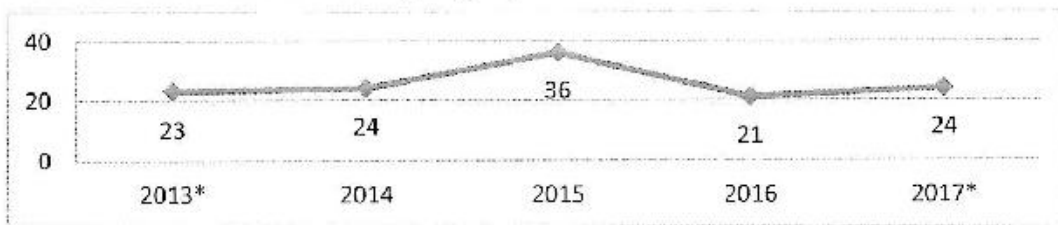
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Pariwisata							
1.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Malang	%	23*	24	36	21	24*
2.	Kunjungan wisatawan di obyek daya tarik wisata	Orang	1.955. 723	2.429. 101	3.298. 692	3.996. 609	47832 83*

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2018

1. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Kota Malang

Adapun capaian indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Malang pada tahun 2013-2017

mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Malang diproyeksikan sebesar 23%. Pada tahun 2014 persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Malang sebesar 24%. Pada tahun 2015 persentase peningkatan kunjungan wisatawan mengalami peningkatan, sehingga mencapai 36%. Sedangkan pada tahun 2016 persentase peningkatan kunjungan wisatawan mencapai penurunan sehingga mencapai 21%. Pada tahun 2017 persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Malang diproyeksikan sebesar 24%.



Gambar 2.100
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Kota Malang
di Kota Malang tahun 2013-2017

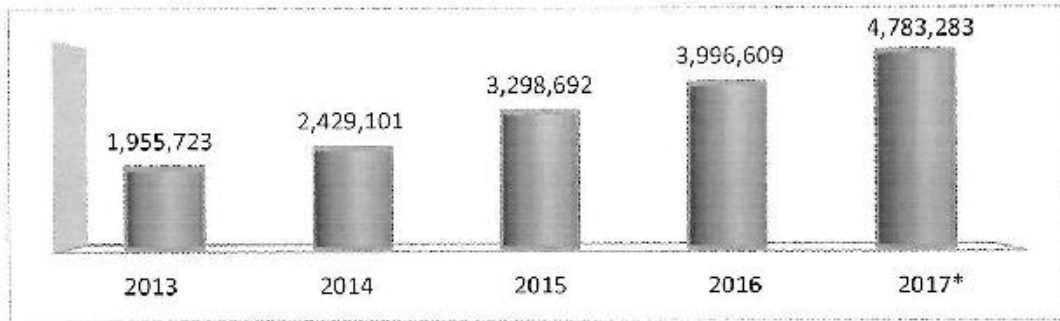
**) angka proyeksi*

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2018

2. Kunjungan Wisatawan di Obyek Daya Tarik Wisata

Pada tahun 2013-2016 indikator kunjungan wisatawan di obyek daya tarik wisata mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan di obyek daya tarik wisata di Kota Malang sebanyak 1.955.723 orang wisatawan. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan di obyek daya tarik wisata di Kota Malang sebanyak 2.429.101 orang wisatawan, yang terdiri dari 6.025 orang Wisman dan 2.423.076 orang Wisnus. Capaian pada tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yakni sebesar 80,51%. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan di obyek daya tarik wisata di Kota Malang sebanyak 3.298.692 orang wisatawan, yang terdiri dari 8.624 orang Wisman dan 3.290.067 orang Wisnus. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yakni sebesar 73,64%. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan di obyek daya tarik wisata di Kota Malang sebanyak 3.996.609 orang wisatawan, yang terdiri dari 9.535 orang Wisman dan 3.987.074 orang Wisnus. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan

jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 yakni sebesar 82,54%. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan di obyek daya tarik wisata di Kota Malang diproyeksikan sebanyak 4.783.283 wisatawan



Gambar 2.101
Kunjungan Wisatawan di Obyek Daya Tarik Wisata
di Kota Malang tahun 2013-2017

*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2018

B. Pertanian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanian Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.38
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanian
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

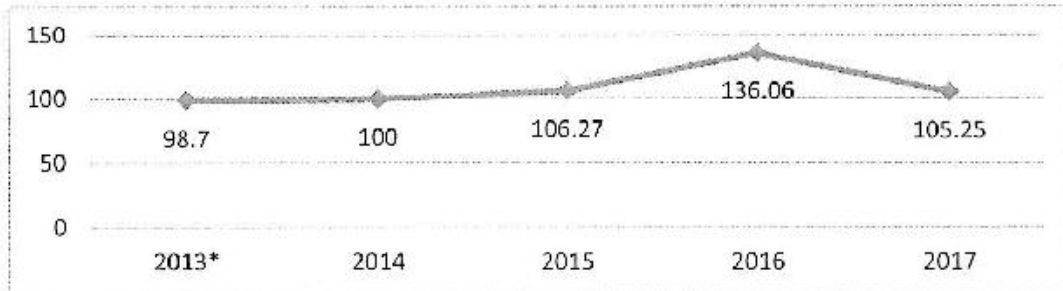
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian							
1.	Jumlah nilai produksi hasil pertanian	%	98,7*	100	106,27	136,06	105,25
2.	Jumlah nilai produksi hasil perkebunan	%	95,84*	100	93,77	93,77	95,31
3.	Jumlah nilai produksi hasil peternakan	%	94,76*	94,29	94,47	85,82	131,08
4.	Terjalinnnya kemitraan antara pengusaha kecil	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, 2018

1. Jumlah Nilai Produksi Hasil Pertanian

Adapun capaian kinerja indikator jumlah nilai produksi hasil pertanian di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 jumlah nilai produksi hasil pertanian di Kota Malang diproyeksikan sebesar 98,7%. Pada tahun 2014 jumlah nilai produksi hasil pertanian di Kota Malang sebesar 100%. Pada tahun 2015 jumlah nilai produksi hasil pertanian di Kota Malang sebesar 106,27% atau 14.347 Ton. Capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2016 jumlah nilai produksi hasil pertanian di Kota

Malang sebesar 136,06% atau 18.369 ton. Capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah nilai produksi hasil pertanian di Kota Malang mengalami penurunan, sehingga menjadi 105,25%.

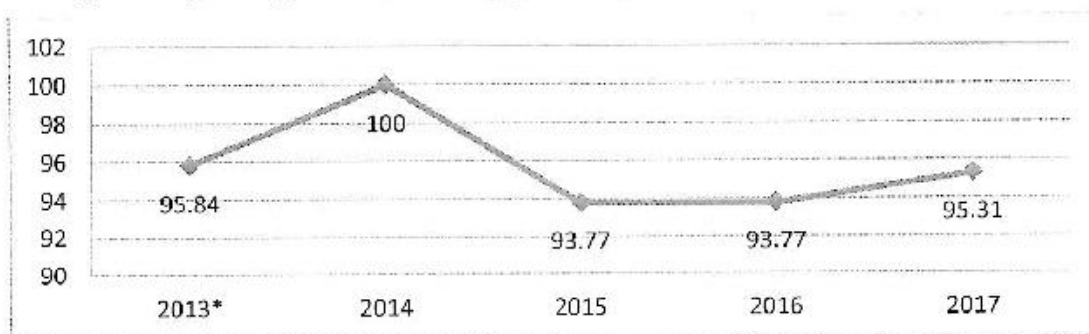


Gambar 2.102
Jumlah Nilai Produksi Hasil Pertanian
Di Kota Malang tahun 2013-2017
*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, 2018

2. Jumlah Nilai Produksi Hasil Perkebunan

Adapun capaian kinerja indikator jumlah nilai produksi hasil perkebunan di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 jumlah nilai produksi hasil perkebunan di Kota Malang diproyeksikan sebesar 95,84%. Pada tahun 2014 jumlah nilai produksi hasil perkebunan di Kota Malang sebesar 100%. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 jumlah nilai produksi hasil perkebunan di Kota Malang sebesar 93,77% atau 60 Ton. Capaian pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah nilai produksi hasil perkebunan di Kota Malang mengalami peningkatan, sehingga menjadi 95,31%.

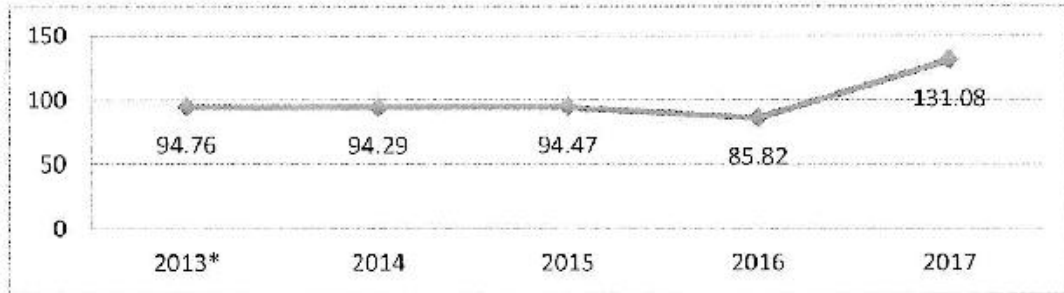


Gambar 2.103
Jumlah Nilai Produksi Hasil Perkebunan
Di Kota Malang tahun 2013-2017
*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, 2018

3. Jumlah Nilai Produksi Hasil Peternakan

Adapun capaian kinerja indikator jumlah nilai produksi hasil peternakan di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif.



Gambar 2.104
Jumlah Nilai Produksi Hasil Peternakan
Di Kota Malang tahun 2013-2017
*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Malang, 2018

Pada tahun 2013 jumlah nilai produksi hasil peternakan di Kota Malang diproyeksikan sebesar 94,76%. Pada tahun 2014 jumlah nilai produksi hasil peternakan di Kota Malang sebesar 94,29%. Pada tahun 2015 jumlah nilai produksi hasil peternakan di Kota Malang sebesar 94,47% atau 22.677 Ton. Pada tahun 2016 jumlah nilai produksi hasil peternakan di Kota Malang sebesar 85,82% atau 22.315 Ton. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah nilai produksi hasil peternakan di Kota Malang mengalami peningkatan, sehingga menjadi 131,08%.

4. Terjalannya Kemitraan Antara Pengusaha Kecil

Adapun capaian kinerja indikator terjalannya kemitraan antara pengusaha kecil di Kota Malang sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 telah mencapai 100%. Namun mengalami peningkatan jumlah terjalannya kemitraan antara pengusaha kecil. Dimana pada tahun 2015 yakni sebanyak 2 kemitraan yang terjalin antara pengusaha kecil dan pada tahun 2016 sebanyak 5 kemitraan yang terjalin antara pengusaha kecil.

C. Perdagangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perdagangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.39
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

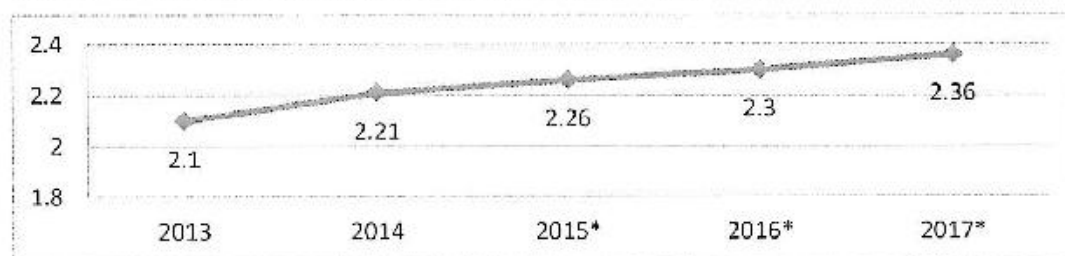
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Perdagangan							
1.	Persentase kontribusi retribusi pasar terhadap PAD	%	2,1	2,21	2,26*	2,3*	2,36*
2.	Cakupan Pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase Pemeliharaan Pasar Tradisional	Pasar Tradisional	13	13	13	25	26*

**) angka proyeksi*

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Malang, 2018

1. Persentase Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD

Adapun capaian indikator kinerja persentase kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kota Malang pada tahun 2014 sebesar 2,21% meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yang sebesar 2,1%. Sedangkan proyeksi persentase kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kota Malang tahun 2015 sebesar 2,26%, tahun 2016 sebesar 2,3% dan tahun 2017 sebesar 2,36%.



Gambar 2.105
 Persentase Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD
 Di Kota Malang tahun 2013-2017

**) angka proyeksi*

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Malang, 2018

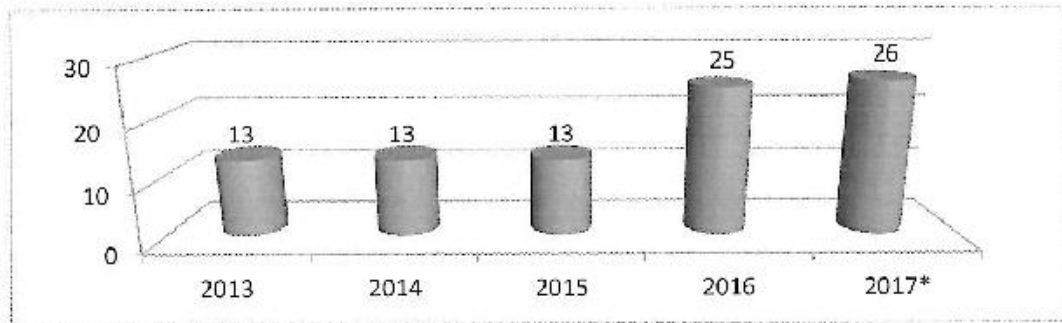
2. Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar

Adapun capaian indikator kinerja cakupan pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar di Kota Malang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 100%. Pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar setiap tahunnya dilakukan untuk mendukung peningkatan pelayanan di pasar tradisional.

3. Jumlah Pemeliharaan Pasar Tradisional

Adapun capaian indikator kinerja jumlah pemeliharaan pasar tradisional di Kota Malang pada tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 hingga tahun 2015

jumlah pemeliharaan pasara tradisional di Kota Malang sebanyak 13 pasar tradisional. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2016 dimana jumlah pemeliharaan pasar tradisional di Kota Malang sebanyak 25 pasar tradisional. Begitu juga dengan tahun 2017 diproyeksikan jumlah pemeliharaan pasar tradisional mengalami peningkatan menjadi 26 pasar tradisional.



Gambar 2.106
Jumlah Pemeliharaan Pasar Tradisional Di Kota Malang
Tahun 2013-2017
*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Pasar Kota Malang, 2018

D. Perindustrian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perindustrian Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.40
Hasil Kinerja Bidang Urusan Perindustrian
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Perindustrian							
1.	PDRB Sektor Industri	miliar rupiah	11096518,7	12.090.542,5	12.637.710,3	13.734.280,25	14.521.774,32
2.	Persentase industri yang menguasai teknologi	%	35	57,75*	59,97	33,8	35
3.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin		320	1260	2780	1293	510

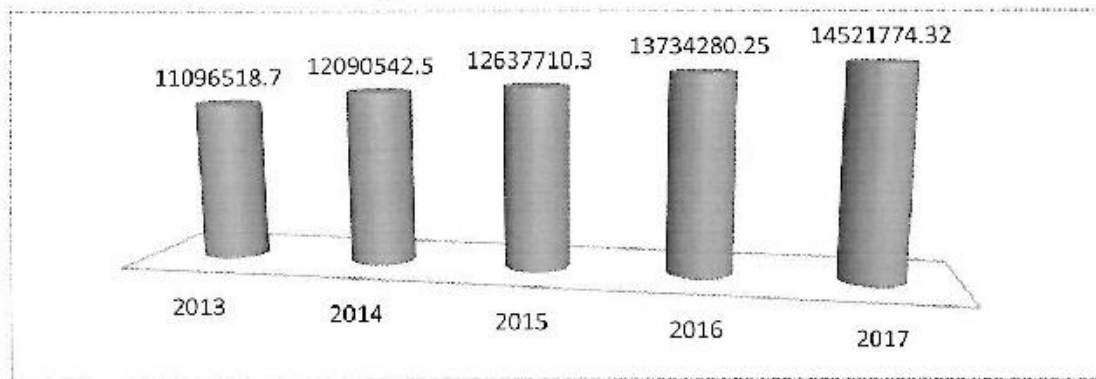
*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang, 2018

1. PDRB Sektor Industri

Persentase kontribusi PDRB sektor industri terus mengalami penurunan pada lima tahun terakhir, namun kinerja sektor perindustrian di Kota Malang pada tahun 2013-2017 masih menunjukkan trend positif. Pada tahun 2013 PDRB Sektor Industri di Kota Malang sebesar 11096518,7 miliar rupiah. Pada tahun 2014 PDRB Sektor Industri di Kota Malang sebesar 12.090.542,50 miliar rupiah. Pada tahun 2015 PDRB Sektor Industri di Kota Malang

mengalami peningkatan menjadi 12.637.710,30 miliar rupiah. Pada tahun 2016 PDRB Sektor Industri di Kota Malang mengalami peningkatan kembali menjadi 13.734.280,25 miliar rupiah. Begitu juga pada tahun 2017 juga kembali mengalami peningkatan menjadi 14.521.774,32 miliar rupiah.



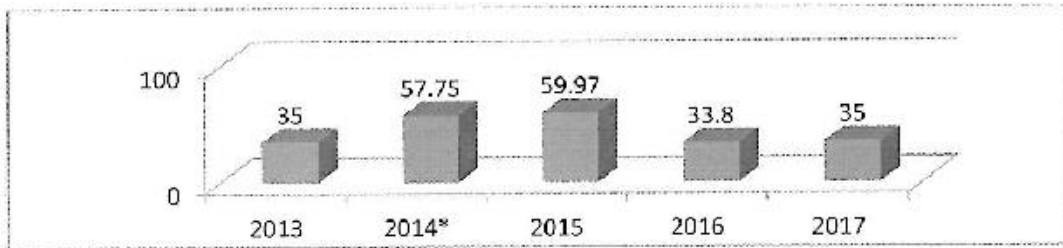
Gambar 2.107

PDRB Sektor Industri di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang, 2018

2. Persentase Industri yang Menguasai Teknologi

Adapun capaian jumlah IKM yang sudah menggunakan mekanisasi atau menguasai teknologi pada tahun 2013 sebesar 35%. Pada tahun 2015 jumlah IKM yang sudah menggunakan mekanisasi lebih dari 50% dalam tahapan proses produksinya sebanyak 1118 unit usaha dari 1981 unit usaha atau sebesar 59,97%. Pada tahun 2016 jumlah IKM yang sudah menggunakan mekanisasi lebih dari 50% dalam tahapan proses produksinya sebanyak 120 unit usaha dari 355 unit usaha atau sebesar 33,8%. Capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Hal ini kemungkinan disebabkan karena banyaknya industri formal yang tutup/tidak berproduksi/pindah lokasi, sehingga jumlah industri formal mengalami penurunan dari 635 unit usaha pada tahun 2015, hanya tinggal 355 unit usaha pada tahun 2016. Sementara industri yang menggunakan mekanisasi lebih dari 50% adalah industri formal, sehingga penurunan jumlah industri formal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap capaian indikator ini. Untuk itu, masih diperlukan kegiatan yang menunjang peningkatan teknologi bagi IKM di Kota Malang. Sedangkan capaian jumlah IKM yang sudah menggunakan mekanisasi atau menguasai teknologi pada tahun 2017 sebesar 35%.



Gambar 2.108

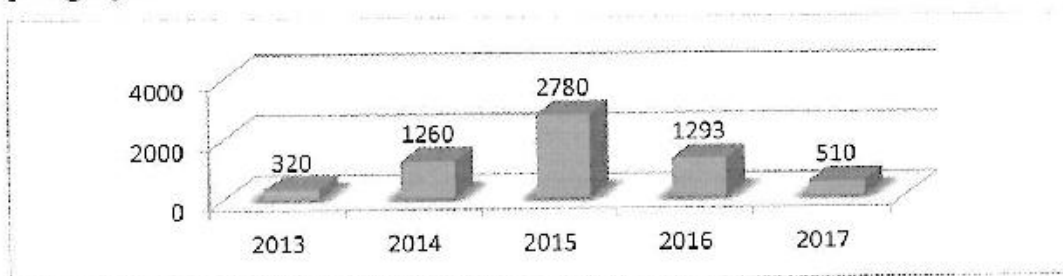
Persentase Produk Industri yang Berstandarisasi
di Kota Malang Tahun 2013-2017

*) angka proyeksi

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang, 2018

3. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Adapun capaian kinerja indikator cakupan bina kelompok pengrajin di Kota Malang Tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 cakupan bina kelompok pengrajin di Kota Malang sebesar 320 kelompok pengrajin. Pada tahun 2014 cakupan bina kelompok pengrajin di Kota Malang sebesar 1260 kelompok pengrajin. Pada tahun 2015 cakupan bina kelompok pengrajin di Kota Malang meningkat menjadi 2780 kelompok pengrajin. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok pengrajin di Kota Malang menurun menjadi 1293 kelompok pengrajin. Kemudian pada tahun 2017 cakupan bina kelompok pengrajin di Kota Malang mengalami penurunan yang drastis hingga menjadi 510 kelompok pengrajin



Gambar 2.109

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
di Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang, 2018

E. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kelautan dan perikanan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

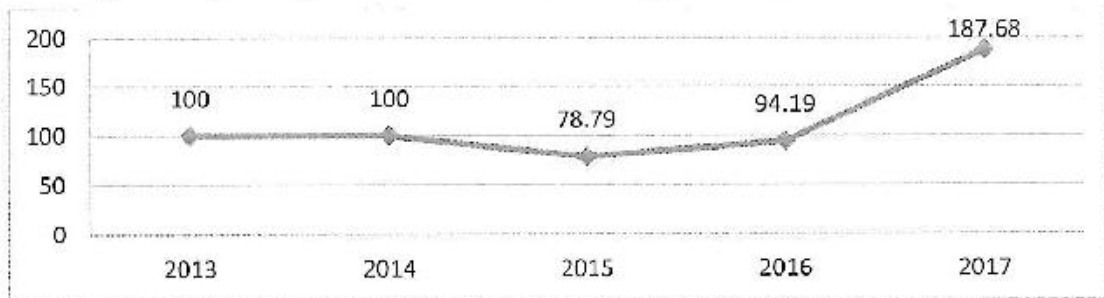
Tabel 2.41
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Kelautan dan Perikanan							
1.	Jumlah nilai produksi hasil perikanan	%	N/A	100	78,79	94,19	187,68

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2018

1. Jumlah nilai produksi hasil perikanan

Adapun capaian kinerja indikator jumlah nilai produksi hasil perikanan di Kota Malang pada tahun 2013-2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013-2014 jumlah nilai produksi hasil perikanan di Kota Malang sebesar 100% atau 40,52 Ton. Pada tahun 2015 jumlah nilai produksi hasil perikanan di Kota Malang sebesar 78,79% atau 58 Ton. Pada tahun 2016 jumlah nilai produksi hasil perikanan di Kota Malang sebesar 94,19% atau 69,7 Ton. Pada tahun 2017 jumlah nilai produksi hasil perikanan di Kota Malang mengalami peningkatan kembali, sehingga menjadi 187,68%.



Gambar 2.110
 Jumlah Nilai Produksi Hasil Perikanan
 Di Kota Malang tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, 2018

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan

Analisis kinerja atas layanan penunjang urusan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kota Malang, yaitu bidang urusan:

A. Perencanaan Pembangunan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.42
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Perencanaan Pembangunan							
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan kota	%	100	100	100	100	100

**) angka proyeksi*

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang, 2018

B. Keuangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.43
 Hasil Kinerja Bidang Urusan Keuangan
 Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Keuangan							
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Besaran SILPA	Rp	182.749.867.308,28	322.985.750.377,67	316.838.899.177,40	305.005.705.627,07	400.598.440.985,66
3.	Penetapan APBD	Rp	1.486.368.766.886,45	1.602.999.850.132,14	1.803.420.540.918,29	1.710.077.444.259,97	1.813.923.922.301,64

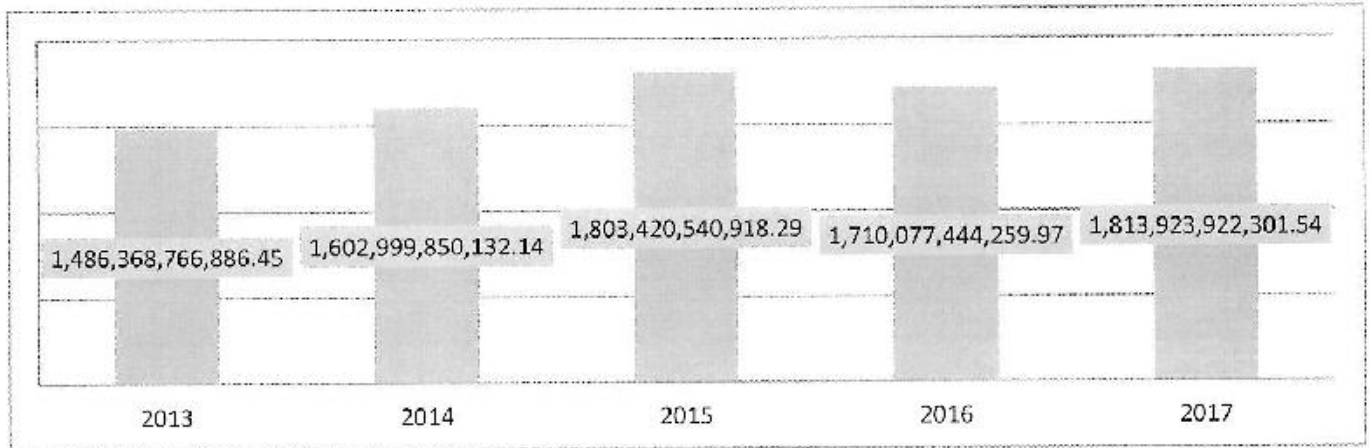
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2018

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Capaian indikator kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2013 hingga tahun 2017 selama 5 (lima) tahun berturut-turut mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

2. Penetapan APBD

Apabila mengacu pada keenam prinsip penyusunan APBD, maka sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 penetapan APBD Kota Malang telah menerapkan prinsip tepat waktu.



Gambar 2.111

Capaian Penetapan APBD Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2018

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.44
Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Keuangan							
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	24	30	38	40	45
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	55	58	60	63	65
3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	70	75	80	85	90

* angka proyeksi

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang, 2018

1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2013 rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Malang sebesar 24%. Pada tahun 2014 rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 30%. Pada tahun 2015 rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 38%. Pada tahun 2016 rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 40%. Pada tahun 2017 rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 45%.

2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pada tahun 2013 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kota Malang sebesar 55%. Pada tahun 2014 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 58%. Pada tahun 2015 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 60%. Pada tahun 2016 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 63%. Pada tahun 2017 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 65%.

3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Pada tahun 2014 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Malang sebesar 70%. Pada tahun 2014 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 75%. Pada tahun 2015 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 80%. Pada tahun 2016 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 85%. Pada tahun 2017 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 90%.

D. Pengawasan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengawasan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.45
Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengawasan
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
Keuangan							
1.	Jumlah tindak lanjut temuan	Tindak lanjut	401	507	504	555	556
2.	Jumlah temuan BPK	kasus	11	14	11	9	9

Sumber: Inspektorat Kota Malang, 2018

1. Jumlah Tindak Lanjut Temuan

Adapun jumlah tindak lanjut temuan di Kota Malang pada tahun 2013-2017, dapat diketahui lima tahun terakhir mengalami perubahan. Pada tahun 2013 jumlah tindak lanjut temuan di Kota Malang sebanyak 401 tindak lanjut temuan. Pada tahun 2014 jumlah tindak lanjut temuan di Kota Malang mengalami peningkatan 507 tindak lanjut temuan. Pada tahun 2015 jumlah tindak lanjut temuan di Kota Malang mengalami penurunan menjadi 504 tindak lanjut temuan. Pada tahun 2016 jumlah tindak lanjut temuan di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 555 tindak lanjut temuan. Pada tahun 2017 jumlah tindak lanjut temuan di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 556 tindak lanjut temuan.

2. Jumlah Temuan BPK

Adapun jumlah temuan BPK di Kota Malang pada tahun 2013-2017, dapat diketahui persentase lima tahun terakhir dalam mengalami perubahan. Pada tahun 2013 jumlah temuan BPK di Kota Malang sebanyak 11 kasus. Pada tahun 2014 jumlah temuan BPK di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 14 kasus. Pada tahun 2015 jumlah temuan BPK di Kota Malang mengalami penurunan menjadi 11 kasus. Pada tahun 2016 jumlah temuan BPK di Kota Malang mengalami penurunan menjadi 9 kasus. Pada tahun 2017 jumlah temuan BPK di Kota Malang masih tetap pada angka 9 kasus.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing ini terklasifikasi menjadi 4 (empat) fokus yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

A. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat (*Hukum Engel/Engel law*).

Tabel 2.46
(T-A.27)

Persentase Pengeluaran Rumah Tangga
Dirinci Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan
di Kota Malang Tahun 2013 s.d 2016

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
1.	Makan	%	41,31	38,09	39,21	38,63
2.	Non Makanan	%	58,69	61,91	60,79	61,37
Total		%	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Malang, 2018

B. Manajemen Daerah Terhadap Revolusi

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun “*Making Indonesia 4.0*” dalam menghadapi Revolusi Industri keempat. *Road Map Making Indonesia 4.0* memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang, termasuk di sektor makanan dan minuman; sektor tekstil dan pakaian; sektor otomotif; sektor kimia; dan sektor elektronik yang menjadi fokus dan 10 prioritas nasional dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia, yaitu :

- a. Perbaiki alur aliran barang dan material;
- b. Desain ulang zona industri;
- c. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (*sustainability*);
- d. Memberdayakan UMKM;

- e. Membangun infrastruktur digital Indonesia;
- f. Menarik minat investasi asing;
- g. Peningkatan kualitas SDM;
- h. Pembangunan ekosistem inovasi;
- i. Insentif untuk investasi teknologi; dan
- j. Harmonisasi aturan dan kebijakan

Bagi Indonesia, revolusi industri akan memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Hingga tahun 2016, industri manufaktur berkontribusi sebesar 20 persen PDB Indonesia dan membuka lebih dari 14 juta lapangan pekerjaan.

Perubahan perekonomian Indonesia dari ekonomi berbasis sumberdaya alam menjadi ekonomi berbasis jasa, membawa dampak menurunnya kontribusi manufaktur Indonesia menjadi 22 persen pada tahun 2016 berbanding terbalik pada tahun 2001 yang mencapai 26 persen dan diperkirakan akan terus menurun pada tahun 2030 jika tidak melakukan intervensi apapun. Guna menyikapi tantangan internasional tersebut maka kebijakan pemerintah Kota Malang memberlakukan strategi dan upaya kebijakan melalui Pengembangan industri kreatif dan IKM potensial lainnya Kota Malang menghadapi Revolusi Industri 4.0.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisa kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator berikut ini:

A. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Adapun panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Malang tahun 2013-2014 seperti pada tabel berikut ini:

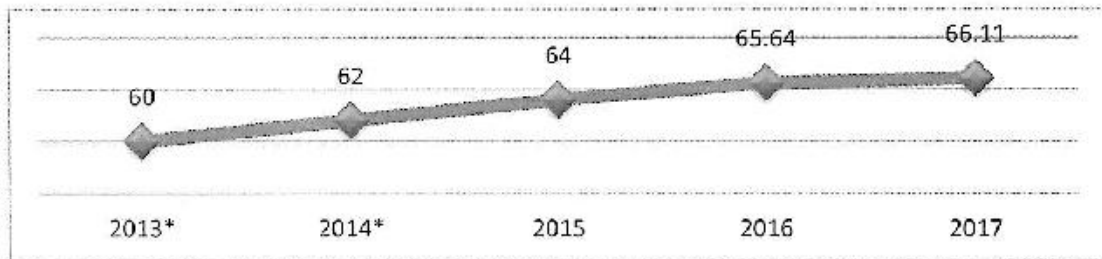
Tabel 2.47
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
di Kota Malang Tahun 2013-2014

No	Uraian	2013	2014
1.	Panjang jalan kota	140,78	204,19
2.	Jumlah kendaraan bermotor	82.865	223.081
	Rasio (km/ 1.0000 kendaraan)	1,7	0,915

Sumber: DPUPPB dan DISHUB Kota Malang, 2014

B. Persentase Layanan Air Bersih

Berikut ini perkembangan capaian persentase layanan air bersih di Kota Malang pada tahun 2013-2017:



Gambar 2.112

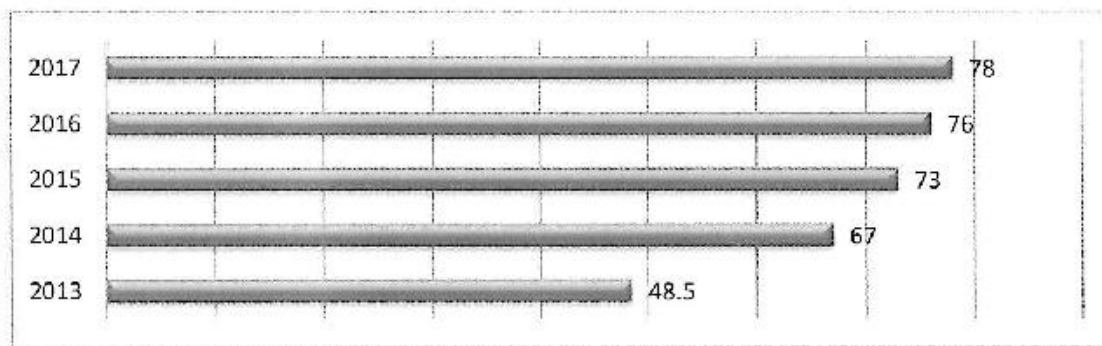
Persentase Layanan Air Bersih di Kota Malang Tahun 2013-2017

*) angka proyeksi

Sumber: PDAM Kota Malang, 2017

C. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Berikut perkembangan capaian persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kota Malang Tahun 2013-2017:



Gambar 2.113

Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
Kota Malang Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang Tahun 2018

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas fokus iklim berinvestasi dilakukan terhadap 5 (lima) indikator, yaitu angka kriminalitas, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, serta jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim investasi.

A. Lama Proses Perijinan

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, standar waktu pelayanan perizinan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.48
Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kota Malang

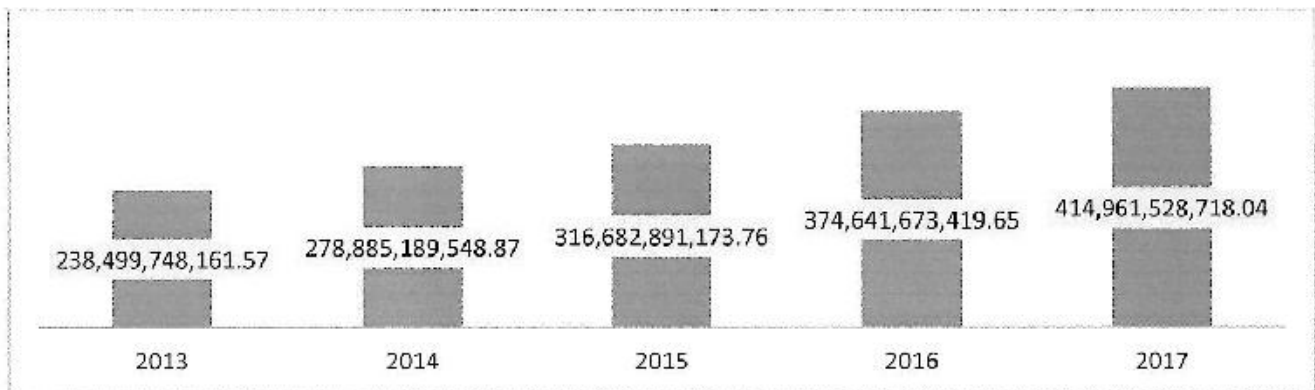
No	Jenis Izin	Standar Waktu
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4 hari kerja
2.	Izin Gangguan (HO) AMDAL	9 hari kerja
3.	Izin Gangguan (HO) UKL-UPL atau SPPL	8 hari kerja
4.	Izin Pemasangan Reklame Sementara/Insidental	1 hari kerja
5.	Izin Pemasangan Reklame Tetap/Permanen (Ukuran 8m ²)	7 hari kerja
6.	Izin Pemasangan Reklame Tetap/Permanen (Ukuran >8m ² dan >12m ²)	8 hari kerja
7.	Izin Usaha Angkutan	4 hari kerja
8.	Izin Trayek	4 hari kerja
9.	Izin Kegiatan yang Berdampak pada Keramaian umum/ Tontonan	4 hari kerja
10.	Izin Penggunaan Tanah Makam	1 hari kerja
11.	Izin Usaha Percetakan	4 hari kerja
12.	Izin Usaha Konstruksi	22 hari kerja
13.	Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata	5 hari kerja
14.	Izin Usaha Perdagangan (IUP/SIUP)	8 hari kerja
15.	Izin Tanda Daftar Industri (TDI)	8 hari kerja
16.	Izin Usaha Industri (UI)	8 hari kerja
17.	Izin Perluasan Industri	8 hari kerja

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Tahun 2017

B. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah.

Jenis pajak daerah di Kota Malang pada tahun 2013 sebanyak 9 jenis pajak yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang meliputi: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Parkir; (7) Pajak Bea Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan; (8) Pajak Air Bawah Tanah; dan (9) Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun perkembangan proporsi nilai pajak daerah dalam realisasi PAD Kota Malang pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

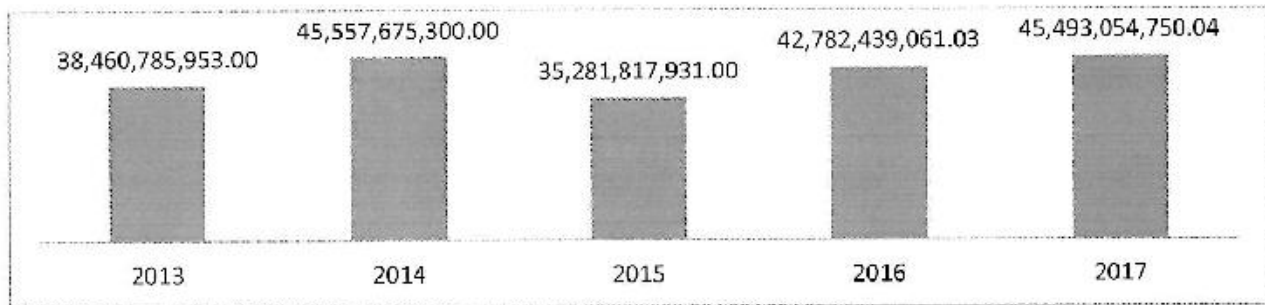


Gambar 2.114

Proporsi Nilai Pajak Daerah dalam Realisasi PAD Kota Malang
Tahun Anggaran 2013-2017

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang,
Tahun 2018

Sedangkan Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Malang meliputi: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil; (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (7) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (8) Retribusi Terminal; (9) Retribusi Rumah Potong Hewan; (10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; (11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; (12) Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha; (13) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (14) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian; (15) Retribusi Ijin Trayek; (16) Retribusi Izin Bidang Perindustrian dan Perdagangan; (17) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; serta (18) Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. Adapun perkembangan proporsi nilai retribusi daerah dalam realisasi PAD Kota Malang pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.115

Proporsi Nilai Retribusi Daerah dalam Realisasi PAD Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2017

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Tahun 2018

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas fokus sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan di Kota Malang pada Tahun 2013-2017.

A. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Perkembangan hasil analisis rasio ketergantungan Kota Malang pada Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.49
Rasio Ketergantungan Tahun 2013-2017
Kota Malang

No.	Tingkat Ketergantungan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
a.	Penduduk Usia <15 tahun	Orang	182.291	183.388	184.521	184.521	186.666
b.	Penduduk Usia >64 tahun	Orang	47.636	47.957	48.294	48.294	48.936
c.	Penduduk usia tidak produktif	Orang	229.927	231.345	232.815	232.815	235.602
d.	Penduduk Usia 15-64 tahun	Orang	610.876	614.628	618.483	618.483	625.812
e.	Rasio Ketergantungan		37,639	37,640	37,643	37,643	37,647

Sumber: BPS Kota Malang Tahun 2018

Rasio Ketergantungan yang terjadi di Kota Malang pada tahun 2013 s/d tahun 2017 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2013 rasio ketergantungan di Kota Malang sebesar 37,639. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 37,640. Pada tahun 2015-2016 rasio ketergantungan di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 37,643. Pada taun 2017 rasio ketergantungan di Kota Malang kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 37,647.

Tabel 2.50
 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Kota Malang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1) KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.1.1	Perumbuhan PDRB	%	12,52	12,68	12,89	13,02	13,38	>	
1.1.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,2	5,8	5,61	5,61	5,69	>	
1.1.1.3	Inflasi	%	7,92	8,14	3,32	2,62	3,75	<	
1.1.1.4	PDRB per Kapita	Juta Rp						<	
1.2	Kesejahteraan Sosial		78,44	78,96	80,05	80,46	80,55	<	
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,82	72,3	72,6	72,68	72,77	70,98	>
1.2.1.1	Angka Harapan Hidup	tahun	69,71	69,96	100	100	100	100	=
1.2.2	Angka Melek Huruf	%	70,82	72,3	72,6	72,69	72,77	71	>
1.2.4	Angka usia harapan hidup	tahun	0,19	0,18	0,16	0,11	0,09	0,46	>
1.2.5	Persentase berita gizi buruk	%	85,25	88,2	100	100	100	100	=
1.2.6	Cakupan kelurahan siaga aktif	%	62,95	63,66	60,56	60,56	64,77	75	<
1.2.7	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	7,14	7,22	7,28	7,28	7,22	5,7	>
1.2.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	98,27	92,78	92,72	92,72	92,78	98,27	<
1.2.9	Rasio penduduk yang bekerja	%	20,18	21,11	23,23	27,41	29,83	<	
1.2.11	Rasio PAD Terhadap Pendapatan	%	20,06	50,1	77,12	78,1	91,87	85	<
1.2.12	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
1.3	Seni Budaya dan Olahraga								
1.3.1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Grup	182	45	45	45*	46*		
1.3.3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Klub	145	174	180	185	185		
2) ASPEK PELAYANAN UMUM									
2.1	Layanan Urusan Wajib Dasar								
2.1.1	Pendidikan								
2.1.1.1	Persentase Peserta PAUD	%	68,3	64,01	82,39	84,28	86,09	85	>
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar	%	99,63	93,92	95,99	95,86	105,89	99,63	>
2.1.1.2.1	APK SD/MI/Paket A	%	92,71	80,16	76,83	85,13	100,22	94,71	>
2.1.1.2.2	APK SMP/MTs/Paket B	%	80,85	83,83	117,39	84,67	-	84,67	<
2.1.1.2.3	APK SMA/SMK/MA/Paket C	%							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.1.3	Angka partisipasi murni								
2.1.1.3.1	APM SD/MI/Paket A	%	88,82	82,48	85,87	82,79	95,81	88,99	
2.1.1.3.2	APM SMP/MTs/Paket B	%	67,07	68,9	58,52	52,89	81,51	71	
2.1.1.3.3	APM SMA/SMK/MA/Paket C	%	58,76	69,99	90,89	58,55	-		
2.1.1.4	Angka Partisipasi sekolah								
2.1.1.4.1	APS SD/MI/Paket A	%	107,34	126,55	104,2	105,36	72,87		
2.1.1.4.2	APS SMP/MTs/Paket B	%	82,85	121,33	104,37	106,35	104,87		
2.1.1.5	Angka Putus Sekolah								
2.1.1.5.1	APS SD/MI	%	0,05	0,06	0,06	0,05	0,04	0	
2.1.1.5.2	APS SMP/MTs	%	0,19	0,12	0,22	0,18	0,09	0	
2.1.1.6	Angka Kelulusan								
2.1.1.6.1	AK SD/MI	%	99,21	99,89	89	100	99,35	100	
2.1.1.6.2	AK SMP/MTs	%	99,63	97,07	89	100	99,79	100	
2.1.1.7	Angka Melanjutkan								
2.1.1.7.1	AM dan SD/MI ke SMP/MTs	%	105,5	93,84	104,61	115,15	112	95,34	
2.1.1.7.2	AM per SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	141,81	99,9	157,29	106,55	103,48	89,98	
2.1.1.8	Fasilitas Pendidikan								
2.1.1.8.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	55,68	60,69	86,29	87,92*	68,92*	65,68	
2.1.1.8.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	69,11	74,8	81,85	92,83*	93,83*	74,11	
2.1.1.8.3	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	55,56	69,9	83,35	94,83*	95,88*	61,36	
2.1.1.9	Rasio guru terhadap murid								
2.1.1.9.1	Rasio guru terhadap murid SD/MI		0,068	0,024	0,023*	0,022*	0,021*	<	
2.1.1.9.2	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs		0,073	0,069	0,06*	0,055*	0,051*	>	
2.1.1.9.3	Rasio guru terhadap murid SMA/MA		0,095	0,085	0,081*	0,078*	0,075*	>	
2.1.1.9.4	Rasio guru terhadap murid SMK		0,073						
2.1.1.9	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata								
2.1.1.9.1	Rasio guru terhadap murid per kelas SD/MI		1,7	1,30	1,25	1,30*	0,56	1,63	
2.1.1.9.2	Rasio guru terhadap murid per kelas SMP/MTs		2,5	1,30	1,26	1,24*	1,1	2,2	
2.1.1.9.3	Rasio guru terhadap murid per kelas SMA/MA		2,7	1,30	1,34	1,29*	2,69	2,69	
2.1.1.9.4	Rasio guru terhadap murid per kelas SMK		3,5	3,5*	3,5*	3,7*	3,7*	>	
2.1.1.9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (per jenjang pendidikan)								
2.1.1.9.1	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	%	39,49	40,82*	41,82*	43,84*	0,89	1,63	
2.1.1.9.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	%	22,83	23,83*	22,83*	23,84*	1,1	2,2	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.1.9.3	Rasio ketersediaan sekolah temadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK	%	28,96	28,21*	30,82*	32,32*	33,84*	2,89	>
2.1.1.11	Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	27,8*	27,97	42,45	81,47	88,58	74,06	>
2.1.2	Kesehatan								
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000/KH	15,65	15,68	9,9	9,54	6,28	23	>
2.1.2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	Bayi	984,35	984,32	980,1	980,46	983,72	977	>
2.1.2.3	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000/KH	0,22	16,81	0,77	10,82	6,78	25	>
2.1.2.4	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000/KH	14,2*	14,89	8,61	6,86	5,41	12	>
2.1.2.5	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000/KH	148,75	97,97	68,24	75,29	120,43	70	<
2.1.2.6	Rasio posyandu per satuan balita	per 100 balita	1,97	1,103	1,94	1,111	1,93	1,102	>
2.1.2.7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk (tiap 1.000 penduduk)	per 1000 penduduk	1,771	0,12	0,17	0,14	0,14	0,12	>
2.1.2.8	Rasio Rumah sakit terhdap penduduk (tiap 10.000 penduduk)	per 10.000 penduduk	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29	0,3	<
2.1.2.9.1	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	97	103,93	30,07	31,99	58,19	95	<
2.1.2.9.2	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	61,46	53,64	82,53	91,09	63,04	52	>
2.1.2.9.3	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	29,1	38,76	6,07	7,36	12,95	27	<
2.1.2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	0,28	0,28	1,57	1,35	1,58	1,3	>
2.1.2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	95,41	87,75	82,89	84,36	93,18	93	>
2.1.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	92,24	91,59	90,73	93,58	91,86	96	<
2.1.2.13	Cakupan DesakKelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	89,47	62,45	86,67	71,93	82,46	91	<
2.1.2.14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	=
2.1.2.15	Persentase anak usia 1 tahun yang diformisasi campak	%	97,87*	88,9	89,7	95,9	97,4	95	>
2.1.2.16	AFP Rate (Non Polio) Per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	per 100.00 penduduk	1,59	6	0	1	2	4	<
2.1.2.17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	=
2.1.2.18	Cakupan penemuan pasien Baru TBC BTA Positif	per 100.000 penduduk	68,11	59,2	54,2	62,1	64,7	75	<
2.1.2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	98,1	100	<
2.1.2.20	Penderita diare yang ditangani	%	70,64	75,8	100	100	100	100	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.2.22	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	55,88	39,02	46	6,33	0,67	25	>
2.1.2.23	Cakupan kunjungan Bayi	%	92,72	98,55	78,99	87,53	93,9	96	<
2.1.2.24	Cakupan puskesmas	per satuan penduduk	300	300	300	300	320	320	=
2.1.2.25	Cakupan puskesmas pembantu	per satuan penduduk	57,99	57,89	57,89	57,88	57,89	57,89	=
2.1.2.26	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	90,32	88,52	87,67	88,59	89,98	96	<
2.1.2.27	Cakupan pelayanan nias	%	89	91,5	85,81	91,16	91,6	96	<
2.1.2.28	Cakupan rekonstruksi dengan komplikasi yang ditangani	%	54,89	76,55	71,89	83,42	92,52	90	>
2.1.2.29	Cakupan pelayanan anak balita	%	84,03	80,7	63,06	68,1	74,3	84	<
2.1.2.30	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan selingkat	%	100	99,95	100	99,68	99,98	98,7	>
2.1.2.31	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	74	76,03	77,92	11,39	20,43	77	>
2.1.2.32	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	=
2.1.2.33	Cakupan Keurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	=
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2.1.3.1	Pekerjaan Umum								
2.1.3.1.2	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	100	100	100	100	100	98,9	<
2.1.3.1.3	Persentase rumah tinggal bersantitas	%	73	68	70	72	83,98	80	>
2.1.3.1.4	Persentase drainase kota dalam kondisi baik	%	97	95,8	88,6	72,77	81,49	76,9	>
2.1.3.1.7	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	87	77	85	87,5	90,18	89	>
2.1.3.1.8	Jumlah pelangan Hoppam	Jiwa	27.266	28.206	29.955	32.807	52.410	90	>
2.1.3.1.9	Persentase Keluarga yang memiliki air minum layak	%	84*	85	86	87	92	90	>
2.1.3.2	Penataan Ruang								
2.1.3.2.1	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	15,92	12,35	10,83	12,38	12,38	15,96	<
2.1.3.2.2	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	%	90	83	90	100	100	97	>
2.1.3.2.3	Persentase penurunan pelanggaran tata ruang	%	100	7,69	7,63*	8,82*	7,82*	15	<
2.1.3.2.4	Persentase Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	%	0	7*	7	12	14,65	15	<
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
2.1.4.6	Luasan kawasan kumuh	ha	608	598	550,1	494,647	479,85	37,1	<
2.1.4.7	Tingkat hunan rumah susun sedemana	%	77,29*	76,82*	79,92*	80*	80,73	80,73	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
	mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu								
2.2.2.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	0	0	0	0	100	=	
2.2.2.6	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang dibankan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	=	
2.2.2.7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	31,25	17,24	8	7,89	17,24	<	
2.2.2.8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	=	
2.2.2.9	Persentase organisasi perempuan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	=	
2.2.2.10	Persentase Forum Anak yang Difasilitasi	%	10	83,33	83,33	83,33	100	=	
2.2.3	Pangan								
2.2.3.1	Ketersediaan pangan utama (food availability)	Ton	10,11*	10,76	10,18	10,18	11,3	>	
2.2.4	Pertanian								
2.2.4.1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah	RP	3.250.000.000	3.250.451.895	3.250.451.895	3.127.796.858.00	3.600.000.000	<	
2.2.4.2	Persentase Bidang Lahan Aset Daerah penyumbang Pendapatan Asli Daerah	%	51,13	53,95	58,95	58,95	51	>	
2.2.4.3	Persentase bidang Lahan Aser yang Sudah Bersertifikat	%	81,7	31,62	10,49	10,9	10,89	>	
2.2.4.4	Persentase Penyelesaian Sengketa Lahan Aset Daerah	%	100	66,66	66,66	46,66	100	=	
2.2.4.5	Persentase Data Aset Daerah Yang Akurat sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya	%	25*	27,5*	35	48,25	80	<	
2.2.5	Lingkungan Hidup								
2.2.5.1	Persentase Pemenuhan PERDA/Kajian Bidang Lingkungan Hidup	Perda	2*	3	2	1	1	=	
2.2.5.2	Adanya Sekolah peduli dan berbudaya Lingkungan (Adiwiyata).	sekolah	24	60	80	113	90	>	
2.2.5.3	Persentase industri yang memiliki AMDAL, UKL/UPL/izin Lingkungan	kegiatan	190*	185	200	500	350	>	
2.2.5.4	Jumlah Perusahaan yang memiliki AMDAL,UKL/UPL dan izin Lingkungan	perumahan	87*	68*	71*	72	72	=	
2.2.5.5	Prosentase ketepatan kegiatan usaha terhadap upaya pencegahan dan pengendalian lingkungan	perusahaan	90*	90	90	96*		=	
2.2.5.6	Persentase kegiatan ekonomi yang memiliki dokumen lingkungan/izin lingkungan	%	65,77	65,77	76,91*	100	625	>	

No	Aspek/Fokus/Bidang Unsur/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.5.9	Persentase perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan limbah cair.	%	32*	29*	32*	30	20	=	
2.2.5.10	Persentase Perusahaan dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).	%	4,81*	5,72*	4,82*	4,76*	4,58	<	
2.2.5.11	Persentase perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan udara emisi dari sumber tidak bergerak.	%	27*	28*	29*	30*	30	=	
2.2.5.12	Persentase perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	%	12*	13*	14*	15	30	=	
2.2.5.13	Persentase penanganan sampah	%	95,42	97,78*	91,85*	70,71*	8,45	<	
2.2.5.14	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	2,98	74*	78*	80*	84	>	
2.2.5.15	Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA	%	98	96	97*	80*	67,73	<	
2.2.5.16	Persentase volume sampah yang dimanfaatkan	%	25	25	26*	26*	28*	<	
2.2.5.17	Persentase pengoperasian TPA	%	48*	45*	65*	55*	60	<	
2.2.5.18	Persentase menurunnya pelanggaran dibidang lingkungan hidup	%	9*	10*	11*	10*	10	=	
2.2.5.19	Persentase tingkat kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup	%	18*	19*	19*	20*	20	<	
2.2.5.20	Persentase kendaraan operasional persampahan yang layak jalan	%	70*	71*	78*	80*	85	<	
2.2.5.21	Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kesesuaiannya.	Paket	Belum dilakukan	Belum dilakukan	1	1	1*	=	
2.2.5.22	Persentase adanya konservasi dan rehabilitasi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (lahan kritis, sumber air, keanekaragaman hayati, dan ekosistem).	kegiatan	1*	1*	1*	1	1*	=	
2.2.5.23	Jumlah sumur resapan dan biopori di Kota Malang.	unit	0	0	2	3	3*	=	
2.2.5.24	Upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	kegiatan	1*	1*	1*	1	2*	=	
2.2.5.25	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	titik sumber air	25*	28	30	32*	35*	=	
2.2.5.26	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	kasus	4*	4	4	4	4	=	
2.2.5.27	Adanya pengembangan data dan informasi lingkungan (Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Malang)	paket	1	1*	2*	1	3*	=	
2.2.5.28	Persentase jumlah titik pantau udara ambient dalam rangka pencagahan pencemaran udara.	titik pantau udara	15*	17*	19*	20	22*	<	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.6.29	Jumlah titik pantau Air Badan Air (ABA) dalam rangka pencemaran air		18 titik x2 kali	18 titik x2 kali	18 titik x 2 kali	18 titik X 3 kali	18 titik X 3 kali	=	
2.2.6.30	Persentase jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor dalam rangka pencegahan pencemaran udara.	paket:	1	1	1	1	1	=	
2.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.2.6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Jiwa	562.511	588.861	619.318	631.263	623.696	<	
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	137,44	85,63	59,24	72,93	74,48	=	
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100	100	100	=	
2.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	100	100	100	100	100	=	
2.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100	100	100	=	
2.2.6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Lembar	56839*	57731*	58.801	59.912	38.500	<	
2.2.6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Lembar	21.812	20.165	17.198	19.675	19.817	>	
2.2.6.8	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Lembar	63.100	71.500	78.100	69.172	66.000	>	
2.2.6.9	Cakupan Penerbitan KTP – elektronik	Lembar	55/84*	56.000	58.801	97.624	38.500	>	
2.2.6.10	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	Lembar	831	2.535	2.388	4.378	5.895	>	
2.2.7	Pembudayaan Masyarakat dan Desa								
2.2.7.1	Persentase LSM aktif	jumlah LSM	8	11	14	20	12	=	
2.2.7.2	Jumlah LSM dan Ormas yang mengikuti pembinaan	Jumlah Organisasi	114	70	170	170	170	=	
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2.2.8.1	Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	%	1,8*	1,79*	1,7*	1,78	1,74	>	
2.2.8.2	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	75,89*	76,99*	76,89*	77,21	77,35	>	
2.2.8.3	Angka kelahiran pada remaja (ASFR) 15-19 tahun	%	5,9*	6,1*	6,3*	6,4	6,2	>	
2.2.8.4	Persentase Laju pertumbuhan penduduk	%	0,51	1,76	1,51	1,25	0,7	<	
2.2.8.5	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif	%	73,25	77,36	76,68	77,98	77,96	=	
2.2.8.6	Rata-rata jumlah anak perkeluarga		0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	=	
2.2.8.7	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	%	1,02	1,26	0,36	0,38	0,36	>	
2.2.8.8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,24	12,18	12,72	12,33	12,18	>	
2.2.8.9	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	70,24	88,84	83,83	74,73	88,94	<	
2.2.8.10	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	30	72,24	73,95	73,88	72,24	>	
2.2.8.11	Ratio petugas Lapangan (PLKB/PKB)		1,06	1,08	0,89	0,89	0,93	<	
2.2.8.12	Ratio petugas pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) di setiap kelurahan		1,1	1,12	1,1	1,1	1,1	=	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.8.13	Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	=
2.2.8.14	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) yang ber-KB	%	81,83	95,68	84,83	100	100	100*	84,85 >
2.2.8.15	Jumlah penyandang penyakit reproduksi remaja	orang	0	0	0	0	0	0	=
2.2.8.16	Jumlah kegiatan pembinaan keluarga	Kegiatan	19*	22	17	14	18*	18*	>
2.2.8.17	Persentase PUS anggota BKB, BKR, BKL, UPPKS yang mendapatkan pembinaan kesetaraan ber-KB	%	71,82*	74,76*	76,62*	77,09	75,49	75,49	<
2.2.8.18	Jumlah keluarga sejahtera dan keluarga pra sejahtera anggota UPPKS	Keluarga	1187*	1189*	1190*	1200	1209	1250	<
2.2.9	Perhubungan								
2.2.9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	5.182.653	2.137.094	3.485.717	3.485.717	2.448	2.448	=
2.2.9.2	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	15.953	15.596	16.149	16.385	13.744	18.000	=
2.2.9.3	Persentase layanan angkutan darat	%	54,8	53,2	61,7	50,2	48	84	<
2.2.9.4	Pemasangan Rambu-rambu	buah	153	143	31	1243	76	76	=
2.2.10	Komunikasi dan Informatika								
2.2.10.1	Cakupan pengembangan dan pembedayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	KIM	9	9	12	14	14	14	=
2.2.10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	89,9	81,6	92,5	93,3	93,8	94	=
2.2.10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	48,5	67	73	76	76	81	=
2.2.10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	78,3	80,3	82,6	85,3	88,5	92,1	=
2.2.10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	75,6	77,2	79,8	82,5	83,1	84,7	=
2.2.10.6	Persentase penyelesaian pengaduan melalui SMS pengguna nomor telekomunikasi dalam rangka perlindungan masyarakat	%	25*	29*	31	32	36,29	38,31	=
2.2.10.7	Persentase meningkatnya rata-rata pengunjung website per tahun	%	13,65*	14,01*	14,14	15,14	15,1	15,15	=
2.2.10.8	Persentase luas area bank spot	%	9,1	8,4	7,5	8,7	6,2	6	=
2.2.10.9	Persentase informasi yang di sebarikan melalui KIM	%	4,98*	5,65*	6,44	7,44	7,44	7,44	=
2.2.10.10	Persentase informasi yang dimanfaatkan masyarakat	%	72*	75*	78	79	79	79	=
2.2.10.11	Jumlah pengguna informasi publik yang terlayani di bagi jumlah pengguna yang masuk X 100 %	%	100	100	94,65	95,65	95,54	95,73	=
2.2.10.12	Jumlah website yang dimiliki pemerintah	Website	100*	108*	108	108	129	101	>
2.2.10.13	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah pelaksanaan deseminasi dan pendistribusian informasi melalui media pertera	SIMDA	29	32	42	42	42	42	=
2.2.10.14	pelaksanaan deseminasi dan pendistribusian informasi	%	12	25*	70*	92	92	92	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi: belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.10.15	melalui media interpersonal								
2.2.11	Prosentase simda yang terintegrasi	%	100*	100*	100	100	100	100	=
2.2.11.1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	64,61	71,71	74,36	76,44	78,94	79,01	<
2.2.11.6	Perentase jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi	%	2900*	2902	2931*	2945*	2978*	2902	=
2.2.11.7	Jumlah UKM yang telah mendapat pembinaan dalam prosedur mengakses permodalan	unit	218*	220	228*	227*	228*	220	=
2.2.11.8	Jumlah UMKM yang memiliki legalitas	UMKM	71*	74	90*	125	130*	125	=
2.2.11.9	Persentase UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha	%	71,72*	73,32	75,76	77,79	78,87	77,84	>
2.2.11.10	Persentase UKM yang mengakses sistem pendukung usaha	%	55,82*	50,9	59,76	70,59	72,46*	67,86	>
2.2.11.11	Persentase wirusaha mikro binaan yang berkembang	%	4,12*	4,58*	4,63*	4,55*	4,67	4,69	<
2.2.11.12	Persentase Pertumbuhan Wirusaha Mikro Baru Binaan	%	4,14*	4,98*	5,11*	5,2*	5,25	5,46	<
2.2.12	Penanaman Modal								
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	2	1	2*	2*	2*	0,75	<
2.2.12.4	Prosentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	%	42	30*	2,9	2,45	3,8	3	>
2.2.13	Keperguruan dan Olahraga								
2.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	31,23*	32,93	32,32	34,15	33,54	33	>
2.2.13.2	Persentase wirusaha muda	%	0,4*	0,42	0,31	0,42	0,67	0,67	<
2.2.13.3	Cakupan pembinaan olahraga	Pembinaan	97	97	97	97	97	97	=
2.2.13.4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Pelatihan	72*	73	73	78	80	60	=
2.2.13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	Pembinaan	60*	60	60	62	63	63	=
2.2.13.6	Jumlah atlet berprestasi	orang	30	50	208	319	376	376	=
2.2.13.7	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	65	15	8	15	11	12	<
2.2.14	Statistik								
2.2.14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		tidak	tidak	tidak	tidak	ada	ada	=
2.2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka"		ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
2.2.14.3	Buku "PDRB"		ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
2.2.15	Persandian								
2.2.15.1	Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan	Dokumen	26	33	39	45	50	66	=
2.2.16	Kebudayaan								
2.2.16.1	Persentase budaya tradisional yang ditamalkan sebagai potensi wisata Kota Malang	%	20*	22*	24*	25	31	33	<
2.2.16.2	Persentase Cagar Budaya yang terjaga	%	40	71,62	58,82	81	100	100	=
2.2.16.3	Persentase tradisi dan adat istiadat budaya yang terjaga	%	100*	100	100	73	80*	73	>

No	Aspek/Fokus/Isu/ang Unsur/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi: belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.18.4	persentase kelompok kebudayaan yang masih aktif yang dibina	%	44,84	59,76	100	73	75*	75	>
2.2.17	Perpustakaan								
2.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan kota	orang	240.045	254.946	227.132	226.073	209.396	244.159	>
2.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	142.477	156.284	164.579	175.095	179.486	179.095	>
2.2.17.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	orang	20.004	21.246	18.928	18.839	20.407	20.346	>
2.2.17.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	90.094	98.228	101.250	105.039	107.452	107.038	>
2.2.18	Kearsipan								
2.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	7	7	18	40	40	50	<
2.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kali	2	2	2	2	1	1	=
2.3	Layanan Urusan Pilihan								
2.3.1	Pariwisata								
2.3.1.1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Malang	%	23*	24	36	21	24*	6	>
2.3.1.2	Kunjungan wisatawan di obyek daya tarik wisata	Orang	1.955.723	2.429.101	3.288.592	3.995.609	4.793.293*	42	>
2.3.1.3	Meningkatnya PAD dan PDRB Kota Malang dan sektor pariwisata	%	41,82	42	43*	45*	50*	42	=
2.3.1.4	Meningkatnya kegiatan pariwisata yang berskala Regional, Nasional dan Internasional	Kegiatan	10	13	18*	18*	20*	12	>
2.3.1.5	Jumlah taman kota dan hutan kota sebagai lokasi rekreasi murah masyarakat	Unit Taman	8	10	12	12	12	12	=
2.3.1.6	Meningkatnya rumah makan dan restoran	Rumah Makan	191	272	298*	301*	315*	270	>
2.3.1.7	Meningkatnya sarana Akomodasi dan Hotel	Unit	100*	104	105*	107*	108*	100	>
2.3.1.8	PDRB sector perdagangan, hotel, dan restoran	Juta Rupiah	1.434.880,40	1.549.845,60	1.712.018,90	1826837,83*	1826848,87*	4,5	=
2.3.1.9	Persentase sektor hotel dan restoran terhadap Total PDRB	%	41,33*	41,36*	41,4*	4,41	4,5	4,5	=
2.3.2	Pertanian								
2.3.2.1	Jumlah nilai produksi hasil pertanian	%	96,7*	100	106,27	136,05	105,25		
2.3.2.2	Jumlah nilai produksi hasil perkebunan	%	95,84*	100	93,77	93,77	95,31		
2.3.2.3	Jumlah nilai produksi hasil peternakan	%	94,76*	94,29	94,47	85,82	131,08		
2.3.5	Perdagangan								
2.3.5.3	Jumlah peningkatan pasar yang dikelola masyarakat menjadi pasar daerah	%	100	100	100	100	100	100	=
2.3.5.4	Volume sampah pasar yang diangani	m3	17.094	20076	20098*	20038*	20300*	20075	=
2.3.5.5	Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah pasar	Unit perobak sampah	10	20	22*	24*	26*	20	=
2.3.5.7	Persentase PKL yang ditata dan direlokasi sesuai	%	2,67*	3,78	2,67	5,98	13,55	6	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	88,52	84,15	70,58*	100	100	5	
2.4.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	88,79	
2.4.1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	43,85*	45,75*	49,34	80,57*	80,64*	100	
2.4.1.8	Prosentase luas wilayah yang diperunikannya telah sesuai dengan RDRTR dan Peraturan Zonasi	%	42,74*	45,67*	50	60,76*	70,64*	95	
2.4.1.9	Prosentase SKPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras dan Renja/RKT berkualitas baik	%	59,67*	60,38*	40,54	100	80,34	95	
2.4.1.10	Prosentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik	%	60,64*	50,78*	40,54	100	80,34	90	
2.4.1.11	Prosentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT	%	100	100	100	100	100	95	
2.4.1.12	Prosentase Indikator Sasaran pada RKPD yang tergetnya terpenuhi	%	45,76*	50,52*	52,50	62	53,41	100	
2.4.2	Keuangan								
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.4.2.4	Realisasi belanja pendidikan (20%) terhadap APBD	Rp	624.904.327.619,96	631.416.000.670,78	625.517.216.602,00	625.098.112.422,96	530.815.997.438,37	2.100.230.441.533,63	
2.4.2.5	Realisasi belanja kesehatan (10%) terhadap APBD	Rp	108.153.552.790,40	81.056.301.557,57	139.945.146.165,14	142.813.682.440,48	159.352.377.552,68	2.100.230.441.533,63	
2.4.2.6	Realisasi Belanja Langsung	Rp	748.227.875.189,50	845.115.677.223,26	893.714.312.481,77	921.093.557.951,21	778.379.635.897,26	678.836.735.135,56	
2.4.2.7	Realisasi Belanja Tidak Langsung	Rp	737.140.890.727,40	757.893.972.908,88	909.706.226.426,52	789.045.786.308,76	1.035.544.086.404,28	1.221.393.706.364,05	
2.4.2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rp	73.314.450,00	76.330.600,00	75.036.600,00	78.766.200,00	6.464.050,00	100.000.000,00	
2.4.2.9	Penerapan APBD	Rp	1.486.368.766.866,45	1.602.889.850.132,14	1.903.420.540.918,29	1.710.077.444.259,97	1.813.923.922.301,54	2.100.230.441.533,63	
2.4.2.10	Persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 hari	%	100	100	72,65	81,17	80,00	80	
2.4.2.11	Persentase Bolanja TidakLangsung (BTL) APBD ≤ 50%	%	42,7*	44,66*	45*	46*	46,44	48	
2.4.2.12	Persentase realisasibelanja langsung SKPD ≥ 90%	%	70*	70,65*	73,35*	77,45	63,98	90	
2.4.2.13	Persentase PenyajianLaporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Benar	%	69,55*	70*	74,03	100,00	100*	40	
2.4.2.14	Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual	%	70*	73,45*	78,43	91,42	93,5*	75	
2.4.3	Kepogawean serta Pendidikan dan Pelatihan								
2.4.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	24	30	38	40	45	60	
2.4.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	55	58	80	63	55	70	
2.4.3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	70	75	80	85	90	98	
2.4.5	Pengawasan								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016	2017		
2.4.5.1	Persentase lindak lanjut temuan	lindak lanjut	401	507	504	555	555	=	
3)	ASPEK DAYA SANG DAERAH								
3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
3.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	963.183	1.215.502	1.260.165	1.355.475	N/A		
3.3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	58,69%	61,91%	60,79%	61,37%	N/A		
3.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
3.2.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		1,7	0,915	0,8*	0,95*	0,8*		
3.2.2	Jumlah orang/orang yang terangkut angkutan umum	Orang	2.137.094	2.137.094	3.485.717	3.485.717	2.448		
3.2.7	Persentase layanan air bersih	%	60*	62*	64	65,84	66,11		
3.2.9	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	48,5	67	73	76	78		
3.3	Fokus Iklim Berinvestasi								
3.3.2	Pajak Daerah	pejak	9	9	9	9	9		
3.3.3	Relibusi Daerah	retribusi	18	18	18	18	18		
3.4	Fokus Sumber Daya Manusia								
3.4.1	Rasio Ketergantungan		37,639	37,840	37,643	37,643	37,847		

*) angka proyeksi

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan salah satu poin penting dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena pada poin inilah dapat terlihat kemampuan suatu daerah dalam menghidupi rumah tangga dan kebutuhannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana

diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 21 tahun 2011, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Malang tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

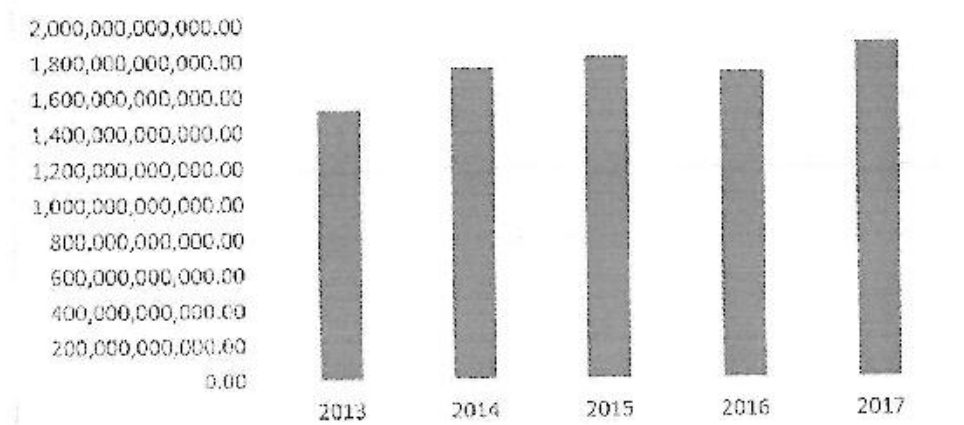
Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kota Malang

No.	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		Rata-rata Pertumbuhan(%)
		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	PENDAPATAN	1.524.846.569.429,26	1.764.864.689.655,03	1.829.072.689.718,02	1.741.394.250.709,64	1.904.539.343.501,98	5,99					
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	317.772.985.191,26	372.545.396.292,03	424.938.755.525,02	477.541.556.464,64	520.899.647.925,98	13,19					
1.1.1.	Pajak daerah	238.499.748.161,57	278.885.189.548,87	316.682.891.173,76	374.641.673.419,65	414.961.528.718,04	14,89					
1.1.2.	Retribusi daerah	38.460.785.953,00	45.557.675.300,00	35.281.817.931,00	42.782.439.061,03	45.493.054.750,04	5,87					
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	16.571.050.907,26	13.385.924.500,39	14.649.144.871,14	15.785.980.797,00	16.490.014.841,36	0,61					
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	24.241.400.169,43	34.716.606.942,77	58.324.901.549,12	44.331.463.186,96	43.955.049.616,54	6,12					
1.2.	Dana Perimbangan	863.736.860.965,00	956.695.776.132,00	926.364.574.783,00	1.069.366.446.979,00	1.174.719.580.753,00	8,22					
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak dan non pajak	86.734.213.965,00	116.943.891.132,00	87.015.121.783,00	114.874.411.979,00	113.684.568.188,00	10,05					
1.2.2.	Dana alokasi umum	746.686.937.000,00	808.447.825.000,00	818.758.893.000,00	859.678.208.000,00	844.576.426.000,00	3,20					
1.2.3.	Dana alokasi khusus	30.315.710.000,00	31.304.060.000,00	20.590.560.000,00	94.813.827.000,00	216.458.586.565,00	24,33					
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	343.336.723.273,00	435.623.517.231,00	14.781.000.000,00	194.486.247.266,00	208.920.114.823,00	8,58					
1.3.1.	Hibah	17.756.000.000,00	19.023.000.000,00	14.781.000.000,00	12.606.000.000,00	10.305.000.000,00	(12,03)					
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					

III- 4

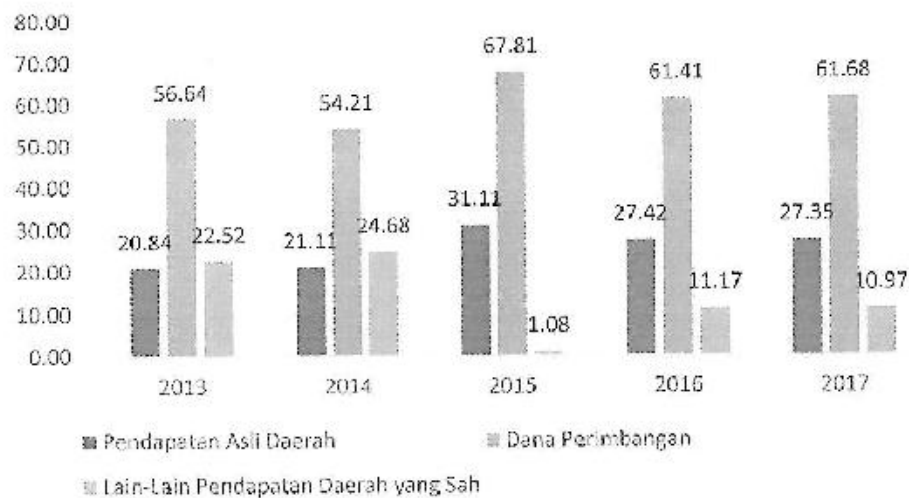
No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dan non pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ^{***})	109.145.826.273,00	154.505.481.231,00	238.885.611.410,00	171.619.907.266,00	188.341.184.823,00	19,44
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus ^{***})	191.569.752.000,00	217.906.979.000,00	224.102.748.000,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	(7,79)
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	24.865.145.000,00	44.188.057.000,00	86.536.953.000,00	5.260.340.000,00	2.773.930.000,00	8,09

Berdasarkan data selama tahun 2013-2017 perkembangan pendapatan daerah pemerintah Kota Malang cukup baik dan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013, total pendapatan daerah Kota Malang sebesar Rp 1.524.846.569.429,26, angka tersebut terus mengalami peningkatan hanya di tahun 2016 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 peningkatan mencapai Rp 1.904.539.343.501,98, dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 5,99%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Malang dalam lima tahun terakhir terus mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut direpresentasikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2016 sebesar 5,61% atau di atas rata-rata Jawa Timur sebesar 5,5%.



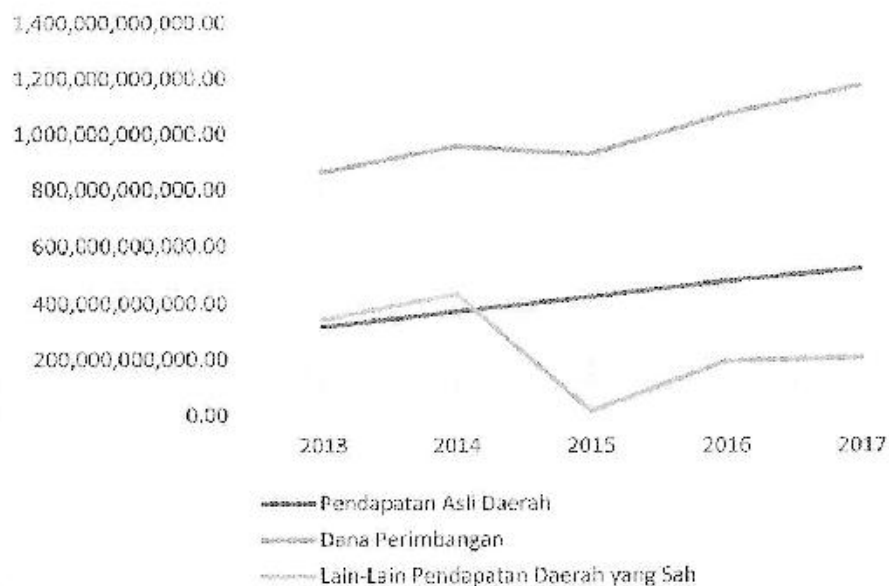
Gambar 3.1
Realisasi Pendapatan Kota Malang Tahun 2013-2017

Secara terperinci, komposisi pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.2
Prosentase Komponen Pendapatan Kota Malang
Tahun 2013-2017

Berdasarkan grafik 3.2. selama tahun 2013-2017 perkembangan pendapatan Kota Malang berdasarkan komponen pendapatan diketahui penyumbang terbanyak berasal dari dana perimbangan sebesar 56,64% tahun 2013 dan meningkat sebesar 61,68% di tahun 2017, penyumbang pendapatan terbesar kedua diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,84% tahun 2013 dan meningkat sebesar 27,35% di tahun 2017. Penyumbang terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 22,52% menurun di tahun 2017 sebesar 10,97%. Meningkatnya prosentase komponen Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja keuangan daerah baik karena semakin tinggi prosentase Pendapatan Asli Daerah mengindikasikan kemandirian fiskal daerah tersebut.



Gambar 3.3
Rincian Pendapatan Kota Malang Tahun 2013-2017

Salah satu komponen penting dari pendapatan daerah adalah Pendapatan asli Daerah, berdasarkan gambar 3.3. dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2013 nilai PAD Kota Malang masih sekitar Rp 317.772.985.191,26, nilai per tahun terus meningkat dengan kenaikan rata-rata 13,19% pertahun, dan tahun 2017 nilai PAD menjadi Rp 520.899.647.925,98. Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah daerah.

Pada sisi dana perimbangan, nilainya juga mengalami peningkatan. Tahun 2013 masih sebesar Rp 863.736.860.965,00, pada tahun 2017 nilai meningkat menjadi Rp 1.174.719.580.753,00 dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 8,22%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan transfer dana yang begitu besar untuk Kota Malang. Maka dengan peningkatan ini, perekonomian Kota Malang dapat tumbuh dengan baik, dan dapat mengindikasikan bahwa

pengelolaan keuangan oleh pejabat pemerintah di Kota Malang juga telah berjalan cukup baik.

Sedangkan pada pendapatan lain yang sah, nilainya fluktuatif dibandingkan komponen pendapatan daerah yang lain. Tahun 2013 nilainya Rp 343.336.723.273,00, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi hingga Rp 435.623.517.231,00, akan tetapi tahun 2017 menjadi Rp 208.920.114.823,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang tahun 2013-2017, masih didominasi oleh Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 238.499.748.161,57, pada tahun 2017 meningkat tajam hampir dua kali lipat sebesar Rp. 414.961.528.718,04. Urutan kedua adalah Retribusi Daerah yang mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2013 Rp. 38.460.785.953,00, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp. 35.281.817.931,00 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 45.493.054.750,04. Berikutnya adalah Lain-lain PAD yang sah dan Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan pada tahun 2013 sebesar Rp. 24.241.400.169,43, menurun menjadi Rp. 43.955.049.616,54 pada tahun 2017. Meningkatnya Pajak Daerah tidak terlepas dari peralihan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB yang sebelumnya dikelola oleh Kantor Pajak Pratama Kementerian Keuangan dan pada tahun 2013 dialihkan kepada pemerintah daerah, selain itu meningkatnya jumlah wisatawan di Kota Malang turut meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau

kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perkembangan realisasi belanja daerah Kota Malang tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2013 s/d Tahun 2017 Kota Malang

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
	BELANJA	1.486.368.766.886,45	1.602.999.850.132,14	1.803.420.540.918,29	1.710.077.444.259,97	1.746.539.609.577,97	4,33
A	Belanja Tidak Langsung	749.227.876.159,05	845.115.877.223,26	1.465.040.706.749,93	921.030.657.951,21	778.379.835.897,26	8,38
1	Belanja Pegawai	686.011.112.196,10	798.826.075.306,54	931.090.867.802,28	862.559.055.658,81	691.770.586.889,86	1,46
2	Belanja Bunga	36.157.840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Belanja Hibah	62.297.290.300,00	44.148.137.497,80	66.492.877.500,00	57.425.620.000,00	85.967.500.000,00	14,39
5	Belanja Bantuan Sosial	129.250.000,00	1.402.739.630,00	397.500.000,00	0,00	0,00	(17,92)
6	Belanja Bagi Hasil	73.314.450,00	78.330.600,00	75.036.600,00	78.766.200,00	6.484.050,00	2,54
7	Belanja Bantuan Keuangan	663.728.700,00	647.332.837,92	635.264.957,40	635.264.957,40	635.264.957,40	(1,08)
8	Belanja Tidak Terduga	17.022.672,00	13.261.351,00	657.238.601,00	331.951.135,00	0,00	(17,90)
B	Belanja Langsung	737.140.890.727,40	757.883.972.908,88	909.706.228.426,52	789.046.786.308,75	968.159.773.680,71	8,07
1	Belanja Pegawai	81.286.972.610,00	78.420.319.395,04		131.171.515.513,47	165.043.060.975,52	11,15
2	Belanja Barang dan Jasa	302.589.084.359,40	361.001.601.091,84		464.208.106.403,99	471.402.444.266,33	10,43
3	Belanja Modal	353.264.833.758,00	318.462.052.422,00	337.647.558.967,36	193.667.164.391,30	331.714.268.438,86	6,20

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi belanja tidak langsung selama periode 2013-2017, setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 8,38%. Belanja langsung selama periode 2013-2017, setiap tahunnya juga mengalami kenaikan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 8,07%. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi anggaran belanja daerah selama periode 2013-2017, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah setiap tahunnya belum mencapai 100%, hal ini antara lain dikarenakan pedoman pelaksanaan dana alokasi khusus datangnya sering terlambat sehingga mempengaruhi capaian realisasi penyerapan, Efisiensi pelaksanaan kegiatan (sisa lelang), dan Penggunaan DBHCHT dibatasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009. Maka daerah sangat berhati-hati dalam penggunaannya sehingga berdampak pada realisasi penyerapan anggaran. Dari tahun ketahun realisasinya menurun secara fluktuatif dan penyerapan anggaran belanja menurun cukup tajam pada tahun 2017 sebesar 83,16%.



Gambar 3.4
Total Belanja Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2017

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. APBD Pemerintah Kota Malang selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang terus meningkat. Berdasarkan gambar 3.4 pada tahun 2013 kekuatan belanja daerah Kota Malang sebesar Rp. 1.486.368.766.886,45 dan tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp. 1.746.539.609.577,97 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 4,33%.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada tabel diatas diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, dan besarnya SiLPA selama lima tahun perkembangannya fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8,56%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Malang belum cukup baik. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal, hal ini untuk memperkuat kepemilikan saham Pemerintah Kota Malang di Bank Jatim dan meningkatkan kemampuan operasional perusahaan daerah.

Tabel 3.3
Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Malang

NO	Uraian	2015	2016	2017
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.829.072.689.718,02	1.741.394.250.709,64	1.904.539.343.501,98
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.803.420.540.918,29	1.710.077.444.259,97	1.746.539.609.577,97
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	31.799.000.000,00	43.150.000.000,00	62.400.000.000,00
A	Defisit riil	-6.146.851.200,27	-11.833.193.550,33	95.599.733.924,01
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			

NO	Uraian	2015	2016	2017
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	322.985.750.377,67	316.838.899.177,40	305.005.705.627,07
5	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	322.985.750.377,67	316.838.899.177,40	305.005.705.627,07
A-B	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan	316.838.899.177,40	305.005.705.627,07	400.605.439.551,08

Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2015-2017 Pemerintah Kota Malang mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil, sehingga pada tahun tersebut surplus riilnya mencapai Rp.316.838.899.177,40; Rp.305.005.705.627,07; dan Rp.400.605.439.551,08. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Malang cukup kuat untuk membiayai belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

3.1.2. Neraca Daerah

Guna melihat posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana maka dapat dilihat dari laporan neraca daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam

rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kota Malang selama kurun waktu 2013-2017 seperti terlihat pada Tabel T-C.3. dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut :

Tabel 3.4
T-C.3
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kota Malang

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
1.	ASET	5.242.132.094.044,72	6.122.163.298.981,10	5.526.662.906.695,95	5.909.774.604.328,97	6.238.817.354.895,96	4,89
1.1.	ASET LANCAR	267.238.853.237,07	394.885.915.147,22	445.067.155.889,51	389.415.540.365,23	559.685.495.944,74	22,92
1.1.1.	Kas	182.843.204.382,65	323.467.491.106,41	-	-	-	19,23
1.1.3.	Piutang	73.911.802.318,56	61.920.579.138,61	-	-	-	4,06
1.1.6.	Persediaan	10.483.846.535,86	9.497.844.902,20	-	-	-	2,35
1:02	INVESTASI JANGKA PANJANG	205.911.407.905,06	217.732.560.256,06	244.551.619.057,00	267.589.635.215,00	414.470.402.466,00	20,59
1:02:01	Investasi NonPermanen	0,00	-	-	-	-	-
	Investasi Permanen	205.911.407.905,06	217.732.560.256,06	244.551.619.057,00	267.589.635.215,00	414.470.402.466,00	20,59
1.3.	ASET TETAP	4.641.960.801.060,65	5.336.133.146.200,33	4.676.002.178.130,70	5.123.854.482.152,62	5.056.667.268.272,36	2,71
1.3.1.	Tanah	2.014.825.971.519,00	2.199.511.439.519,00	2.548.778.039.519,00	2.838.174.684.519,00	2.774.207.557.213,00	8,54
1.3.2.	Peralatan dan mesin	319.294.221.198,81	368.181.590.972,12	475.729.994.444,62	556.750.085.934,97	606.557.168.429,63	17,62
1.3.3.	Gedung dan bangunan	1.051.221.436.806,37	1.098.701.296.781,87	1.159.307.074.563,87	1.297.395.098.893,22	1.190.453.657.311,73	3,43
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.185.633.150.762,72	1.597.811.304.862,59	1.790.145.995.016,09	1.834.150.864.016,31	1.955.878.092.605,28	13,97
1.3.5.	Aset tetap lainnya	35.735.128.236,75	36.350.862.527,75	41.737.341.258,75	47.836.246.159,75	57.001.760.860,01	12,58
1.3.5.	Konstruksi dalam pengerjaan	35.250.892.537,00	35.576.651.537,00	35.164.866.400,00	31.664.269.400,00	33.976.971.400,00	0,72
1.3.6.	Akumulasi Penyusutan	-	-	(1.374.861.133.071,63)	(1.482.116.766.770,63)	(1.561.407.939.547,29)	3,29

1.5	ASET LAINNYA	127.021.031.841,94	173.411.677.377,49	161.041.953.618,74	128.914.946.596,12	207.994.188.212,86	17,70
1.5.1.	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	-	
1.5.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	17.980.000,00	61.405.000,00	54.605.000,00	52.105.000,00	52.105.000,00	56,47
1.5.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	106.449.318.000,00	106.449.318.000,00	106.449.318.000,00	106.449.318.000,00	106.449.318.000,00	-
1.5.4.	Aset tak berwujud	10.965.817.336,00	14.259.620.436,00	5.204.504.506,25	6.377.244.054,50	7.350.245.639,25	1,08
	Aset lain yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	345.935.911,79	323.000.151,54	- 1,66
1.5.5.	Aset lain-lain	9.587.916.505,94	52.641.333.941,49	49.333.526.112,49	15.690.343.629,83	93.819.519.402,07	218,13
	JUMLAH ASET DAERAH	5.242.132.094.044,72	6.122.163.298.981,10	5.526.662.906.695,95	5.909.774.604.328,97	6.238.817.354.895,96	4,89
2.	KEWAJIBAN	14.146.537.929,50	8.997.715.570,00	23.029.366.134,36	51.749.802.661,28	13.001.857.255,51	42,35
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.146.537.929,50	8.997.715.570,00	23.029.366.134,36	51.749.802.661,28	13.001.857.255,51	42,35
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	1.093.240,00	43.294.450,00	5.477.418,00	2.000.000,00	-	902,34
2.1.2.	Utang muka dari kas daerah	-	-	-	-	-	
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	-	-	924.787.006,25	1.110.365.567,08	977.091.227,88	2,02
2.1.3.	Utang Bclanja	-	-	20.676.245.528,11	50.284.506.869,41	11.701.249.613,10	16,62
	Utang jangka pendek lainnya	14.145.444.689,50	8.954.421.120,00	1.422.856.182,00	6.994.313,00	510.263,00	- 78,26
	Utang pihak ketiga lainnya	-	-	-	345.935.911,79	323.006.151,54	- 1,66
3.	EKUITAS DANA	5.227.985.556.115,22	6.113.165.583.411,10	5.503.633.540.561,59	5.858.024.801.667,69	6.225.815.497.640,45	4,92
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	253.092.315.307,57	385.888.199.577,22	-	-	-	13,12

III-17

3.1.1.	SILPA	182.754.567.308,28	322.985.750.377,67	-	-	19,18
3.1.2.	Cadangan piutang	73.911.802.318,56	61.920.579.138,61	-	-	4,06
3.1.3.	Cadangan persediaan	10.483.846.535,86	9.497.844.902,20	-	-	2,35
3.1.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(14.145.444.690)	(8.954.421.120)	-	-	9,17
3.1.5.	Pendapatan ditangguhkan	87.543.834,37	438.446.278,74	-	-	100,21
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	4.974.893.240.807,65	5.727.277.383.833,88	-	-	3,78
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset tetap	4.641.960.801.060,65	5.336.133.146.200,33	-	-	3,74
3.2.3.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	127.021.031.841,94	173.411.677.377,49	-	-	9,13
3.2.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	-	-	-	-	-
3.2.4.	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	205.911.407.905,06	217.732.560.256,06	-	-	1,44
3.3.	EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
3.3.1.	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.242.132.094.044,72	6.122.163.298.981,10	5.526.662.906.695,95	5.909.774.604.328,97	6.238.817.354.895,96
						4,89

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Pada tahun 2017, Kota Malang memiliki aset senilai Rp. 6,2 trilyun, dengan tingkat pertumbuhan 4.89 persen per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2017 mencapai Rp. 5.0 trilyun dan rata-rata tumbuh 2.71 persen per tahun. Aset tetap ini meliputi 80,6 persen dari seluruh aset pemerintah Kota Malang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 13 milyar. Dari tahun 2013 hingga 2017, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2014 dan tertinggi tahun 2016. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Malang Tahun 2017 mencapai Rp. 6,2 trilyun, dan mengalami pertumbuhan dari 2013-2017 dengan rata-rata 4.92 persen.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Malang dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Malang mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran Kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (pro-poor), pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan perluasan lapangan kerja (pro-job). Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan yang mencakup :

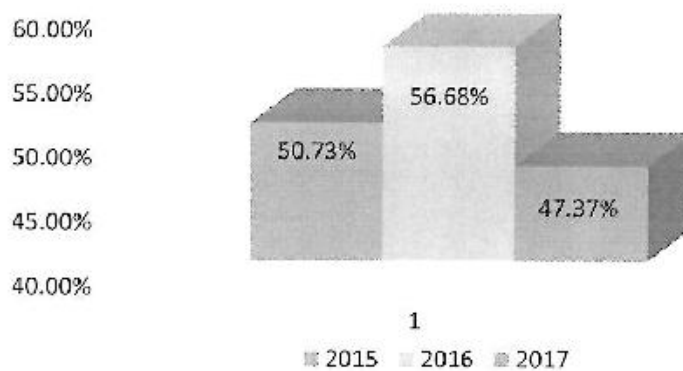
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
T-B.8.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Malang

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%) (a) / (b) x 100
		(a)	(b)	
1	Tahun anggaran 2015	931.090.867.802,28	1.835.219.540.918,29	50,73
2	Tahun anggaran 2016	993.730.571.172,28	1.753.227.444.259,97	56,68
3	Tahun anggaran 2017	856.813.647.865,38	1.808.939.609.577,97	47,37

Berdasarkan Tabel T-B.8. dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2015-2017, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada tahun 2015 sebesar Rp. 931.090.867.802,28, meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 993.730.571.172,28 dan menurun pada tahun 2017 sebesar Rp. 856.813.647.865,38. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif cukup lebih besar, hal ini dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik.



Gambar 3.5
Prosentase Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja

Berdasarkan gambar 3.5. prosentase perbandingan belanja pegawai dengan total belanja Kota Malang mengalami fluktuatif dari awal tahun 2015 sebesar 50,73% meningkat menjadi sebesar 56,68% pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 sebesar 47,37. Hal ini menunjukkan apabila jumlah belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat yang berarti alokasi belanja langsung semakin berkurang yang merupakan anggaran terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Semakin sedikit anggaran belanja langsung akan berdampak terhadap sedikitnya program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*).

3.3.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran pemerintah Kota Malang dalam kurun tahun 2013-2017 dapat digambarkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.6
T-C.5.
Defisit Riil Anggaran
Kota Malang

No.	Uraian	2013 Rp.	2014 Rp.	2015 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.
1	Rrealisasi Pendapatan Daerah	1.524.846.569.429,26	1.764.864.689.655,03	1.829.072.689.718,02	1.741.394.250.709,64	1.904.539.343.501,98
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	1.486.368.766.886,45	1.602.999.850.132,14	1.803.420.540.918,29	1.710.077.444.259,97	1.746.539.609.577,97
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.171.900.460,32	21.633.656.453,50	31.799.000.000,00	43.150.000.000,00	62.400.000.000,00
A.	Defisit / Surplus riil	21.305.902.082,49	140.231.183.069,39	(6.146.851.200,27)	(11.833.193.550,33)	95.599.733.924,01

Berdasarkan tabel defisit riil anggaran di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 memperoleh surplus anggaran sebesar Rp. 21.305.902.082,49, demikian pula pada tahun 2014 terjadi peningkatan surplus anggaran sebesar Rp. 140.231.183.069,39. Namun pada tahun 2015 terjadi defisit riil anggaran sebesar Rp. 6.146.851.200,27 dan pada tahun 2016 defisit riil mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.833.193.550,33

Pada tahun berikutnya 2017 anggaran pemerintah Kota Malang memperoleh surplus anggaran sebesar Rp. 95.599.733.924,01. Besarnya surplus anggaran pada tahun 2017 menandakan rendahnya penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah mencerminkan kinerja anggaran yang tidak optimal. Anggaran pendapatan daerah harusnya discrap secara optimal oleh pemerintah daerah, dengan demikian diharapkan dapat membantu perputaran perekonomian masyarakat. Berputarnya perekonomian daerah pada tahap berikutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3.7
T-C.6.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Malang

No.	Uraian	2015 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	322.985.750.377,67	316.838.899.177,40	304.956.166.202,31
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan pembiayaan Daerah	322.985.750.377,67	316.838.899.177,40	304.956.166.202,31

Dari tabel T-C.6. tersebut, terlihat bahwa terdapat defisit riil anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp. 6.146.851.200,27 dan pada tahun 2016 defisit riil mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.833.193.550,33, sedangkan tahun 2013, 2014, dan 2017 mengalami surplus. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi penerimaan

pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana tabel T-C.6.

Tabel 3.8
T-C.7.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Malang

No.	Uraian	2015		2016		2017	
		Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA
	Jumlah SILPA	316.838.899.177,40		305.005.705.627,07		400.555.900.126,32	
1	Pelampauan penerimaan PAD	60.960.595.413,94	19,24	90.109.985.250,09	29,54	5.936.202.960,42	1,48
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(49.127.516.928,50)	-15,51	(47.672.216.521,00)	-15,63	(37.961.823.534,00)	-9,48
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(59.619.000.000,00)	-18,82	(36.442.180.869,00)	-11,95	21.295.301.609,00	5,32
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya						
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7	Kegiatan lanjutan						

Dari tabel T-C.7. di atas terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2015-2017), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Di masa mendatang diharapkan SiLPA harus semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2018-2022 disajikan pada tabel T-C.8. berikut:

Tabel 3.9
T-C.8.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kota Malang

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	2.101.830.272.383,09	2.169.180.948.398,09	2.298.561.759.613,09	2.427.957.453.838,34	2.600.138.790.436,05
1.1	Pendapatan Asli Daerah	533.511.294.685,00	740.306.528.700,00	869.687.339.915,00	999.083.034.140,25	1.171.264.370.737,96
1.1.1	Pajak daerah	430.000.000.000,00	621.900.000.000,00	739.200.000.000,00	855.400.000.000,00	1.009.800.000.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	42.963.819.700,00	52.882.566.500,00	60.946.172.135,00	70.837.440.844,25	83.065.385.027,46
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	25.014.262.985,00	25.750.000.000,00	27.100.000.000,00	28.500.000.000,00	32.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	35.533.212.000,00	40.673.962.200,00	42.441.167.780,00	44.345.593.296,00	46.398.985.710,50
1.2	Dana Perimbangan	1.215.649.394.188,00	1.120.075.914.188,00	1.120.075.914.188,00	1.120.075.914.188,00	1.120.075.914.188,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak dan non pajak	113.684.568.188,00	113.684.568.188,00	113.684.568.188,00	113.684.568.188,00	113.684.568.188,00

1.2.2	Dana alokasi umum	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	215.461.165.000,00	119.887.685.000,00	119.887.685.000,00	119.887.685.000,00	119.887.685.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	352.669.583.510,09	308.798.505.510,09	308.798.505.510,09	308.798.505.510,09	308.798.505.510,09
1.3.1	Hibah	66.393.280.000,00	66.393.280.000,00	66.393.280.000,00	66.393.280.000,00	66.393.280.000,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dan non pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	208.600.575.510,09	208.600.575.510,09	208.600.575.510,09	208.600.575.510,09	208.600.575.510,09
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	73.871.078.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.337.330.000,00	3.337.330.000,00	3.337.330.000,00	3.337.330.000,00	3.337.330.000,00
2	Belanja	2.206.747.280.578,09	2.243.430.948.398,09	2.371.461.759.613,09	2.499.457.453.838,34	2.668.138.790.436,05
2.1	Belanja Tidak Langsung	935.907.737.278,09	976.210.015.401,09	1.003.926.539.212,24	1.032.169.529.765,34	1.062.987.814.770,08
2.1.1	Belanja Pegawai	842.944.367.125,09	898.365.869.501,09	926.082.393.312,24	954.325.383.865,34	985.143.668.870,08
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	81.883.217.200,00	81.883.217.200,00	81.883.217.200,00	81.883.217.200,00	81.883.217.200,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan	663.728.700,00	663.728.700,00	663.728.700,00	663.728.700,00	663.728.700,00

	Kuangan							
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	20.119.224.253,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.270.839.543.300,00	1.267.220.932.997,00	1.367.535.220.400,85	1.467.287.924.073,00	1.605.150.975.665,96		
2.2.1	Belanja Pegawai	225.129.125.675,00						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	679.449.337.741,91						
2.2.3	Belanja Modal	355.590.959.883,09						
3	Pembayaan	104.917.008.195,00	74.250.000.000,00	72.900.000.000,00	71.500.000.000,00	68.000.000.000,00		
3.1	Penerimaan Pembayaan	129.392.008.195,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00		
3.2	Pengeluaran Pembayaan	24.475.000.000,00	25.750.000.000,00	27.100.000.000,00	28.500.000.000,00	32.000.000.000,00		

A. Kebijakan Pendapatan

Dari Tabel T-C.8. di atas diproyeksikan bahwa kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Malang untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2018-2023, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat rata-rata 5,99% per tahun, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,46–7,59% per tahun, inflasi rata-rata 4–6% per tahun. Dengan meningkatnya perekonomian yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi, maka potensi obyek pajak dan retribusi akan meningkat.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada Tabel T-C.8. kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
5. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan

fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB dan BPHTB. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber – sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018-2023 sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;

2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 2 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I dan Prioritas II.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
2. SiLPA tahun 2018-2023 diproyeksikan tumbuh negatif dengan rata-rata per tahun sebesar -5,56%, pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi : Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program).

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Secara keseluruhan kerangka pendanaan daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2018-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10
T-C.9
Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Malang

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan	2.101.830.272.383,09	2.169.180.948.398,09	2.298.561.759.613,09	2.427.957.453.838,34	2.600.138.790.436,05
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	129.392.008.195,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Total Penerimaan	2.231.222.280.578,09	2.269.180.948.398,09	2.398.561.759.613,09	2.527.957.453.838,34	2.700.138.790.436,05
	Dikurangi					
4	Belanja Tidak Langsung	935.907.737.278,09	976.210.015.401,09	1.003.926.539.212,24	1.032.169.529.765,34	1.062.987.814.770,08
5	Pengeluaran Pembiayaan	24.475.000.000,00	25.750.000.000,00	27.100.000.000,00	28.500.000.000,00	32.000.000.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.270.839.543.300,00	1.267.220.932.997,00	1.367.535.220.400,85	1.467.287.924.073,00	1.605.150.975.665,96

Tabel 3.11
T-C.10.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Malang

NO	URAIAN	Proyeksi			
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.270.839.543.300,00	1.267.220.932.997,00	1.367.535.220.400,85	1.467.287.924.073,00
	Prioritas I	762.503.725.980,00	753.157.738.400,00	1.028.890.440.540,00	1.251.309.699.693,00
	Prioritas II	508.335.817.320,00	514.063.194.597,00	338.644.779.860,85	215.978.224.379,60
					1.605.150.975.665,96
					1.471.320.364.994,00
					133.830.610.671,96

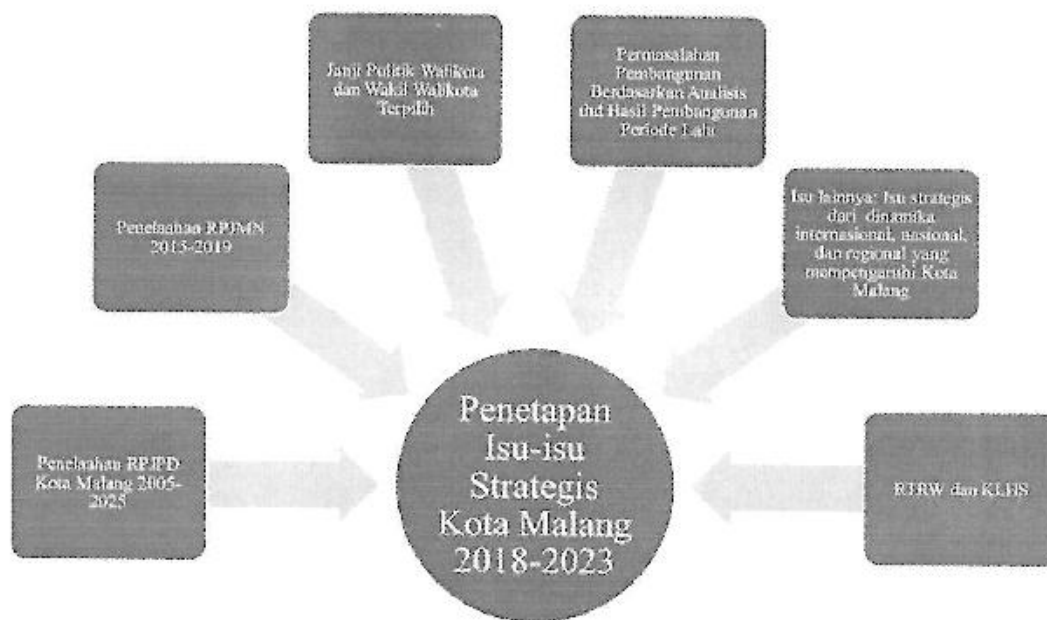
Berdasarkan tabel T-C.10 di atas, rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berupa total penerimaan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, dan prioritas II, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II.

Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas utama. Disamping itu Program prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kota Malang untuk periode 2018-2023 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kota Malang. Pembentukan isu-isu strategis di Kota Malang ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJPD Kota Malang 2005-2025; telaah terhadap dokumen RPJMN 2015-2019; telaah terhadap RPJM Provinsi Jawa Timur 2014-2019; telaah terhadap isu internasional; telaah terhadap Platform Walikota Terpilih; telaah terhadap dokumen Kualitas Lingkungan Hidup; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan dalam bentuk skematik disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 4.1

Skematik Penetapan Isu-isu Strategis Kota Malang 2018-2023

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan standar (SPM/SDG's/Standar Nasional/target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren), sebagaimana telah dibahas pada bagian Analisis Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bab II).

Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDG's/Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren). Berikut permasalahan pembangunan yang ada di Kota Malang :

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pendidikan diantaranya;

- a. Kurangnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Belum dilakukan pemetaan dan pemerataan guru;
- c. Belum meratanya pendidikan dan pelatihan guru;
- d. Belum maksimalnya kesempatan belajar, partisipasi dan keberlanjutan pendidikan;
- e. Belum merata akses pendidikan;
- f. Rasio guru terhadap rata-rata murid per kelas belum seimbang;
- g. Masih tingginya lembaga Pendidikan Anak usia Dini yang belum terakreditasi;

- h. Masih terdapat siswa melanjutkan ke pondok pesantren maupun melanjutkan ke pkaet A dan/atau B tanpa pemberitahuan; dan
- i. Minimnya fasilitas sarama dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik dan perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan standar.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan yang mucnul dalam urusan kesehatan diantaranya;

- a. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan belum optimal;
- b. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal;
- c. Belum optimalnya Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi;
- d. Masih tingginya cakupan penemuan pasien baru TBC BTA Positif;
- e. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan dirinya dan keluarga atas penyakit tidak menular, terutama orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di fasilitas kesehatan;
- f. Minimnya tenaga medis, terutama di tingkat puskesmas;
- g. Puskesmas pembantu tidak beroperasi setiap hari;
- h. Belum maksimalnya penanganan kualitas hidup pasien terminal melalui peran aktif dokter keluarga; dan
- i. Pemberian jaminan kesehatan bagi semua warga.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang muncul dalam urusan pkerjaan umum dan penataan ruang diantaranya;

- a. Belum optimalnya sistem drainase dan utilitas secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana kota dalam kondisi baik (ramah dan nyaman);
- c. Belum optimalnya kerjasama Malang Raya pengelolaan sungai dan air minum; dan
- d. Kurangnya pengawasan kesesuaian Tata Ruang (polisi tata ruang).

4. Urusan Perumahan dan Permukiman

Permasalahan yang muncul dalam urusan perumahan dan permukiman diantaranya;

- a. Belum optimalnya pengelolaan Kawasan permukiman Daerah Aliran Sungai; dan
- b. Belum adanya regulasi kemudahan kepemilikan perumahan bagi penduduk.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang muncul dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diantaranya;

- a. Belum adanya Pengembangan sistem pengamanan lingkungan online.

6. Urusan Sosial

Permasalahan yang muncul dalam urusan sosial diantaranya;

- a. Kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan PMKS;
- b. Masih terbatasnya tempat penampungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (khususnya rumah lansia);
- c. Belum adanya sistem distribusi bantuan social darurat secara non-tunai
- d. Belum adanya sistem informasi penghubung warga yang ingin membantu dengan sasaran anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus; dan
- e. Masih terdapatnya anak jalanan yang datang dari luar daerah Kota Malang.

7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya;

- a. Belum maksimalnya Penanganan komprehensif terhadap tindakan kekerasan perempuan dan anak (menggunakan sistem informasi);
- b. Kurang optimalnya Penguatan karakter berbasis keluarga (salah satunya dengan sekolah ibu); dan
- c. Kurang optimalnya pengembangan Kota Layak Anak.

8. Urusan Pangan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pangan diantaranya;

- a. Belum terjaminnya ketersediaan dan diversifikasi pangan;
- b. Belum optimalnya strategi stabilisasi harga bahan pokok;
- c. Belum optimalnya subsidi bahan pangan bagi warga miskin; dan
- d. Kurang keberpihakan belanja pada pasar tradisional.

9. Urusan Pertanian

Permasalahan yang muncul dalam urusan pangan diantaranya;

- a. Semakin menyempitnya lahan pertanian aktif yang disebabkan masifnya alih fungsi lahan menjadi permukiman dan kawasan industri; dan
- b. Masih minimnya jumlah aset pemerintah Kota Malang yang dikelola (berupa) sawah pertanian.

10. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang muncul dalam urusan lingkungan hidup diantaranya;

- a. Belum maksimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan sampah dan limbah secara terpadu;
- b. Dibutuhkan Integrasi PAM dan PAL atas kebutuhan air dan pengelolaan limbah;
- c. Masih terdapatnya kasus perusahaan maupun industri di Kota Malang yang membuang limbah ataupun sampah di aliran sungai di Kota Malang;
- d. Belum maksimalnya Pengelolaan IPAL di bangunan pemerintah, swasta dan rumah tangga berbasis komunal; dan
- e. Perlu adanya pengelolaan taman edukasi dan perluasan hutan kota secara kreatif.

11. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang muncul dalam urusan perhubungan diantaranya;

- a. Tingginya tingkat kemacetan di Kota Malang;
- b. Kurang optimalnya rekayasa lalu lintas penanggulangan kemacetan; dan

- c. Kurang optimalnya konektivitas wilayah (Jalan Lingkar Luar Kota).
12. **Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**
Permasalahan yang muncul dalam urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah diantaranya;
 - a. Belum maksimalnya fasilitasi UMKM dalam mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan.
13. **Urusan Kebudayaan**
Permasalahan yang muncul dalam urusan kebudayaan diantaranya;
 - a. Belum maksimalnya Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya.
14. **Urusan Pariwisata**
Permasalahan yang muncul dalam urusan kebudayaan diantaranya;
 - a. Masih minimnya kalender event-event pemberdayaan komunitas sebagai destinasi edukasi dan wisata; dan
 - b. Masih minimnya Pengembangan Kawasan pemberdayaan tematik.
15. **Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**
Permasalahan yang muncul dalam urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diantaranya;
 - a. Belum optimalnya sistem manajemen kinerja ASN;
 - b. Pemanfaatan diklat kepegawaian belum optimal; dan
 - c. Belum adanya standar kompetensi dan peta kebutuhan kepegawaian secara profesional.
16. **Urusan Perdagangan**
Permasalahan yang muncul dalam urusan perdagangan diantaranya;
 - a. Belum optimalnya pemanfaatan pasar tradisional dan pasar modern berbasis rakyat.
17. **Urusan Perindustrian**
Permasalahan yang muncul dalam urusan perindustrian diantaranya;
 - a. Kurang baiknya sistem kelembagaan BUMD;

- b. Belum terbentuknya cluster/kawasan strategis pariwisata kota Malang;
- c. Belum banyak berkembangnya tempat kreatif;
- d. Belum banyak berkembangnya event kreatif; dan
- e. Belum adanya ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru serta Penyediaan co-working space.

18. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang muncul dalam urusan komunikasi dan informatika diantaranya;

- a. Belum sepenuhnya sistem informasi manajemen pemerintahan terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. Belum adanya Big Data dan Pola pemanfaatan secara Geo Spasial; dan
- c. Belum adanya sistem respon cepat dan monitoring pembangunan, serta optimalisasi Ngalam Command Center (NCC).

19. Urusan Keuangan Daerah

Permasalahan yang muncul dalam urusan keuangan daerah diantaranya;

- a. Belum maksimalnya sistem pengelolaan aset daerah;
- b. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem keuangan yang bersih dan transparan.

20. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang muncul dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya;

- a. Belum optimalnya Penguatan peran Forum Tokoh Agama dan masyarakat;
- b. Belum optimalnya sistem pengaduan pelanggaran hukum;
- c. Belum optimalnya harmoniasi dan sinkroniasi Properda sesuai kebutuhan pembangunan daerah;
- d. Belum optimalnya harmoniasi dan sinkroniasi Properda sesuai kebutuhan pembangunan daerah; dan
- e. Penyelesaian sengketa hukum.

21. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang muncul dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diantaranya;

- a. Keterbatasan alat berkaitan dengan pelayanan kependudukan.

22. **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Permasalahan yang muncul dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diantaranya;
 - a. Keterbatasan *database* data dan informasi.
23. **Urusan Perpustakaan**
Permasalahan yang muncul dalam urusan Perpustakaan diantaranya;
 - a. Minat baca masyarakat malang masih tergolong rendah;
 - b. Masih kurangnya pustakawan untuk operasional perpustakaan; dan
 - c. Belum ada ruang khusus dalam Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Kota Malang.
24. **Urusan Kearsipan**
Permasalahan yang muncul dalam urusan Kearsipan diantaranya;
 - a. Belum tercukupinya jumlah tenaga arsiparis;
 - b. Rendahnya peningkatan SDM pengelola kearsipan;
 - c. Rendahnya kapasitas daerah dalam upaya penguatan *database*; dan
 - d. Belum tersedianya sarana penyimpanan arsip (depo arsip).
25. **Urusan Pertanahan**
Permasalahan yang muncul dalam urusan Pertanahan diantaranya;
 - a. Kepengurusan izin lokasi belum menyesuaikan perkembangan masyarakat karena masih menggunakan peraturan yang lama;
 - b. Belum terdapatnya pemisahan lebih rinci antara tugas pokok dan fungsi di seksi pertanahan aset dan satu atap; dan
 - c. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait urusan pertanahan DPKP karena pertanahan DPKP berada berbeda Dengan Kantor Pertanahan.
26. **Urusan Penanggulangan Bencana Daerah**
Permasalahan yang muncul dalam urusan Penanggulangan Bencana Daerah diantaranya;
 - a. Kurangnya alat evakuasi bencana;

- b. Kendala dalam melakukan mitigasi longsor karena masih terdapat masyarakat yang membangun rumah di sepadan sungai; dan
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan bencana.
27. Urusan Tenaga Kerja
- Permasalahan yang muncul dalam urusan Tenaga Kerja diantaranya;
- a. Pengangguran masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan; dan
 - b. Belum adanya pengkajian terkait pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
28. Urusan Statistik
- Permasalahan yang muncul dalam urusan Statistik diantaranya;
- a. Kurang terpadunya data antara kominfo dan BPS mengenai statistik;
 - b. Data Statistik sektoral yang di peroleh dari OPD masih belum maksimal dan belum terintegrasi;
 - c. Terbatasnya jaringan dan kemampuan SDM dalam penguasaan internet dan intranet di setiap SKPD-Data dari jaringan konfigurasi Malang;
 - d. Belum terintegrasi data antara Kominfo dan BPD terkait statistic; dan
 - e. Perolehan data statistic sektoral dari OPD belum maksimal dan terintegrasi.
29. Urusan Persandian
- Permasalahan yang muncul dalam urusan Persandian diantaranya;
- a. Masih tingginya ancaman keamanan data dan informasi; dan
 - b. Belum efektifnya penanganan persandian dan keaman informasi.

30. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang muncul dalam urusan Penanaman Modal diantaranya;

- a. Belum optimalnya koordinasi internal dengan OPD teknis; dan
- b. Belum terintegrasinya sistem aplikasi untuk penanaman modal dan perizinan.

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Internasional

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan merupakan tahun transisi dari berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs). SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030 maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut : 1) Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*); 2) Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*); 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*); 4) Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*); 5) Kesetaraan Gender (*Gender Equality*); 6) Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*); 7) Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*); 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*); 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*); 10) Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*); 11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*sustainable Cities and*

Communities); 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*); 13) Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*); 14) Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*); 15) Kehidupan di Darat (*Life on Land*); 16) Institusi Keadilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*); 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*).

Berdasarkan tujuan tersebut, Kota Malang memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dimana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (RENAKSI) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diurus utamakan ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dokumen perencanaan di Kota Malang.

4.2.2 Isu Nasional

Isu-isu Nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Bagaimanapun isu-isu yang dirumuskan kedepannya berusaha untuk menjawab serta mengantisipasi tantangan serta ancaman dalam jangka panjang. Dalam pembangaunan di Kota Malang berikut isu-isu nasional yang menjadi perhatian dalam perumusan RPJMD Kota Malang yaitu:

1. Infrastruktur

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur serta dalam rangka mendukung pencapaian target infrastruktur *Middle Income Country* maka, percepatan pembangunan bidang infrastruktur menekankan enam prioritas Utama yaitu: 1) Percepatan Pembangunan Perumahan; 2) Pembangunan Infrastruktur/ Prasarana Dasar Kawasan Permukiman serta Energi dan Ketenagalistrikan; 3) Menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional; 4) Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan; 5) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan; dan 6) Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur.

Dengan prioritas tersebut Kota Malang berusaha mewujudkan sistem transportasi yang berdaya saing untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengurangi kesenjangan melalui pemerataan aksesibilitas infrastruktur/prasarana. Pemerintah daerah kedepannya dapat berkolaborasi dengan *Private Sector* dalam usaha mewujudkan pembangunan sistem sarana infrastruktur yang terintegrasi.

2. Permasalahan Persiapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Target pencapaian SPM tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, yang merupakan salah satu bagian dari prioritas pertama dari 11 prioritas nasional, yaitu Reformasi Birokrasi dan tata kelola. Prioritas Reformasi Birokrasi dan tata kelola menginginkan terjadinya pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal itu kemudian didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan SPM di daerah tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 32/2004 tentang pemerintah. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya. Untuk mempercepat penerapan SPM di daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 79 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang mengatur penerapan standar pelayanan minimal di daerah melalui 4 tahapan, yaitu: Persiapan rencana pencapaian SPM, Pengintegrasian rencana SPM dalam dokumen perencanaan, Mempersiapkan mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan SPM serta Penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM.

3. Kebijakan Ekonomi Nasional

Sebagaimana dalam RPJMN 2014-2019 bahwa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional, penguatan kerangka kelembagaan pemerintah akan difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam NAWA CITA, yang diantaranya cita ke tujuh yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik dengan disusunnya 7 sub agenda prioritas sebagai berikut: (1) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (2) Peningkatan Ketahanan Air; (3) Peningkatan Kedaulatan Energi; (4) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (5) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (6) Penguatan Sektor Keuangan; dan (7) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh juga akan melindungi masyarakat dari penurunan daya beli karena kenaikan harga. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, diperlukan berbagai upaya yang mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan yang mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju. Selain itu diperlukan pula berbagai upaya agar semua masyarakat dapat menikmati kemajuan ekonomi yang terjadi secara berkeadilan. Dengan demikian tujuan untuk memajukan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Adapun untuk mendukung sekaligus merespon dinamika situasi dan kondisi perekonomian maka pemerintahan era Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla telah mengeluarkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) sejak yang dikeluarkan melalui suatu Perpres terhitung sejak PKE I pada 9 September 2015. Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) I-XV, yang totalnya ada 234 regulasi namun per 18 Januari 2018, ada 11 regulasi yang dihapus, sehingga menjadi 223 regulasi.

Penerbitan PKE tersebut memiliki alasan, empat urutan prioritas alasan yang dimaksudkan yakni (1) pertama, untuk mendorong ekspor melalui program *National Interest Account* (NIA) dan mengoptimalkan peran Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI); (2) Kedua, untuk mendorong investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing; (3) Ketiga, guna meningkatkan pengeluaran pemerintah; (4) Keempat, menjaga stabilitas harga utamanya harga pangan yang menjadi faktor penentu pergerakan inflasi.

4. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup secara nasional meliputi kerusakan/kebakaran hutan, banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindungi; penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industry, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RAN GRK merupakan komitmen Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat dukungan internasional pada tahun 2020.

5. Revolusi Industri 4.0

Bagi Indonesia, revolusi industri akan memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Hingga tahun 2016, industri manufaktur berkontribusi sebesar 20 persen PDB Indonesia dan membuka lebih dari 14 juta lapangan pekerjaan. Perubahan

perekonomian Indonesia dari ekonomi berbasis sumberdaya alam menjadi ekonomi berbasis jasa, membawa dampak menurunnya kontribusi manufaktur Indonesia menjadi 22 persen pada tahun 2016 berbanding terbalik pada tahun 2001 yang mencapai 26 persen dan diperkirakan akan terus menurun pada tahun 2030 jika tidak melakukan intervensi apapun.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun "*Making Indonesia 4.0*" dalam menghadapi Revolusi Industri keempat. *Road Map Making Indonesia 4.0* memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang, termasuk di sektor makanan dan minuman; sektor tekstil dan pakaian; sektor otomotif; sektor kimia; dan sektor elektronik yang menjadi fokus dan 10 prioritas nasional dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia, yaitu: 1) Perbaiki alur aliran barang dan material; 2) Desain ulang zona industri; 3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (*sustainability*); 4) Memberdayakan UMKM; 5) Membangun infrastruktur digital Indonesia; 6) Menarik minat investasi asing; 7) Peningkatan kualitas SDM; 8) Pembangunan ekosistem inovasi; 9) Insentif untuk investasi teknologi; dan 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan.

4.2.3 Isu Regional

Pembangunan Kota Malang tidak hanya memperhatikan isu-isu internasional maupun nasional saja. Isu Regional juga menjadi perhatian dalam kajian RPJMD Kota Malang. Berikut ini isu-isu regional yang menjadi perhatian dalam perumusan isu-isu strategis Kota Malang:

1. Menuju Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009 - 2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan

kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator tersebut kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan".

Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibutuhkan kinerja yang lebih sinergis terutama pada peningkatan daya beli masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar dalam pengembangan sistem struktur ruang yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Isu strategis terkait infrastruktur terdiri dari: 1) Peningkatan konektivitas dan penyediaan jaringan transportasi; 2) Pengembangan keterpaduan antarmoda dan pengembangan transportasi multimoda; 3) Penurunan biaya transportasi dan biaya logistic; 4) Pengelolaan jaringan irigasi dalam mendukung kedaulatan pangan; 5) Penanganan Bencana banjir dan kekeringan; 6) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan; 7) Akhir (TPA) Regional; dan 8) Pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif infrastruktur (non APBD).

3. Pengangguran dan Kondisi Ketenagakerjaan

Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur hingga tahun 2016 masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang ditandai dengan masih banyaknya angkatan kerja belum terserap. Menurut data BPS terdapat kenaikan TPT dari tahun 2014 sampai tahun 2016 pada bulan Agustus yaitu 4,19 di tahun 2014 menjadi 4,21 di tahun 2016. Di samping itu terdapat beberapa isu strategis lain yang berhasil diidentifikasi terkait ketenagakerjaan diantaranya adalah upah pekerja yang relatif masih rendah dan masih rendahnya jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, kecilnya perusahaan yang menjadi peserta program jamsostek aktif (pada tahun 2015

ada 48 persen, meningkat menjadi 50 persen di tahun 2016), kemudian perusahaan yang memenuhi persyaratan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) juga masih kecil (ada 27 persen di tahun 2015 dan 35 persen di tahun 2016) serta skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim/belum sesuai kualifikasi.

Isu selanjutnya yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan termasuk dalam hal pengendalian TKA/tenaga kerja asing, serta perluasan dan penciptaan tenaga kerja seperti ketersediaan informasi pasar kerja maupun “linkage program” antara perusahaan dan pencari kerja. Selain masalah di atas, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan dari sektor pertanian juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Kedepannya pemerintah Kota Malang akan berusaha meningkatkan nilai tambah terhadap produktivitas Kota Malang agar dapat menekan angka pengangguran yang rata-rata masih kurangnya persiapan.

4. Kemiskinan

Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa timur yang terus menunjukkan perbaikan, menggambarkan kesungguhan pemerintah bersama stake holder dalam upaya penanganan masalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS (BRS 2 Januari 2014), pada tahun 2012 per bulan september jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 4.960.540 jiwa atau 13,08%, kemudian menurun menjadi 4.865.820 jiwa atau 12,73% pada September tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 0,35 poin persen. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur ini masih diatas persentase nasional. Persentase penduduk miskin nasional pada september 2012 mencapai 11,66% dan menjadi 11,47% pada tahun 2013. Berdasarkan data BPS (BRS 3 Januari 2017), pada tahun 2015 per bulan september jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 4.775.970 jiwa atau 12,28%, kemudian menurun menjadi 4.638.530 jiwa atau 11,85% pada September tahun 2016, mengalami penurunan sebesar 0,20 poin persen. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur ini masih diatas persentase nasional. Persentase

penduduk miskin nasional pada september 2015 mencapai 11,13% dan menjadi 10,70% pada tahun 2016. Jadi secara umum tingkat kemiskinan Jawa Timur menunjukkan tren yang cenderung menurun. Garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 12,30% yakni dari 243.783 rupiah per kapita per bulan pada September 2012 menjadi 273.758 rupiah per kapita per bulan. Sedangkan Garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 4,02% yakni dari 316.464 rupiah per kapita per bulan pada September 2015 menjadi 329.172 rupiah per kapita per bulan pada September 2016. Serta dalam kurun lima tahun terakhir (Year on Year) Garis Kemiskinan Jawa Timur terus mengalami kenaikan.

Dari sisi kualitas penanganan kemiskinan, diantaranya dapat dilihat dari Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, yakni indeks kedalaman kemiskinan dalam satu semester 2013 menunjukkan kenaikan dari 1,84 pada bulan Maret 2013 menjadi 2,07 pada September 2014, sedangkan indeks keparahan mengalami kenaikan dari 0,43 pada bulan Maret 2013 menjadi 0,5 pada bulan September 2013. Peningkatan kedua indeks ini memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau semakin membutuhkan upaya yang besar untuk mengangkat mereka menjadi lebih berdaya.

Indeks kedalaman kemiskinan dalam satu semester 2015 menunjukkan penurunan dari 1,99 pada bulan Maret 2016 menjadi 1,95 pada September 2016, sedangkan indeks keparahan mengalami penurunan dari 0,474 pada bulan Maret 2016 menjadi 0,473 pada bulan September 2016. Penurunan kedua indeks ini pada rentang tahun 2015-2016 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, begitupula dengan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin kecil.

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah menghilangkan kemiskinan. Kota Malang yang dalam pembangunannya memegang prinsip pembangunan berkelanjutan melalui usaha pemerintah daerah dengan mendorong produktivitas masyarakat melalui pemberian modal/investasi bagi UKM yang ada sehingga harapannya

dengan meningkatnya produktivitas masyarakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya

5. Pengendalian Tata Ruang

Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari adanya potensi kebencanaan yang dapat memberikan ancaman terhadap wilayah yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan dan investasi, sehingga perlu upaya mitigasi bencana kedalam perencanaan tata ruang. Dinamika pembangunan pada kawasan perkotaan yang memberikan pengaruh terhadap alih fungsi lahan perkotaan sehingga diperlukan suatu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam kawasan perkotaan. Pemerataan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan perkotaan dan antar kawasan, peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Diperlukan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan dimana pembangunan kawasan perkotaan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sector lainnya.

4.2.4 Telaah Dokumen Lainnya

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 telah menelaah Revisi RTRW Kota Malang Tahun 2017-2032 sehingga didapatkan telaahan berkaitan dengan rencana struktur ruang; rencana pola ruang dan; indikasi program pemanfaatan ruang. Melihat pentahapan 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun Revisi RTRW Kota Malang Tahun 2017-2032, RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 masuk dalam Tahapan I (2017-2021) dan II (2022-2026). dimana mulai tahun 2017. Hasil telaahan struktur dan pola ruang tersaji ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
(T-B.27)
Hasil Telaahan Struktur Ruang
Kota Malang

No.	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
I	STRUKTUR RUANG						
I.1	Perwujudan Struktur Ruang	Pembagian Pusat-Pusat Pelayanan Kota dengan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ penetapan batas BWP dan SBWP ▪ pengaturan fungsi kegiatan 	Pusat Kota I adalah BWP Malang Tengah (Kawasan Alun-Alun Bunder dsk), Pusat Kota II adalah BWP Malang Tenggara (Kawasan Mayjen Sungkono).				
			Sub pusat kota I meliputi; Kotalama, Sawojajar, Tanjungrejo, Oro-Oro Dowo, Samaan, Pandanwangi, Purwantoro, Bunulrejo, Lowokwaru				
			Sub Pusat Kota II meliputi ; Mergosono, Ciptomulyo, Bandungrejosari, Sukun, Sukoharjo, Bareng, Kauman, Dinoyo, Sumber Sari, Tulusrejo, Mojolangu.				
			Sub Pusat Kota II meliputi ; Mergosono, Ciptomulyo, Bandungrejosari, Sukun, Sukoharjo, Bareng, Kauman, Dinoyo, Sumber Sari, Tulusrejo, Mojolangu.				
			Sub pusat kota III meliputi; Buring , Gadang, Pisangcandi, Karang Besuki, Kasin, Kiduldalem, Gadingkasri, Rampal Celaket, Penanggungan, Arjosari, Purwodadi, Blimbing, Ksatrian, Polehan, Jodipan, Merjosari, Jatimulyo, Tlogomas, Tunggulwulung, Tasikmadu.				
			Sub pusat kota IV meliputi; Arjowinangun,				

No.	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
			Tlogowaru, Wonokoyo, Bumiayu, Kedungkandang, Madyopuro, Lesanpuro, Cemorokandang, Bakalan Krajan, Kebonsari, Mulyorejo, Bandulan, Balcarjosari, Polowijen, Ketawanggede, Tunjungsakar.				
		Pembangunan fasilitas utama perkotaan dengan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan sistem jaringan prasarana utama kota. ▪ Pembaharuan database kependudukan 	seluruh wilayah Kota Malang				
		Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan dengan kegiatan: Penyusunan dan evaluasi rencana rinci tata ruang	BWP Malang Tengah Memiliki fungsi pelayanan primer adalah pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, pendidikan dan peribadatan. Fungsi sekundernya memiliki fungsi kegiatan seperti pendidikan, fasilitas umum dan sosial, dan perdagangan barang dan jasa				
			BWP Malang Utara Memiliki fungsi pelayanan primer adalah pendidikan, perdagangan dan jasa, industri besar/menengah dan kecil serta wisata budaya. Fungsi sekundernya antara lain perumahan, perkantoran, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau.				
			BWP Malang Timur Laut Memiliki fungsi pelayanan primer adalah terminal, industri besar, menengah, dan kecil, perdagangan dan jasa, pendidikan dan sarana olah raga. Fungsi				

No.	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
			sekundernya antara lain permukiman, sarana olahraga, perkantoran, pendidikan dan fasilitas umum, serta ruang terbuka hijau.				
			BWP Malang Timur Memiliki fungsi pelayanan primer adalah perkantoran, sarana olahraga, industri, dan perumahan. Fungsi sekundernya antara lain Perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau.				
			BWP Malang Tenggara Memiliki fungsi pelayanan primer adalah perkantoran, perdagangan dan Jasa, sport centre (Gor Ken Arok), Gedung Convention Center, industri, perumahan dan Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan fungsi sekundernya antara lain perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan dan fasilitas umum. Untuk kedepannya dapat dikembangkan kegiatan lainnya seperti pusat perbelanjaan juga				
			BWP Malang Barat Memiliki fungsi pelayanan primer adalah industri, fasilitas umum, dan perumahan. Fungsi sekundernya adalah pendidikan, pertanian, perdagangan dan jasa, sarana olah raga, dan ruang terbuka hijau.				

Tabel 4.2
(T-B.28)
Hasil Telaahan Pola Ruang
Kota Malang

No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
I	Perwujudan Kawasan Lindung						
		Perlindungan lingkungan cagar budaya	BWP Malang Utara BWP Malang Barat				
	Kawasan Perlindungan Setempat	Perlindungan sungai besar di luar kawasan permukiman	Sepanjang sungai besar				
		Perlindungan sekitar saluran irigasi atau sempadan saluran irigasi	Kawasan pertanian kota Malang				
	Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	Pemantapan RTH Kota Malang					
	Kawasan Rawan Bencana Alam	Penyediaan fasilitas evakuasi bencana					
	Zona Perumahan	penataan permukiman lingkungan di daerah badan air Sungai Brantas, Sungai Metro, dan Sungai Amprong					
		Pengembangan permukiman dengan kepadatan tinggi, sedang dan rendah.					
II.1	Zona Perdagangan dan Jasa	Pengembangan Pasar Tradisional					
		Pemenuhan kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa					
		pengembangan pusat perbelanjaan					
		Pengembangan kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala pelayanan					
II.2	Zona Industri	Pengembangan dan penataan kawasan dan koridor industri	Kawasan industri dan pergudangan di Jalan Tenaga				
II.3	Zona Sarana Pelayanan Umum	Pendidikan : pemerataan taman kanak-kanak dan sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat					

No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I	Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
		Rencana pengembangan pada sub zona transportasi					
		Upaya pengembangan sarana kesehatan					
		Pengembangan Sub zona olahraga	di Kedungkandang/ BWP Malang Tenggara;				
		Pembangunan Tempat-tempat Pelatihan di Kota Malang di lokasi Strategis Kawasan Pendidikan dan Perkantoran	Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing				
	Pengembangan Sub Zona Pariwisata	Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan pariwisata					
	Rencana Sistem Jaringan Pergerakan	Perbaiki kualitas jaringan jalan					
		Pengembangan jalur pedestrian					
		Pengembangan jalur sepeda					
		Pembangunan Jalan Lingkar Barat dan Timur					
		Pengadaan bus kota					
		Pengembangan Terminal cargo dan Dry port					
		Pengembangan double track					
		jalur lintas selatan (untuk memfasilitas rencana jalan tol)					
	Jaringan Drainase	Perbaiki Kualitas Drainase Kota					
		Pengembangan Saluran drainase baru					
		Pengembangan inovasi berbasis lingkungan					
	Jaringan Air Limbah	Perbaiki kualitas persampahan					
		Pengembangan Inovasi persampahan					

2. Telaahan RPJMD Daerah Sekitar

Tabel 4.3
(T-B.32)
Identifikasi RPJMD Daerah Sekitar
Kota Malang

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1.	Kabupaten Malang	2016-2021	Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan	Kebijakan yang dirumuskan Kabupaten Malang berkaitan dengan Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia
			Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai	Kebijakan yang dirumuskan Kabupaten Malang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan
			Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah	Kebijakan yang dirumuskan Kabupaten Malang berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Pemerintahan
			Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah	Kebijakan yang dirumuskan Kabupaten Malang berkaitan dengan Bidang Ekonomi
2.	Kota Batu	2017-2022	Mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui optimalisasi pelayanan publik yang profesional	Kebijakan yang dirumuskan Kota Batu berkaitan dengan Bidang Pemerintahan
			Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis agrowisata internasional dalam upaya peningkatan sektor pariwisata, pertanian dan UMKM	Kebijakan yang dirumuskan Kota Batu berkaitan dengan Bidang Ekonomi
			Membangun sumber daya manusia yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan	Kebijakan yang dirumuskan Kota Batu berkaitan dengan Bidang

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
			pengembangan pendidikan formal dan nonformal yang berorientasi pada potensi daerah	Sumber Daya Manusia
			Penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketertarikan, dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah	Kebijakan yang dirumuskan Kota Batu berkaitan dengan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
			Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi	Kebijakan yang dirumuskan Kota Batu berkaitan dengan Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi
3.	Kabupaten Blitar	2016-2021	Peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha	Kebijakan yang dirumuskan Kabupaten Blitar berkaitan dengan Bidang Ekonomi
Bantuan permodalan dan pelatihan usaha bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah				
Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja				
Peningkatan perlindungan tenaga kerja				
Peningkatan pelatihan kewirausahaan				
Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Kebijakan yang dirumuskan Kabupaten Blitar berkaitan dengan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan			
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat				
Peningkatan kewaspadaan masyarakat pada daerah rawan bencana				
Jaminan akses terhadap layanan pendidikan	Kebijakan yang dirumuskan Kabupaten Blitar berkaitan dengan Bidang Sumber Daya Manusia			
Peningkatan sertifikasi pendidik				
Peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan				
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan				
Peningkatan upaya kesehatan mandiri masyarakat				
Pengembangan lingkungan sehat				
Peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan	Kebijakan yang dirumuskan Kabupaten Blitar berkaitan dengan Bidang Pemerintahan			
Peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah				
Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah				
Penataan struktur kelembagaan sesuai kebutuhan daerah				
Menerapkan pembinaan kinerja aparat				
Peningkatan standar				

No.	Dacrah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
			kualitas pelayanan SKPD	
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat	Kebijakan yang dirumuskan Kabupaten Blitar berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Lingkungan
			Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat	
			Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, serta industri potensial	
			Peningkatan penggunaan iptek dalam industri kecil dan menengah	
			Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Kebijakan yang dirumuskan Kabupaten Blitar berkaitan dengan Bidang Pemerintahan
			Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa	
			Pemetaan, pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal	
			Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa	

3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan lebih dijelaskan secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta secara teknis penyusunan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana mengharuskan adanya analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023 didapati bahwa analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Malang ditentukan dengan

melihat pada capaian masing-masing indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Malang sesuai dengan kelompok kewenangan kota yang berjumlah 222 indikator. Capaian tersebut secara umum disajikan dalam bentuk data selama 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 sampai 2017. Berdasarkan data capaian tersebut selanjutnya dilakukan analisis apakah capaian dari masing-masing indikator pada tahun terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2019, dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dari proses kajian lingkungan hidup (KLHS) yang telah dilakukan, menghasilkan Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu Strategis Rancangan Awal RPJMD Kota Malang	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Malang
Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan serta layanan dasar lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat; 2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat; 3. Meningkatkan jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa belum mencapai; 4. Meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara merata; dan 5. Meningkatkan Kualitas konsumsi PPH yang belum mencapai target. Dan 6. Menurunkan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Peningkatan produktifitas dan daya saing daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju Pertumbuhan PDB Perkapita sudah meningkat; 2. Meningkatkan akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan; 3. Kontribusi pariwisata terhadap PDB menurun; 4. Meningkatkan wisatawan mancanegara masih rendah; 5. 1000 KM pembangunan jalan tol; 6. Menambahkan jalur kereta api; 7. Meningkatkan industri kecil dengan pinjaman atau kredit; 8. Meningkatkan akses terhadap layanan sumber air minum layak pada rumah tangga; 9. Meningkatkan akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan; 10. Meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi layak untuk rumah tangga; 11. Meningkatkan Kualitas air sungai sebagai sumber air baku; 12. Meningkatnya limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri; dan 13. Meningkatkan Timbulan sampah yang didaur ulang 20 ton/hari;
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan belum dihitung secara kuantitatif; 2. Kekerasan terhadap anak perempuan; dan 3. Menurunkan korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Isu Strategis Rancangan Awal RPJMD Kota Malang	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Malang
Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; 2. Meningkatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); 3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota); 4. Meningkatkan instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) 5. Meningkatkan metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa); 6. Meningkatnya pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website; dan 7. Meningkatkan konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kota Malang, 2018

4.2.5 Isu Strategis Kota Malang

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kota Malang. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Adapun tahapan perumusan isu strategis RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 melalui tahapan Penentuan dan Pembobotan. Secara teknis, proses Tahapan Penentuan isu strategis diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan Kota Malang, yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan terkait mengenai pembangunan Kota Malang serta hasil FGD yang dilaksanakan dengan perwakilan OPD terkait dan Bidang sektoral Barcnlitbang Kota Malang. Penentuan isu tersebut terasaji dalam Daftar Panjang identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kota Malang berdasarkan Urusan Pembangunan Kota Malang. Berikut Penentuan daftar panjang Isu Strategis Pembangunan Kota Malang:

Tabel 4.5
Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kota
Malang berdasarkan Urusan Pembangunan Kota Malang

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	No.	Urusan	Isu Strategis
Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	1. Pendidikan dan kebudayaan 2. Kesehatan 3. Tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	1.	Urusan Pendidikan	a. Pemerataan pelayanan pendidikan formal (komposisi ideal tenaga pengajar) b. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan c. Pengembangan digitalisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah
		2.	Urusan Sosial	a. Meningkatkan jumlah Kelurahan tangguh di tingkat Kota Malang
		4.	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	a. Pembaharuan manajemen sistem kepegawaian secara profesional guna mendukung gerakan antikorupsi, budaya kerja dan pelayanan publik yang prima
		5.	Urusan Kesehatan	a. Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau oleh masyarakat tidak mampu b. Peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Malang c. Penurunan AKI, AKB, dan AKB d. Peningkatan Gizi Masyarakat terutama balita e. Peningkatan kesehatan lingkungan f. Kecukupan tenaga medis dan non medis sesuai standar kebutuhan teknis g. Mengupayakan Kota Malang bebas pasung dan ODF (<i>Open Defecation Free</i>)
		7.	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Memperkuat partisipasi masyarakat melanjutkan perwujudan kota layak anak b. Peningkatan efektifitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan c. Optimalisasi penghapusan (eliminasi) diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
		9.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	a. Penguatan wawasan kebangsaan dari semua latar belakang kelompok masyarakat untuk mencegah timbulnya bencana sosial b. Pemantapan penanganan konflik sosial secara terpadu dan berkelanjutan
		10.	Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja b. Peningkatan fungsi dan peran Satlinmas sesuai standar yang berlaku
		11.	Urusan Kebudayaan	a. Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya. b. Peningkatan kualitas pengelolaan warisan seni dan budaya Kota Malang sebagai komunitas jasa

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	No.	Urusan	Isu Strategis
		12.	Urusan Tenaga Kerja	a. Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan b. Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja
		13.	Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	a. Pengembangan digitalisasi dalam pengelolaan pangkalan data kependudukan dan catatan sipil b. Peningkatan tata kelola layanan dasar dengan penguatan integrasi administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)
		14.	Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	a. Peningkatan (perluasan) cakupan peserta Keluarga Berencana b. Pengembangan <i>database</i> keluarga dalam pengendalian penduduk
		15.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	a. Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Layak Pemuda b. Sistem pembinaan harus berkelanjutan dan sistematis c. Mengoptimalkan upaya memfasilitasi komunitas olahraga masyarakat d. Peningkatan kapasitas SDM Pemuda dan perlakuan khusus atlet olahraga
		16.	Urusan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Penguatan Mitigasi Bencana yang lebih partisipatif dan terintegrasi
		17.	Urusan Perpustakaan	a. Optimalisasi pembudayaan Minat Baca masyarakat b. Pengembangan sarana perpustakaan digital c. Peningkatan pelayanan dan aksesibilitas bagi pengunjung yang berkategori difabel
		16.	Urusan Kearsipan	a. Pembinaan dan pengelolaan kearsipan belum optimal b. Meningkatkan pengelolaan kearsipan dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>e-government</i>
Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1. Perckonomian 2. Kepariwisataaan	1.	Urusan Perdagangan	a. Peningkatan fasilitasi dan promosi ekspor b. Revitalisasi Pasar Rakyat dan komoditas dalam mendukung daya saing daerah
		2.	Urusan Perindustrian	a. Revitalisasi Pasar Rakyat dan komoditas dalam mendukung daya saing daerah b. Pengembangan industri kreatif dan IKM potensial lainnya Kota Malang menghadapi Revolusi Industri 4.0
		3.	Urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah	a. Peningkatan daya saing produk UKM dan Koperasi melalui standarisasi nasional b. Perluasan perizinan wilayah Industri Kecil dan Menengah

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	No.	Urusan	Isu Strategis
		4.	Urusan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem informasi layanan investasi yang terintegrasi dan ramah pasar b. Optimalisasi implementasi peran PTSP dalam pelayanan publik berkaitan perizinan dan non perizinan c. Pengembangan kerjasama antardaerah dan kerjasama dengan badan usaha (<i>private</i>) dalam penyediaan infrastruktur
			Urusan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas kota sebagai pengembangan destinasi pariwisata perkotaan
			Urusan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan konsumsi pangan berkecukupan gizi
			Urusan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan efektifitas sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal secara berkelanjutan b. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang komprehensif c. Peningkatan edukasi perilaku dan budaya masyarakat yang berwawasan lingkungan
			Urusan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan aktifitas alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan kawasan industri b. Kepemilikan aset pemerintah Kota Malang yang dikelola sebagai lahan pertanian (sawah).
			Urusan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas kota sebagai pengembangan destinasi pariwisata perkotaan
			Urusan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan efektifitas sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal secara berkelanjutan b. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang komprehensif c. Peningkatan edukasi perilaku dan budaya masyarakat yang berwawasan lingkungan
Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Infrastruktur		Urusan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang unggul dan berdaya saing
			Urusan Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sarana dan prasarana komunikasi publik serta pengelolaan informasi publik b. Peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informatika pemerintah daerah c. Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana komunikasi publik d. Optimalisasi pengelolaan informasi publik

Bidang Pembangunan	Tema Pembagunan Prioritas	No.	Urusan	Isu Strategis
			Urusan Statistik	a. Optimalisasi pengembangan dan integrasi statistik sektoral
			Urusan Persandian	a. dalam pengamanan informasi
			Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang	a. Penataan ulang sistem (saluran/gorong-gorong) drainase yang terintegrasi dan holistik b. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH/taman-taman lingkungan sebagai fasilitas interaksi masyarakat c. Penguatan kapasitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota secara terintegrasi
			Urusan Perumahan dan kawasan permukiman	a. Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni b. Peningkatan efektifitas keberlanjutan penanganan kawasan kumuh menuju Akses Universal 100% (air bersih) 0% (kumuh) 100% (sanitasi dan limbah)
			Urusan Pertanahan	a. Peningkatan pelayanan pertanahan sesuai pedoman mekanisme yang berlaku b. Peningkatan efektifitas pemisahan lebih rinci antara tugas pokok dan fungsi di seksi pertanahan aset dan satu atap c. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait urusan pertanahan di DPKP

Sumber: FGD Rantek RPJMD, 2017

Tabel 4.6
(T-B.35)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Belum optimalnya capaian Masyarakat Terdidik dan Berkarakter	Kurangnya Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Belum Maksimalnya Kesempatan Belajar, Partisipasi Dan Keberlanjutan Pendidikan
		Belum Merata Akses Pendidikan
	Belum optimal kualitas layanan kesehatan	Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Belum Optimal (Ambulan 100 Unit, KPLDH)
		Belum Optimalnya Kesadaran Dan Kemandirian Masyarakat Dalam Berperilaku Sehat Dan Menjaga Kesehatan Lingkungan
		Belum Maksimalnya Penanganan Kualitas Hidup Pasien Terminal Melalui Peran Aktif Dokter Keluarga;
		Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Secara Efektif Dan Efisien
	Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Semua Warga Kota Malang	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah		
		Syarat Kebersihan Dan Sertifikasi Layak Sehat Bagi Pengusaha Kuliner Dan Pedagang Kaki Lima;		
	Kurang maksimalnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Belum Terjaminnya Ketersediaan Dan Diversifikasi Pangan		
		Belum Adanya Regulasi Kemudahan Kepemilikan Perumahan Bagi Penduduk Kota Malang		
		Kurang Optimalnya Strategi Stabilisasi Harga Bahan Pokok		
		Masih Belum Optimalnya Subsidi Bahan Pangan Bagi Warga Miskin		
		Kurangnya Keberpihakan Belanja Pada Prasar Tradisional		
Belum optimalnya peningkatan Produktifitas dan Daya Saing yang merata dan berkelanjutan	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	Belum Optimalnya Pemanfaatan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Berbasis Rakyat		
		Kurang Baiknya Sistem Kelembagaan BUMD		
		Belum Terbentuknya Cluster / Kawasan Strategis Pariwisata Kota Malang		
		Belum Adanya Ekosistem Kolaborasi Dan Kewirausahaan Baru Serta Penyediaan Co-Working Space		
		Belum Maksimalnya Fasilitasi UMKM Dalam Mendapatkan Kemudahan Legalitas, Permodalan Dan Kemitraan, Serta Pendampingan Dalam Mengembangkan Produk Unggulan		
		Belum Banyak Berkembangnya Tempat Kreatif		
	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Belum Optimalnya Sitem Drainase Dan Utilitas Secara Terpadu Dan Berkelanjutan	
			Belum Optimalnya Kerjasama Malang Raya Pengelolaan Sungai, Dan Air Minum;	
			Belum Optimalnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Kota Dalam Kondisi Baik (Ramah Dan Nyaman)	
			Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Pemukiman Daerah Aliran Sungai;	
			Kurang Optimalnya Konektivitas Wilayah (Jalan Lingkar Luar Kota)	
			Kurang Optimalnya Rekayasa Lalu Lintas Penanggulangan Kemacetan	
	Belum optimalnya kesesuaian tata ruang	Belum optimalnya kesesuaian tata ruang	Belum Maksimalnya Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Dan Limbah Secara Terpadu	
			Dibutuhkan Integrasi PAM Dan PAL Atas Kebutuhan Air Dan Pengelolaan Limbah;	
			Belum Maksimalnya Pengcloaan IPAL Di Bangunan Pemerinta, Swasta Dan Rumah Tangga Berbasis Komunal	
			Perlu Adanya Pengelolaan Taman Edukasi Dan Perluasan Hutan Kota Secara Kreatif	
	Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Belum optimalnya Kualitas Perlindungan Sosial	Kurangnya Pengawasan Kesesuaian Tata Ruang (Polisi Tata Ruang)	
			Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Kurang Maksimalnya Pembinaan Dan Pemberdayaan PMKS
				Masih Terbatasnya Tempat Penampungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Khususnya Rumah Lansia)
Masih Minimnya Penanganan Dan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas				
Belum Adanya Sistem Distribusi Bantuan Social Darurat Secara Non-Tunai				
Belum Adanya Sistem Informasi Penghubung Warga Yang Ingin Membantu Dengan Sasaran Anak Kurang Mampu Dan Berkebutuhan Khusus				
			Masih Minimnya Kalender Event-Event Pemberdayaan Komunitas Sebagai Destinasi Edukasi Dan Wisata	
			Masih Minimnya Pengembangan Kawasan Pemberdayaan Thematik	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Belum Maksimalnya Penanganan Komprehensif Terhadap Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak (Menggunakan Sistem Informasi)
		Kurang Optimalnya Penguatan Karakter Berbasis Keluarga (Salah Satunya Dengan Sekolah Ibu)
	Stabilitas Lingkungan Sosial belum terjaga dengan maksimal	Belum Optimalnya Penguatan Peran Forum Tokoh Agama Dan Masyarakat
		Belum Adanya Pengembangan Sistem Pengamanan Lingkungan Online
		Belum Maksimalnya Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Belum maksimalnya penegakan dan tertib hukum	Tidak Optimalnya Sistem Pengaduan Pelanggaran Hukum
		Belum Optimalnya Harmonisasi Dan Sinkronisasi Perda Sesuai Kebutuhan Pembangunan Daerah
		Penyelesaian Sengketa Hukum
	Kurang optimalnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
		Kurang Optimalnya Organisasi Perangkat Daerah Yang Tepat Ukuran Dan Tepat Fungsi, Melalui Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Penatalaksanaan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Target Reformasi Birokrasi
		Kurang Maksimalnya Sistem Layanan Publik Yang Cepat, Mudah Dan Terintegrasi
		Belum Maksimalnya Sistem Pengelolaan Aset Daerah
		Optimalisasi Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
		Belum Optimalnya Pengelolaan Sistem Keuangan Yang Bersih Dan Transparan
	Belum optimalnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Belum Optimalnya Sistem Manajemen Kinerja ASN
		Belum Adanya Standar Kompetensi Dan Peta Kebutuhan Kepegawaian Secara Profesional
		Belum Tersedianya Kebutuhan Jabatan Struktural Yang Profesional
		Belum Terbangunnya Budaya Kerja Yang Berintegritas Dan Jiwa Kepemimpinan Yang Tangguh
Belum Adanya Sistem Reward Dan Punishment Kinerja Aparatur		
Belum sepenuhnya Integrasi Teknologi Informasi	Belum Sepenuhnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Terintegrasi Secara Menyeluruh Dan Berkelanjutan	
	Belum Adanya Big Data Dan Pola Pemanfaatan Secara Geo Spasial	
	Belum Adanya Sistem Respon Cepat Dan Monitoring Pembangunan, Serta Optimisasi Ngalam Command Center (NCC)	

Adapun tahapan berikutnya, diidentifikasi isu strategis yang telah ditentukan kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Isu strategis Rantek RPJMD tersebut telah dipetakan berdasarkan pilihan Tema Pembangunan Prioritas Kota Malang, yang kemudian menjadi dasar

dalam menentukan Kebijakan Prioritas dan Program Prioritas RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023.

Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasar Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kota Malang berdasarkan Urusan Pembangunan Kota Malang tersebut dalam tabel 4.5, untuk kemudian dilakukan penapisan menggunakan kriteria tersebut di atas. Penapisan isu strategis dilakukan untuk menentukan isu yang paling strategis di Kota Malang yang dapat menjadi dasar penentuan Kebijakan dan Program Prioritas RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023. Apabila isu tersebut memiliki persentase pemenuhan keenam kriteria tersebut, maka isu tersebut merupakan yang paling strategis dibandingkan yang lain.

Pada tahapan pembobotan ini, akan menghasilkan daftar pendek terhadap isu strategis terpilih yang mana berdasarkan penilaian tingkat prioritas. Proses pemilihan isu pembangunan ini diselenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan untuk penajaman terhadap isu-isu strategis dan upaya penapisan atau membuat daftar pendek dari isu strategis pembangunan terpilih. Proses penapisan isu pembangunan daftar panjang menjadi daftar pendek dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Verifikasi Daftar Panjang Isu Pembangunan

Verifikasi ini dimaksudkan untuk *cross-check* ulang identifikasi yang sudah tim temukan pada tahap penentuan isu strategis berdasar tema pembangunan prioritas dan urusan pembangunan daerah yang melibatkan pemangku kepentingan yang telah disepakati, sebagaimana yang tersaji pada tabel 4.5.

2. Penilaian Daftar Panjang (Long list)

Penilaian daftar panjang Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kota Malang berdasarkan Urusan Pembangunan Kota Malang tersebut menggunakan metode rating. Metode rating yang akan dilakukan adalah dengan menilai tingkat pengaruh dari masing-masing isu terhadap kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria tersebut meliputi : (1)Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Metode penilaian rating menggunakan interval penilaian dari angka 1 hingga 10. Semakin tinggi penilaian yang diberikan dapat diartikan bahwa isu tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kriteria yang ditentukan. Nilai skala pengukuran terhadap kriteria dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
(T-B.38)
Skala Penilaian Metode Rating

Level Pengaruh	Skala Penilaian (Range scale)
Tidak berpengaruh	1-2
Kurang berpengaruh	3-4
Cukup berpengaruh	5-6
Berpengaruh	7-8
Sangat berpengaruh	9-10

sumber: Tim Rantek RPJMD,2017

Tabel di atas adalah tabel Pembobotan dengan metode rating yang dilakukan terhadap Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kota Malang:

Tabel 4.8
(T-B. 39)
Pembobotan Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kota Malang

No.	Daftar Panjang Isu Strategis	Telaah Kriteria						Total skor
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Pemerataan pelayanan pendidikan formal (komposisi ideal tenaga pengajar)	8	9	9	9	6	8	49
2	Pencapaian Stanadar Nasional Pendidikan	9	9	6	7	6	4	44
3	Pengembangan digitalisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah	9	9	6	7	5	6	43
4	Mengoptimalkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	8	8	7	6	4	4	38
5	Meningkatkan jumlah kelurahan tangguh di tingkat Kota Malang	8	9	6	5	4	2	37
6	Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan	9	8	9	7	5	8	46
7	Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja	8	8	9	7	6	8	48
8	Pembaharuan manajemen sistem kepegawaian secara profesional guna mendukung gerakan antikorupsi, budaya kerja dan pelayanan publik yang prima	8	9	8	8	6	9	48
9	Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu	9	9	9	7	6	8	48
10	Peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Malang	7	8	7	8	6	4	40
11	Peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Malang	8	7	7	7	7	6	42
12	Penurunan AKI, AKB, dan AKB	8	7	7	7	7	7	43
13	Peningkatan Gizi Masyarakat terutama balita	8	7	7	6	6	5	39
14	Peningkatan kesehatan lingkungan	8	7	8	7	5	5	40
15	Kecukupan tenaga medis dan non medis sesuai standar kebutuhan teknis	8	7	8	7	6	5	41
16	Mengupayakan Kota Malang bebas pasung dan ODF (<i>Open Defecation Free</i>)	6	7	8	8	4	7	40
17	Pengembangan digitalisasi dalam pengelolaan pangkalan data kependudukan dan catatan sipil.	8	7	8	7	8	8	46
18	Peningkatan tata kelola layanan dasar dengan penguatan integrasi administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	9	9	9	7	7	8	48
19	Menguatkan partisipasi masyarakat melanjutkan perwujudan kota layak anak	6	6	7	6	4	4	33
14	Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.	8	8	8	7	7	7	45
20	Optimalisasi penghapusan (eliminasi) diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak	8	8	9	8	8	9	49
21	Peningkatan (perluasan) cakupan peserta Keluarga Berencana	8	7	6	6	5	3	35
22	Pengembangan <i>database</i> keluarga dalam pengendalian penduduk	7	7	8	7	4	4	37
23	Penguataan wawasan kebangsaan dari semua latar belakang kelompok masyarakat untuk mencegah timbulnya bencana sosial	8	5	7	4	4	4	32
24	Pemantapan penanganan konflik sosial secara terpadu dan berkelanjutan	6	7	8	6	4	6	37
25	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja	8	8	7	8	6	4	41
26	Peningkatan fungsi dan peran Satlinmas sesuai standar yang berlaku	5	6	8	6	7	3	35

No.	Daftar Panjang Isu Strategis	Telaah Kriteria						Total skor
		I	II	III	IV	V	VI	
27	Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya.	8	7	7	5	6	3	36
28	Peningkatan kualitas pengelolaan warisan seni dan budaya Kota Malang sebagai komunitas jasa.	9	9	8	9	8	9	52
	Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Layak Pemuda	7	5	5	6	5	6	34
29	Sistem pembinaan harus berkelanjutan dan sistematis	7	6	5	6	6	6	37
30	Mengoptimalkan upaya memfasilitasi komunitas olahraga masyarakat	7	5	6	6	6	5	35
31	Peningkatan kapasitas SDM pemuda dan perlakuan khusus atlet olahraga	6	8	8	7	5	5	39
32	Penguatan Mitigasi Bencana yang lebih partisipatif dan terintegrasi	7	8	7	5	6	4	37
26	Optimalisasi pembudayaan Minat Baca masyarakat	8	8	8	6	6	6	42
33	Pengembangan sarana Perpustakaan Digital.	7	7	8	8	6	5	41
34	Peningkatan pelayanan dan aksesibilitas bagi pengunjung yang berkategori difabel	7	7	7	6	5	5	37
35	Pembinaan dan pengelolaan kearsipan belum optimal.	7	8	8	4	5	3	35
36	Rendahnya pengelolaan kearsipan dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>e-government</i>	8	7	7	7	6	7	42
37	Peningkatan fasilitasi dan promosi Ekspor.	8	9	6	9	4	8	45
38	Revitalisasi Pasar Rakyat dan komoditas dalam mendukung daya saing daerah	8	7	8	7	8	8	46
39	Pengembangan industri kreatif dan IKM potensial lainnya Kota Malang menghadapi Revolusi Industri 4.0	9	9	9	8	7	9	51
40	Peningkatan daya saing produk UKM dan Koperasi melalui standarisasi nasional	8	7	9	8	8	9	49
41	Perluasan perizinan wilayah Industri Kecil dan Menengah	8	7	6	6	5	7	39
42	Pengembangan sistem informasi layanan investasi yang terintegrasi dan ramah pasar	8	9	9	8	5	8	47
43	Optimalisasi implementasi peran PTSP dalam pelayanan publik berkaitan perizinan dan non perizinan	4	8	8	8	5	4	37
44	Pengembangan kerjasama antardaerah dan kerjasama dengan badan usaha (<i>private</i>) dalam penyediaan infrastruktur	7	7	7	7	6	6	40
45	Peningkatan konsumsi pangan berkecukupan gizi	4	8	8	8	3	5	36
46	Peningkatan standarisasi usaha perikanan	4	5	5	5	3	6	28
47	Peningkatan konsumsi pangan berkecukupan gizi.	7	7	7	6	4	7	38
48	Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas kota sebagai pengembangan destinasi pariwisata perkotaan	8	8	8	8	6	8	46
49	Belum efektifnya sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal secara berkelanjutan	5	8	9	8	7	6	43
50	Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara komprehensif.	8	8	8	8	6	8	46
51	Peningkatan edukasi perilaku dan budaya masyarakat yang berwawasan lingkungan	8	7	8	6	6	6	41
52	Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang unggul dan berdaya saing	9	9	8	9	8	9	52
53	Peningkatan pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sarana dan prasarana komunikasi publik serta pengelolaan informasi publik	8	6	9	6	8	2	39
54	Peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informatika pemerintah daerah	8	8	4	7	4	2	33
55	Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana komunikasi publik	8	8	7	4	8	2	37
56	Optimalisasi pengelolaan informasi publik	6	7	7	8	4	5	37
57	Optimalisasi pengembangan dan integrasi statistik sektoral	6	8	7	8	3	4	36
58	Peningkatan efektifitas penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi	4	8	8	5	3	4	32
59	Penataan ulang sistem (saluran/gorong-gorong) drainase yang terintegrasi dan holistik	8	8	9	8	8	9	49

No.	Daftar Panjang Isu Strategis	Telaah Kriteria						Total skor
		I	II	III	IV	V	VI	
60	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH/taman-taman lingkungan sebagai fasilitas interaksi masyarakat.	7	8	8	7	3	7	40
61	Penguatan kapasitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota secara terintegrasi	8	9	8	8	3	8	44
62	Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni	8	8	8	7	4	9	44
63	Peningkatan efektifitas keberlanjutan penanganan kawasan kumuh menuju Akses Universal 100% (air bersih) 0% (kumuh) 100% (sanitasi dan limbah)	4	7	7	7	4	4	33
64	Peningkatan pelayanan pertanahan sesuai pedoman mekanisme yang berlaku	7	7	7	7	4	5	37
65	Peningkatan efektifitas pemisahan lebih rinci antara tugas pokok dan fungsi di seksi pertanahan aset dan satu atap	5	7	8	7	7	7	41
66	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait urusan pertanahan di DPKP	4	7	8	8	4	8	39
67	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan	9	8	9	8	5	9	48
68	Peningkatan aktifitas alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan kawasan industri	8	7	6	6	5	7	39
69	Kepemilikan aset pemerintah Kota Malang yang dikelola sebagai lahan pertanian (sawah)	7	7	7	7	4	5	37

Tabel 4.9
(T-B. 40)

Rata-Rata Skor Isu Strategis Pembangunan Kota Malang

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Pemerataan pelayanan pendidikan formal (komposisi ideal tenaga pengajar)	49	14
2	Pencapaian Standar Nasional Pendidikan	44	12
3	Pengembangan digitalisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah	43	12
4	Mengoptimalkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	38	11
5	Meningkatkan jumlah Kelurahan tangguh di tingkat Kota Malang	37	10
6	Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan	46	13
7	Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja	48	13
8	Pembaharuan manajemen sistem kepegawaian secara profesional guna mendukung gerakan antikorupsi, budaya kerja dan pelayanan publik yang prima	48	14
9	Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu	48	14
10	Peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Malang	40	11
11	Peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Malang	42	12
12	Penurunan AKI, AKB, dan AKB	43	12
13	Peningkatan Gizi Masyarakat terutama balita	39	11
14	Peningkatan kesehatan lingkungan	40	11
15	Kecukupan tenaga medis dan non medis sesuai standar kebutuhan teknis	41	12
16	Mengupayakan Kota Malang bebas pasung dan ODF (<i>Open Defecation Free</i>)	40	11
17	Pengembangan digitalisasi dalam pengelolaan pangkalan data kependudukan dan catatan sipil.	46	13
18	Peningkatan tata kelola layanan dasar dengan penguatan integrasi administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	48	14
19	Menguatkan partisipasi masyarakat melanjutkan perwujudan	33	9

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
	kota layak anak		
14	Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.	45	13
20	Optimalisasi penghapusan (eliminasi) diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak	49	14
21	Peningkatan (perluasan) cakupan peserta Keluarga Berencana	35	10
22	Pengembangan <i>database</i> keluarga dalam pengendalian penduduk	37	11
23	Penguataan wawasan kebangsaan dari semua latar belakang kelompok masyarakat untuk mencegah timbulnya bencana sosial	32	9
24	Pemantapan penanganan konflik sosial secara terpadu dan berkelanjutan	37	11
25	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja	41	12
26	Peningkatan fungsi dan peran Satlinmas sesuai standar yang berlaku	35	10
27	Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya.	36	10
28	Peningkatan kualitas pengelolaan warisan seni dan budaya Kota Malang sebagai komunitas jasa.	52	15
	Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Layak Pemuda	34	10
29	Sistem pembinaan harus berkelanjutan dan sistematis	37	10
30	Mengoptimalkan upaya memfasilitasi komunitas olahraga masyarakat	35	10
31	Peningkatan kapasitas SDM pemuda dan perlakuan khusus atlet olahraga	39	11
32	Penguatan Mitigasi Bencana yang lebih partisipatif dan terintegrasi	37	11
26	Optimalisasi pembudayaan Minat Baca masyarakat	42	13
33	Pengembangan sarana Perpustakaan Digital.	41	12
34	Peningkatan pelayanan dan aksesibilitas bagi pengunjung yang berkategori difabel	37	11
35	Pembinaan dan pengelolaan kearsipan belum optimal.	35	10
36	Rendahnya pengelolaan kearsipan dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>e government</i>	42	12
37	Peningkatan fasilitasi dan promosi Ekspor.	45	13
38	Revitalisasi Pasar Rakyat dan komoditas dalam mendukung daya saing daerah	46	13
39	Pengembangan industri kreatif dan IKM potensial lainnya Kota Malang menghadapi Revolusi Industri 4.0	51	15
40	Peningkatan daya saing produk UKM dan Koperasi melalui standarisasi nasional	49	14
41	Perluasan perizinan wilayah Industri Kecil dan Menengah	39	11
42	Pengembangan sistem informasi layanan investasi yang terintegrasi dan ramah pasar	47	13
43	Optimalisasi implementasi peran PTSP dalam pelayanan publik berkaitan perizinan dan non perizinan	37	11
44	Pengembangan kerjasama antardaerah dan kerjasama dengan badan usaha (<i>private</i>) dalam penyediaan infrastruktur	40	11
45	Peningkatan konsumsi pangan berkecukupan gizi	36	10
46	Peningkatan standarisasi usaha perikanan	28	8
47	Peningkatan konsumsi pangan berkecukupan gizi	38	11
48	Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas kota sebagai pengembangan destinasi pariwisata perkotaan.	46	13
49	Belum efektifnya sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal secara berkelanjutan	43	12
50	Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara komprehensif.	46	13
51	Peningkatan edukasi perilaku dan budaya masyarakat yang berwawasan lingkungan	41	12

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
52	Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang unggul dan berdaya saing	52	15
53	Peningkatan pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sarana dan prasarana komunikasi publik serta pengelolaan informasi publik	39	11
54	Peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informatika pemerintah daerah	33	9
55	Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana komunikasi publik	37	11
56	Optimalisasi pengelolaan informasi publik	37	11
57	Optimalisasi pengembangan dan integrasi statistik sektoral	36	10
58	Peningkatan efektifitas penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi	32	9
59	Penataan ulang sistem (saluran/gorong-gorong) drainase yang terintegrasi dan holistik	49	14
60	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH/taman-taman lingkungan sebagai fasilitas interaksi masyarakat.	40	11
61	Penguatan kapasitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota secara terintegrasi	44	13
62	Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni	44	13
63	Peningkatan efektifitas keberlanjutan penanganan kawasan kumuh menuju Akses Universal 100% (air bersih) 0% (kumuh) 100% (sanitasi dan limbah)	33	9
64	Peningkatan pelayanan pertanahan sesuai pedoman mekanisme yang berlaku	37	11
65	Peningkatan efektifitas pemisahan lebih rinci antara tugas pokok dan fungsi di seksi pertanahan aset dan satu atap	41	12
66	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait urusan pertanahan di DPKP	39	11
67	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan	48	14
68	Peningkatan aktifitas alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan kawasan industri	39	11
69	Kepemilikan aset pemerintah Kota Malang yang dikelola sebagai lahan pertanian (sawah)	37	11

Keterangan Kriteria:

I = Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;

II = Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;

III = Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;

IV = Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;

V = Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan

VI = Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Adapun setelah dilakukan pembobotan setiap poin Daftar Panjang Isu Strategis, terpilihlah 10 Isu Strategis Pilihan Prioritas yang memiliki nilai pembobotan tertinggi dilihat dari enam kriteria yang sudah ada. Berikut ini uraian dari 10 Isu Strategis Pilihan Prioritas :

Tabel 4.10
Daftar Isu Strategis Pilihan Prioritas

No.	Daftar Isu Strategis Pilihan Prioritas	Telaah Kriteria						Total skor
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang yang unggul dan berdaya saing	9	9	8	9	8	9	52
2	Pengembangan industri kreatif potensial Kota Malang belum optimal	9	9	9	8	7	9	51
3	Penataan ulang sistem (saluran/gorong-gorong) drainase yang terintegrasi dan holistik	8	8	9	8	8	9	49
4	Pemerataan pelayanan pendidikan formal (komposisi ideal tenaga pengajar)	8	9	9	9	6	8	49
5	Optimalisasi penghapusan (eliminasi) diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak	8	8	9	8	8	9	49
6	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan	9	8	9	8	5	9	48
7	Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja	8	8	9	7	6	8	48
8	Pembaharuan manajemen sistem kepegawaian secara profesional guna mendukung gerakan antikorupsi, budaya kerja dan pelayanan publik yang prima	8	9	8	8	6	9	48
9	Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu	9	9	9	7	6	8	48
10	Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas kota sebagai pengembangan destinasi pariwisata perkotaan	8	8	8	8	6	8	46

Adapun pembobotan dari isu strategis prioritas tersebut kemudian disesuaikan dengan visi misi dari kepala daerah terpilih, dimana dalam penyesuaiannya telah terbentuk 4 (empat) bidang pembangunan secara makro: SDM, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pemerintahan yang akhirnya menghasilkan 4 isu Kota Malang, antara lain:

Tabel 4.11
Pemetaan Isu Strategis RPJMD Kota Malang

Bidang Pembangunan	Isu Strategis Prioritas	Isu Kota Malang	Misi Kota Malang
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan pelayanan pendidikan formal; 2. Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu; dan 3. Optimalisasi pembudayaan, minat baca masyarakat. 	Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan serta layanan dasar lainnya	Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang unggul dan berdaya saing; 2. Pengembangan industri kreatif potensial Kota Malang; 3. Penataan ulang sistem (saluran) drainase yang terintegrasi dan holistik; dan 4. Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas Kota sebagai 	Peningkatan produktifitas dan daya saing daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkelanjutan	Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

Bidang Pembangunan	Isu Strategis Prioritas	Isu Kota Malang	Misi Kota Malang
	pengembangan destinasi pariwisata perkotaan.		
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan sosial; dan 2. Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja 	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran	Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender
Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaharuan manajemen sistem kepegawaian secara profesional guna mendukung gerakan antikorupsi, budaya kerja dan pelayanan publik yang prima 	Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan merupakan cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN untuk menjamin konsistensi arahan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah. Visi dan misi pembangunan Kota Malang tahun 2018-2023 juga merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang terangkum dalam kerangka ideologi Tri Sakti dan Agenda Nasional Nawa Cita RPJMN 2014-2019. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kota Malang selama lima tahun yang akan datang dan terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus dan terfokus. Pentingnya perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yaitu untuk menentukan strategi atau arahan kebijakan serta mengambil keputusan untuk mencapai tujuan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

5.1 VISI

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode keempat menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Malang untuk tahun 2018-2023. Visi pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023 berdasarkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Malang adalah sebagai berikut:

“Kota Malang Bermartabat”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah “martabat” menunjuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi “Kota Malang Bermartabat” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tantangan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah “kota bermartabat”, adalah sebuah profil Kota Malang yang memiliki masyarakat yang paripurna, terdidik dan berkarakter, lembut dan tegas, aman dan nyaman, serta penuh kesadaran positif. Dalam arti yang lebih luas adalah Kota yang aman dari segala bentuk ancaman, senantiasa tertib, terlihat bersih dan asri. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kota Malang yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki berbagai keunggulan dan daya saing tinggi untuk dapat memampatkan diri sebagai kota yang terkemuka, prestasi di berbagai bidang. Visi “Kota Malang Bermartabat”.

5.2 MISI

Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Untuk mewujudkan Visi “Kota Malang Bermartabat” dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

Misi 2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

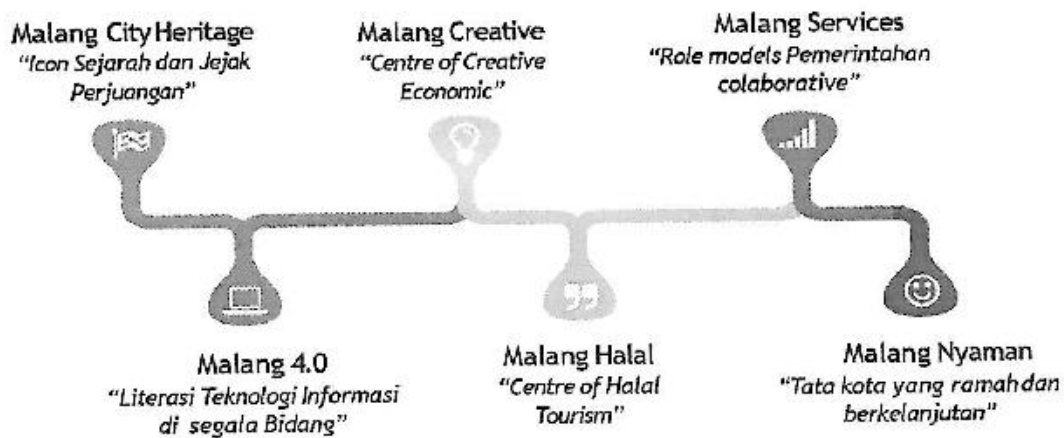
Misi 3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial.

Misi 4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berkaitan dengan Visi dan Misi tersebut dirumuskanlah *Malang Future*. Di mana *The Future Of Malang* terdapat 6 konsep yang dibangun dari ikhtiar pemahaman terhadap karakter dan potensi kota dan selanjutnya ingin diwujudkan “wajah” Kota Malang di masa mendatang melalui pencaanangan visi pembangunan kota.



Gambar 5.1
The Future of Malang

1. *Malang City Heritage* (Icon Sejarah dan Jejak Perjuangan)
Konsep *Malang City Heritage* diwujudkan melalui 5 langkah:
 - 1) Penegakan Regulasi Cagar Budaya
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya untuk meningkatkan perlindungan keberadaan cagar budaya (*tangible* dan *intangible*) serta menjadi payung hukum upaya pelestariannya.
 - 2) Pengembangan Destinasi dan Paket Wisata *Heritage*
Kayutangan "*Malioboronya Malang*", Sentra Batik, Pecinan, Kauman, Museum, Ijen Boulevard, Alun-Alun, dll.
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat
Membangun rasa memiliki cagar budaya melibatkan masyarakat.
 - 4) Penguatan Peran Perguruan Tinggi, Komunitas, Media dan Pelaku Bisnis
Mendorong lahirnya terobosan-terobosan inovatif dalam setiap aspek pelestarian sejarah dan budaya kota.
 - 5) Penguatan Edukasi Sejarah dan Budaya di Setiap Jenjang Sekolah

Menanamkan pengetahuan kepada generasi muda akan kekayaan sejarah dan budaya kota.

2. Malang 4.0 (Literasi Teknologi Informasi di segala Bidang)

Malang berkomitmen mengoptimalkan karakteristik uniknya sebagai Kota Pendidikan untuk menjawab tantangan penguasaan teknologi informasi, efisiensi bisnis, *internet of things*, dan rekayasa robotika yang menjadi karakteristik era Revolusi Industri 4.0. Melalui melekat teknologi kuat karakter dan ingat budaya mendorong tidak hanya menguasai teknologi tetapi Kota Malang juga ingin menghasilkan generasi yang kuat karakternya dan tak lupa pada budaya dan kearifan lokal, melalui:

- 1) Hapus calistung di usia emas anak-anak;
- 2) Memperkuat pendidikan karakter;
- 3) Sekolah ibu/*parenting*;
- 4) Gerakan sholat berjamaah;
- 5) Mendorong *Entrepreneurship* dan pengembangan IKM;
- 6) Reorientasi pendidikan dan peningkatan kapasitas berbasis skill dan kompetensi era Industri 4.0;
- 7) Menyuburkan ekosistem inovasi dan teknologi;
- 8) Meningkatkan kemudahan berusahan dan berinvestasi; dan
- 9) Menyiapkan infrastruktur digital.

3. Malang *Creative* (*Centre of Creative Economic*)

Semenjak tahun 2015, komitmen dan fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang mengalami akselerasi yang signifikan. Pembentukan kelembagaan, penyelenggaraan berbagai event, termasuk menjadi Tuan Rumah ICCC kedua, hingga penetapan *Roadmap* Ekonomi Kreatif 2018-2022 menjadi Peraturan Walikota adalah modal membangun sektor Ekonomi Kreatif sebagai salah satu katalis pertumbuhan ekonomi bersama sektor pariwisata. Menurut Perwal nomor 12 Tahun 2018, Substansi kebijakan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif 2018-2022 adalah penyediaan infrastruktur, pengembangan ekosistem dan peningkatan pemasaran. Untuk subsektor prioritas adalah game dan aplikasi sedangkan unggulan adalah kuliner, film, video dan animasi. Berikut ini langkah yang disiapkan dalam *Malang Creative*:

- 1) Tahun 2016
 - a. Komite Ekonomi Keratif;
 - b. *Malang Creative Fusion*;
 - c. *Indonesia Creative Cities Conference 2nd*; dan
 - d. Festival Malang Mbois 1st.
 - 2) Tahun 2017
 - a. Uji Petik Subsektor Prioritas dan Unggulan;
 - b. Festival Malang Mbois 2st; dan
 - c. Makot Kota Malang.
 - 3) Tahun 2018
 - a. Perwal Nomor 12 Tahun 2018 (*Roadmap* Ekonomi Kreatif 2018-2022); dan
 - b. Festival Malang Mbois 3st.
 - 4) Tahun Selanjutnya
 - a. Penetapan Ekraf sebagai salah satu Sasaran Strategis RPJMD;
 - b. *Co-Working Space* di 5 Kecamatan; dan
 - c. Mall UMKM.
4. Malang Halal (*Centre of Halal Tourism*)
- Konsep Malang Halal diwujudkan melalui:
- 1) Pengembangan destinasi wisata halal;
 - 2) Event wisata halal;
 - 3) Kerjasama pencapaian standar hotel halal;
 - 4) Destinasi kuliner halal;
 - 5) Penguatan kapasitas SDM Pariwisata halal; dan
 - 6) Promosi paket wisata halal.
5. Malang Services (*Role models Pemerintahan collaborative*)
- Berdasarkan fakta bahwa saat ini Kota Malang telah menyiapkan *Roadmap Smart City 2019-2023* untuk diselaraskan dengan konsepsi *Malang Services*. Rating Akuntabilitas Kinerja Kota Malang berdasarkan evaluasi Kementerian PAN RB pada tahun 2017 adalah BB. Pemerintah Kota telah menetapkan SK Walikota 2013/2018 tentang Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kota Malang telah mengembangkan lebih dari 60 aplikasi untuk fungsi administrasi pemerintahan maupun layanan publik. Berikut langkah dalam mewujudkan Malang *Services*:

1) Penegakan Perda dan Tertib Hukum

Penyelesaian sengketa hukum, harmonisasi properda dengan kebutuhan pembangunan, penguatan koordinasi untuk penanganan permasalahan lintas kewenangan, penguatan monev, pengendalian dan penertiban pelaksanaan Perda, sistem pengaduan.

2) Membangun Sistem Kelembagaan Efektif

Penataan struktur kelembagaan, penyempurnaan sistem perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunna, penguatan sistem layanan publik, optimalisasi sumber pendapatan daerah, penataan aset, transparansi keuangan, mendorong inovasi.

3) Mendorong Meritokrasi Manajemen ASN

Mekanisme *reward and punishment* berbasis kinerja, membangun mental aparatur berintegritas dan berjiwa melayani, Pengembangan Karir ASN secara Profesional, Membangun Standar Kompetensi, Sistem *Talent Pool* untuk kebutuhan jabatan.

4) Perecepatan Integrasi Teknologi Informasi

Sistem respon cepat, pemanfaatan *Big Data* dan Geo Spasial, Optimalisasi *Command Center*, Pembentukan Tim Koordinasi Daerah untuk SPBE, Penguatan SOP seluruh Aplikasi berbasis IT, Kerjasama Aplikasi berbagi Pakai, Kemitraan dengan Perguruan Tinggi.

6. Malang Nyaman (Tata kota yang ramah dan berkelanjutan)

Konsep Malang Nyaman diwujudkan melalui:

1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penertiban, arah kebijakan pusat pertumbuhan baru, kerjasama tata ruang perbatasan daerah.

2) Pengelolaan Transportasi Modern

Jalan lingkar, rekayasa lalu lintas ATCS, penataan parkir, revitalisasi angkutan umum/pengembangan transportasi massal.

3) Revitalisasi Sistem Drainase

Eco-Drainage, Sistem Informasi Drainase, Pembangunan Drainase terintegrasi.

4) Pengelolaan Kawasan Permukiman DAS dan Kumuh

Perumahan, pengembangan Rusunawa, pengurangan rumah tidak layak huni, koordinasi implementasi kewenangan DAS Sungai Strategis Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Kapasitas Ketangguhan Kebencanaan.

5) Penyediaan Sarpras Kota yang Nyaman

Pedestrian, jalur sepeda, penerangan jalan, kualitas perkerasan jalan, sarana sosial ekonomi, dan lain-lain.

6) Pengelolaan Air Minum, Sampah dan Limbah

Modernisasi TPA, pengurangan sampah plastik, perluasan manfaat Bank Sampah Malang, pengelolaan Limbah B3, pengamanan air baku, pemenuhan target cakupan 100% air minum dan akses sanitasi layak.

7) Pemenuhan Kebutuhan RTH Publik

Taman ramah anak, taman rumah lansia dan hutan kota tersebar merata dan semakin memenuhi target 20% RTH Publik.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*)

dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Walikota dan Wakil Walikota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan pembangunan Kota Malang tahun 2018-2023:

1. Terwujudnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Layanan Dasar Lainnya

Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya merupakan tujuan dari misi pertama, yaitu Menjamin Akses Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga. Hal yang ingin dicapai yaitu kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang yang adil dan merata. Pembangunan diprioritaskan pada pembangunan sumberdaya manusia (SDM) dengan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang berkualitas serta pendapatan perkapita yang terus meningkat. Dimensi pembangunan SDM yang juga memberikan kesempatan dan kesetaraan yang proporsional pada sektor pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin agar laki-laki dan

perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan.

2. Terwujudnya Produktifitas Dan Daya Saing Daerah yang Merata Dan Berkelanjutan

Terwujudnya produktifitas dan Daya Saing Daerah yang merata dan berkelanjutan merupakan tujuan dari misi kedua, yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan. Pembangunan daya saing daerah yaitu melalui pembangunan ekonomi, iklim usaha berbasis keunggulan lokal. Prioritas pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah berlandaskan keunggulan kompetitif berbasis pada potensi ekonomi lokal, kreatif, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja yang didukung oleh keberadaan kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

3. Terwujudnya Kesejahteraan Dan Kerukunan Sosial yang Berpihak Masyarakat Rentan dan Gender

Terwujudnya Kesejahteraan Dan Kerukunan Sosial yang Berpihak Masyarakat Rentan dan Gender merupakan tujuan dari misi ketiga, yaitu Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan Terhadap Masyarakat Rentan dan Gender. Pada hakikatnya kerukunan sosial sebagai bentuk aktualisasi dari pilar iman dan taqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tercipta peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan beradat, dan keharmonisan dalam hidup yang majemuk serta ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat Kota Malang mampu menghasilkan karya-karya budaya yang luhur serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Malang memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia.

4. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel merupakan tujuan dari misi empat, yaitu Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel. Tujuan ini berfokus pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik sesuai agenda reformasi birokrasi. Berprioritas dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu pemerintahan daerah yang dinamis dengan mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hasil rumusan sasaran pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter;
- 2) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan; dan
- 3) Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan.

2. Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif;

- 2) Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu; dan
 - 3) Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup.
3. Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender
- Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya kualitas perlindungan sosial; dan
 - 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan.
4. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel
- Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum;
 - 2) Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif;
 - 3) Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN; dan
 - 4) Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi.

Tabel 5.1
(T-C 11)
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Mengengah Kota Malang Tahun 2018-2023
VISI: Kota Malang Bermartabat

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal					Target Capaian				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020			2021
1.	Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan	81,0	81,43	81,86	83,00	83,80	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan
					0,77	0,78	0,79	0,82	0,84	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	
2.	Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan	Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah merata dan berkelanjutan	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>	0,846	0,847	0,848	0,850	0,851	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
					5,4%	5,5%	5,6%	5,7%	5,8%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	
					0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36		
					N/A	6	6,1	6,2	6,3	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
					3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya kualitas pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	82,15	82,92	83,69	84,46	85,23	86,00	86,00	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran beraskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender	Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender		Angka Kemiskinan	4,10	3,91	3,76	3,59	3,43	3,27	3,27	
				Indeks Sosial Modal	79,20	81,36	83,52	85,68	87,84	90	90	
			Meningkatnya Kualitas Perindungan Sosial	Persentase penurunan PMKS	-2,23%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Dinas Sosial P3AP2KB
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,836	0,852	0,868	0,884	0,90	0,90	Kecamatan
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,25	96,8	96,9	97,0	97,10	97,20	97,20	Dinas Sosial P3AP2KB
4.	Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang		Indeks Birokrasi	70	72	74	76	78	80	80	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase perda yang ditegakkan	21%	25%	40%	60%	82%	100%	100%	Satpol PP
		Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Nilai SAKIP		70,96	75,65	80,5	82,05	83,5	84,9	84,9	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Opini BPK Maturitas SPIP Rasio PAD		WTP 3,18 0,22	WTP 3,50 0,24	WTP 4 0,26	WTP 4,1 0,28	WTP 4,2 0,30	WTP 4,3 0,33	WTP 4,3 0,33	BPKAD Inspektorat Bapenda
		Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN		64,00	71,46	72,92	74,38	75,84	77,10	77,10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE		N/A	3,8	4,09	4,21	4,45	4,54	4,54	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 5.2
Keterkaitan Prioritas (Intervensi) Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Intervensi (Prioritas) Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1.	Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Karakter sejak Usia Dini; 2. GRAB → Gratis Belajar 12 tahun bagi siswa tidak mampu; 3. Beasiswa Perguruan Tinggi untuk Pelajar (Warga Malang) yang berprestasi; 4. Kualitas tenaga pendidik unggul dengan Uji Kompetensi Guru >75; 5. Kualitas dan Kesejahteraan Guru (Tunjangan Guru, Kepssek, dan tenaga pendidik berbasis kinerja); 6. Rotasi Guru dan Kepssek dalam rangka pemerataan kualitas Pendidikan; dan 7. Upgrade Sarana dan Infrastruktur Pendidikan berbasis digital. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal; 2. Pembinaan Pendidikan Dasar; dan 3. Pembinaan Ketenagaan.
			Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> - 100% Warga Kota Malang mendapat BPJS, warga tidak mampu ditanggung Pemkot; 2. Upgrade Kualitas Layanan Puskesmas; 3. Unit Layanan Kesehatan 24 Jam, lengkap dengan dokter jaga dan perawat di setiap kelurahan; 4. JAMPERSAL 1 Juta Rupiah; 5. Ambulan Gratis tiap Kelurahan, penambahan 100 armada dengan waktu tunggu 15 menit dengan membangun jejaring; 6. Preventif dan Promotif Kesehatan masyarakat dan kualitas hidup pasien melalui peran aktif dokter keluarga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 2. BLUD Puskesmas; 3. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah; 4. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah; 5. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 6. Peningkatan Kesehatan Masyarakat; 7. Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
			Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui operasi pasar; 2. Menjamin ketersediaan dan diversifikasi pangan; 3. Kemudahan akses perumahan bagi warga kelas menengah; 4. Subsidi bahan pangan bagi warga miskin desil 1 dengan daging 1,5 kg/bulan/anak; dan 5. Keberpihakan belanja ASN kepada pasar tradisional; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bina Perdagangan; dan 2. Peningkatan Ketahanan Pangan.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Intervensi (Prioritas) Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
P	Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan	Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> Sentra UMKM dan Ekonomi Kreatif, Malang Creative Center, Malang Art Center, dan Malang Planning Gallery sebagai pemanfaatan ex-Ramayana dan cx-PDAM; Revitalisasi pasar tradisional dan pasar modern berbasis pasar rakyat; Memperbaiki sistem kelembagaan BUMD (finansial, pengawasan) yang diantaranya pembentukan BUMD Kota Malang Menciptakan ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru serta Penyediaan <i>co-working space</i> di 5 kecamatan; Wisata Kreatif dan Wisata Halal: Wisata Heritage; Kampung Arena; Studio Trans; Islamic Center & Museum alQuran; Mall UMKM. Membangun event-event kebudayaan yang mendidik sebagai salah satu destinasi wisata; Menyusun kalender event-event pemberdayaan komunitas sebagai destinasi edukasi dan wisata; dan Pengembangan Kawasan pemberdayaan tematik 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Pariwisata; Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pengembangan usaha mikro; Pengembangan Industri; Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar; dan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.
			<p>Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu</p>	<ol style="list-style-type: none"> Jalan lingkar luar Kota Malang; Pengembangan sekitar Pintu Tol; Kerjasama Malang Raya pengelolaan Sungai, dan Air Minum; Percepatan rekayasa lalu lintas penanggulangan macet (Zero Macet); Revitalisasi sistem drainase untuk mengurangi banjir (Zero Banjir); diantaranya menuntaskan proyek drainase sistem jacking; Sarana dan prasarana Kota yang ramah dan nyaman melalui penyediaan trotoar, lahan dan Jembatan; diantaranya melanjutkan pembangunan Jembatan Kedungkandang Pengelolaan Kawasan pemukiman Daerah Aliran Sungai (Bedah Kampung-rumah, jalan, gang, saluran air, dll); dan Integrasi sistem Angkutan Dalam Kota Malang; 	<ol style="list-style-type: none"> Bina Marga; Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Cipta Karya; Pengendalian Lalu Lintas; Pelayanan Angkutan Darat; dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Intervensi (Prioritas) Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
				9. Pengembangan moda transportasi umum yang modern dan berdaya saing	
			Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru; 2. Membentuk fungsi polisi lala ruang; 3. Pengembangan pola ruang perbatasan antar wilayah; 4. Penyederhanaan dan Perbaikan mekanisme perijinan; 5. Pengelolaan dan Pemantapan sampah terpadu (<i>zero waste</i>) ; 6. Integrasi PAM dan PAL atas kebutuhan air dan pengelolaan limbah; 7. Pengelolaan IPAL di bangunan pemerintah, swasta dan rumah tangga berbasis komunal; dan 8. Pengelolaan polusi karbon kendaraan bermotor (<i>zero carbon</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Ruang dan Pertanian; 2. Penataan Lingkungan Hidup; 3. Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3; dan 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
3.	Mewujudkan Kota yang rukun dan Toleran beragama dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender	Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya Kualitas Perindungan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Sarana Prasarana Sosial yang ramah terhadap penyandang disabilitas; 2. Pembangunan paniti jompo terpadu berkonsep villa lansia di wilayah Malang timur; 3. Membangun sistem distribusi bantuan social darurat; 4. Membangun sistem informasi penghubung warga yang ingin membantu anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus; 5. Membina dan Memberdayakan PMKS untuk lebih produktif; 6. Penertiban peredaran minuman berakohol dan tempat hiburan; 7. RTI ramah perempuan dan anak; 8. Membangun sistem informasi pelaporan, pelacakan dan pemindakan kasus kekerasan perempuan dan anak; dan 9. Penyajian keluarga muda baru dengan konsep sekolah ibu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kescmpatan Kerja dan Hubungan Industrial; 2. Pmberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan 3. Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Intervensi (Prioritas) Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem pengamanan lingkungan dengan e-siskamling; dan Penguatan forum dan peran tokoh-tokoh agama dan masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Perempuan dan Anak; Perlindungan Masyarakat; Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana; dan Pemberdayaan Masyarakat.
4.	Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Penyesaian sengketa hukum; Harmonisasi Perperda dengan Kebutuhan Pembangunan; Sistem Pengaduan Pelanggaran Hukum; Database Perencanaan dan Penegakan Tata Ruang; Penetapan Insentif, disinsentif dan sanksi terhadap pelaksanaan pnatanaan ruang; Penguatan Ngalam <i>Command Center</i> (NCC) sebagai fungsi <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dan penanganan untuk pelayanan masyarakat; dan Pengaduan dan pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang. 	<ol style="list-style-type: none"> Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
			Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	<ol style="list-style-type: none"> Struktur kelembagaan yang ramping dan tepat fungsi (<i>right sizing</i>) Penyempurnaan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan; Optimalisasi kinerja lembaga melalui lelang kinerja; Mall Pelayanan Publik dan Pengembangan sistem layanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi melalui Malang <i>Services</i>; Pencertiban pengelolaan pajak dan retribusi daerah; Pengelolaan sistem manajemen Aset untuk produktifitas; Pengelolaan sistem keuangan yang bebas KKN dan Transparan; dan; 	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya; Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum; Pengelolaan Perparkiran; Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pelayanan Pencatatan Sipil; Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Perencanaan bidang Infrastruktur dan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Intervensi (Prioritas) Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
					<p>Kewilayahan; 10. Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah; 11. Pemeliharaan Asst Daerah; 12. Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah; 13. Pelayanan Pajak Daerah; 14. Layanan Pengadaan Barang/Jasa; 15. Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan 16. Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan.</p>
			<p>Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN</p>	<p>1. Mengembangkan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kinerja aparatur; 2. Membangun standar kompetensi dan dan pcta kebutuhan kepegawaian secara profesional; 3. Menjalankan talent poll untuk menyediakan kebutuhan jabatan structural yang profesional; dan 4. Membangun budaya kerja yang berintegritas dan jiwa kepemimpinan yang tangguh;</p>	<p>1. Pengembangan dan Mutasi Kepegawaian; 2. Pengembangan Kompetensi dan Fasilitas Profesi; dan 3. Pengembangan Standar Kompetensi.</p>
			<p>Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi</p>	<p>1. Membangun sistem respon cepat dan monitoring pembangunan; 2. Membangun Big Data dan Pola pemanfaatan secara Geo Spasial; 3. Mengintegrasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi; dan 4. Peningkatan Fungsi Lembaga Perijinan Perda Tata Ruang - DPMPSTSP</p>	<p>1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan 2. Pengelolaan Aplikasi Informatika.</p>

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

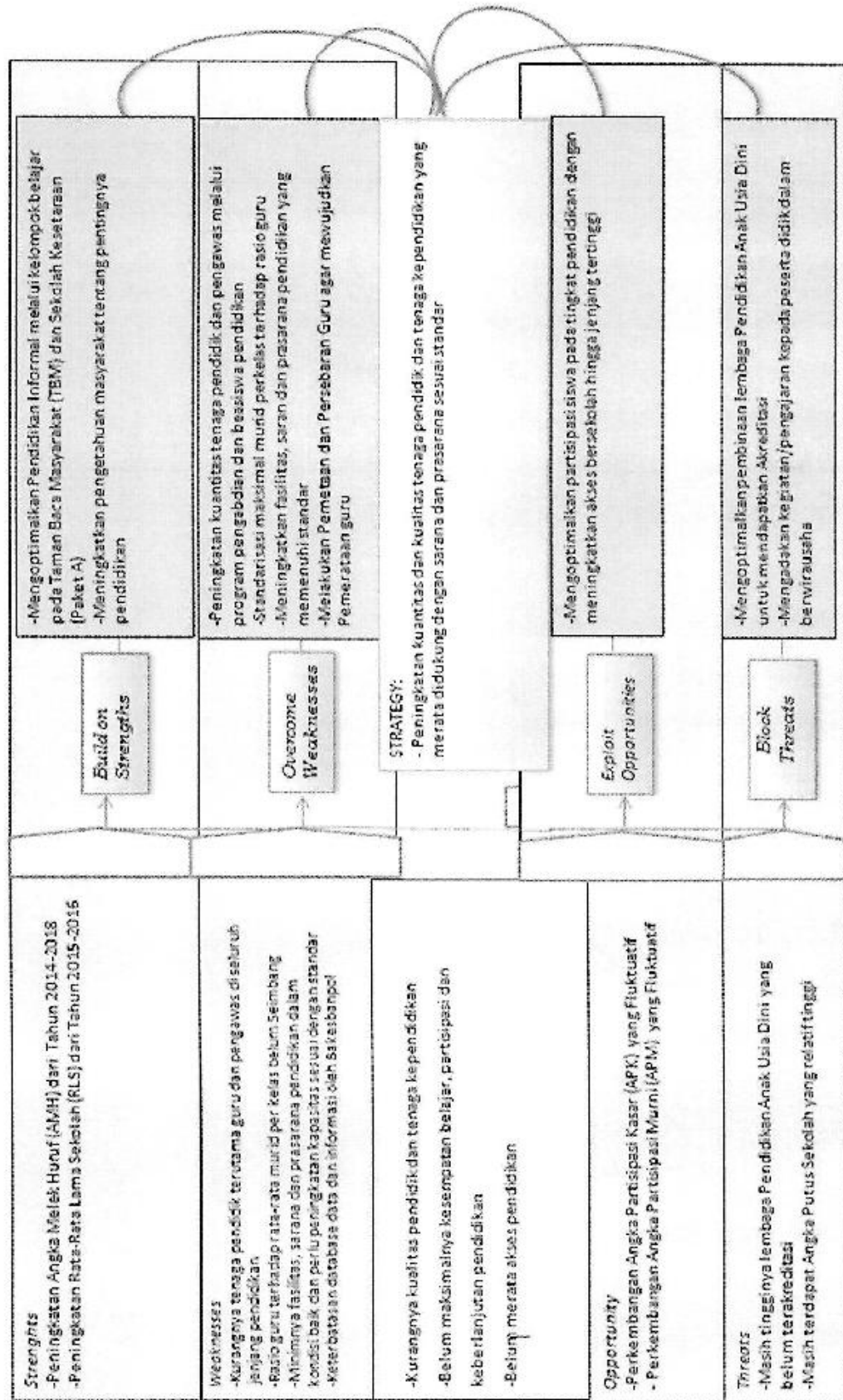
Strategi dan arah kebijakan merupakan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Pendekatan dengan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Capaian pembangunan yang sudah dilakukan oleh Kota Malang harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui adaptasi terhadap perkembangan internal maupun eksternal Kota Malang. Disamping itu, lingkungan internal juga menjadi hal penting karena didalamnya berisi sumber daya yang dimiliki sehingga sasaran, tujuan, misi, dan visi yang dirumuskan harus berdasarkan kondisi riil.

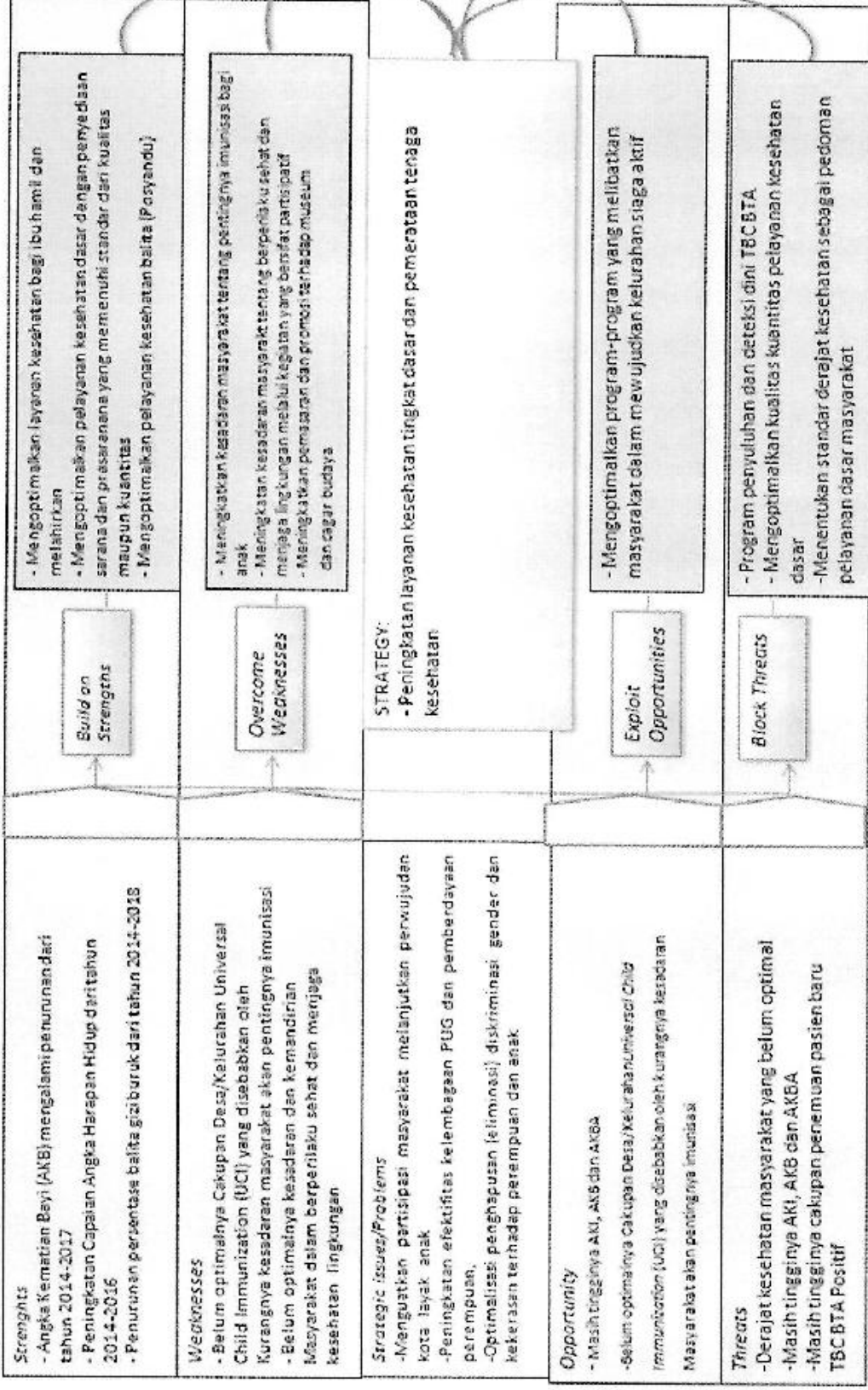
6.1 Strategi

Perumusan RPJMD 2018-2023 Kota Malang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi capaian RPJMD periode sebelumnya termasuk tahapan-tahapan yang dirumuskan didalamnya dan analisis faktor internal maupun faktor eksternal berdasarkan hasil telaah visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Analisis faktor-faktor internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sedangkan analisis faktor-faktor eksternal diperlukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi Kota Malang dalam mencapai tujuan pembangunan.

Gambar 6.1
(G-B.8)
Strategy Worksheet: SWOT Formulation
Goal (Sasaran): Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter



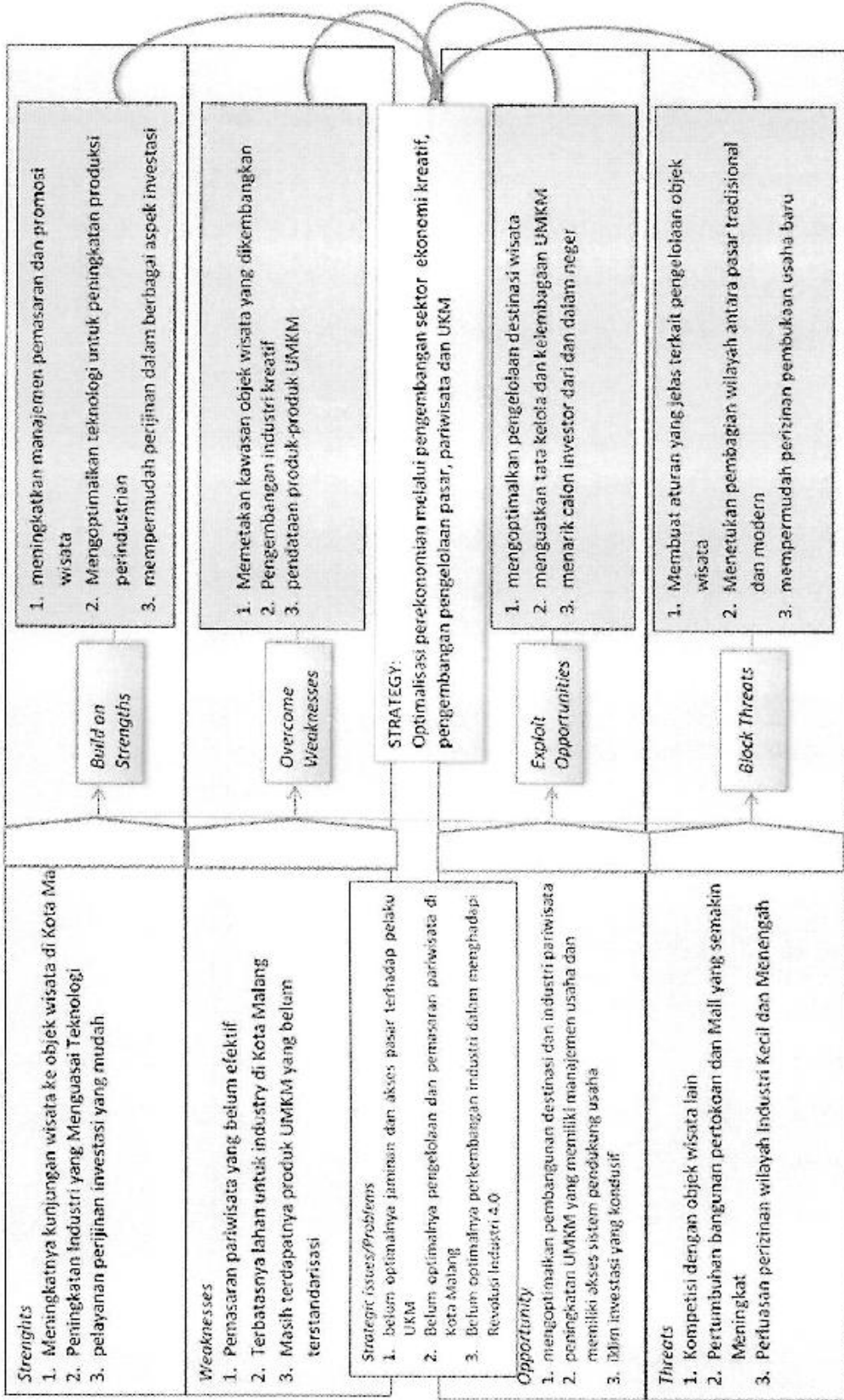
Gambar 6.2
 (G-B.8)
 Strategy Worksheet: SWOT Formulation
 Goal (Sasaran): Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan



Gambar 6.3
 Gambar G-B.8
 Strategy Worksheet: SWOT Formulation
 Goal (Sasaran): Meningkatkan Daya Beli Terhadap Komoditas Pangan Dan Non-Pangan

<p>Strengths</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Daerah Rawan Pangan sebesar 100% - Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 	<p>Build on Strengths</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan daerah rawan pangan agar tetap stabil - Mengoptimalkan pola pangan yang berkualitas
<p>Weaknesses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan pangan di Kota Malang masih didominasi oleh sumber pangan nabati dengan persentase sebesar 81,75% - Menurunnya produksi Pertanian dan Perkebunan 	<p>Overcome Weaknesses</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan ketersediaan sumber pangan hewani - Meningkatkan kegiatan pendampingan dan bantuan modal dalam peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan
<p>Strategic issues/Problems</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan pangan di Kota Malang masih didominasi oleh sumber pangan nabati dengan persentase sebesar 81,75% - Daya Konsumsi ikan masyarakat masih rendah - Produktivitas pertanian dan perkebunan rendah 	<p>STRATEGY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan melalui stabilisasi harga 	
<p>Opportunity</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Cadangan Pangan Kota Malang Stabil - Peningkatan produksi sektor peternakan dan perikanan 	<p>Exploit Opportunity</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan terhadap produksi pendukung ketahanan pangan - Mengoptimalkan usaha pengelolaan hasil produksi sektor peternakan dan perikanan dalam
<p>Threats</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daya Konsumsi ikan masyarakat masih rendah 	<p>Block Threats</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan promosi konsumsi ikan dan pengelolaan makanan berbahan dasar ikan

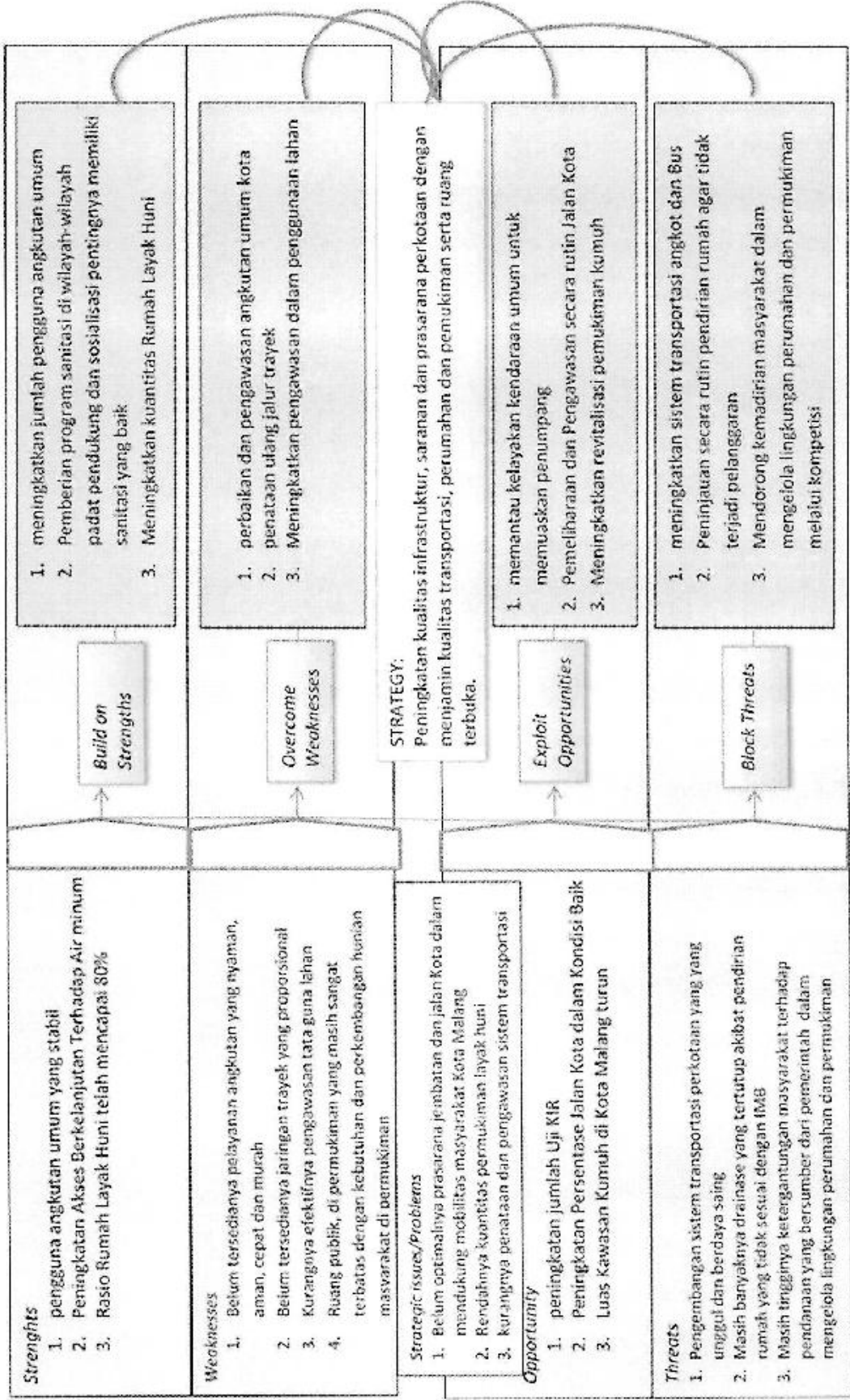
Gambar 6.4
(G-B.8)
Strategy Worksheet: SWOT Formulation
Goal (Sasaran): Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif



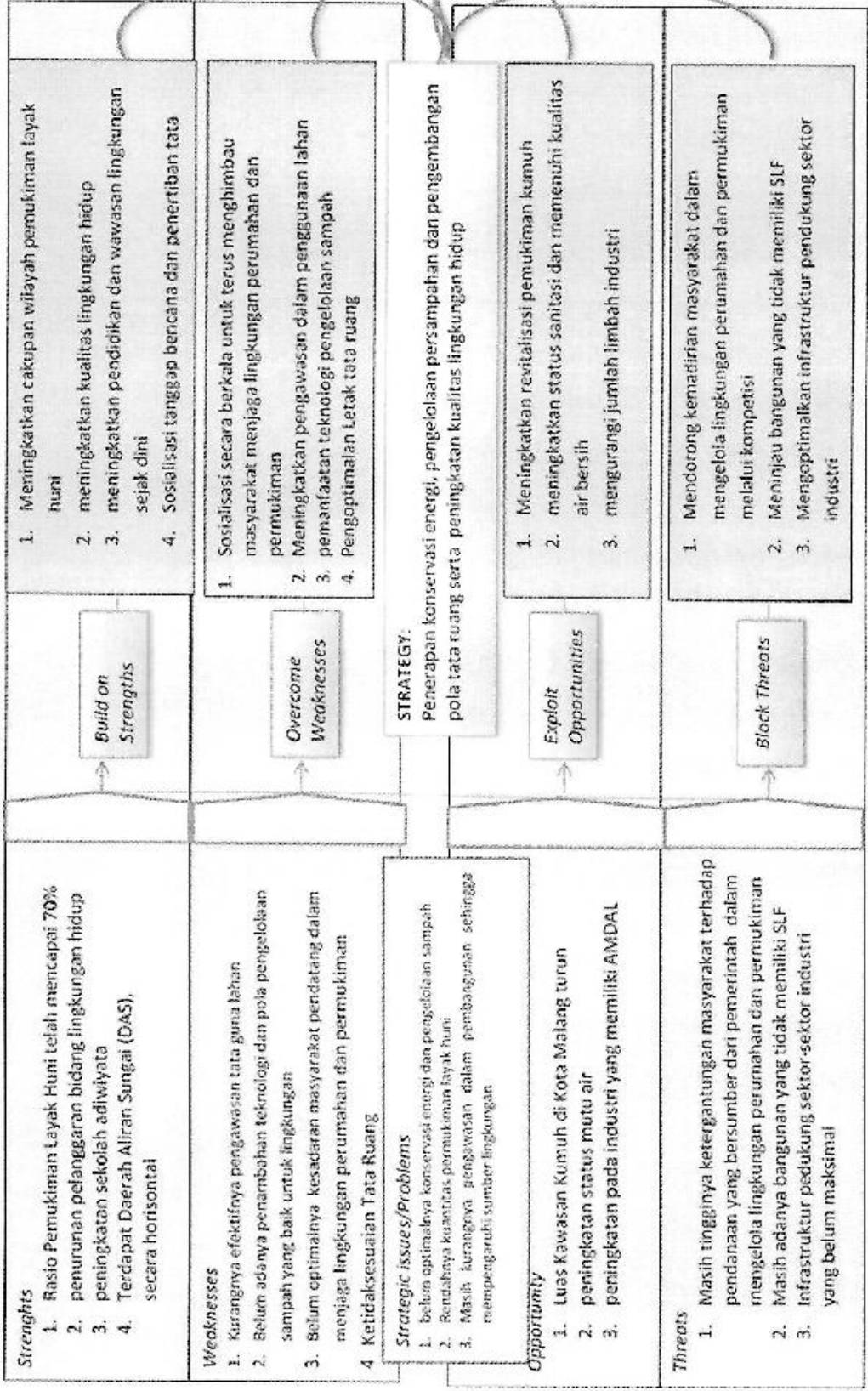
Gambar 6.5
(G-B.8)

Strategy Worksheet: SWOT Formulation

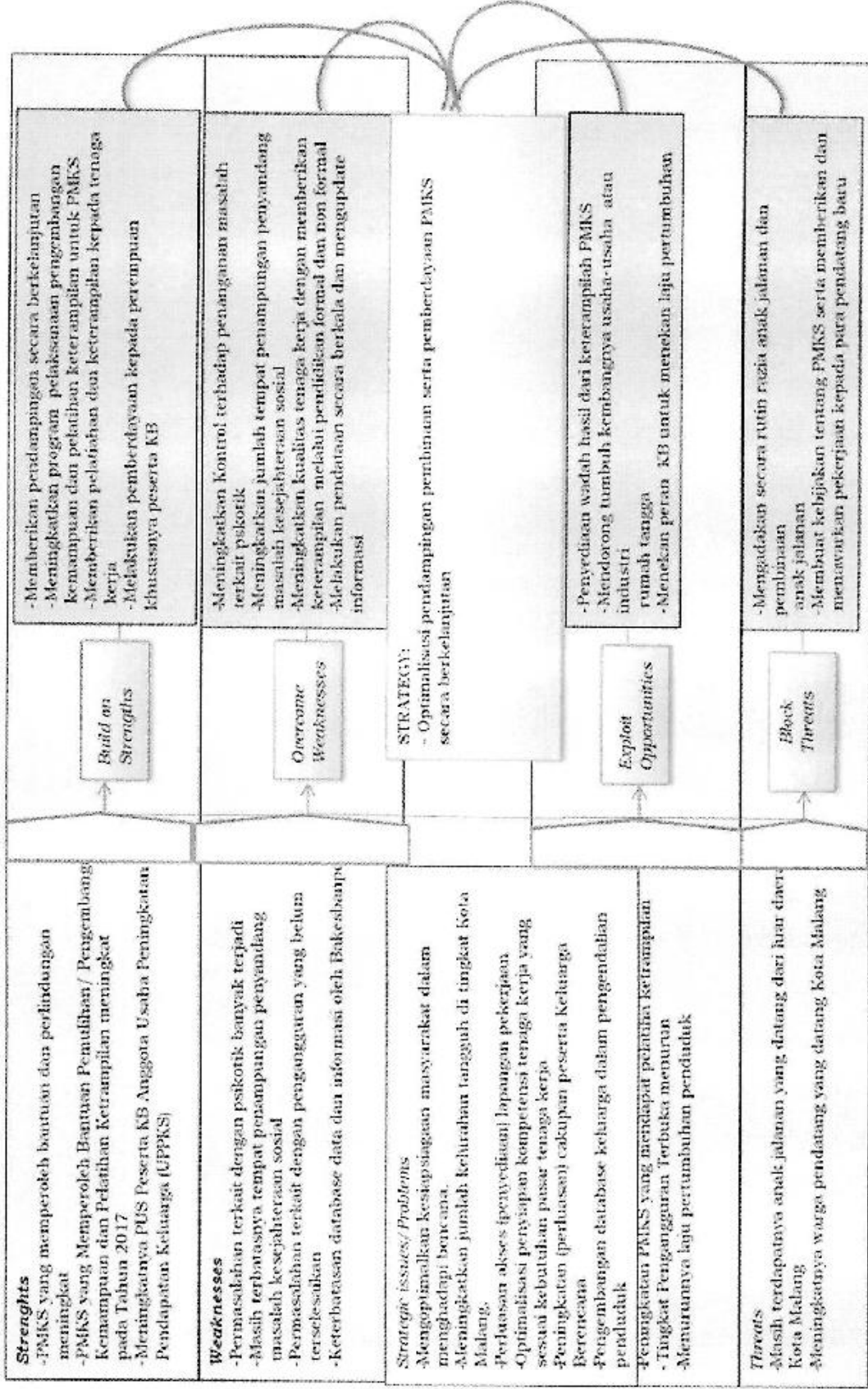
Goal (Sasaran): Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota Secara Terpadu



Gambar 6.6
(G-B.8)
Strategy Worksheet: SWOT Formulation
Goal (Sasaran): Meningkatkan Kualitas Kemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup



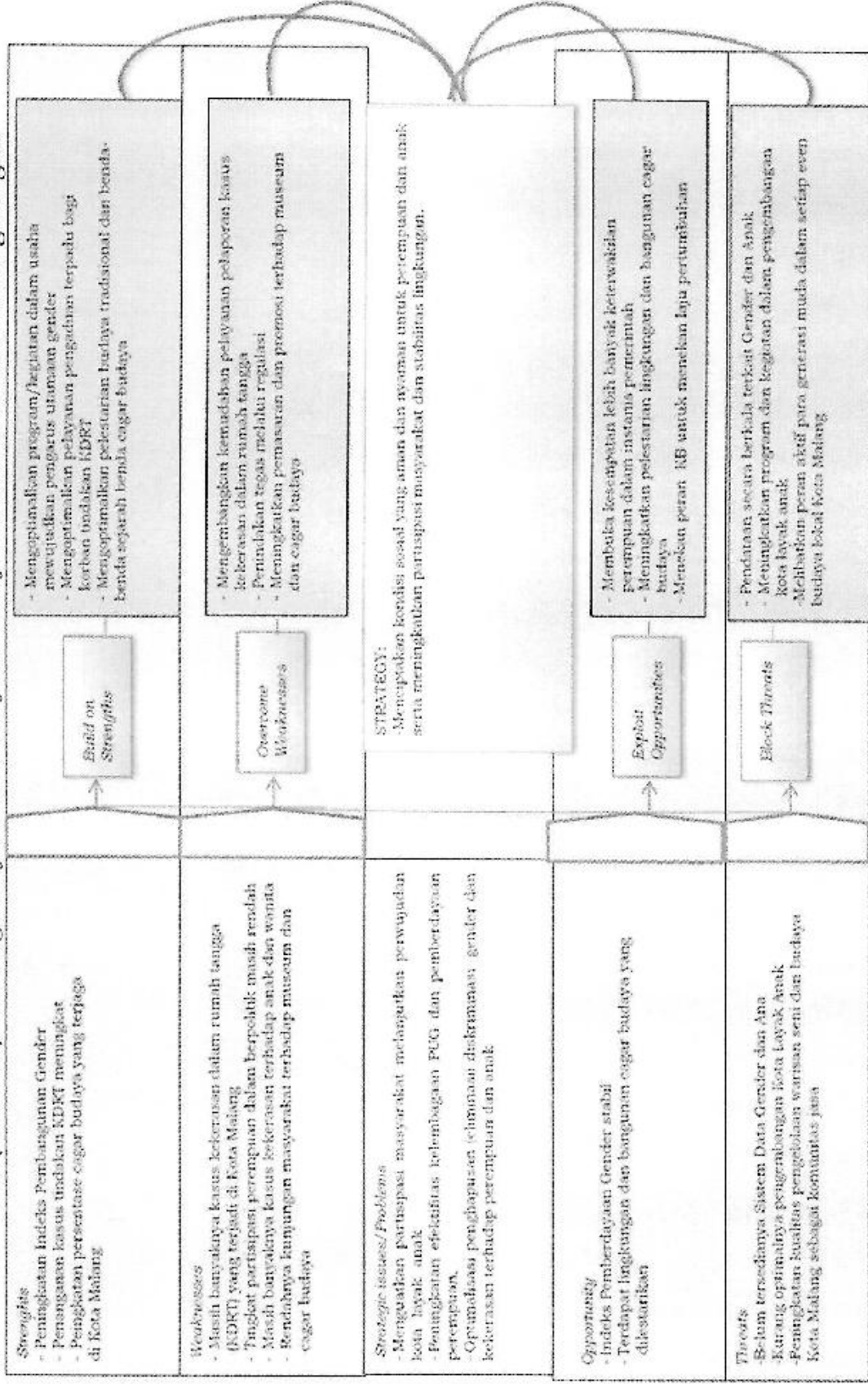
Gambar 6.7
(G-B.8)
Strategy Worksheet: SWOT Formulation
Goal (Sasaran): Meningkatkan Kualitas Perlindungan Sosial



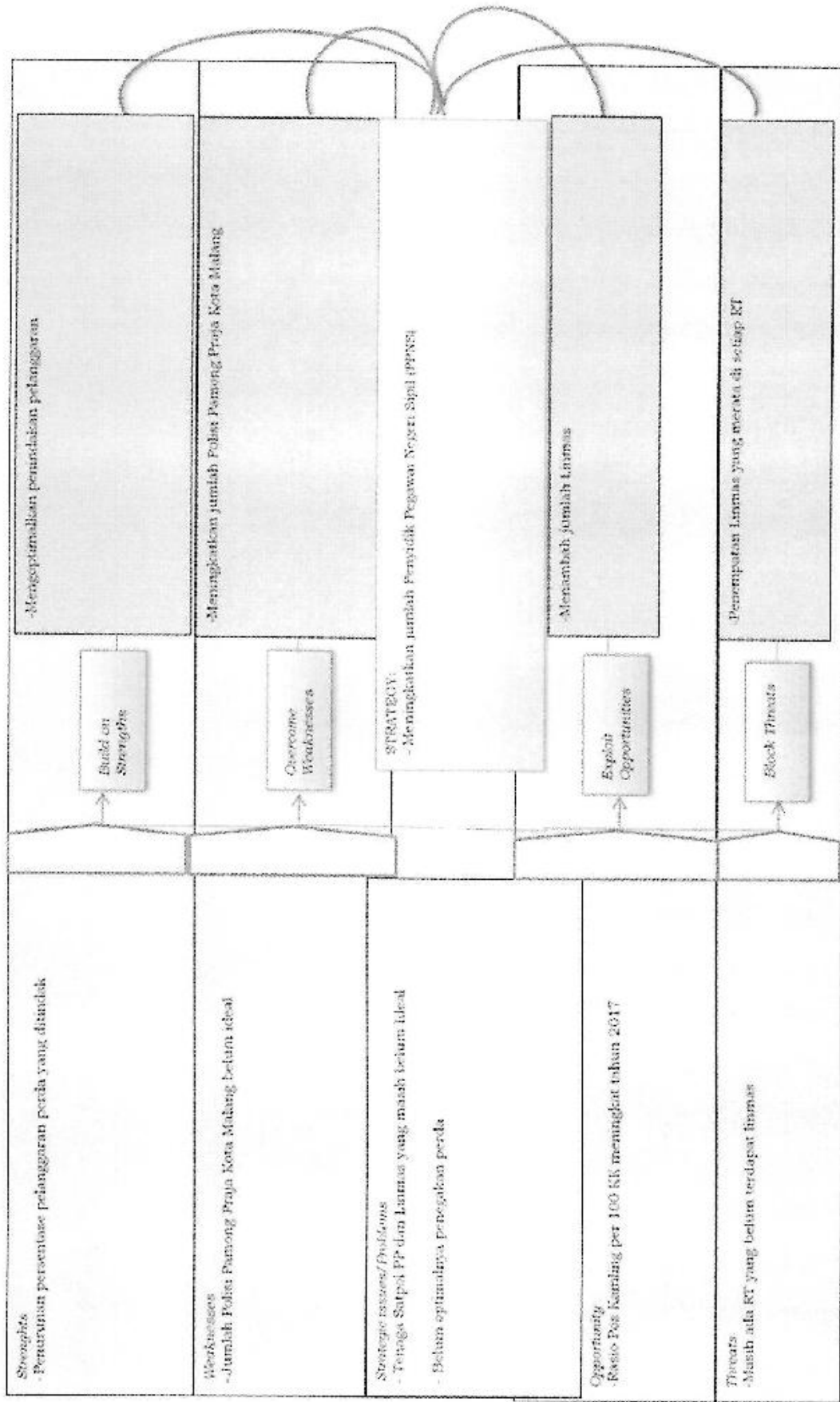
Gambar 6.8

(G-B.8)

Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan



Gambar 6.9
 (G-B.8)
 Strategy Worksheet: SWOT Formulation
 Goal (Sasaran): Meningkatkan Pengawasan Peraturan Daerah Dan Tertib Hukum

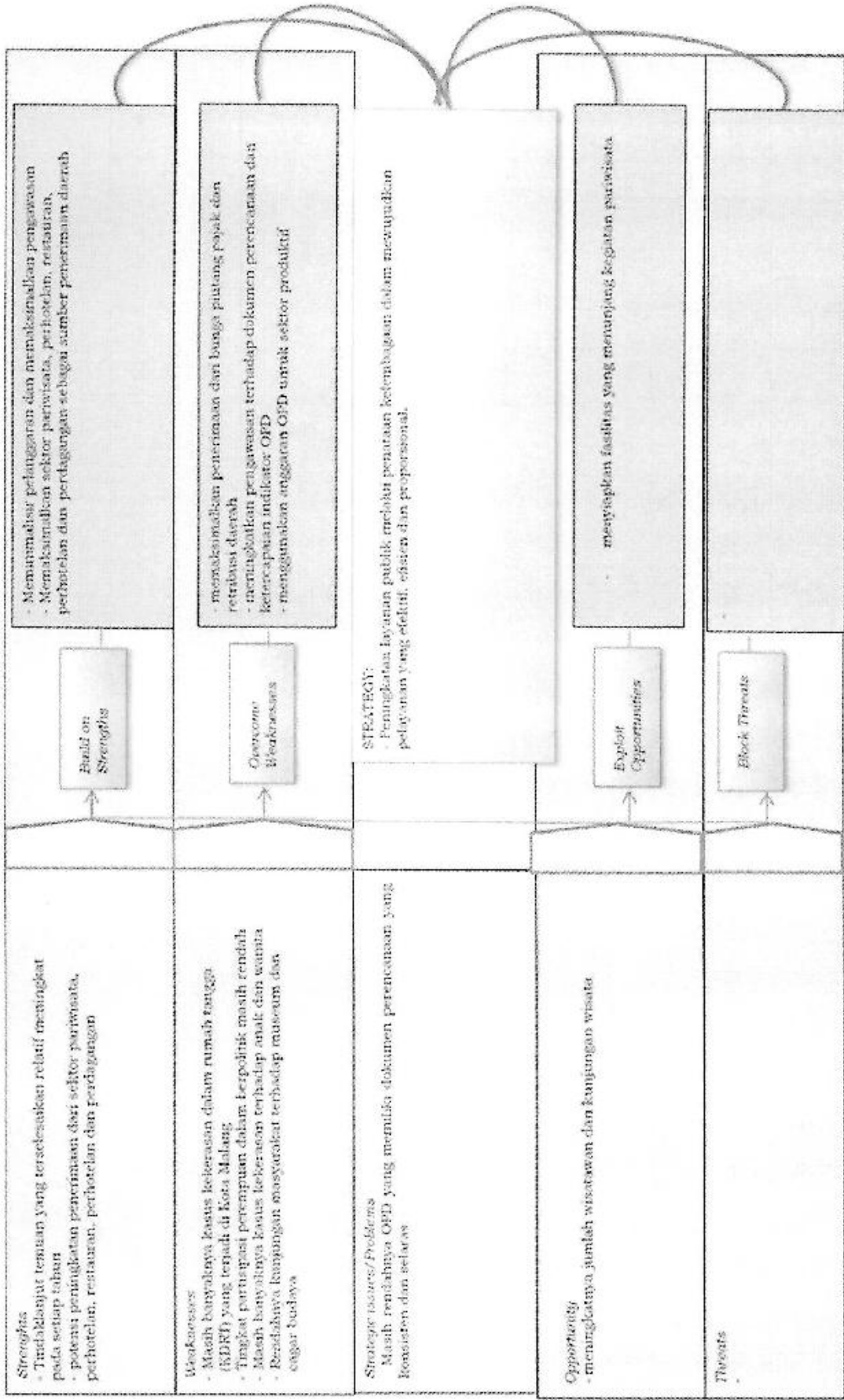


Gambar 6.10

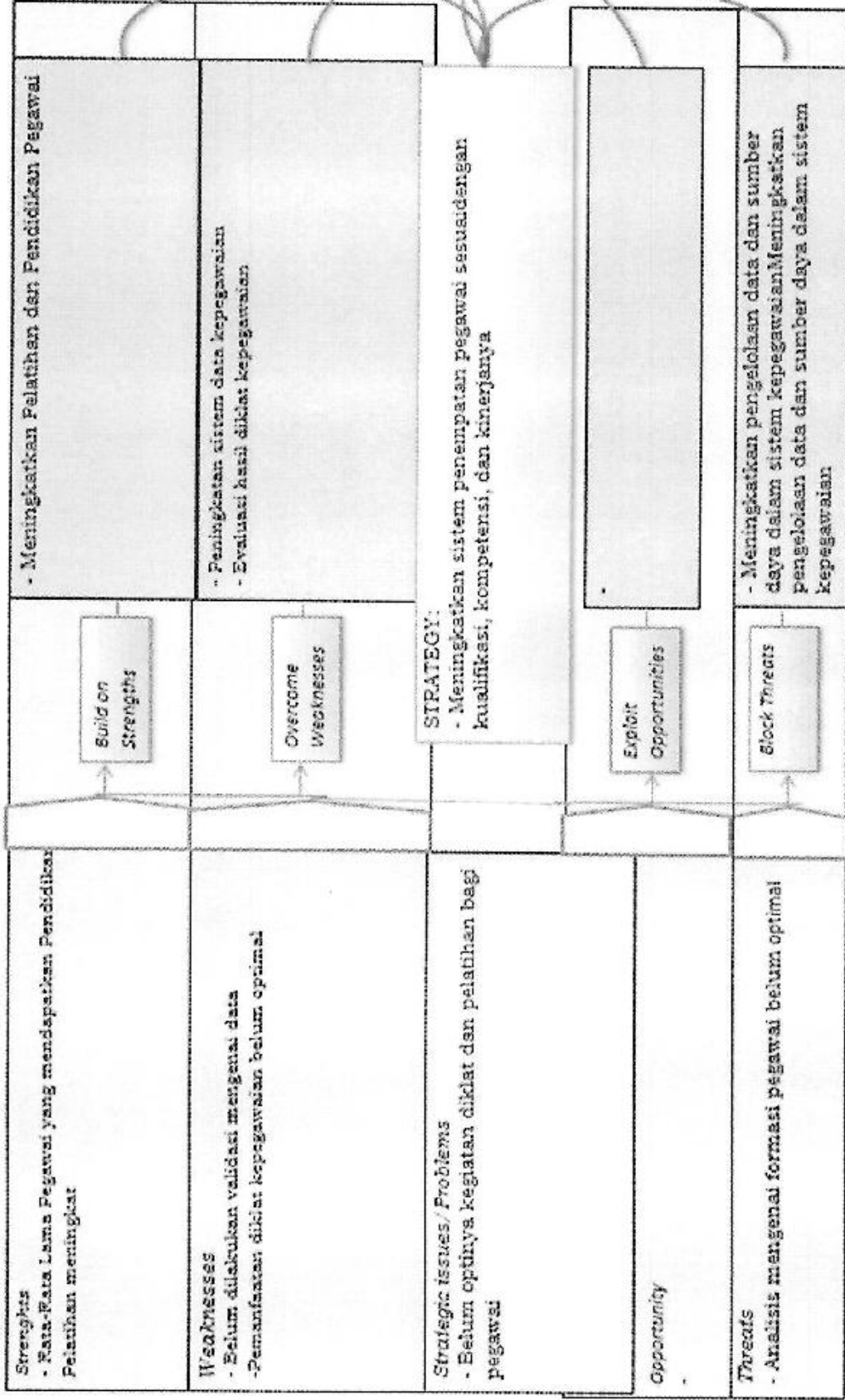
(G-B.8)

Strategy Worksheet: SWOT Formulation

Goal (Sasaran): Meningkatkan Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif



Gambar 6.11
 (G-B.8)
 Strategy Worksheet: SWOT Formulation
 Goal (Sasaran): Meningkatkan Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN



Perumusan strategi hasil analisis SWOT seperti ditunjukkan pada sub bagian analisis SWOT dipilih untuk dirumuskan menjadi rumusan strategi yang disesuaikan dengan isu strategis dan rumusan visi, misi, tujuan sasaran Kota Malang. Setelah melalui proses penilaian atas alternatif strategi hasil dari analisis SWOT di atas dirumuskan strategi terpilih seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
(T-B. 48)
Perumusan Strategi

No.	Masalah	Strategi
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya rasio tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang pendidikan 2. Masih terdapat Angka Putus Sekolah yang relatif tinggi dikarenakan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 3. Minimnya fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik dan perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan standar 	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya AKI, AKB dan AKBA 2. Belum optimalnya Cakupan Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi; 3. Belum optimalnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat dan menjaga kesehatan lingkungan 4. Belum maksimalnya penanganan kualitas hidup pasien terminal melalui peran aktif dokter keluarga 	Peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terjaminnya ketersediaan dan 	Optimalisasi daya beli masyarakat terhadap komoditas

No.	Masalah	Strategi
	<p>diversifikasi pangan</p> <p>2. Belum adanya Regulasi kemudahan kepemilikan perumahan bagi penduduk Kota Malang</p> <p>3. Kurang optimalnya strategi stabilisasi harga bahan pokok</p> <p>4. Masih belum optimalnya subsidi bahan pangan bagi warga miskin</p> <p>5. Kurangnya keberpihakan belanja pada pasar tradisional</p>	<p>pangan dan non pangan melalui stabilisasi harga</p>
4.	<p>1. Belum optimalnya jaminan dan akses pasar terhadap pelaku UM</p> <p>2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran pariwisata di Kota Malang</p> <p>3. Belum optimalnya perkembangan industri dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0</p>	<p>Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UM, yang diantaranya membentuk BUMD Kota Malang</p>
5.	<p>1. Belum optimalnya prasarana jembatan dan jalan Kota dalam mendukung mobilitas masyarakat Kota Malang</p> <p>2. Rendahnya kuantitas permukiman layak huni</p> <p>3. kurangnya penataan dan pengawasan sistem transportasi</p>	<p>Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dengan menjamin kualitas transportasi, perumahan dan pemukiman serta ruang terbuka, yang diantaranya menuntaskan proyek drainase sistem jacking dan melanjutkan pembangunan Jembatan Kedungkandang</p>
6.	<p>1. Belum optimalnya konservasi energi dan pengelolaan sampah</p> <p>2. Rendahnya kuantitas permukiman layak huni</p> <p>3. Masih kurangnya pengawasan dalam pembangunan sehingga mempengaruhi sumber lingkungan</p>	<p>Penerapan konservasi energi, pengelolaan persampahan dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup</p>
7.	<p>1. Kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan PMKS</p> <p>2. Masih terbatasnya tempat penampungan penyandang masalah kesejahteraan</p>	<p>Optimalisasi pendampingan pembinaan serta pemberdayaan PMKS secara berkelanjutan</p>

No.	Masalah	Strategi
	<p>sosial (khususnya rumah lansia)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Masih minimnya penanganan dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas 4. Belum adanya sistem distribusi bantuan social darurat secara non-tunai 5. Belum adanya sistem informasi penghubung warga yang ingin membantu dengan sasaran anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus 	
8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih minimnya kalender event-event pemberdayaan komunitas sebagai destinasi edukasi dan wisata 2. Peningkatan Pengembangan Kawasan pemberdayaan tematik 3. Mengoptimalkan penanganan komprehensif terhadap tindakan kekerasan perempuan dan anak (menggunakan sistem informasi) 4. Mengoptimalkan penguatan karakter berbasis keluarga (salah satunya dengan sekolah ibu) 5. Mengoptimalkan Penguatan peran Forum Tokoh Agama dan masyarakat 6. Belum adanya Pengembangan sistem pengamanan lingkungan online 7. Belum maksimalnya Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya 	Menciptakan kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk perempuan dan anak serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan.
10.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang bersanksi hukum ditegakkan 2. Masih belum dilaksanakan 	Meningkatkan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

No.	Masalah	Strategi
	<p>Perda yang telah dihasilkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tidak optimalnya sistem pengaduan pelanggaran hukum 4. Belum optimalnya Harmonisasi dan sinkronisasi Properda sesuai kebutuhan pembangunan daerah 5. Penyelesaian sengketa hukum 	
11.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja pembangunan daerah 2. Kurang optimalnya organisasi Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi, melalui penataan kelembagaan, analisis jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan target reformasi birokrasi 3. Belum optimalnya kualitas pelayanan melalui partisipasi masyarakat dan mendorong inovasi pelayanan publik 4. Kurang maksimalnya sistem layanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi 5. Belum maksimalnya sistem pengelolaan aset daerah 6. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah 7. Belum optimalnya pengelolaan sistem keuangan yang bersih dan transparan 8. Belum maksimalnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<p>Peningkatan layanan publik melalui penataan kelembagaan dalam mewujudkan pelayanan publik efektif, efisien dan proporsional melalui diantaranya: Menyusun struktur kelembagaan yang ramping dan tepat fungsi (<i>right sizing</i>) dan Mengoptimalkan kinerja lembaga melalui lelang kinerja.</p>
12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sistem manajemen kinerja ASN 	<p>Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai</p>

No.	Masalah	Strategi
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum adanya standar kompetensi dan peta kebutuhan kepegawaian secara profesional 3. Belum tersedianya kebutuhan jabatan struktural yang profesional 4. Belum terbangunnya budaya kerja yang berintegritas dan jiwa kepemimpinan yang tangguh 5. Belum optimalnya peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan 6. Belum adanya sistem reward dan punishment kinerja aparatur 	dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya
13.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya sistem informasi manajemen pemerintahan terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan 2. Belum adanya Big Data dan Pola pemanfaatan secara Geo Spasial 3. Belum adanya sistem respon cepat dan monitoring pembangunan, serta optimaisasi Ngalam Command Center (NCC) 	Pengembangan Big Data Informasi yang terintegrasi

Tabel 6.2
(T-C. 12)
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Malang

VISI : KOTA MALANG BERMARTABAT		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1 : Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bgai Semua Warga		
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Tercapainya masyarakat terdidik dan berkarakter	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Optimalisasi daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan melalui stabilisasi harga
MISI 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan		
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UM. Yang diantaranya membentuk BUMD Kota Malang.
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras Kota secara terpadu	Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dengan menjamin kualitas transportasi, perumahan dan pemukiman serta ruang terbuka. Yang diantaranya

		menuntaskan proyek drainase sistem jacking dan melanjutkan pembangunan Jembatan Kedungkandang
	Meningkatkan kualitas pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Penerapan konservasi energi, pengelolaan persampahan dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup
MISI 3 : Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender		
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Optimalisasi pendampingan pembinaan serta pemberdayaan PMKS secara berkelanjutan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Menciptakan kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk perempuan dan anak serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan.
MISI 4 : Pemerintahan yang Tertib Hukum, Profesional dan Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Akuntabel		
Terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Meningkatkan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Peningkatan layanan publik melalui penataan kelembagaan dalam mewujudkan pelayanan publik efektif, efisien dan proporsional
	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan

		kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya. Yang diantaranya Menyusun struktur kelembagaan yang ramping dan tepat fungsi (<i>right sizing</i>) dan Mengoptimalkan kinerja lembaga melalui lelang kinerja
	Meningkatnya integrasi teknologi informasi	Pengembangan Big Data Informasi yang terintegrasi

6.2 Arah Kebijakan

Tabel 6.3
(T-B. 49)

Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Tercapainya masyarakat terdidik dan berkarakter	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar	Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Dasar Lainnya
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan	Akses dan Kualitas Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya
		Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Optimalisasi daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan melalui stabilitas harga	Menjaga daya beli dan perlindungan sosial

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.	Terwujudnya Produktifitas dan Daya Saing Daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UM	Pemantapan industri kreatif masyarakat
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dengan menjamin kualitas transportasi, perumahan dan pemukiman serta ruang terbuka.	Infrastruktur perekonomian dan sarana prasarana sosial
		Meningkatnya Kualitas kemanfaatan tata ruang dan Lingkungan Hidup	Penerapan konservasi energi, pengelolaan persampahan dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	
3.	Terwujudnyakesejahteraan masyarakat dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Optimalisasi pendampingan pembinaan serta pemberdayaan PMKS secara berkelanjutan	Kemandirian Sosial Ekonomi
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan sabilitas	Menciptakan kondisi sosial yang aman dan nyaman	

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		lingkungan	untuk perempuan dan anak serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan.	
4.	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Penegakan dan Tertib Hukum	Meningkatkan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Suprastruktur Kelembagaan
		Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Peningkatan layanan publik melalui penataan kelembagaan dalam mewujudkan pelayanan publik efektif, efisien dan proporsional	
		Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya	
		Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Pengembangan Big Data Informasi yang terintegrasi	

Tabel 6.4
(T-C. 13)
Arah Kebijakan Pembangunan
Kota Malang
Arah Kebijakan

Fokus Tahun-1	Fokus Tahun-2	Fokus Tahun-3	Fokus Tahun-4	Fokus Tahun-5
Suprastruktur Kelembagaan. Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial. Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial.	Suprastruktur Kelembagaan. Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial. Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial.	Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial. Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial. Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat.	Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial. Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial. Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat. Kemandirian Sosial Ekonomi	Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial. Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat. Kemandirian Sosial Ekonomi.

Arah kebijakan pembangunan Kota Malang dalam kurun waktu 5 Tahun kedepan terbagi dalam 5 periode dengan uraian sebagai berikut: Tahun-1, kebijakan pembangunan Kota Malang mengarah kepada suprastruktur kelembagaan, akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, menjaga daya beli dan perlindungan sosial serta infrastruktur perekonomian sarana dan prasarana sosial. Arah kebijakan ini selaras dengan misi ke-1 (satu), misi ke-2 (dua), misi ke-3(tiga), dan misi ke-4 (empat) Kota Malang. Pembangunan diprioritaskan yang pertama pada misi ke-1 (satu) yaitu Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses

pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang. Kebijakan pembangunan misi 2 (dua) Kota Malang yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. Kebijakan pembangunan terkait dengan misi 3 (tiga) Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender. Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyeteraan gender, serta kerukunan sosial. Arah kebijakan misi ke-4 (empat) Kota Malang yaitu Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel. Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tahun-2, arah kebijakan pembangunan Kota Malang pada tahun ke-2 (dua) masih sama dengan tahun ke-1 (satu) yaitu mengarah kepada suprastruktur kelembagaan, akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, menjaga daya beli dan perlindungan sosial serta infrastruktur perekonomian sarana dan prasarana sosial. Arah kebijakan ini selaras dengan misi ke-1 (satu), misi ke-2 (dua), misi ke-3 (tiga), dan misi ke-4 (empat) Kota Malang.

Tahun-3, kebijakan pembangunan Kota Malang mengarah kepada akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya. menjaga daya beli dan perlindungan sosial, infrastruktur perekonomian dan sarana prasarana sosial, pemantapan industri kreatif masyarakat. Dalam tahun ini arah pembangunan Kota Malang terkait pada 3 (tiga) misi Kota Malang, yang pertama pada misi ke-1 (satu) yaitu Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan

pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang. Kedua terkait dengan misi 2 (dua) Kota Malang yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. Ketiga, terkait dengan misi 3 (tiga) Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender. Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaan gender, serta kerukunan sosial.

Tahun-4, kebijakan pembangunan Kota Malang pada tahun ke-4 (empat) masih sama dengan tahun ke-3 (tiga) yaitu mengarah kepada Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial, Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial, Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat, dan Kemandirian Sosial Ekonomi.

Tahun-5, kebijakan pembangunan Kota Malang mengarah kepada Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya, Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial, Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat, Kemandirian Sosial Ekonomi. Di tahun ini arah pembangunan selaras dengan 3 (tiga) misi. Pertama, Misi 1 (satu) yaitu Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang. Kedua, misi 2 (dua) Kota Malang yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan

meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, terlibat penataan ruang serta berwawasan lingkungan. Dan ketiga dengan misi 3 (tiga) Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender. Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial.

6.3 Program Pembangunan

Tabel 6.5
(T-C. 14)
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kota Malang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupai/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RUMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan:												Peringkat Daerah Peranggu ng Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Merjani Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya bagi semua warga																	
	Terwujudnya Pemertanian Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,0	81,43	81,86	83,00	83,80	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90			
	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berbudaya	Indeks Pendidikan	0,77	0,78	0,79	0,82	0,84	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87			
	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	APK PAUD			90,38	90,88	91,38	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APM PAUD			81,4	81,9	82,4	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang PAUD		0	11.350.000.000	14.300.000.000	16.000.000.000	18.150.000.000	18.150.000.000	18.150.000.000	18.150.000.000	18.150.000.000	18.150.000.000	18.150.000.000	18.150.000.000	60.000.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PAUD			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program /Program Pembanguanan Daerah	Indikator Kinerja (Tujutan/ Output/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penganggung Jawab			
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Program Pembinaan Pendidikan Dasar	APK SD																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
																		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APM SD																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
																		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Sarana-sarana Capaian Peningkatan Karakter Jorong SD																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APK SMP		0	200.403.000.000	207.896.176.000	217.795.746.000	229.913.880.000	656.088.897.000										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SMP																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jorong SMP																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
																		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Pembinaan Ketrnagaan	Pembinaan Guru tersertifikasi																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
																		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembinaan Guru dengan Rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75		0	12.500.000.000	14.750.000.000	16.150.000.000	18.750.000.000	62.150.000.000									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
																		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Yujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal SPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Horangkat Daerah Penyelenggara Jember
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rasio profesionalitas dan keahlian tenaga Pendidikan		35		42		52		52		52		52		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,814	0,818		0,820		0,823		0,825		0,825		0,825		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Urut Pelayanan Kesehatan Yang Meneruahi STM		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Cakupan penduduk yang terjangkau asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat		100%	0	100%	137.647.052.000	100%	142.121.709.000		135.807.439.000		100%	569.147.361.000		Dinas Kesehatan
	Program BLUD Puskesmas	Persentase Puskesmas Yang Telah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	MDR (Net Death rate)		<2%	0	<2%	45.000.000.000	<2%	50.000.000.000		50.500.000.000		<2%	185.500.000.000		Dinas Kesehatan
	Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	DOI (Ded Occupancy Rate) RSUD		0,3	0	0,35	8.754.124.540	0,4	9.724.036.994		10.836.440.593		0,5	37.329.602.227,10		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Pendulaan Penyakit	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		100%	0	100%	4.750.000.000	100%	5.000.000.000		5.250.000.400		100%	19.500.000.000		Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Asas/Program /Program Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Pangkat Daerah Peringkat jawah
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Konsisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ Berat)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Persentase Keutuhan UCI		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Ibu		0	60,22	10.000.000.000	51,61	11.500.000.000	51,61	12.500.000.000	43,01	12.750.000.000	43,01	43,01	43,01	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Peningkatan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Masyarakat	Angka Kematan Bayi		6,02	6,02	5,94	5,94										Dinas Kesehatan
Persentase Balita Stunting			<21%	0,23	0,23	0,22	0,21										Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase Tenaga Medis Yang Berkompetensi		85%	87%	89%	90%										Dinas Kesehatan
		Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan Dan Obat-Obatan Sesuai Standar		100%	100%	100%	100%										Dinas Kesehatan
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	0	1,67	1,7	1,74	1,72										Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan peserta KB Aktif	0	75,4	75,6	75,8	76										Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2.500.000.000	2.750.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000										Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				12.500.000.000	13.500.000.000	14.500.000.000	15.500.000.000										Dinas Kesehatan
				0	0	0	0										Dinas Kesehatan
				56.000.000.000	56.000.000.000	56.000.000.000	56.000.000.000										Dinas Kesehatan
				11.750.000.000	11.750.000.000	11.750.000.000	11.750.000.000										Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Program Pelembagaan Daerah	Indikator Kinerja (Tupak/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal REJMD (tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Penlembaan												Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode REJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Perubahan Ekonomi	5,4%	5,5%	5,6%	5,7%	5,8%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%				
		Ciri Rasio	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37				
		Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	K/A	6	6,1	6,2	6,3	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45				
		Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina		25%	30%	35%	30%	60%	60%	60%	60%	60%	60%				Dinas Kepemuda an, Olahraga, dan Pariwisata
		Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina		30%	40%	40%	50%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	18.750.000.000			Dinas Kepemuda an, Olahraga, dan Pariwisata
		Persentase Pemasaran Pariwisata		45%	55%	55%	65%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	5.000.000.000			Dinas Kepemuda an, Olahraga, dan Pariwisata
		Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif		25%	30%	30%	40%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	12.250.000.000			Dinas Kepemuda an, Olahraga, dan Pariwisata
		Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro Yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil		0	40,79%	70,39%	99,90%	129,58%	129,58%	129,58%	129,58%	129,58%	129,58%	7.800.000.000			Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase Peningkatan Jumlah IKM		0	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	825.000.000			Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program/ Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Fasilitas Penceranaan Jalan	N/A	67,23%		78,15%		89,09%		100%		100%		100%		Dinas Pekerjaan Umum, Peningkatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Drainase Kota Dalam Kotalistas Daur	82,73%	83,01%		83,51%		84,02%		84,52%		84,52%		84,52%		Dinas Pekerjaan Umum, Peningkatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Fasilitas Kota Dalam Kotalistas Baku	60%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pekerjaan Umum, Peningkatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Jalan Yang Memiliki Jalur Pejalan Baki	N/A	89,93%		91,53%		93,14%		94,74%		94,74%		94,74%		Dinas Pekerjaan Umum, Peningkatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Layanan Rumah Layak Hidup Yang Terjangkau		56%	3.300.000.000	63%	3.750.000.000	75%	4.000.000.000	80%	4.250.000.000	80%	15.500.000.000	80%	15.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Peningkatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupian/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Peringkat Daerah Peringkat Jawa Tengah		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Komulatif Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU		55%			65%			75%			80%			80%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Rumah Tidak Layak Hurdi		0%			0%			0%			0%			0%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Cipta Karya	Persentase Unggulan Gedung Yang Memenuhi Syarat Serdikot Lak Fungsi Bangunan Gedung		100%			100%			100%			100%			100%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Pembangunan Kawasan Prioritas Sesuai RTHL	N/A	5%	1.000.000.000	10%	115.000.000.000	15%	154.000.000.000	20%	191.000.000.000	25%	461.000.000.000					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase rumah tinggal berbasis air bersih/berair	93,12%	93,71%		94,01%	94,01%			94,16%			94,16%					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pengembangan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Peringkat Daerah Pemeringkapan Jawa
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	84,41%		85,02%		85,17%		85,32%		85,47%		85,47%			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengendalian Laju Limas	Persentase penurunan titik kemacetan	0	68%	7.500.000.000	63%	9.000.000.000	58%	9.250.000.000	53%	9.750.000.000	53%	35.500.000.000	Dinas Perhubungan		
	Program Pelayanan Angkutan Darat	Persentase Layanan Angkutan Darat Jumlah Angkutan Darat/jumlah Penumpang Angkutan Darat		65%	6.000.000.000	70%	6.250.000.000	71%	6.750.000.000	79%	7.050.000.000	79%	28.050.000.000	Dinas Perhubungan		
	Program Peninjauan Prasarana dan Sarana Publik	Persentase Keperawatan KIR Angkutan Umum		13,00%		14,17%		11,37%		10,50%		10,30%		Dinas Perhubungan		
		Persentase Pelaksanaan Heningkatan Sarana Dan Prasarana Kewilayahan		0,35	29.571.548.000	0,4	34.473.086.000	0,45	383.728.873.000	0,48	41.306.940.000	0,48	402.080.000.000	Kecamatan/Kelurahan		
		Persentase Gula Masyarakat Untuk Sarana Prasarana Di Wilayah Yang Diskomodir		3,89		4,04		4,19		4,34		4,34		Kecamatan/Kelurahan		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program/ Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Awal REJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Peringkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Komisi Kliring pada akhir periode REJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Kemampuan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	82,15	82,92	83,69	84,46	85,23	86,01	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	Rp	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Penataan Ruang dan Perencanaan	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang terangkut			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Pembiayaan SIPR Dalam Pemeliharaan Ruang		0	3.500.000.000	3.750.000.000	4.000.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000	4.250.000.000	15.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Terusun dan Sesuai Standar			85%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	9.350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase Pengurangan Sampah yang terangkut di masyarakat dan Sektor informal (Merupakan nilai kumulatif)		0	25.000.000.000	27.500.000.000	29.500.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	112.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Program Pembinaan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase Penanganan Sampah		75%		73%		72%		72%		72%					Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penguasaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luas RTH Public Yang Dibebani Dasi Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan		8,23	26.500.000.000	8,3	27.500.000.000	8,4	29.500.000.000	8,41	35.000.000.000	8,41	118.500.000.000				Dinas Lingkungan Hidup
	Mewujudkan Kota yang Rukun dan Tolakan Kerusakan Kebersamaan dan Keberhasilan Berhimpun Masyarakat, Benteng dan Gender	Angka Kemiskinan	4,10	3,76	3,59	3,43	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27				
	Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berpilah Masyarakat Rentan dan Gender	Indeks Modal Sosial	79,20	83,52	85,53	87,81	90	90	90	90	90	90	90				
	Meningkatkan Kualitas Perlinggungan Sosial	Persentase penurunan PMKS	-2,23%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%				
	Program Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan		73%	350.000.000	78%	400.000.000	77%	450.000.000	78%	500.000.000	78%	1.700.000.000				Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program / Program Pemangung Daerah	Indikator Kinerja (Tajuk/Target/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Peringkat Daerah Penanggung Jawab						
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Persentase Kasus Yang Dihilangkan Dengan Perhatian Berbasis (PB)		62,2%			67%			70%			70%			Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Perekembangan Sosial dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Persentase PMS Yang Menperoleh Bantuan Sosial		51,19		51,52		51,84		52,15			52,15			Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan, Perindusgar, Anak, Pengendalian, Pendaklat dan Keluarga Berencana
		Persentase Kebijakan Sumber Daya Manusia, Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		13,28	15.000.000.000	13,28	15.250.000.000	13,28	15.750.000.000	13,28	16.250.000.000	13,28	16.250.000.000	62.230.000.000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan, Perindusgar, Anak, Pengendalian, Pendaklat dan Keluarga Berencana
		Persentase Laman Media Publikasi Yang Terpilih Dengan Baik		100%		100%		100%		100%			100%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan, Perindusgar, Anak, Pengendalian, Pendaklat dan Keluarga Berencana

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program / Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal R-UMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pembiayaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Berencana					
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Tahun 2023				
				TARGET	KP	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Kp	
	Memangkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMS)	0,870	0,855	0,852	0,864	0,864	0,90	0,90	0,90	0,90							
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,25	96,8	96,9	97	97,1	97,2	97,2	97,2	97,2							
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif																
		Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)																
				0	3.500.000.000	4.500.000.000	4.750.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	17.750.000.000						

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Proyek/Pembarungan Daerah	Indikator Kinerja Utama/Impact/Outcome	Komisi Kelembagaan (Kecamatan 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Peringkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Kewaspadaan Bencana dan Peningkatan Konflik	Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Bencana yg disebabkan konflik teknologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan keamanan		0	67,8%	3.500.000.000	70%	3.750.000.000	72,8%	3.900.000.000	75%	4.100.000.000	75%	15.250.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik	
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Kejadian Bencana Pada Tingkat Pulau		0	10%	1.750.000.000	15%	2.000.000.000	20%	2.200.000.000	25%	2.400.000.000	25%	6.350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		0	4,18	61.000.000.000	4,26	61.500.000.000	4,34	63.000.000.000	4,42	61.500.000.000	4,42	250.000.000.000	Kecamatan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pengembangan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Output/Outcome)	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Peringkat Daerah Penyelenggara Jember					
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target
	Program Pelayanan Bisnis dan Non Bisnis Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Persentase Perizinan Ijin Dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata Dan Sosial Budaya		0	82,5%	1.500.000.000	85%	1.650.000.000	87,50%	1.850.000.000	90%	2.050.000.000	90%	7.050.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Perencanaan dan Modal dan Pelanggaran Terhadap Satu Pinte
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum	Persentase Perizinan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum		0	87,50%	1.500.000.000	85%	1.650.000.000	87,50%	1.850.000.000	90%	2.050.000.000	90%	7.050.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Perencanaan dan Modal dan Pelanggaran Terhadap Satu Pinte
	Program Pengelolaan perburuan	Persentase Realisasi Target Retribusi MB		0	100%	4.300.000.000	100%	5.300.000.000	100%	5.800.000.000	100%	6.000.000.000	100%	21.500.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Perencanaan dan Modal dan Pelanggaran Terhadap Satu Pinte
	Program Pelayanan Pendukung	Persentase Pendukung yang Meralfiki Dokumen Administrasi Pemerintahan		0	95,50%	3.500.000.000	96%	3.650.000.000	96,5%	3.800.000.000	97%	4.000.000.000	97%	14.900.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangko Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil		0	91%	2.000.000.000	92%	2.150.000.000	95%	2.300.000.000	94%	2.450.000.000	94%	8.900.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD.		0	100%	4.800.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.250.000.000	100%	6.500.000.000	100%	21.550.000.000	Happeda	
	Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase Penjabaran Rencana & Rencana Kerangka Perangko Daerah Mula Mula Pelaksanaan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam Yang Sesuai Dengan Tahapan Dan Tata Cara.		0	85%	2.150.000.000	90%	2.350.000.000	100%	2.500.000.000	100%	3.000.000.000	100%	10.000.000.000	Dappeda	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program / Kegiatan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Awal R/R/M/D (tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode R/R/M/D		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Jumlah Nelayan/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Ekotonomi Dan Sumbidaya Alam Yang Mendukung Pemanfaatan.		85%		90%	100%		100%		100%		100%		Bappeda	
	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Prabahasaan Manusia	Persentase Penyusunan Rencana & Renja Perangkat Daerah Mula hingga Bekerjalaban Dan Pembangunan Manusia Yang Sesuai Dengan Tahunan Dan Tata Cara.		85%	2.000.000.000	90%	2.200.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.700.000.000	100%	3.350.000.000		Bappeda	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Peningkatan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Output/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Jumlah kajian / Analisis / Studi / Rencana Induk / Grand Design Sektor Infrastruktur Dan Sewilayahnya Yang Mendukung Perencanaan			85%			90%		100%			100%		Happada
	Program Perwujudan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah	Persentase BTL APBD 4 50%		0	40%	6.000.000.000	40%	6.750.000.000	40%	6.900.000.000	40%	7.100.000.000	40%	26.750.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pemertanfaatan Aset Daerah	kontribusi Pemertanfaatan Aset terhadap PAD		0	2.703.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	4.200.000.000	9.000.000.000	4.200.000.000	4.100.000.000	12.000.000.000	15.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Perencanaan dan penganggaran Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		0	37,04%	3.000.000.000	28,96%	3.250.000.000	17,23%	3.500.000.000	17,23%	3.750.000.000	17,23%	13.500.000.000	Badan Pendapatan Daerah
	Program Keluaran Pajak Daerah	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD		0	82,08%	6.000.000.000	82,97%	4.300.000.000	83,44%	4.750.000.000	84,16%	5.000.000.000	84,16%	18.250.000.000	Badan Pendapatan Daerah
	Program Layanan Pengabdian Masyarakat	Persentase proses pengabdian masyarakat sesuai kemampuan		0	100%	3.000.000.000	100%	3.200.000.000	100%	3.400.000.000	100%	3.600.000.000	100%	10.200.000.000	Sekretaris Daerah
	Program Kelembagaan, Kerangkastruktural dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai kapasitas organisasi		0	3	2.400.000.000	3,1	2.700.000.000	3,2	3.000.000.000	3,3	3.300.000.000	3,3	11.400.000.000	Sekretaris Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Ujuran/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Peringkat Daerah Penanggung Jawab					
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET
	Program: Evaluasi dan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Dilakukan Revitalisasi			100% (10 /10)	3.100.000.000	100% (10 /10)	3.250.000.000	100% (10 /10)	3.450.000.000	100% (10 /10)	3.650.000.000	100% (10 /10)	13.450.000.000	Inspektori
		Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dilakukan Revitalisasi		0	100% (2/2)		100% (2/2)							Inspektori	
	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	64	71,46	72,92		74,38	75,84	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1		
	Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian	Persentase peangkatan, skuban, anggaran tertentu			83,70%	2.200.000.000	84,39%	2.300.000.000	85,65%	2.450.000.000	87,13%	2.550.000.000	87,13%	9.500.000.000	Dadan Kepegawaian dan Puskasda Puskasda nagan SDM
		Persentase rekrutir, sub struktural dan pelaksanaan		0	62,00%		64%		66%	68%	68%	68%	68%		Haras Kepegawaian dan Puskasda nagan SDM
	Program Pengembangan kompetensi dan kualifikasi Profesi	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0	63,41%	9.000.000.000	65,15%	9.500.000.000	71,88%	10.200.000.000	83,35%	10.500.000.000	83,35%	39.600.000.000	Dadan Kepegawaian dan Puskasda nagan SDM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Output/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		91%		96%			100%			100%			100%		Ditjen Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
	Program Ketenagakerjaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Keunggulan Organisasi		3	240.000.000,00	3,1	270.000.000,00	3,2	300.000.000,00	3,3	330.000.000,00	3,3	114.000.000,00	3,3	114.000.000,00	3,3	Secretaria t Daerah
	Program Pengembangan Standar Kompetensi	Persentase standar kompetensi perangkat daerah yang ditetapkan		0	900.000.000,00	90%	900.000.000,00	90%	1.150.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	4.150.000.000,00	100%	4.150.000.000,00	100%	Secretaria t Daerah
	Merajutnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kemudahan SPBL	N/A	3,8	4,09	4,21	4,45	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	
	Program Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang Terlayani Dan Terpublikasi		0	1.550.000.000,00	81,00%	1.750.000.000,00	81,00%	2.050.000.000,00	85,00%	2.150.000.000,00	85,00%	7.500.000.000,00	85,00%	7.500.000.000,00	85,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti		0	55,55%	57,89%	60,00%	61,90%	61,90%	61,90%	61,90%	61,90%	61,90%	61,90%	61,90%	61,90%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengolahan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informasi yang terintegrasi		0	14.500.000.000,00	17,31%	14.750.000.000,00	21,82%	15.000.000.000,00	26%	15.750.000.000,00	26%	60.000.000.000,00	26%	60.000.000.000,00	26%	Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab dalam menyclenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu Indikatif sesuai tahun periode RPJMD ini.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan di tiap perangkat daerah Pemerintah Kota Malang. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Malang, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain.

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Malang dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada. Tabel Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 8.1 (T-C.17) sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel Tabel 8.2 (T-C.18).

Tabel 8.1
Tabel T-C.17
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kota Malang

No	Indikator	Target Tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Indeks pembangunan Manusia	81,43	81,86	83,00	83,80	84,90
2	Pertumbuhan Ekonomi	5,5%	5,6%	5,7%	5,8%	5,9%
3	Gini Ratio	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36
4	Angka Kemiskinan	3,91	3,76	3,59	3,43	3,27
5	Indeks Modal Sosial	81,36	83,52	85,68	87,84	90
6	Indeks Reformasi Birokrasi	72	74	76	78	80

Tabel 8.2
Tabel T-C.18
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Malang

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1)	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1	Indeks pembangunan Manusia	81,0	81,43	81,86	83,00	83,80	84,90	84,90
1.1.2	Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>	0,846	0,847	0,848	0,850	0,851	0,852	0,852
1.1.3	Indeks Pendidikan	0,77	0,78	0,79	0,82	0,84	0,87	0,87
1.1.4	Indeks Kesehatan	0,814	0,814	0,816	0,818	0,828	0,825	0,825
1.2	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Angka Kemiskinan	4,10	3,91	3,76	3,59	3,43	3,27	3,27
1.2.2	Indeks Modal Sosial	79,20	81,36	83,52	85,68	87,84	90	90
1.2.3	Persentase penurunan PMKS	-2,23%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
1.2.4	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,836	0,852	0,868	0,884	0,90	0,90
1.2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,25	96,8	96,9	97,0	97,10	97,20	97,20

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2)	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	70	72	74	76	78	80	80
2.2	Persentase perda yang ditenggalkan	21%	25%	40%	60%	82%	100%	100%
2.3	Nilai SAKIP	70,96	75,65	80,5	82,05	83,5	84,9	84,9
2.4	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.5	Maturitas SPIP	3,18	3,50	4	4,1	4,2	4,3	4,3
2.6	Rasio PAD	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,33	0,33
2.7	Indeks Profesionalitas ASN	64,00	71,46	72,92	74,38	75,84	77,10	77,10
2.8	Indeks Kematangan SPBE	N/A	3,8	4,09	4,21	4,45	4,54	4,54
3)	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
3.1	Pertumbuhan Ekonomi	5,4%	5,5%	5,6%	5,7%	5,8%	5,9%	5,9%
3.2	Gini Ratio	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36
3.3	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	N/A	6	6,1	6,2	6,3	6,45	6,45
3.4	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,50
3.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	82,15	82,92	83,69	84,46	85,23	86,00	86,00

BAB IX PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023 pada dasarnya merupakan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Kota Malang akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2018-2023), bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan prioritas kepala daerah terpilih. RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 ini telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD Kota Malang dan Walikota Malang, serta Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. RPJMD ini telah menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025, dan memperhatikan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 ini hendaknya dilakukan secara konsisten, transparan, partisipatif, dan penuh tanggungjawab. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023 ini sebaik-baiknya;
2. RPJMD ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

3. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Malang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 ini, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);
4. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Malang berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023;
5. Program dan kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran sub agenda/agenda pembangunan.
6. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 sangat tergantung dari peran seluruh *stakeholder* yang terlibat di dalamnya;
7. Masyarakat Kota Malang perlu diberikan ruang agar dapat berperan dalam pelaksanaan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan wujud penguatan peran (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan;
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

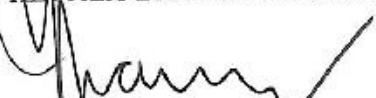
WALIKOTA MALANG

ttd

SUTIAJI

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019